



JAMBI
MANTAP



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

**GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun 2022 ini.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya dalam penyusunan LKPJ Gubernur Jambi Akhir Tahun Anggaran 2022 ini telah menggunakan format sistematika sebagaimana yang telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud.

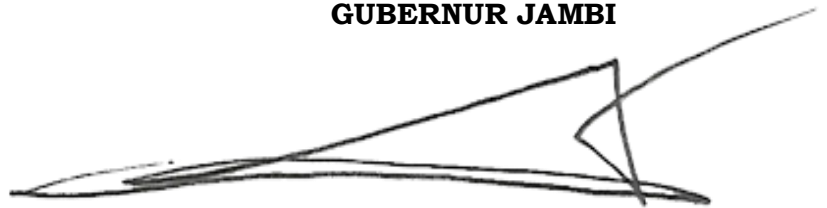
LKPJ Gubernur Jambi Tahun 2022 merupakan pelaporan penyelenggaraan pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022. Buku LKPJ ini menyajikan data capaian pada Tahun 2022 yang mengindikasikan pencapaian kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi. Keberhasilan pembangunan daerah yang telah dicapai pada Tahun 2022 merupakan hasil kerja bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi dan elemen masyarakat secara luas.

Disamping keberhasilan yang telah dicapai, kami menyadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran serta rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi merupakan masukan penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Jambi pada masa yang akan datang.

Demikian yang dapat kami laporkan, semoga dokumen LKPJ Gubernur Jambi Tahun 2022 dapat berguna dan bermanfaat peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat Provinsi Jambi.

Jambi, 27 Maret 2023

GUBERNUR JAMBI



Dr. H. AL HARIS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar vi

Daftar Grafik vii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 DASAR HUKUM I-1

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH I-8

1.3 DATA UMUM DAERAH I-10

1.3.1 Data Geografis Wilayah I-10

1.3.1.1 Topografi I-11

1.3.1.2 Klimatologi dan Hidrologi I-12

1.3.1.3 Hidrologi I-12

1.3.1.4 Penggunaan Lahan I-13

1.3.2 Jumlah Penduduk I-13

1.3.3 Pertumbuhan Penduduk I-14

1.3.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) I-16

1.3.5 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan I-19

1.3.6 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja I-19

1.3.7 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan I-20

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD PROVINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2022 II-1

2.1 PERUBAHAN PENJABARAN PENDAPATAN DAERAH II-1

2.1.1 Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah II-1

2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH II-5

2.3 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH II-10

2.3.1 Kebijakan Belanja Daerah II-10

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah II-12

2.4 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH II-20

2.4.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah II-20

2.4.2 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah II-20

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN III-1

3.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 III-1

3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia III-1

3.1.2 Tingkat Kemiskinan III-2

3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka III-2

3.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi III-3

3.1.5 Pendapatan Perkapita III-3

3.1.6 Indeks Gini III-3

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 III-3

3.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 III-8

3.3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar III-8

3.3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar III-86

3.3.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan III-151

3.3.4 Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan III-220

3.4 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 III-278

3.5 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAMBI ATAS LKPJ GUBERNUR JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021 YANG DITINDAKLANJUTI PADA TAHUN ANGGARAN 2022 III-282

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN IV-1

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN IV-1

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya IV-2

4.1.2 Dinas PUPR Provinsi Jambi IV-2

4.1.3 Dinas TPHP Provinsi Jambi IV-5

4.1.4 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi IV-17

4.1.5 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi IV-18

4.2 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA IV-19

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Kelurahan/Desa
Provinsi Jambi Tahun 2022 I-10

Tabel 1.2 Luas Daerah Pengaliran Beberapa Sungai di Provinsi Jambi I-13

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk,
Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah berdasarkan
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022 I-14

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Provinsi Jambi Tahun 2022 I-15

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Menurut Generasi Tahun 2022 I-16

Tabel 1.6 Klasifikasi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Jenis Kelamin dan
Jenis Jabatan Kepegawaian Tahun 2022 I-17

Tabel 1.7 Komposisi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Golongan/Ruang
Tahun 2022 I-17

Tabel 1.8 Komposisi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Golongan/Ruang
Tahun 2022 I-18

Tabel 1.9 Komposisi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Eselonning
Tahun 2022 I-18

Tabel 1.10 Perubahan Pendapatan dan Realisasi pada Perubahan APBD
Provinsi Jambi Tahun 2022 I-19

Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022 I-20

Tabel 1.12 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022 I-21

Tabel 2.1 Target, Realisasi dan Kontribusi Kelompok Pendapatan
Tahun Anggaran 2022 II-1

Tabel 2.2 Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022 II-6

Tabel 2.3 Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 II-7

Tabel 2.4 Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 II-7

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022 II-12

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022 II-13

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022 II-14

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022 II-15

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Provinsi Jambi
 Tahun Anggaran 2022 II-15

Tabel 2.10 Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada
 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022
 (Berdasarkan Komponen Belanja) II-16

Tabel 2.11 Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada
 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022
 (Berdasarkan Kabupaten/Kota) II-17

Tabel 2.12 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
 Tahun Anggaran 2022 II-18

Tabel 2.13 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kelurahan
 Tahun Anggaran 2022 II-19

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Jambi
 Tahun Anggaran 2022 II-20

Tabel 3.1 Indikator Makro Provinsi Jambi Tahun 2022 III-1

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 III-4

Tabel 3.3 Kebijakan Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
 Tahun 2022 III-278

Tabel 3.4 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2021 Provinsi Jambi
 Yang ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2022 III-282

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan serta Realisasi Anggaran Dinas PUPR Provinsi
 Jambi Tahun 2022 IV-1

Tabel 4.2 Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Desa/Kelurahan
 Tahun 2022 IV-20

Tabel 4.3 Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Desa Tahap I
 Tahun 2022 IV-21

Tabel 4.4 Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Desa Tahap II
 Tahun 2022 IV-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Provinsi Jambi I-11

Gambar 4.1 Peta Lokasi Kegiatan IV-4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Realisasi Keuangan Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022 IV-18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Thaha Saifuddin Tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah *Nederlandsch Indie*. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamlirkanlah Negara Republik Indonesia. Sumatera disaat Proklamasi tersebut menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai Ibukotanya.

Setelah kemerdekaan, pada Tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia bersidang di Bukittinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di wilayah Sumatera yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112). Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2022 tentang Provinsi Jambi oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Juli 2022 di Jakarta dan mencabut Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran-Negara Tahun 1957 No.75) sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang ini menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Jambi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".

Pada awal pembentukan Provinsi Jambi, baru terdiri dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari dan wilayah-wilayah Kecamatan Kerinci Ulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Ilir serta Kotapraja Jambi. Pada tahun 1958, wilayah-wilayah Kecamatan Kerinci Ulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Ilir, ditetapkan sebagai wilayah Kabupaten Kerinci.

Provinsi Jambi mengalami perubahan yang signifikan, sejak terjadinya pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif pada tahun 1999, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemekaran selanjutnya dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2012 secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, gubernur menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat paripurna yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dokumen LKPJ berkenaan dengan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yaitu berupa capaian pelaksanaan program dan kegiatan, permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh gubernur dan pelaksanaannya serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi Tahun 2022 berlangsung masih dalam kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19. Sektor-sektor yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas perekonomian masyarakat seperti perdagangan, perkebunan dan pertanian serta sektor jasa lainnya mulai menggeliat. Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid-19 Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pelaku ekonomi di berbagai tingkatan dapat beraktivitas kembali. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan di level nasional yang memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat yang termasuk kelompok rentan karena terganggunya aktivitas ekonomi terkait mata pencaharian karena adanya pembatasan aktivitas publik.

Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 adalah kecenderungan inflasi yang terus meningkat baik secara nasional maupun regional. Adapun inflasi di Provinsi Jambi dihitung dengan melihat Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi dan Kota Muara Bungo setiap bulannya. Pada Juli 2022, inflasi di Provinsi Jambi adalah yang tertinggi yaitu mencapai 8,55%. Tingkat inflasi di Provinsi Jambi sempat turun menjadi 7,70% pada Agustus 2022. Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BMM pada awal September 2022 yang berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan distribusi berdampak pada kenaikan harga-harga barang kebutuhan masyarakat kembali membuat inflasi Provinsi Jambi menjadi 8,09%. Kebijakan dan koordinasi yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi dengan TPID Kabupaten/Kota kemudian berhasil menurunkan inflasi di Provinsi Jambi menjadi 6,35% per Desember 2022.

Keberhasilan itu dicapai berkat strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Kelancaran distribusi, Ketersediaan Pasokan dan Komunikasi efektif). Selain itu untuk melakukan stabilisasi harga juga dilakukan operasi pasar terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan subsidi untuk pengendalian harga komoditas penyumbang inflasi melalui subsidi langsung pada distributor, subsidi langsung pada pengecer (penjual langsung di pasar), bantuan ongkos angkut pada distributor dan subsidi langsung pada Perum BULOG untuk pelaksanaan operasi pasar. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan intervensi komoditi cabai merah melalui Badan Pangan Nasional sebanyak 8 ton untuk 1 kali operasi pasar. Cabai merupakan salah satu komoditi yang membuat tingkat inflasi di Provinsi Jambi melejit tinggi. Intervensi tersebut

sudah menunjukkan stabilnya harga cabai sampai saat ini. Selanjutnya masih dalam rangka menekan laju inflasi dilakukan pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan diantaranya dengan melakukan pembelian bersama beras lokal oleh ASN se-Provinsi Jambi dan terakhir telah dilaksanakan pemberian subsidi BBM pada nelayan sebanyak 6.000 orang dengan total bantuan sebesar Rp. 4.554.000.000,- dan tukang ojek sebanyak 5.000 orang dengan total bantuan sebesar Rp. 1.621.500.000,-.

Tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi pada triwulan IV tahun 2022 dibanding triwulan IV tahun 2021 tumbuh sebesar 5,22% (*year on year*). Hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan kecuali jasa kesehatan -2,40%, konstruksi -0,88 %, jasa keuangan -0,72% dan administrasi pemerintahan sebesar -0,65%. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan sebesar 16,92%, diikuti oleh jasa perusahaan sebesar 15,13%, pengadaan listrik dan gas sebesar 11,66% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,09%. Sedangkan seluruh *leading sector* yaitu pertanian, pertambangan dan perdagangan melanjutkan tren pemulihan dan tumbuh impresif di atas 5%. Keberhasilan menekan laju inflasi dalam proses pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan dampak kenaikan harga BBM yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan Pemerintah Provinsi Jambi telah berada dalam jalur yang tepat sepanjang tahun 2022 untuk mengelola dan menjaga kondisi ekonomi yang sehat dan berpihak kepada masyarakat banyak.

Sepanjang tahun 2022 nilai ekspor asal Provinsi Jambi mencapai US\$ 2.991,50 juta meningkat 14,25% dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai ekspor 2.618,46%, sektor pertambangan merupakan penyumbang andil terbesar dengan nilai mencapai 62,90% dari total nilai ekspor. Sepanjang tahun 2022 pula ekspor komoditi pertambangan batubara mengalami peningkatan signifikan di pasar dunia, dengan total nilai ekspor sebesar US\$ 445.898.294 naik 273% dibandingkan tahun 2021, dengan total nilai ekspor sebesar US\$ 119.506.233. Provinsi Jambi memiliki sumber tambang batubara di beberapa wilayah antara lain Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo. Di satu sisi, distribusi batubara dari lokasi tambang ke Pelabuhan Talang Duku sampai saat ini masih menggunakan jalur transportasi darat yang dipergunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini dirasakan cukup dilematis karena memberikan pengaruh yang besar terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat yang mempergunakan jalan yang sama untuk kegiatan non pertambangan batubara. Tingkat kemacetan yang diakibatkan volume kendaraan pengangkut batubara yang tinggi telah mengakibatkan banyak kerugian, baik secara materiil maupun imateriil. Tingginya aktivitas pengangkutan batubara turut mengakibatkan kerusakan ruas jalan yang dilewati. Jumlah kendaraan angkutan batubara yang beroperasi secara hitungan manual di lapangan sampai Desember 2022 terdata sebanyak 11.500 unit sedangkan angkutan batubara yang berkontrak dan terdaftar pada Aplikasi Simsalabim Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berjumlah 6.031 unit dengan transportir 38 perusahaan.

Permasalahan yang diakibatkan angkutan batubara antara lain; mengakibatkan kerusakan sebagian ruas jalan nasional yang dilalui oleh rute angkutan batubara; Masih banyaknya kendaraan angkutan batubara yang *Over Dimension and Over Load* (ODOL); Kurangnya fasilitas kantong parkir/*rest area* untuk kendaraan angkutan batubara sehingga banyak angkutan batubara yang parkir di tepi jalan sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya; Kurangnya fasilitas/prasarana di lokasi pelabuhan untuk bongkar muat batubara; Meningkatnya jumlah kendaraan angkutan batubara yang tidak terkendali; dan belum optimalnya pengaturan angkutan batubara.

Permasalahan tersebut perlu segera diatasi dan dicarikan solusinya. Mengingat sarana transportasi jalan memiliki peranan yang sangat besar dalam berbagai aktivitas masyarakat. Titik kemacetan parah terjadi di Simpang Tiga Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari. Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan beberapa langkah antisipasi dan pengambilan kebijakan untuk mengurai persoalan kemacetan yang ditimbulkan oleh angkutan batubara.

Berikut langkah-langkah antisipasi dan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurai persoalan kemacetan yang ditimbulkan oleh angkutan batubara. Untuk penanganan jangka pendek dan insidentil dilakukan melalui penanganan ruas jalan provinsi yang menjadi lintasan angkutan batubara oleh UPTD Workshop dan Perbekalan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi juga memanfaatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan APBD Provinsi Jambi untuk memperbaiki dan memelihara kualitas Jalan Pelabuhan Talang Duku-*Stockpile* yang terletak di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi. Untuk jangka menengah terdapat 3 langkah yaitu percepatan penyelesaian Peraturan Daerah terkait Batubara, pembatasan usia kendaraan dan kewajiban transporter menyediakan kantong parkir.

Sementara kebijakan untuk jangka panjang yang ditempuh Pemerintah Provinsi Jambi adalah melaksanakan pembangunan jalan khusus batubara di Provinsi Jambi baik melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Adapun dasar pembangunan jalan khusus di Provinsi Jambi merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus. Disamping itu pembangunan jalan khusus sudah sangat dibutuhkan karena adanya penurunan kinerja layanan jalan umum dan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas akibat percampuran moda transportasi. Untuk pelaksanaan pembangunan melalui jalan darat telah ada tiga (3) perusahaan yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan jalan khusus batubara dan angkutan berat lainnya yaitu PT. Putra Bulian Property, PT. Sinar Agung Sukses dan PT. Inti Tirta. Saat ini terdapat tiga (3) jalur khusus batubara via jalan darat yang telah dipersiapkan; Pertama, Jalur Kilangan Kecamatan Bajubang-Mestong-Sungai Gelam-Kumpeh Ulu-Taman Rajo yang telah dilaksanakan *groundbreaking* pada 1 September 2022 yang dilaksanakan oleh PT. Putra Bulian Property; Kedua, Jalur Kec. Mandiangan-Batin XXIV-Muaro Tembesi-Muaro Bulian-Muaro Sebo Ilir yang sudah dilakukan *groundbreaking* pada 17 Desember 2022 dengan panjang ruas jalan mencapai 95 Km yang dilaksanakan oleh PT. Inti Tirta; Ketiga, Jalur Kec. Pauh-Mandiangan-Mandiangan Timur-Bajubang-Mestong-Jambi Luar Kota yang pembangunan fisiknya akan dimulai pada bulan Februari

2023 dilaksanakan oleh PT. Sinar Agung Sukses. Untuk angkutan batubara memanfaatkan aliran Sungai Batanghari terdapat Jalur Mandiangin–Jebak-Talang Duku dan Jalur Muaro Tembesi–Talang Duku. Selain mempercepat pembangunan jalan khusus angkutan batubara, saat ini Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan penanganan jalan alternatif Simpang Karneo–Kilangan dengan lebar badan jalan 6 meter yang dikhususkan untuk kendaraan selain angkutan batubara dan angkutan berat lainnya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara dan Mineral dan sebagai turunan dari Undang-Undang tersebut Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana kewenangan pengelolaan mineral dan batubara (minerba) yang sebelumnya didelegasikan oleh pemerintah ke pemerintah daerah, didalam Undang-Undang minerba baru kewenangan berada ditangan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menetapkan sumber daya mineral dan batubara adalah kekayaan nasional oleh karena itu pengelolaannya dibawah kendali pemerintah pusat, kemudian dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta dalam rangka pengaturan lalu lintas kendaraan angkutan batubara menggunakan jalan umum atau publik di wilayah Provinsi Jambi. Atas dasar tersebut Pemerintah Provinsi Jambi juga mengambil langkah-langkah strategis dari aspek pengawasan dan penegakan hukum. Sebelum tingkat kemacetan akibat angkutan batubara mengalami puncaknya pada pertengahan sampai akhir tahun 2022, pada tahun 2021 melalui Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1448/SE/Dishub-P3.1/XII/2021 telah diatur jenis kendaraan, tonase serta jam operasional dari berbagai kendaraan berukuran besar terutama angkutan batubara. Menyikapi kemacetan yang kian parah, Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 8/INGUB/DISHUB Tahun 2022 Tanggal 11 Oktober 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batubara di Wilayah Provinsi Jambi. Instruksi Gubernur tersebut mengatur tentang jam operasional, rute serta ketentuan lain terkait operasional angkutan batubara.

Untuk memastikan permasalahan kemacetan akibat angkutan batubara dapat diselesaikan secara komprehensif, telah disusun rencana aksi dan tindak lanjut percepatan yang terdiri dari; Pertama, preservasi ruas jalan baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten yang dilalui angkutan batubara; Kedua, peningkatan jalan ruas alternatif Simpang Karneo-Kilangan (aspal atau rigid beton); Ketiga, optimalisasi pemanfaatan moda transportasi Sungai Batanghari sebagai alternatif utama angkutan batubara; Keempat, peningkatan pengawasan angkutan batubara terutama pada kendaraan yang telah dipasang nomor lambung; Kelima, pembatasan tonase dan pengaturan jam operasional sesuai Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2022; Keenam, memastikan kesiapan pembangunan kantong parkir angkutan batubara di Desa Terusan seluas 40 Ha; Ketujuh,

progres pembangunan jalan khusus dan dukungan kebijakan dan rekomendasi; Kedelapan, kesiapan petugas pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan batubara serta *punishment*/hukuman; Kesembilan, penanganan jalan alternatif untuk kendaraan umum dari Simpang Durian Luncuk menuju Sridadi sepanjang 55 Km melalui dana CSR pemegang IUP Tahun 2022; Kesepuluh, transportasi angkutan batubara dari Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo diarahkan ke Jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing–Merlung–Pelabuhan.

LKPJ merupakan bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran yang disusun berdasarkan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022. Saat ini, RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 memasuki tahun pertama yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2021.

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Gubernur Jambi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 5);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 9);
 21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 28);
 22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 32);
 23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 Nomor 35);

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan dokumen RPJMD yang tertuang dalam Perda Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Adapun visi misi Provinsi Jambi yaitu JAMBI MANTAP

“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”

Jambi Maju	: Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
Jambi Aman	: Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun,

meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

- Jambi Nyaman : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religious dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.
- Jambi Profesional : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan visi, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut yaitu :

1. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan, yaitu menetapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dengan didukung *e-government* terintegrasi.
2. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tercatat 49.026,579 Km. Secara administratif pemerintahan, wilayah Provinsi Jambi terbagi ke dalam 11 Kabupaten/Kota, meliputi 9 Kabupaten dan 2 Kota, 144 Kecamatan, 171 Kelurahan dan 1.414 Desa, dengan Kota Jambi sebagai Ibukota.

Luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan dan desa per kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Kelurahan/Desa
Provinsi Jambi Tahun 2022

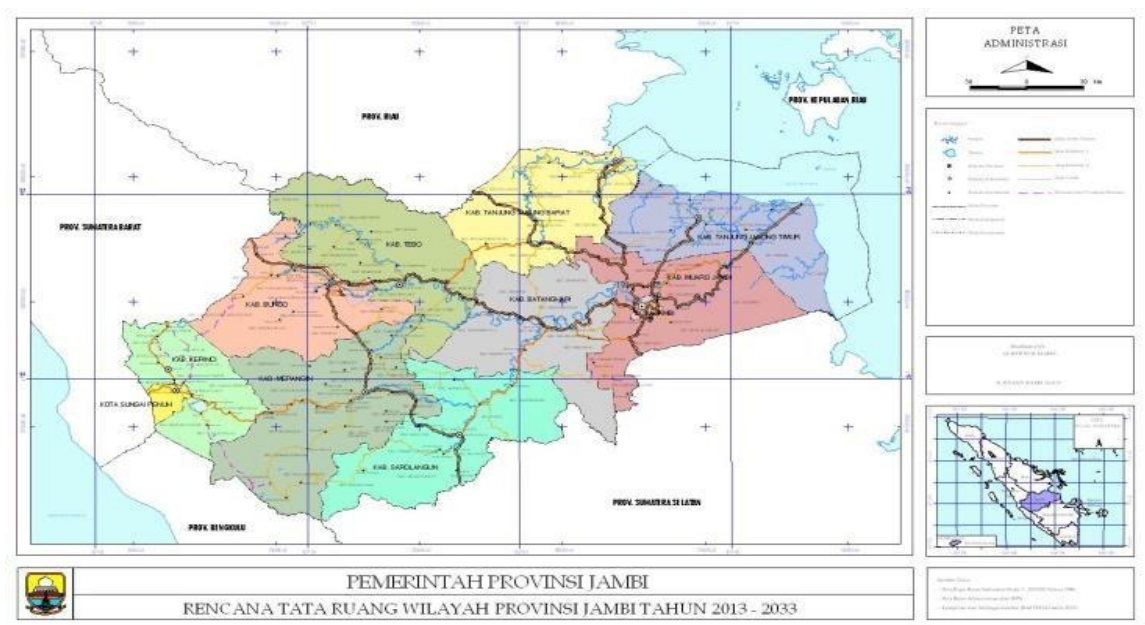
NO.	KODE	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	LUAS WILAYAH (KM²)
1.	15.01	KAB. KERINCI	18	2	285	3.445,196
2.	15.02	KAB. MERANGIN	24	10	205	7.540,118
3.	15.03	KAB. SAROLANGUN	11	9	149	5.935,894
4.	15.04	KAB. BATANG HARI	8	14	110	5.387,516
5.	15.05	KAB. MUARO JAMBI	11	5	150	5.225,796
6.	15.06	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	13	20	114	5.546.063
7.	15.07	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	11	20	73	4.546,621
8.	15.08	KAB. BUNGO	17	12	141	4.760,827
9.	15.09	KAB. TEBO	12	7	107	6.103,737
10.	15.71	KOTA JAMBI	11	62	0	169,887
11.	15.72	KOTA SUNGAI PENUH	8	4	65	364,924
		JUMLAH	144	171	1.414	49.026,579

Sumber: Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Provinsi Jambi sebagai daerah yang berada di tengah-tengah Pulau Sumatera ini juga memiliki posisi yang sangat strategis untuk mengembangkan perekonomian interregional wilayah Sumatera. Provinsi Jambi berbatasan langsung dengan 6 Provinsi antara lain :

1. Riau disebelah Utara;
2. Kepri disebelah Utara dan Timur;
3. Sumsel disebelah selatan;
4. Sumbar disebelah Barat;
5. Bengkulu disebelah Barat; dan
6. Babel disebelah Timur.

Gambar 1.1
Peta Provinsi Jambi



Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

1.3.1.1 Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. Morfologi kearah barat lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Secara Topografis Provinsi Jambi terbagi atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian (BPS Provinsi Jambi 2020) yaitu :

1. Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
2. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batang Hari; dan
3. Daerah dataran tinggi > 500 m (14,5%) pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

1.3.1.2 Klimatologi dan Hidrologi

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga rentan terhadap perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Berdasarkan analisis daya tampung lingkungan berdasarkan kemampuan pengaturan iklim yang tertinggi hanya dimiliki oleh 6 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini karena terkait dengan keberadaan hutan-hutan konservasi pada wilayah tersebut, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung Bukit Hulu Landai di Merangin dan Hutan Lindung Bukit Tinjanu Limun di Sarolangun serta Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Tebo dan Tanjung Jabung Barat.

1.3.1.3 Hidrologi

Dilihat dari pola aliran sungai, daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Kerinci. Sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau.

Pada musim hujan kecenderungan air sungai meluap, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai tujuh meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggi di sepanjang wilayah Sungai Batanghari baik secara tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha.

Berdasarkan aliran sungai hampir semua wilayah Provinsi Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari dengan orde-ordenya sehingga sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi berada dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari yang mencakup enam sub DAS di dalamnya yaitu :

- a. Sub DAS Batanghari Hulu;
- b. Sub DAS Batang Merangin Tembesi;
- c. Sub DAS Batang Tabir;
- d. Sub DAS Batang Bungo;
- e. Sub DAS Batang Tebo; dan
- f. Sub DAS Batanghari Hilir.

Tabel 1.2

Luas Daerah Pengaliran Beberapa Sungai di Provinsi Jambi

NO.	KABUPATEN/KOTA	NAMA SUNGAI	LUAS DAERAH PENGALIRAN (HA)	DEBIT MAKS (M ³ /DTK)	DEBIT MIN (M ³ /DTK)
1	2	3	4	5	6
1.	Kerinci	Batang Merao	187,50	245,00	5,11
2.	Merangin	Batang Merangin	3.645,00	2.300,00	26,07
3.	Sarolangun	Batang Sarolangun	1.258,00	-	-
4.	Batang Hari	Batanghari	35.984,38	8.484,00	202,00
5.	Muaro Jambi	Batanghari	38.704,00	8.363,00	515,00
6.	Tanjab Timur	Jangkat	-	-	-
7.	Tanjab Barat	Batang Pengabuan Merlung	4.300,00	57,11	2,50
8.	Tebo	Batang Tebo	1.831,60	742,00	20,60
9.	Bungo	Batang Bungo	410,60	177,20	6,54
10.	Kota Jambi	Batanghari	42.141,00	12.059,00	-

Sumber: RTRWP Jambi 2013-2033, 2013

1.3.1.4 Penggunaan Lahan

Berdasarkan data tutupan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2011 dan 2018 terdapat perubahan pola penggunaan sumberdaya lahan di wilayah Provinsi Jambi yaitu sebagai berikut :

1. Tutupan hutan terkonversi menjadi beberapa penggunaan lahan yang bersifat budidaya;
2. Penambahan luas lahan perkebunan juga berasal dari alih fungsi lahan budidaya lainnya (pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campuran);
3. Pengelolaan pertanian dan perkebunan belum menerapkan praktek pertanian yang baik. Hal ini Nampak dari meluasnya belukar dan lahan terbuka yang berasal dari lahan pertanian kering dan lahan perkebunan. Hal ini juga terlihat dari kejadian kebakaran hutan dan lahan yang cukup signifikan pada Tahun 2015 seluas 90.363 Ha. Kebakaran hutan dan lahan ini terulang pada Tahun 2019 dengan luasan yang lebih besar yaitu 101.418 Ha.

1.3.2 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan modal penting dalam pembangunan daerah di Provinsi Jambi, selain sebagai pelaku pembangunan juga sebagai objek yang menjadi sasaran yaitu kesejahteraan penduduk. Jumlah Penduduk Jambi berdasarkan Jambi Dalam Angka

Tahun 2022 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebanyak 3.631.136 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 72,39 jiwa/Km² dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 3015,88 jiwa/Km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 253,47 jiwa/Km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020-2022 adalah sebesar 1,329 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Batang Hari sebesar 2,162% dan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,58%.

1.3.3 **Pertumbuhan Penduduk**

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020, pada tahun 2022 jumlah penduduk di Provinsi Jambi mencapai 3.631.136 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,329%.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK 2022*	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 2020-2022 (%)	KEPADATAN PENDUDUK 2022	LUAS WILAYAH (KM ²)
1	2	3	4	5	6
1.	Kerinci	253.863	0,82	75,66	3.445,20
2.	Merangin	357.577	0,568	46,57	7.540,12
3.	Sarolangun	298.091	1,575	48,2	5.935,89
4.	Batang Hari	313.209	2,162	53,96	5.371,23
5.	Muaro Jambi	412.830	1,528	77,51	5.459,23
6.	Tanjung Jabung Timur	234.164	1,078	43,01	4.313,18
7.	Tanjung Jabung Barat	324.456	1,246	69,78	5.546,06
8.	Tebo	344.816	1,204	53,37	6.266,71
9.	Bungo	373.344	1,721	80,13	4.596,30
10.	Kota Jambi	619.553	1,253	3015,88	169,89
11	Kota Sungai Penuh	99.233	1,543	253,47	364,92
Provinsi Jambi		3.631.136	1,329	72,39	49.008,73

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Interim 2020

Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur. Rasio jenis kelamin laki-laki mendominasi dari sejak usia kelahiran sampai dengan menjelang usia 75 tahun. Namun pada kelompok umur 75 tahun keatas kondisi membalik, laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan. Hal ini karena angka harapan hidup laki-laki lebih rendah dari perempuan.

Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok umur juga sebagai gambaran agar pemerintah bisa menentukan kebijakan terkait penyediaan pendidikan, bentuk pengembangan pendidikan dan sebagainya.

Untuk lebih jelasnya mengenai data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Provinsi Jambi Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	159.421	153.323	312.744
5-9	159.369	152.780	312.149
10-14	157.394	148.828	306.222
15-19	154.760	146.513	301.273
20-24	154.394	147.757	302.151
25-29	152.981	148.965	301.946
30-34	150.785	148.510	299.295
35-39	145.072	142.658	287.730
40-44	137.220	133.340	270.560
45-49	124.795	120.446	245.241
50-54	106.246	100.835	207.081
55-59	86.428	81.713	168.141
60-64	65.875	62.150	128.025
65-69	46.814	44.195	91.009
70-74	26.419	25.991	52.410
75 +	21.296	23.863	45.159
JAMBI	1.849.269	1.781.867.312	3.631.136

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2023

Hasil sensus penduduk terkait komposisi penduduk Provinsi Jambi berdasarkan generasi Tahun 2022 penduduk Provinsi Jambi di dominasi oleh generasi Z dan Milenial. Proporsi generasi Z mencapai 26,75% (971.483 ribu jiwa) dari total populasi dan generasi milenial sebanyak 25,84% (938.158 ribu jiwa) dari total populasi penduduk Provinsi Jambi. Kedua generasi ini dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.5

Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Menurut Generasi Tahun 2022

NO.	GENERASI	JUMLAH	PERSEN	KETERANGAN
1.	Post Gen Z	624.892	17,21	Lahir tahun 2013 dan seterusnya, perkiraan usia sekarang <=9 tahun
2.	Generasi Z	971.483	26,75	Lahir tahun 1997 sampai 2012, perkiraan usia sekarang 8-24 tahun
3.	Millenial	938.158	25,84	Lahir tahun 1981 sampai 1996, perkiraan usia sekarang 25-40 tahun
4.	Generasi X	716.654	19,74	Lahir tahun 1965 sampai 1980, perkiraan usia sekarang 41-56 tahun
5.	Baby Boomer	345.615	9,52	Lahir tahun 1946 sampai 1964, perkiraan usia sekarang 57-75 tahun
6.	Pre Boomer	34.337	0,95	Lahir sebelum tahun 1945, perkiraan usia sekarang + 75 tahun
		3.631.136	100	

Sumber: William H. Frey analysis of Census Bureau Estimates dan BPS Provinsi Jambi, diolah Tahun 2023

1.3.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan elemen terpenting bagi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi pemerintah. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu aktor birokrasi, menjadi mesin pembangunan yang berperan penting dalam memastikan berjalannya seluruh agenda dan program pembangunan yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2022 sebanyak 10.208 orang. Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci menurut jenis kelamin, golongan ruang, pendidikan, eselonning dan usia.

a. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan Kepegawaian

Tabel 1.6
Klasifikasi ASN Provinsi Jambi berdasarkan
Jenis Kelamin dan Jenis Jabatan Kepegawaian Tahun 2022

JUMLAH PEGAWAI		JENIS JABATAN KEPEGAWAIAN		
Laki-laki	Perempuan	Jabatan Struktural	Jabatan Struktural Tertentu	Jabatan Fungsional Umum
4.735	5.473	969	6.022	3.217

Sumber: BKD Provinsi Jambi, 2023

b. Berdasarkan Golongan/Ruang

Melihat dari data ASN berdasarkan golongan per Desember Tahun 2022 mayoritas menduduki golongan III mencapai 68%. Komposisi ASN berdasarkan golongan per Desember Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel/gambar dibawah ini.

Tabel 1.7
Komposisi ASN Provinsi Jambi berdasarkan
Golongan/Ruang Tahun 2022

NO.	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1.	I	28	19	9
2.	II	725	481	244
3.	III	6.917	2.945	3.972
4.	IV	2.538	1.290	1.248
Jumlah		10.208	4.737	5.473

Sumber: BKD Provinsi Jambi, 2023

c. Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan data per Desember Tahun 2022, mayoritas tingkat pendidikan ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi didominasi Sarjana (S1) yaitu mencapai 63% dari total ASN, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan dan kompetisi yang dimiliki ASN Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya cukup baik dan potensial. secara rinci kondisi ASN Provinsi Jambi sesuai dengan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tabel/gambar dibawah ini.

Tabel 1.8

Komposisi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1.	S.3	30	19	11
2.	S.2	1.076	609	467
3.	S.1	6.658	2.880	3.778
4.	DIV	586	285	301
5.	D.III	707	200	507
6.	D.II	29	16	13
7.	D.I	15	9	6
8.	SLTA	1.049	676	373
9.	SLTP	35	25	10
10.	SD	23	16	7
Jumlah		10.208	4.777	5.513

Sumber: BKD Provinsi Jambi, 2023

d. Berdasarkan Eselonning

Tabel 1.9

Komposisi ASN Provinsi Jambi berdasarkan Eselonning Tahun 2022

NO.	ESELON	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
B 1.	I.b	1	1	0
2.	II.a	37	35	2
3.	II.b	9	9	0
4.	III.a	162	124	38
5.	III.b	47	47	17
6.	IV.a	597	385	212
7.	IV.b	99	50	49
	V.a	0	0	0
Jumlah		969	651	318

Sumber: BKD Provinsi Jambi, 2023

1.3.5 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Pendapatan Transfer; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan sebesar 109,61%. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.10
Perubahan Pendapatan dan Realisasi pada Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2022

URAIAN		APBD (RP)			%
		MURNI	PERUBAHAN	REALISASI	
PENDAPATAN DAERAH		4.215.309.003.799,00	4.335.678.330.489,00	4.752.194.795.569,36	109,61
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.780.655.105.531,40	1.934.773.577.429,00	2.163.585.918.787,36	111,83
II.	PENDAPATAN TRASNFER	2.400.282.706.887,60	2.366.533.561.680,00	2.573.889.060.882,00	108,76
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.371.191.380,00	34.371.191.380,00	14.719.815.900,00	42,83

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

1.3.6 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja pembangunan daerah yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan sebesar 94,45%. Tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.11

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD TA 2022 (RP)		REALISASI	
	MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	%
Belanja Operasi	3.194.389.455.857,00	3.116.986.804.447,00	2.933.764.603.717,06	94,12
Belanja Modal	675.746.046.780,00	975.361.553.135,00	906.797.776.480,80	92,97
Belanja Tidak Terduga	130.436.119.124,00	28.884.765.344,00	9.090.918.793,00	31,47
Belanja Transfer	795.275.290.346,00	768.618.442.258,00	768.618.442.258,00	100,00
JUMLAH	4.795.846.912.107,00	4.889.851.565.184,00	4.618.271.741.248,86	94,45

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

1.3.7 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait Realisasi Pembiayaan akan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.12
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD TA 2022		REALISASI	
	MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	%
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	582.744.439.490,00	740.479.765.899,00	727.949.765.896,76	98,31
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	582.744.439.490,00	727.979.765.899,00	727.949.765.896,76	100,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	12.500.000.000,00	-	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.206.531.182,00	27.206.531.182,00	27.206.531.182,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Hutang	2.206.531.182,00	2.206.531.182,00	2.206.531.182,00	100,00
PEMBAYARAN NETTO	580.537.908.308,00	713.273.234.717,00	700.743.234.714,76	98,24

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD PROVINSI JAMBI

TAHUN ANGGARAN 2022

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta dilaksanakan melalui keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cepat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dihasilkan suatu kebijakan yang akurat dan cermat serta tepat sasaran. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Provinsi Jambi.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan program/kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2022 diprioritaskan pada penguatan pemulihan ekonomi, penanganan Stunting dan inflasi, yang berimplikasi pada perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan alokasi anggaran program dan kegiatan perangkat daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1. PERUBAHAN PENJABARAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.1. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2022 pandemi COVID-19 belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek, termasuk aspek kesehatan, ekonomi dan sosial. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, stunting dan inflasi, pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi

dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan penyesuaian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Penyesuaian ini perlu dilakukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap perkembangan keadaan, sekaligus merupakan penerapan perencanaan dan penganggaran yang terpadu. Dengan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan transfer.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Memantapkan kelembagaan melalui peningkatan peran dan fungsi BPKPD dan Perangkat Daerah Penghasil;
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan secara intensif, dengan Pemerintah Pusat untuk pengalokasian sumber dana pendapatan transfer;
4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak dan retribusi;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pendapatan;
7. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan publik kepada wajib pajak;
8. Memantapkan integritas seluruh aparatur dalam meningkatkan pelayanan prima;
9. Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN pengelola pendapatan;
10. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, terutama terkait kebijakan pajak daerah;
11. Terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah; dan
12. Meningkatkan monev dan koordinasi dalam upaya mengoptimalkan kontribusi pendapatan daerah yang bersumber dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer sebagai bagian dari Transfer, dalam implementasinya tidak terlepas dari arah kebijakan pemerintah pusat yang menitikberatkan kepada peningkatan *quality control* anggaran Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) serta pemberian insentif terhadap penganggaran belanja pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Adapun arah kebijakan terkait TKDD Tahun Anggaran 2022, yaitu sebagai berikut :

1. Memaksimalkan penyerapan belanja APBD Tahun 2022;
2. Melaksanakan penganggaran belanja wajib (earmark) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan dan ke PU-an serta pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi;
3. Mendorong belanja infrastruktur daerah melalui *creative financing* untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan

4. Redesign pengelolaan TKDD, terutama Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), diperlukan strategi pencapaian sebagai berikut :

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), ditempuh melalui :
 - a. Melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi penerimaan baik yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - b. Melakukan updating data sebagaimana yang disyaratkan untuk peningkatan Dana Perimbangan, terutama yang bersumber Dana Alokasi Umum;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan;
 - d. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Penghasil, Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Samsat (Polri dan PT. Jasa Raharja);
 - f. Mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - g. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD PPD dan Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah dalam peningkatan pelayanan publik;
 - i. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah dengan cara memastikan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah berjalan efektif sehingga mampu mencegah peluang terjadinya kebocoran dan penyimpangan;
 - j. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - k. Melakukan inovasi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Strategi pencapaian target pendapatan transfer

Dalam pencapaian target pendapatan transfer, kedisiplinan pemerintah daerah dalam penggunaannya menjadi hal yang paling utama agar sejalan dengan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Apalagi di masa pandemi Covid-19, penggunaannya lebih difokuskan kepada penanganan pandemi (dengan kolaborasi internal pemerintah daerah Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota), yaitu:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH), baik bagi hasil pajak maupun sumber daya alam dalam rangka mendukung penanganan kesehatan,

- insentif tenaga kesehatan daerah, jaring pengamanan sosial serta pemulihan ekonomi dampak Covid-19;
- b. Dukungan pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% yang digunakan antara lain untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan daerah dan mendukung kelurahan dalam kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - c. Mendukung pemulihan ekonomi melalui pengutamaan metode padat karya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik;
 - d. Penanganan Covid-19 melalui penyesuaian penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik kesehatan; dan
 - e. Penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) paling sedikit 30 persen untuk bidang kesehatan termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19, sarana prasarana kesehatan, digitalisasi pelayanan kesehatan dan untuk perlindungan sosial.
3. Strategi lain-lain pendapatan daerah yang sah ditempuh melalui :
- a. Koordinasi dengan perangkat daerah pengelola dana Bio CF, kementerian teknis dan lembaga non pemerintah terkait; dan
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan PT. Jasa Raharja.

2.2. **ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH**

Sumber Pendapatan Daerah dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Pendapatan transfer; dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sesuai aturan yang berlaku. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan sebesar 109,61% dari target yang telah ditetapkan. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing kelompok pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Target, Realisasi dan Kontribusi Kelompok Pendapatan Tahun Anggaran 2022

URAIAN		APBD (Rp)			%	KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN (%)
		MURNI	PERUBAHAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAERAH		4.215.309.003.799,00	4.335.678.330.489,00	4.752.194.795.569,36	109,61	100,00
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.780.655.105.531,40	1.934.773.577.429,00	2.163.585.918.787,36	111,83	45,53
II.	PENDAPATAN TRASNFER	2.400.282.706.887,60	2.366.533.561.680,00	2.573.889.060.882,00	108,76	54,16
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.371.191.380,00	34.371.191.380,00	14.719.815.900,00	42,83	0,31

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2022 semula ditargetkan sebesar Rp.1.780.655.105.531,40, sementara pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 target menjadi sebesar Rp.1.934.773.577.429,00. Realisasi PAD tercapai sebesar Rp. 2.163.585.918.787,36 atau 109,61% dari target yang telah ditetapkan. Sektor Pajak Daerah menjadi penyumbang utama yaitu sebesar 86,51% terhadap PAD. Pencapaian tersebut tidak lepas dari inovasi dalam pelayanan pajak daerah. Target, realisasi dan kontribusi masing-masing rincian PAD terhadap total PAD Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian PAD Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022

URAIAN		APBD (Rp)			%	KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN (%)
		MURNI	PERUBAHAN	REALISASI		
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.780.655.105.531,40	1.934.773.577.429,00	2.163.760.169.387,36	111,84	100,00
-	Pendapatan Pajak Daerah	1.507.600.967.748,73	1.669.702.987.193	1.871.835.359.804,18	112,11	86,51
-	Hasil Retribusi Daerah	24.723.961.400,00	18.257.083.000	16.889.982.177	92,51	0,78
-	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.557.790.122,00	30.422.308.662	30.612.977.018,66	100,63	1,41
-	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	218.772.386.260,67	216.391.198.574	244.421.850.387,52	112,95	11,30

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

Pada Pendapatan Transfer, dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2022 semula ditargetkan sebesar Rp. 2.400.282.706.887,60 sedangkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp.2.366.533.561.680,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp.2.573.889.060.882,00 atau 108,76% dari target yang ditetapkan. Kontribusi masing-masing rincian Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Target, Realisasi, dan Kontribusi Rincian Pendapatan Transfer
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD (Rp)			%	KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN
	MURNI	PERUBAHAN	REALISASI		
PENDAPATAN TRASFER	2.400.282.706.887,60	2.366.533.561.680,00	2.573.889.060.882,00	108,76	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.400.282.706.887,60	2.366.533.561.680,00	2.573.889.060.882,00	108,76	100

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2022 semula ditargetkan sebesar Rp.34.371.191.380,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp.34.371.191.380,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp14.719.815.900,00 atau 42,83% dari target yang telah ditetapkan. Kontribusi masing-masing rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Target, Realisasi dan Kontribusi Rincian
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD (Rp)			%	KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN
	MURNI	PERUBAHAN	REALISASI		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.371.191.380,00	34.371.191.380,00	14.719.815.900,00	42,83	-
Pendapatan Hibah	34.371.191.380,00	34.371.191.380,00	14.719.815.900,00	42,83	100

A. Permasalahan

1. Terjadinya pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian nasional yang berimbas pada menurunnya kemampuan daya beli masyarakat sehingga lebih memprioritaskan kebutuhan primer;
2. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu masih perlu ditingkatkan;
3. Kesadaran wajib pajak akan tertib administrasi terhadap kepemilikan kendaraan masih kurang untuk mengajukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
4. Pemanfaatan layanan kemudahan seperti E-Samsat dalam membayar pajak belum merata di setiap daerah;
5. Ketersediaan sarana dan prasarana layanan perpajakan di Samsat belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan;
6. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) belum optimal, dimana penelusuran terhadap penunggak pajak masih rendah;
7. Pemberlakuan tarif Pajak Air Permukaan (PAP) menggunakan formulasi tarif yang lama dan masih mengacu pada perda no 8 Tahun 2002 dimana tarif pajak air permukaan 10 % dari nilai perolehan air; dan
8. Kurangnya kuantitas dan kualitas kompetensi sumber daya aparatur bidang perpajakan sehingga pelaksanaan pelayanan kepada wajib pajak menjadi kurang optimal;

B. Upaya

1. Upaya menghadapi pandemi Covid-19, stunting dan inflasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
 - a. Meningkatkan layanan di luar SAMSAT Induk dan mendorong pembayaran pajak melalui layanan digital (E-SAMSAT);
 - b. Meningkatkan pendapatan dari sektor Lain-lain PAD yang Sah, dengan melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil, kemudian optimalisasi tim pendapatan dari sektor retribusi dan Lain-lain PAD yang Sah serta melakukan monitoring dan survei potensi Lain-lain PAD yang Sah;
 - c. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Retribusi Daerah dan penyusunan regulasi penerimaan Retribusi Daerah merupakan upaya optimalisasi terhadap Perangkat Daerah Penghasil dan objek retribusi yang menjadi potensi baru pendapatan dari Retribusi Daerah yang belum bisa dipungut;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan pendapatan dari perusahaan daerah yang belum optimal; dan

- e. Mengoptimalkan anggaran yang ada dan mengupayakan sinergi kolaborasi dengan kabupaten/kota untuk bersama-sama sesuai kewenangan masing-masing mengoptimalkan peningkatan PAD melalui perjanjian kerja sama untuk terlibat secara aktif baik dari sisi anggaran dan sumber daya.
2. Mengintensifkan sosialisasi terhadap seluruh pemilik kendaraan bermotor salah satunya melalui Operasi Terpadu Tertib Kendaraan Bermotor berkolaborasi dengan mitra BPKPD (Kepolisian, Jasa Raharja dan Bank Jambi);
3. Mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak dan BBNKB;
4. Melaksanakan sosialisasi secara intensif melalui seluruh media massa;
5. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan di seluruh SAMSAT se-Provinsi Jambi;
6. Upaya penyelesaian terkait tarif Pajak Air Permukaan (PAP) dengan membuat regulasi baru tentang tarif Pajak Air Permukaan;
7. Melakukan penelusuran terhadap badan usaha yang bergerak dalam penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) namun demikian belum terdaftar sebagai Wajib Pungut (WAPU) di Jambi. Selanjutnya dilakukan rapat koordinasi dengan kabupaten dan kota terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) serta koordinasi/rapat teknis dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas);
8. Upaya optimalisasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan baik yang berasal dari bagi hasil pajak (PPH dan DBHCHT) dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam (PSDH, Landrent, Royalti, Migas dan Panas Bumi):
 - a. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan melalui koordinasi yang intensif dengan instansi vertikal yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hasil dari koordinasi ini dapat dilihat *trend* pendapatan dari Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan selalu meningkat setiap tahunnya, meskipun pada pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, lifting migas serta harga minyak mentah Indonesia;
 - b. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Rokok, meliputi koordinasi dan konsolidasi lebih intensif dengan instansi pusat dan kabupaten/kota, terutama berkaitan dengan data jumlah penduduk di aplikasi SIAP Kementerian Dalam Negeri, yang menjadi bahan perhitungan DBH. Data yang belum masuk ke aplikasi SIAP Kementerian Dalam Negeri belum menjadi bahan perhitungan DBH sehingga untuk pajak rokok acuannya tergantung dari data kependudukan di aplikasi SIAP Kementerian Dalam Negeri.
9. Melaksanakan peningkatan kapasitas melalui in-house training serta bimbingan teknis terkait pengelolaan pendapatan, perpajakan dan sistem aplikasi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sebagai upaya optimalisasi pelayanan pendapatan; dan

10. Menerapkan pola skala prioritas untuk kebutuhan subkegiatan yang utama dalam mendorong realisasi pendapatan untuk menghadapi *refocusing* anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan.

2.3. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

2.3.1. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer yaitu pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah pemerintah daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan/subkegiatan.

Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Jambi untuk perubahan RKPD Tahun 2022 tetap diarahkan kepada kebijakan RKPD Tahun 2022, bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat. Komponen belanja yang bersifat mengikat meliputi: honorarium pegawai honorer/tidak tetap BLUD, belanja jasa kantor listrik, air, telepon/internet, belanja premi asuransi, belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, dan belanja beasiswa pendidikan ASN;
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar:
 - a. Pelaksanaan prioritas pembangunan Jambi Tahun 2022;
 - b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021-2024; dan
 - c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Pelaksanaan tujuan penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022;
5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari total belanja APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi secara konsisten dan berkesinambungan, mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
7. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2021-2024 serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran; dan
8. Menindaklanjuti hasil Rekomendasi DPRD Provinsi Jambi atas LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah diformulasikan untuk membiayai 4 (empat) jenis belanja pembangunan daerah yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 4.795.846.912.107,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 4.889.851.565.184,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 4.618.271.741.248,86 atau 94,45% dari anggaran yang telah ditetapkan. Tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realiaasi Belanja Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD TA 2022 (Rp)		REALISASI	
	MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	%
Belanja Operasi	3.194.389.455.857,00	3.116.986.804.447,00	2.933.764.603.717,06	94,12
Belanja Modal	675.746.046.780,00	975.361.553.135,00	906.797.776.480,80	92,97
Belanja Tidak Terduga	130.436.119.124,00	28.884.765.344,00	9.090.918.793,00	31,47
Belanja Transfer	795.275.290.346,00	768.618.442.258,00	768.618.442.258,00	100,00
JUMLAH	4.795.846.912.107,00	4.889.851.565.184,00	4.618.271.741.248,86	94,45

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

Secara terperinci, anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 3.194.389.455.857,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 3.116.986.804.447,00 sedangkan realisasi Belanja Operasi pada APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.933.764.603.717,06 atau 94,12% dari anggaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD TA 2022 (Rp)		REALISASI	
	MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	%
Belanja Pegawai	1.783.283.772.998,00	1.576.301.970.948,00	1.510.158.703.505,12	95,80
Belanja Barang Dan Jasa	1.163.913.054.808,00	1.315.436.789.171,56	1.214.072.448.465,12	92,29
Belanja Subsidi	550.000.000,00	8.182.500.000,00	1.221.139.100,00	14,92
Belanja Hibah	189.140.347.976,00	198.559.518.524,44	191.244.722.206,82	96,32
Belanja Bantuan Sosial	57.502.280.075,00	18.506.025.803,00	17.067.590.440,00	92,23
JUMLAH	3.194.389.455.857,00	3.116.986.804.447,00	2.933.764.603.717,06	94,12

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

- a. Belanja Pegawai pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 1.783.283.772.998,- dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.576.301.970.948,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.510.158.703.505,12 atau 95,80%.
- b. Belanja Barang dan Jasa pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 1.163.913.054.808,- dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.315.436.789.171,56 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.214.072.448.465,12 atau 92,29%;
- c. Belanja Subsidi pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 di alokasikan sebesar Rp. 550.000.000,00 dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 8.182.500.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.221.139.100,-;
- d. Belanja Hibah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 189.140.347.976,00 dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 198.559.518.524,44 direalisasikan sebesar Rp. 191.244.722.206,82 atau 96,32%;
- e. Belanja Bantuan Sosial pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 57.502.280.075,00 dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 18.506.025.803,- direalisasikan sebesar Rp. 17.067.590.440,- atau 92,23%.

2. Realisasi Belanja Modal

Belanja Modal pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 675.746.046.780,- dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 di alokasikan sebesar Rp. 975.361.553.155,- sedangkan realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 906.797.776.480,80 atau 92,97% dari anggaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD TA 2022 (Rp)		REALISASI	
	MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	%
Belanja Modal	675.746.046.780,00	975.361.553.155,00	906.797.776.480,80	92,97
JUMLAH	675.746.046.780,00	975.361.553.155,00	906.797.776.480,80	92,97

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

3. Realisasi Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 130.436.119.124,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 28.884.765.344,00 sedangkan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 9.090.918.793,00 atau 31,47% dari anggaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Provinsi Jambi
 Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD TA 2022 (Rp)		REALISASI	
	MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	%
Belanja Tidak Terduga	130.436.119.124,00	28.884.765.344,00	9.090.918.793,00	31,47
JUMLAH	130.436.119.124,00	28.884.765.344,00	9.090.918.793,00	31,47

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

4. Realisasi Belanja Transfer

Belanja Transfer pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 795.275.290.346,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 927.718.442.260,00 sedangkan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 925.218.442.258,00 atau 99,73% dari anggaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
 Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD TA 2022 (Rp)		REALISASI	
	MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	%
Belanja Bagi Hasil	738.072.805.088,00	768.618.442.260,00	768.618.442.258,00	100,00
Belanja Bantuan Keuangan	57.202.485.258,00	159.100.000.000,00	156.600.000.000,00	98,43
JUMLAH	795.275.290.346,00	927.718.442.260,00	925.218.442.258,00	99,73

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

Secara terperinci, anggaran dan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 meliputi Belanja Transfer Bagi Hasil pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan sebesar Rp. 738.072.805.088,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 768.618.442.260,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp768.618.442.258,00 atau 100%. Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak berdasarkan Komponen Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak
Kepada Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022
(Berdasarkan Komponen Belanja)

URAIAN	APBD TA 2022 (Rp)		REALISASI	
	MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	%
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	168.483.950.581,52	159.538.338.613,00	159.538.338.613,00	100,00
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	118.727.929.142,58	132.327.526.502,00	132.327.526.502,00	100,00
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	276.564.428.448,11	286.151.935.393,00	286.151.935.393,00	100,00
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan (P3AP)	824.167.980,69	594.807.886,00	594.807.886,00	100,00
Bagi Hasil Pajak Rokok (Parok)	173.472.328.935,50	190.005.833.864,00	190.005.833.864,00	100,00
JUMLAH	738.072.805.088,40	768.618.442.258,00	768.618.442.258,00	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

Berikut adalah rincian target dan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak berdasarkan Kabupaten/Kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.11

Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Berdasarkan Kabupaten/Kota)

NO.	KABUPATEN/KOTA	APBD TA 2022	PERUBAHAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Kota Jambi	136.308.787.613,47	140.777.167.144,00	140.777.167.144,00	100,00
2.	Kab. Batanghari	62.590.637.183,33	65.257.460.614,00	65.257.460.614,00	100,00
3.	Kab. Bungo	71.686.409.374,07	74.659.802.815,00	74.659.802.815,00	100,00
4.	Kab. Tebo	61.660.260.714,83	64.385.680.529,00	64.385.680.529,00	100,00
5.	Kab. Merangin	66.189.539.889,72	69.032.231.019,00	69.032.231.019,00	100,00
6.	Kab. Sarolangun	60.222.062.237,35	62.787.850.734,00	62.787.850.734,00	100,00
7.	Kab. Muaro Jambi	69.357.898.719,21	72.432.999.434,00	72.432.999.434,00	100,00
8.	Kab. Tanjab Barat	61.856.398.160,69	64.563.780.990,00	64.563.780.990,00	100,00
9.	Kab. Tanjab Timur	51.727.163.453,02	54.074.739.747,00	54.074.739.747,00	100,00
10.	Kab. Kota Sei. Penuh	45.606.664.614,12	47.461.754.455,00	47.461.754.455,00	100,00
11.	Kab. Kerinci	50.866.983.128,60	53.184.974.777,00	53.184.974.777,00	100,00
JUMLAH		738.072.805.088,41	768.618.442.258,00	768.618.442.258,00	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

Secara terperinci, selain anggaran dan realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 yang meliputi Belanja Transfer Bagi Hasil juga termasuk Belanja Transfer Bantuan Keuangan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 yang di alokasikan sebesar Rp.57.202.485.258,00, sedangkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp.159.100.000.000,00. Adapun realisasi Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp.156.600.000.000,00 atau 98,43% yang terdiri dari :

- a. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp139.900.000.000,00 atau 100%. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
kepada Desa Tahun Anggaran 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	APBD TA 2022	PERUBAHAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	51.233.211.827,00	139.900.000.000	139.900.000.000	100,00
1.	Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Batanghari	4.028.344.032,00	11.000.000.000	11.000.000.000	100,00
2.	Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Bungo	5.163.604.623,00	14.100.000.000	14.100.000.000	100,00
3.	Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Kerinci	10.437.073.173,00	28.500.000.000	28.500.000.000	100,00
4.	Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Merangin	7.507.368.423,00	20.500.000.000	20.500.000.000	100,00
5.	Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Muaro Jambi	5.493.196.407,00	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00
6.	Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Sarolangun	5.456.575.098,00	14.900.000.000	14.900.000.000	100,00
7.	Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Tanjab Barat	4.174.829.269,00	11.400.000.000	11.400.000.000	100,00
8.	Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Tanjab Timur	2.673.355.585,00	7.300.000.000	7.300.000.000	100,00
9.	Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Tebo	3.918.480.104,00	10.700.000.000	10.700.000.000	100,00
10.	Belanja Bantuan Desa ke Kota Sungai Penuh	2.380.385.113,00	6.500.000.000	6.500.000.000	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

- b. Realisasi Belanja Keuangan Infrastruktur/Inovasi Penguatan Kelembagaan Kelurahan sebesar Rp.16.500.000.000,00 atau 100%. Rincian selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kelurahan Tahun Anggaran 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	APBD TA 2022	Perubahan	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Belanja Bantuan Keuangan Infrastruktur/Inovasi Penguatan Kelembagaan Kelurahan	5.969.273.431,00	16.500.000.000	16.500.000.000	100,00
1.	Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Batanghari	512.698.331,00	1.400.000.000	1.400.000.000	100,00
2.	Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Bungo	439.455.713,00	1.200.000.000	1.200.000.000	100,00
3.	Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Kerinci	73.242.619,00	200.000.000	200.000.000	100,00
4.	Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Merangin	366.213.094,00	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
5.	Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Muaro Jambi	183.106.547,00	500.000.000	500.000.000	100,00
6.	Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Sarolangun	329.591.784,00	900.000.000	900.000.000	100,00
7.	Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Tanjab Barat	732.426.188,00	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
8.	Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Tanjab Timur	732.426.188,00	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
9.	Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Tebo	183.106.547,00	700.000.000	700.000.000	100,00
10.	Belanja Bantuan Kelurahan ke Kota Jambi	2.270.521.182,00	6.200.000.000	6.200.000.000	100,00
11.	Belanja Bantuan Kelurahan ke Kota Sungai Penuh	146.485.238,00	400.000.000	400.000.000	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

2.4. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.4.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jambi bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran.

Adapun pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Jambi berupa anggaran penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jambi (PT. BPD Jambi Perseroda). Prioritas penyertaan modal tersebut diarahkan untuk pemenuhan modal inti minimum dan untuk peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian Daerah Provinsi Jambi. Pembiayaan daerah netto merupakan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal.

2.4.2. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Rincian Anggaran dan Realiasi Pembiayaan Daerah selengkapnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2022

URAIAN	APBD TA 2022 (Rp)		REALISASI	
	MURNI	PERUBAHAN	(Rp)	%
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	582.744.439.490,00	740.479.765.899,00	727.949.765.896,76	98,31
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	582.744.439.490,00	727.979.765.899,00	727.949.765.896,76	100,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	12.500.000.000,00	-	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.206.531.182,00	27.206.531.182,00	27.206.531.182,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	-	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Hutang	2.206.531.182,00	2.206.531.182,00	2.206.531.182,00	100,00
PEMBAYARAN NETTO	580.537.908.308,00	713.273.234.717,00	700.743.234.714,76	98,24

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

Selanjutnya dapat dijelaskan pagu anggaran dan realisasi pembiayaan sebagaimana Tabel 2.14 sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 582.744.439.490,00 dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.740.479.765.899,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp.727.949.765.896,76 atau 98,31%. Rincian realisasi dijelaskan pada uraian di bawah ini :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun sebelumnya (SiLPA) pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.582.744.439.490,00 dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.727.979.765.899,00 Realisasi penerimaan pembiayaan dari alokasi SiLPA TA 2022 adalah sebesar Rp. 727.949.765.896,76 atau 100%.
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2022 yang direncanakan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 tidak terealisasi atau 0% merupakan pencairan dana kupem pada rekening beku Kabupaten/Kota.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 atau 100% merupakan penyertaan modal untuk pemenuhan modal inti pada PT. BPD Jambi Perseroda.

3. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.3.143.068.905.676,00 sedangkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp.3.308.728.633.000,00 terealisasi sebesar Rp. 700.743.234.714,76 atau 98,24%.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

3.1 CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

Majunya perekonomian di banyak daerah merupakan sinyal baik bagi target pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan upaya kolaboratif yang sinergis antara pusat, daerah, masyarakat sipil serta stakeholder terkait lainnya dalam mewujudkan cita-cita pembangunan dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Indeks Gini. Capaian Indikator Makro Provinsi Jambi pada Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1

Indikator Makro Provinsi Jambi Tahun 2022

NO.	INDIKATOR	KONDISI AWAL/TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	
				TARGET	REALISASI
1.	Indeks Pembangunan Manusia	71,29	71,63	72,14	72,14
2.	Tingkat Kemiskinan	7,97	7,67	7,90	7,70
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,13	5,09%	5,00	4,59
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-0,46	3,66	4,70	5,13
5.	Pendapatan Perkapita ADHK	41,84	39,36	42,30	41,31
6.	Indeks Gini	0,316	0,315	0,315	0,335

Sumber: RPJMD Prov Jambi 2021-2026, BPS 2022

3.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pencapaian IPM sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga pendekatan dimensi dasar indikator pembentuk IPM yaitu; umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak. Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik, IPM Jambi pada Tahun 2022 mencapai 72,14% meningkat 0,51% dari IPM Tahun 2021 sebesar 71,63% ini

memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat Provinsi Jambi untuk terus tumbuh dan berkembang. Semakin tinggi nilai IPM, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

3.1.2 Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi pada periode 2022 terus mengalami perbaikan di angka 7,70%, dibawah target yang ditetapkan RPJMD Tahun 2022 sebesar 7,90%. Data sampai dengan Bulan September 2022 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 283,82 ribu orang, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,193 sedangkan untuk indeks keparahan kemiskinan berada pada posisi angka 0,237.

Berdasarkan infografis perkembangan kemiskinan, September 2022 yang di rilis oleh BPS Provinsi Jambi, persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera menempatkan Provinsi Jambi pada urutan ke-8 terendah. Dimana Provinsi Sumatera Utara yang tertinggi mencapai 1.262,09 ribu jiwa dan Kepulauan Bangka Belitung yang terendah mencapai 69,69 ribu jiwa.

3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2022 Perkembangan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi menunjukan pertumbuhan positif, tercatat pengangguran terbuka Provinsi Jambi sebesar 4,59% atau turun 0,5% dari Tahun 2021 sebesar 5,09%. Sedangkan target indikator makro pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah 5,00%.

Hal ini menandakan bahwa keadaan ketenagakerjaan semakin membaik seiring dengan proses pemulihan ekonomi regional. Angkatan kerja yang semula tidak bekerja karena pandemi, sudah mulai kembali bekerja seiring pulihnya aktivitas sektor-sektor usaha.

Provinsi jambi mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3,6 juta orang, dengan 2,78 juta orang berada pada usia kerja. Dari 2,78 juta penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja sebanyak 1,88 juta orang dengan proporsi bekerja 1,8 juta orang dan tidak bekerja 86,5 ribu orang. Distribusi tenaga kerja Provinsi Jambi 47,96% bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, dimana sektor tersebut merupakan sektor terbesar dalam pembentukan PDRB Provinsi Jambi. Selama periode Agustus 2021 s.d. Agustus 2022 lapangan usaha pertanian masih menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 862 ribu orang. Sementara lapangan usaha industri pengolahan dengan kontribusi 5,25% menyerap 94 ribu tenaga kerja. Sementara lapangan usaha perdagangan besar mengalami penurunan sebanyak 11 ribu orang, namun masih memiliki kontribusi terbesar kedua serapan tenaga kerja yaitu sebesar 14,49%.

3.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Gambaran dari capaian indikator makro Provinsi Jambi Tahun 2022 cukup menggembirakan, hal ini tercermin dari pencapaian laju pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi tumbuh positif sebesar 5,13% (c-on-c) yang sebelumnya 3,69% pada Tahun 2021 naik 1,54%. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tumbuh pada hampir seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan terbesar pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, kecuali konstruksi, administrasi pemerintahan, jasa keuangan dan jasa kesehatan yang berkontraksi (tumbuh negatif).

Apabila dibandingkan dengan Ekonomi Kawasan Sumatera dan Ekonomi Nasional, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Sumatera (4,98%) namun lebih rendah dibanding capaian Nasional (5,01%).

3.1.5 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai landasan/pedoman pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi karena pemerintah dapat memantau pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Pendapatan per kapita di hitung secara berkala (periodik) biasanya satu tahun. Jika pendapatan perkapita meningkat, dapat dikatakan bahwa adanya kenaikan kesejahteraan sosial pada masyarakat tersebut.

Pendapatan perkapita Provinsi Jambi Tahun 2022 sebesar 41,31 triliun, kurang 0,99 dari target yang ingin dicapai Tahun 2022 namun jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita pada Tahun 2021 sebesar 39,26 triliun, terjadi peningkatan sebesar 2,05.

3.1.6 Indeks Gini

Indeks gini atau disebut juga gini ratio adalah indikator ekonomi yang mengukur ketimpangan pendapatan antar masyarakat di suatu daerah. Bila gini ratio sama dengan 0 (nol), pemerataan pendapatan yang sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan lainnya. Bila gini ratio sama dengan 1 (satu), ketimpangan yang sempurna artinya satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Angka gini rasio atau tingkat ketimpangan cenderung berfluktuasi dimana periode September 2022 kembali meningkat 0,015 poin menjadi 0,335. Tingkat ketimpangan ini masih cukup jauh jika dibandingkan dengan tingkat ketimpangan nasional (0,381).

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

Provinsi Jambi telah menetapkan Indikator Kinerja yang bertujuan untuk menggambarkan tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan Indikator Kinerja

daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD.

Memasuki Tahun 2022 yang merupakan tahap awal pelaksanaan RPJMD untuk periode 2021-2026, kondisi perekonomian mulai tumbuh positif seiring dengan peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat sehingga aktivitas perekonomian berangsur mulai pulih. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun 2022.

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022 tercermin dari 3 (tiga) misi, 8 capaian tujuan/sasaran strategis RPJMD dan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) indikator memperoleh capaian kinerja sangat baik, 1 (satu) indikator mencapai dengan kriteria baik. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

Misi Kesatu : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan						
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL 2020	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif dengan Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	100%
Misi Kedua : Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah						
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL 2020	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Memulihkan Perekonomian Daerah Melalui Pengelolaan Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan (Ekonomi Hijau) guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan PDRB Hijau	-0,46	4,55	4,6	101,9%
		Tingkat Kemiskinan	7,97	7,90	7,70	102,59%
3.	Memantapkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Dasar	Rasio Konektivitas	53,5	53,9	68,4	126,90%
		Akses terhadap air minum layak	78,06	79,08	78,86	99,72%
		Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet	78,06	99,36	89,50	90,07%
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,06	72,07	70,32	97,57%
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis lahan (juta ton CO2 eq)	31,683	3.283 juta ton CO2 eq	4 juta ton CO2 eq	121,83%

5.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,13	5,00	4,59%	108,93%
6.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Kemudahan Akses Terhadap Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	70,00	71,00	69,50	97,88%
Misi Ketiga : Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia						
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI AWAL 2020	TAHUN 2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, Berbudaya, Agamis dan Berkesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Manusia	71,29	72,14	72,14	100%
8.	Meningkatkan Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan	Indeks Pemberdayaan Perempuan	65,86	67,78	65,93	97,27%

Sumber: RPJMD 2021-2026, BPS, LKJ Pemprov Jambi Tahun 2022, Perangkat Daerah/ OPD

Pencapaian indikator dari misi kesatu sasaran kesatu ditunjukkan dengan ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2022 (angka 2021) adalah 62,74 dengan kategori B.

Pencapaian pada misi kedua sasaran kedua ditunjukkan dengan ketercapaian 2 (dua) indikator kinerja daerah yaitu Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau dan Tingkat Kemiskinan. Kesatu, Untuk PDRB Hijau Realisasi dari indikator ini adalah 4,6 atau ketercapaian 101,9% dari target yang telah ditetapkan.

Kedua, Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar dan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang. Kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Angka kemiskinan Provinsi Jambi pada Tahun 2022 sebesar 7,70% atau 283,82 orang. Dibawah target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Salah satu yang mempengaruhi peningkatan kemiskinan yaitu kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga BBM pada Tanggal 3 September 2022 melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022.

Pada sasaran ketiga ditunjukkan dengan ketercapaian 3 (tiga) indikator yakni Rasio Konektivitas, Akses Terhadap Air Minum Layak dan Persentase Desa/Kelurahan yang Memiliki Akses Internet. Kesatu, dalam sistem transportasi, konektivitas memainkan peran penting dalam sebuah penyelenggaraan transportasi. Konektivitas merupakan satu kesatuan dalam jaringan transportasi yang mengacu pada kerapatan sambungan di jalan atau jaringan jalan dan kelangsungan dalam jaringan tersebut. Provinsi Jambi mencapai angka 68,4%. Jika dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2022 sebesar 53,9 maka capaian kinerja pada indikator ini sebesar 126,90% masuk dalam kategori tinggi. Kedua, air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah

memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi pada Tahun 2022 adalah sebesar 78,86%. Capaian ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2022 yakni sebesar 79,08% maka mencapai 99,72% dan termasuk dalam kategori tinggi. Ketiga, tersedianya akses internet sampai dengan ke pelosok Desa, ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Desa menjadi Desa Mandiri dan cepat mendapatkan informasi terkini sehingga dapat mendorong perekonomian. Capaian realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 89,50, jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2022 yakni sebesar 99,36% maka capaian kinerja pada indikator ini memperoleh persentase sebesar 90,07%, dari 285 Desa/Kelurahan yang belum memiliki akses internet atau *blind spot* sudah terpasang sebanyak 121 fasilitas internet gratis, artinya masih tersisa 164 Desa/Kelurahan yang akan dilanjutkan guna mendapatkan akses internet gratis pada Tahun 2023.

Pada sasaran keempat ditunjukkan dengan ketercapaian 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis lahan (juta ton CO₂ eq). Kesatu, Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu; Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Kedua, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dalam rangka penurunan emisi GRK Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan langkah-langkah strategis dengan memonitor dan optimalisasi capaian sasaran-sasaran jangka menengah pendukungnya antara lain meningkatnya luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya dengan indikator kinerjanya yakni persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya. Capaian yang diperoleh dari indikator ini adalah masing-masing 97,57 dan 121,83%.

Sasaran kelima ditunjukkan dengan ketercapaian 1 (satu) indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 adalah sebesar 4,59%. Hal ini berarti dari 1.000 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 46 orang penganggur. Pada Agustus 2022 ini, nilai TPT mengalami penurunan sebesar 0,5% poin dibandingkan dengan Agustus 2021.

Sasaran keenam ditunjukkan dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Indeks Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan kondisi Ketersediaan Energi

(Kkal/kap/hari), Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun), Jumlah Penduduk (jiwa) serta kandungan energi. Adapun capaian pada Tahun 2022 yakni sebesar 97,88%.

Pencapaian pada misi ketiga sasaran ketujuh ditunjukkan dengan pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia di Provinsi Jambi terus mengalami kemajuan. Sejak Tahun 2018, status Pembangunan Manusia Provinsi Jambi meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2013-2022 IPM Provinsi Jambi rata-rata meningkat sebesar 0,70% per tahun, dari 67,76 pada Tahun 2013 menjadi 72,14 pada Tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan IPM pada Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pada Tahun 2021 dan 2022 IPM Provinsi Jambi terus membaik seiring dengan penanganan Covid-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Provinsi Jambi. Peningkatan IPM Provinsi Jambi Tahun 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Sasaran kedelapan ditunjukkan dengan indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Perempuan (gender). Indeks Pemberdayaan Perempuan merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada tiga indikator penyusunnya, yaitu persentase keterwakilan perempuan di parlemen, persentase keterwakilan perempuan sebagai tenaga profesional, administrasi dan teknisi serta sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Realisasi capaian kinerja Indeks Pemberdayaan Gender pada Tahun 2022 mencapai 65,93 atau 97,27%.

Sebagai upaya untuk meningkatkan IDG ini, maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Pembinaan Organisasi Perempuan.

3.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

3.3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01			BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN							1.225.012.373.865	957.742.110.670		
	01.01					1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1. Nilai AKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	1) Nilai 2) Nilai	1) 70 2) 82	1) 70 2) 89,03	703.904.082.573	667.986.849.997		
	01.01.1.01					1 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	dokumen	8	8	1.758.884.634	1.222.466.483		
	01.01.1.01	1				1 Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	689.680.234	635.704.834	Sesuai dengan aturan, ada pembayaran honorarium PPTK tidak terealisasi karena hanya bias direalisasikan 1 dari beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK	
	01.01.1.01	2				2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	41.805.000	18.298.950	Sesuai dengan aturan, ada pembayaran honorarium PPTK tidak terealisasi karena hanya bias direalisasikan 1 dari beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK	
	01.01.1.01	3				3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	38.300.000	14.974.500	Sesuai dengan aturan, ada pembayaran honorarium PPTK tidak terealisasi karena hanya bias direalisasikan	

															1 dari 4 beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK	
	01.01.1.01	4					4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	39.500.000	16.717.800	Sesuai dengan aturan, ada pembayaran honorarium PPTK tidak terealisasi karena hanya bias direalisasikan 1 dari beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK	
	01.01.1.01	5					5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	39.500.000	16.070.500	Sesuai dengan aturan, ada pembayaran honorarium PPTK tidak terealisasi karena hanya bias direalisasikan 1 dari beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK	
	01.01.1.01	6					6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Dokumen	1	1	62.908.000	23.003.000	Sesuai dengan aturan, ada pembayaran honorarium PPTK tidak terealisasi karena hanya bias direalisasikan 1 dari beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK	
	01.01.1.01	7					7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	847.191.400	497.696.899	Dengan adanya keterbatasan waktu sehingga kegiatan perjalanan dinas evaluasi sekolah hanya dilakukan pada 6 kab/kota	
	01.01.1.02						2	Administrasi	Jumlah	Laporan	1	1	688.766.006.872	655.168.722.959		

								Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan							
01.01.1.02	1							1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	63.300	61.583	688.521.885.697	655.004.574.819	Sisa dana merupakan sisa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tidak direalisasikan	
01.01.1.02	2							2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	1	1	126.592.000	85.072.965	Sisa dana merupakan sisa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang tidak direalisasikan	Mengurangi volume barang cetak, makan minum rapat dan menghitung kembali biaya perjalanan dinas
01.01.1.02	3							3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	52.541.175	35.632.675	Terdapat dana sisa merupakan uang lembur yang tidak dicairkan	Agar kedepannya tidak dianggarkan lagi uang lembur
01.01.1.02	4							4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	Dokumen	1	1	50.000.000	43.422.500	Terdapat dana sisa merupakan Biaya Perjalanan Dinas yang tidak dicairkan, mengingat waktu di akhir tahun dalam melakukan kegiatan	Menghitung kebutuhan anggaran perjalanan dinas
01.01.1.02	5							5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan penyusunan laporan keuangan 6keuangan	Laporan	20	0	14.988.000	0	Terdapat dana sisa merupakan uang lembur dan biaya perjalanan dinas yang tidak dicairkan	Menghitung kebutuhan anggaran perjalanan dinas dan biaya uang lembur pada sub kegiatan

									bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD							
	01.01.1.03						3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Aset	Laporan	1	1	742.096.000	613.459.240		
	01.01.1.03	1					1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan BMD SKPD	Dokumen	1	1	30.000.000	22.260.000	Dana yang tersedia berasal dari : 1) biaya penggandaan dimana volume lembar yang digandakan (daftar usulan dan dokumen RKBMD) lebih sedikit dari volume yang dianggarkan; 2) belanja makan minum rapat dimana kegiatan rapat hanya dilaksanakan 2 kali dari 3 kali yang direncanakan	
	01.01.1.03	2					2	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun dan laporan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	2	2	495.000.000	478.489.470	Sisa anggaran adalah komulatif dari uang harian, transport peserta yang tidak hadir (14 orang) karena yang bersangkutan sebagian ada yang bersamaan mengikuti ujian ppg, ujian kuliah, studi banding dan urusan keluarga lainnya	Peserta yang melapor sebelum kegiatan suda dilaksana n agar kepsek mengutus staf lain untuk mengikuti dengan syarat membawa kelengkapan dokumen, namun sepertinya karena berkaitan dengan rekon final dan aplikasi sebagaiab pengganti tidak

																	bersedia
	01.01.1.03	3					3	Penatausa- haan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen bahan tanggapan pemeriksaan	Dokumen	9	9	217.096.000	112.709.770			
	01.01.1.04						4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pendapatan SKPD	Laporan	1	1	28.465.000	17.564.970			
	01.01.1.04	1					1	Perencanaan Pengelolaan Retsibusi Daerah	Jumlah Dokume Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	1	28.645.000	17.564.970	Sesuai dengan aturan, ada pembayaran honorarium PPTK tidak terrealisasi karena hanya bias direalisasikan 1 dari beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK		
	01.01.1.05						5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Persen	100	100	1.181.924.295	911.441.971			
	01.01.1.05	3					1	Pendataan dan pengolahan adminitrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Dokumen	2	2	110.000.000	46.573.860	(1). Kegiatan pendataan di beberapa kabupaten/kot a tidak berlangsung secara baik, dikarenakan di beberapa uang penginapan hanya dianggarkan 1 (satu) hari, sementara daerah yang dituju lebih dari 10 (sepuluh) jam, (2). Pembayaran Uang Lembur terkendala dengan aturan dan kebijakan serta kelengkapan dokumen lembur	(1). Membayarka n uang penginapan sebagaimana yang tertera pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dikarenakan pendataan dilaksanakan sebelum anggaran perubahan, (2). Melakukan koordinasi dan konsultasi lebih lanjut terkait pedoman pelaksanaan pembayaran uang lembur khususnya di lingkup	

																	kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
	01.01.1.05	4						2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawai-an	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	143.459.000	93.376.272	Terdapat Dana sisa yang merupakan uang perjalanan dinas yang tidak dicairkan dikarenakan kegiatan Sistem Informasi Kepegawaian baru disosialisasikan pada bulan November Tahun 2022 di Jakarta	Sudah dilakukan sosialisasi langsung ke sekolah2 kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, waktu yang tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan di akhir tahun
	01.01.1.05	5						3	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawai-an	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai (Dinas)	Dokumen	1	1	110.000.000	91.692.000	Terdapat Dana sisa yang merupakan uang perjalanan dinas yang tidak dicairkan dikarenakan mengingat waktu di akhir tahun anggaran	Dilakukannya monitoring, evaluasi dan penilaian kerja pegawai/guru kabupaten/kota dalam provinsi jambi
	01.01.1.05	5						4	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja Guru (UPTD BTIKP)	Dokumen	1	1	196.795.000	179.570.142	Kegiatan monitoring ,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai tidak terserap 100% karena ada sisa uang penginapan dan transport. - Sesuai dengan aturan, ada pembayaran honorarium PPTK tidak terealisasi karena hanya bisa di realisasikan 1 dari beberapa sub kegiatan yang	

	01.01.1.06	3					4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	2	2	196.001.564	190.860.464	Dana yang tersisa berasal dari adanya peralatan rumah tangga yang tidak bisa dibelanjakan karena harga barang di SIPD tidak relevan lagi dengan harga barang saat ingin dibelanjakan	Pengajuan SSH di Umumkan Sebelum Penganggar-an Murni atau Perubahan
	01.01.1.06	4					5	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket bahan logistic kantor yang disediakan	Paket	1	1	480.841.901	446.225.162	Dana yang tersisa berasal dari belanja makan dan minum rapat biasa dan tamu, dimana kegiatan rapat biasa maupun tamu tidak terlalu banyak di bulan desember	
	01.01.1.06	5					6	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda-an	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket	1	1	367.407.800	339.303.060	Dana yang tersisa merupakan sisa dana yang tidak dibelanjakan	Tidak ada
	01.01.1.06	5					7	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda-an	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Paket	1	1	209.913.393	186.533.550	Terdapat pembelian album foto yang tidak sesuai dengan jumlah cetak foto	
	01.01.1.06	6					8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	1	1	46.654.000	46.654.000	Tidak ada permasalahan	Tidak ada
	01.01.1.06	7					9	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Paket	3	3	177.152.800	176.679.600	Dana yang tersisa merupakan sisa dana yang tidak dibelanjakan	Tidak ada
	01.01.1.06	9					10	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	778.289.000	485.991.416	Dana Perjalanan Dinas ada beberapa yang tidak dilaksanakan	Agar ke depan menganggar kan biaya perjalanan dinas

															dikarenakan di DPA sudah di plotting kota2 yang bisa dikunjungi untuk melakukan perjalanan dinas	menggunakan metode paket
	01.01.1.06	10					11	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD	Dokumen	1	1	53.877.276	52.717.276	Tidak ada permasalahan, sisa dana berasal dari efisiensi dana makan minum rapat	
	01.01.1.06	11					12	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (BTIKP)	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD	Dokumen	1	1			(1) Terdapat perbedaan cost penginapan di Kabupaten /Kota, (2) Adanya kebijakan dari Pemerintah untuk menggunakan jasa dari marketplace dalam pemesanan barang/jasa	(1) Membayarkan cost penginapan sesuai dengan riil dana yang dikeluarkan oleh pelaksana tugas dengan catatan tidak melebihi dari pagu yang tersedia pada DPA/DPPA, (2) Mencari informasi tentang penggunaan marketplace dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, dan dari hasil tersebut terdapat kegiatan yang tidak dapat dibayarkan serta adanya penawaran dari beberapa barang yang dipesan
	01.01.1.07						7	Pengadaan Barang	Persentase	Persen	100	100	644.050.798	643.821.542		

								Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi								
	01.01.1.07							1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	31	31	619.785.678	619.556.422	Dana yang tersisa merupakan sisa dana kontrak	Tidak ada
								2	Pengadaan Aset tetap lainnya	Jumlah unit asset lainnya yang disediakan	Unit	4	4	24.265.120	24.265.120	Tidak ada	Tidak ada
	01.01.1.08						8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	4.589.923.000	3.924.701.875			
	01.01.1.08	1						1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	15.000.000	10.000.000	Tidak adanya bidang atau seksi yang mengajukan pengiriman surat melalui POS, dan terkadang juga surat menyurat yang dikirimkan ke kabupaten/kot a sifatnya mendesak serta membutuhkan tanggapan yang cepat	Pengiriman surat menyurat lebih mengutamakan moda daring (dalam jaringan) seperti melalui WhatsApp maupun surat elektronik (surel) yang dirasakan lebih mudah mendapatkan respon langsung dari penerima surat
	01.01.1.08	2						2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	804.578.000	600.003.742	Dana yang tersisa berasal dari belanja jasa telepon, air dan listrik dimana realisasi belanja perbulannya lebih kecil dari dana yang	penyesuaian anggaran belanja telepon, air dan listrik di APBD 2023

	01.01.1.08	3					3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	594.917.000	296.570.390	disediakan Dana yang tersisa berasal dari: 1) Sisa penawaran untuk belanja Pembuatan Kajian Akademis Cabang Dinas dan Pembuatan Kajian Akademis Pembentukan BLUD Sekolah, 2) Tidak direalisasikan belanja pembuatan Kajian Akademis Perencanaan Sistem Digitalisasi Pendidikan dikarekan adanya keterbatasan waktu pengerjaan, 3) Sisa belanja pemeliharaan Alat/ Komponen elektronik dan listrik gedung kantor dikarenakan kegiatan pemeliharaan yang dikerjakan sesuai dengan usulan pemeliharaan, 4) Sisa perjalanan dinas dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan ketidaksuaia n Sub Kegiatan dengan indikator dan tolak ukur kinerja dalam	1) Menganggar kan kembali kegiatan belanja pembuatan Kajian Akademis Perencanaan Sistem Digitalisasi Pendidikan pada tahun 2023, 2) Melakukan pergeseran anggaran pada rekening yang relevan untuk perjalanan dinas

	01.01.1.08	4					4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	3.175.428.000	3.018.127.743	DPA. (1). Adanya perubahan anggaran untuk BPP dan KPA yang semula dianggarkan hanya 5 (lima) orang, sementara sesuai dengan SK ada 6 (enam) orang. (2). Adanya perubahan jadwal pelaksanaan penyusunan profile PAUD yang berakibat tidak terealisasinya kegiatan makan minum rapat, honorarium keanggotaan PAUD, dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, (3). Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN teranggarkan selama 12 (dua belas) bulan dengan premi per orang Rp. 15.400, (4). Belanja Jasa Tenaga Pendidikan teranggarkan untuk 137 orang x 12 bulan = 1.644 orang, (5). Lambannya penyampaian Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan uraian tugas	(1). Melakukan pergeseran anggaran dari rekening yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), (2). Melakukan koordinasi dan konsultasi lebih lanjut tentang perubahan jadwal kegiatan, agar dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya, (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS mulai diaktifkan pada bulan April 2022 dan jumlah premi per orangnya sebesar Rp. 14.574,28, (4). Belanja Jasa Tenaga Pendidikan dibayarkan sesuai kebutuhan yaitu untuk 135 orang x 12 bulan = 1.620 orang, (5). Menetapkan batas akhir penetapan Surat Perjanjian Kerja dan uraian tugas

																Tenaga Non ASN pada tiap triwulan	yang dipergunakan sebagai syarat utama pembayaran gaji Tenaga Non ASN
	01.01.1.09						9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	2.487.629.509	2.343.577.842			
	01.01.1.09	2						1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	804.578.000	600.003.742	Dana yang tersisa berasal dari belanja jasa telepon, air dan listrik dimana realisasi belanja perbulannya lebih kecil dari dana yang disediakan	penyesuaian anggaran belanja telepon, air dan listrik di APBD 2023
	01.01.1.09	9						2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	2	2	444.000.000	443.503.000	Sisa dana merupakan sisa kontrak	Tidak Ada
	01.01.1.09	10						3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	914.009.999	912.153.200	Sisa dana merupakan sisa kontrak	Tidak Ada
	01.01.1.09	10						4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (BTIKP)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	224.288.610	223.650.735,61	Adanya kebijakan dari Pemerintah untuk menggunakan jasa dari marketplace dalam pemesanan barang/jasa	Mencari informasi tentang penggunaan marketplace dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, dan terdapat penawaran dari beberapa barang/jasa yang dipesan/dike

	01.02.1.01	1						1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang telah dibangun	unit	2	2	2.829.960.000	2.786.862.313	Pembangunan USB di SMA Kasang Puduk yang terbangun adalah ruang kelas sebanyak 6 ruang dan WC sebanyak 2 unit, sedangkan untuk kantor belum teranggarkan.	Dianggarkan pembanguan kantor pada APBD tahun anggaran 2023.
	01.02.1.01	2						2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang bertambah	ruang	23	23	9.645.104.502	9.106.499.806	Terdapat pembangunan RKB yang tidak selesai 100% hingga akhir tahun anggaran yaitu pembangunan RKB SMAN 14 Kota Jambi, akan tetapi pembangunan terus diselesaikan dengan memberikan kesempatan kepada penyedia selama 36 hari kalender dari tanggal akhir kontrak. Penyedia dibayar sesuai progres yang dicapainya yaitu 73,8%.	Dijadikan hutang daerah dan akan dibayarkan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
	01.02.1.01	5						3	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang telah dibangun	ruang	36	36	13.235.010.608	13.210.902.499	Tidak ada Permasalahan	
	01.02.1.01	12						4	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang telah dibangun	ruang	1	1	70.000.000	69.900.000	Pembangunan Aula SMAN 1 Kota Jambi tidak jadi direalisasikan karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembangunan aula tersebut.	Dianggarkan kembali pada tahun 2023 sesuai dengan biaya perencanaan yang telah dibuat.

	01.02.1.01	14						5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	unit	84	84	23.324.179.705	22.932.347.374	Tidak ada Permasalahan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
	01.02.1.01	19						6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/ berat	ruang	32	32	4.031.790.140	3.990.724.877	Tidak ada Permasalahan	
	01.02.1.01	36						7	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	paket	134	134	9.845.102.488	9.597.362.200	Terjadinya keterlambatan pada penyediaan meubiler khususnya meubiler DAK oleh pihak penyedia.	Dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 kali jumlah hari keterlambatannya.
	01.02.1.01	39						8	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia	paket	1	1	7.373.099.500	7.007.789.500	Data Usulan dari Sekolah tidak sesuai dengan Data Dari DINSOSDUPCA PIL	Meminta data yang Valid dengan DINSOSDUPCAPIL
	01.02.1.01	41						9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang tersedia	paket	21	21	4.339.983.645	4.321.718.500	Terjadinya keterlambatan pada penyediaan Alat Peraga IPA oleh pihak penyedia.	Dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 kali jumlah hari keterlambatannya.
	01.02.1.01	47						10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	satuan pendidikan	75	75	200.000.000	196.030.000	1. Dana yang tersisa adalah dana yang berasal dari sisa penawaran untuk belanja langsung sama pihak ke tiga yaitu pihak hotel kening paket meeting dalam kota dan 2. Dana pada belanja Honorarium narasumber (kelebihan jam)	
	01.02.1.01	48						11	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	satuan pendidikan	75	75	300.000.000	228.628.334	1. Dana yang tersisa adalah dana yang berasal dari sisa penawaran untuk belanja langsung	memaksimalkan penyerapan anggaran dengan limit waktu yang tersedia dari

								Atas								dengan pihak ke tiga yaitu pihak hotel untuk rekening paket meeting dalam kota dan 2. DPA mengalami revisi dan kemudian mendapatkan tambahan dana 100.000.000 yang diperuntukkan untuk sosialisasi dan advokasi perencanaan berbasis data bagi satuan pendidikan di kabupaten dan kota sesuai dengan RTL yang disepakati dengan direktorat SMA, dan kemudian monitoring dan evaluasi program sekolah penggerak ke sekolah penggerak. kebutuhan waktu untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan kegiatan dan waktu penerimaan Dokumen DPPA-P 2022 yang diterima pada minggu ke-3 November 2022 tidak memadai dengan waktu yang dibutuhkan untuk kesiapan administrasi surat perintah tugas dan	adminisrasi keuangan

	01.02.1.01	49						12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta didik	150	150	1.209.893.940	1.165.649.560	perbaikannya.	menambah anggaran agar bisa dilaksanakan secara offline dan kegiatan lebih efektif
	01.02.1.01	51						13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	271	271	1.000.000.000	888.198.000,00	pada kegiatan ini terdapat biaya Swab antigen untuk peserta, Panitia, dan Narasumber, dana ini tidak terserap karena sudah tidak memerlukan Swab/Antigen.	
	01.02.1.01	53						14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	237		119.684.060.000	0		
	01.02.1.02						2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan SMK yang terpenuhi	persen	100		241.221.257.932	143.363.399.836		
	01.02.1.02	1						1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	unit	2	2	2.850.000.000	2.796.225.000	Tidak ada Permasalahan	
	01.02.1.02	2						2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	ruang	121	121	58.516.224.958	57.689.703.967	Tidak ada Permasalahan	
	01.02.1.02	7						3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	ruang	1	1	275.000.000	273.669.000	Tidak ada Permasalahan	
	01.02.1.02	10						4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	unit	10	10	2.062.959.000	2.057.671.294	Tidak ada Permasalahan	
	01.02.1.02	28						5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	paket	44	44	3.850.000.000	3.779.663.233	Tidak ada Permasalahan	
	01.02.1.02	31						6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	paket	1	1	5.994.986.600	5.706.020.000,00	Honorarium PPTK dan PPK tidak diambil, biaya	anggaran tidak di realisasikan

																perjalanan dinas tidak sesuai	
	01.02.1.02	33						7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	paket	48	48	65.941.703.000	65.655.962.160	Tidak ada Permasalahan	
	01.02.1.02	37						8	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	863	863	1.025.000.196	999.627.827	Anggaran yang tersedia belum memenuhi kebutuhan SMK PP.	Dilakukan revisi anggaran untuk honor guru pamong dll, karena untuk sekolah berasrama belum ada payung hukumnya pada tahun 2022
	01.02.1.02	40						9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	satuan pendidikan	25	25	593.359.990	532.200.856	Pada kegiatan ini terdapat permasalahan, dimana dengan anggaran yang tersedia belum bisa dilakukan kegiatan yang maksimal dalam proses kegiatan evaluasi, seperti kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Siswa, Verifikasi kesiapan UKK, dan Pelaksanaan Asessmen, sehingga hanya baru 25 sekolah yg bisa dia komodor, semntara secera keseluruhan terdapat 182 SMK	Dilakukan pergesaran anggaran pada APBD P dengan melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas utama seperti evaluasi program SMK PK dan Sosialisasi Implemntasi Kurikulum Merdeka
	01.02.1.02	41						10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik	peserta didik	372		2.646.999.942	2.236.446.902	Masih Kurangnya Anggaran untuk melaksanakan	melakukan penambahan anggaran agar bisa melaksanakan

									dan Non Akademik							Lomba secara offline dan anggaran untuk bahan perlengkapan lomba tingkat provinsi,	n secara offline agar kegiatan lebih efektif dan maksimal
	01.02.1.02	43					11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	orang	328		2.182.422.054	1.004.276.054	pada kegiatan ini terdapat rekening belanja jasa kontribusi asosiasi : 1. Peningkatan Kualifikasi Calon Kepala Sekolah (Rp. 450.000.000) 2. Peningkatan Kualifikasi Pengawas (Rp. 450.000.000), kegiatan tersebut tidak bisa di laksanakan karena untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah tidak lagi berdasrkan Diklat Cakep dan Cawas.		
	01.02.1.02	45					12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan	244		1.188.632.192	631.933.543	Pada kegiatan ini terdapat rekening Perjalanan Dinas luar daerah yang tidak mempunyai dana Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kotanya, maka untuk perjalanan ini tidak dilaksanakan. Ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Anggaran tidak cukup untuk pelaksanaan	Sudah berkoordinasi dengan yang merencanakan Anggaran sebelumnya	

																kegiatan tersebut, itu diinformasikan oleh PPTK sebelumnya yang menyusun anggaran setelah dilaksanakan Anggaran perubahan	
	01.02.1.02	46						13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	180		94.093.970.000	0		
	01.02.1.03						3	Pengelolaan Pendidikan Khusus		Persentase Pengelolaan Satuan Pendidikan Khusus Yang Terpenuhi	Persen	100		31.632.055.353	22.096.167.963		
	01.02.1.03	1						1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	unit	3	3	4.604.733.000	4.510.209.455	Tidak ada Permasalahan	
	01.02.1.03	2						2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	ruang	10	10	2.210.000.000	2.210.000.000	Tidak ada Permasalahan	
	01.02.1.03	3						3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ruang	1	1	145.000.000	145.000.000	Tidak ada Permasalahan	
	01.02.1.03	7						4	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	unit	2	2	660.600.000	640.452.810	Tidak ada Permasalahan	
	01.02.1.03	8						5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Paket Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	unit	38	38	8.397.950.504	7.753.225.468	1.Dana yang tersisa adalah dana yang berasal dari sisa penawaran untuk belanja langsung bersama pihak ketiga 2. Terdapat sisa dana pada rekening belanja Honorarium Narasumber adalah dikarenakan kegiatan tidak	

																memungkinkan untuk dilakukan sebanyak 2x, sehingga dilakukan hanya 1 kali kegiatan. 3. Terdapat sisa dana pada rekening belanja paket meeting dalam kota dikarenakan adanya kekurangan dana untuk melakukan kegiatan sebanyak 2x, sehingga hanya dapat melaksanakan sebanyak 1x kegiatan. 4. Terdapat sisa dana pada rekening Belanja modal yang disebabkan karena tidak dapat terlaksananya Pembangunan Kantin SLBN 1 Kota Jambi dan Pembangunan Kantin SLBN Muara Bulian yang disebabkan keterbatasan lahan.	
	01.02.1.03	14					6	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	ruang	1	1	170.000.000	170.000.000	Tidak ada Permasalahan		
	01.02.1.03	15					7	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Paket Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	ruang	2	2	340.000.000	340.000.000	Tidak ada Permasalahan		
	01.02.1.03	38					8	Pengadaan	Jumlah	paket	1	1	1.530.000.000	1.150.864.744	25 % tidak		

									Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia						tersalurkan karena tidak tercantumkan didalam Juknis dan juklak, dan ada siswa yang sebagai penerima bantuan PIP di Tahun 2022	
	01.02.1.03	44					9	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	peserta didik	229	229	3.382.582.539	3.175.362.046	1. Anggaran yang tersedia belum mencukupi terlaksananya kegiatan. 2. Masih Banyaknya sasaran kegiatan yang direncanakan	melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan agar sasaran peserta yang di butuhkan tercapai	
	01.02.1.03	46					10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		0		310.000	0	1. Anggaran yang tersedia belum memenuhi kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan. 2. Belum maksimalnya sasaran pelaksanaan kegiatan yang direncanakan	melakukan sosialisasi mandiri tentang pelaksanaan kegiatan agar sasaran peserta yang di butuhkan tercapai	
	01.02.1.03	47					11	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Satuan Pendidikan Khusus yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	satuan pendidikan	13	13	92.310.000	92.302.750			
	01.02.1.03	48					12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/ Lomba Akademik dan Non Akademik	peserta Didik	170		1.348.129.320	1.307.435.350	1. Kurangnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan lomba secara offline, 2. Perlu Penambahan untuk terlaksananya Lomba ABK secara Offline	menambah anggaran agar bisa dilaksanakan secara offline dan kegiatan lebih efektif	
	01.02.1.03	50					13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan	orang	90		597.000.000	255.101.640	1. ada nya perubahan sistem pembayaran magang ke OPD/Instansi	1. dilakukan kegiatan mandiri dimasing masing sekolah dan	

								Pendidikan Khusus	Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi							lain dimana belum ada aturan standar harga sehingga proses kegiatan magang tidak dapat terlaksana,dan tenaga ahli yang diminta juga tidak memenuhi persyaratan 2. program kualifikasi S1 dua kali khusus PLB terhambat karena mahasiswa telah diwisuda dan sudah selesai serta dana yang dialokasikan tidak sesuai kode rekening yang seharusnya dana hibah bukan beasiswa	melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti BLK, 2. pembiayaan perkuliahan dari sebelum dilaksanakan program Kualifikasi S1 dua kali,sudah diberikan kenaikan gaji bagi guru SLB dari 1.350.000 menjadi 1.800.000
	01.02.1.03	51					14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	satuan pendidikan	13	13	448.349.990	346.213.700	Tidak ada Permasalahan		
	01.02.1.03	52					15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	satuan pendidikan	19	19	7.705.090.000	0			
	01.03				3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			Persentase Sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal persen	100	100		967.414.000	794.834.810			
	01.03.1.01					1	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah					750.000.000	698.849.810				
	01.03.1.01	1					1	Pelatihan Penyusunan Kurikulum	Jumlah Penyusun Kurikulum	orang	280	280	750.000.000	698.849.810,00	1. Dana yang tersisa adalah dana yang		

								Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya							berasal dari sisa penawaran untuk belanja langsung sama pihak ke tiga yaitu pihak hotel untuk rekening paket meeting dalam kota, 2. Sisa honorarium Penanggungjawab aban Pengelola Keuangan	
	01.03.1.02						2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase penerapan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus	persen	100		217.414.000	95.985.000			
	01.03.1.02	1						1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	dokumen	1	1	116.771.000	22.586.500,00	1. Kurikulum muatan lokal secara keseluruhan anggaran yang tersedia belum memadai 2. program yang disusun belum menyentuh substansi kegiatan 3. sasaran peserta yang dilatih belum maksimal	melakukan sosialisasi mandiri tentang pelaksanaan kegiatan agar sasaran peserta yang di butuhkan tercapai
	01.03.1.02	2						2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	dokumen	5	5	84.094.000	73.398.500,00	Kurikulum Merdeka dan Kurikulum muatan lokal secara keseluruhan anggaran yang tersedia belum memadai	melakukan sosialisasi mandiri tentang pelaksanaan kegiatan agar sasaran peserta yang di butuhkan tercapai
	01.03.1.02	3						3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	buku	144		16.549.000	0		
	01.04						4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIK	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi	persen	100		46.932.273.388	44.930.173.861,00			

								Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
	01.04.1.01						1	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) provinsi	Persentase Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi	persen	100		46.932.273.388	44.930.173.861,00	
	01.04.1.01	1					1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	dokumen	1	1	1.643.405.518	1.337.879.249,00	1.dana yang tersisa adalah dana kegiatan Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru baru ada di akhir tahun yakni akhir bulan oktober,dimana kendala pembayaran honor tim Penilaian Kepsek dan Guru senior tidak ada standar harga ,sehingga tidak dapat dibayarkan, standar harga yang ada sudah terkunci untuk kota jambi sementara tim penilai ada dikabupaten kota diprovinsi jambi yang kita bayar berupa transfortasi tim penilai, 2. ada nya purubahan pada sistem pembayaran perjadiin yakni dipenginapan yang tidak dapat dibayarkan /orang, 3.

																kegiatan perjadin golongan IV baik koordinasi kepusat terkait PPPK kekurangan waktu sehingga tidak maksimal	
	01.04.1.01	2					2	Penataan Pendistribusia n Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	laporan	1	1	45.288.867.870	43.592.294.612,00	tidak ada permasalahan.	Penataan Pendistribusi an Pendidik dan Tenaga Kependidika n Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
	01.05					5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dikelola oleh masyarakat yang memperoleh izin operasional	persen	100		30.670.250				
	01.05.1.01						1	Persentase penerbitan izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan masyarakat	persen	100		30.670.250	0				
	01.05.1.01	1					1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah usulan perizinan operasional sekolah yang terlayani	dokumen	1		670.250	0	SK Pejabat KPA Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggaraka n oleh Masyarakat adalah H.M.Thohir di UPTD BTKP, tidak sesuai dengan penunjukanny a yang seharusnya ditunjuk	Penunjukan Pejabat KPA sesuai denagn DPA Kegiatan Bidang masing-masing	

																adalah KPA Sekretariat (M.Syahrani), dikarenakan DPA Kegiatan tersebut ada di Sekretariat Dinas Pendidikan	
	01.05.1.01	2						2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap perizinan satuan pendidikan	dokumen	1		30.000.000	0		
	01.06					6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji bagi Guru Bahasa Indonesia	persen	100		300.000.000	250.380.250,00		
	01.06.1.01						1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			Persentase pembinaan pengembangan dan perlindungan Bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah Kab/Kota di Provinsi Jambi	persen	100	300.000.000	250.380.250,00		
	01.06.1.01	6						1	Peningkatan Apresiasi Siswa terhdp Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Prov.	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	orang	55	55	300.000.000	250.380.250,00	Sesuai dengan aturan, ada pembayaran honorarium PPTK tidak terealisasi karena hanya bisa di realisasikan 1 dari beberapa sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK	

No.			UrusanPemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
01	1		BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI		1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					108.599.387.474	97.834.326.639	TIDAK ADA MASALAH	
								Persentase balita stunting	Persen	16	18			Pemenuhan kebutuhan PMT pabrikaan bersumber dana DAK 2022 tidak bias dilaksanakan Provinsi karena dana ditarik oleh Kemenkes	Meminta pemenuhan kebutuhan PMT pabrikaanKab/Kota melalui buffer stok pusat
								Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	85	86,29			Tidak Ada Masalah	
								Persentase Bumil Kurang Energi Kronis (KEK)	Persen	15,4	11,6			Tidak Ada Masalah	
								Persentase pelayanan kesehatanbagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100			Tidak Ada Masalah	
								Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen	100	100			Tidak Ada Masalah	
								Persentase Kab/Kota yang mencapai angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC succes rate) minimal 90%	Persen	63,64	54,55			Masih adanya kab/kota yang terlambat mencatat dan melaporkan data TBC ke sistem informasi Tuberkolosis ; Pengawas menelanobat (PMO) yang belum berjalan ; Masih banyak	Perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang mewajibkanse mua data TBC di semua faskes wajib dicatat dan dilaporkan serta ada sistem reward dan punishment ; KIE pasien,

																	JKN/KIS Nasional	
									Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terakreditasi	Persen	100	90,82					Pada Tahun 2022, terjadi penundaan Akreditasi di seluruh Indonesia sesuai surat dari Kementerian Kesehatan RI	Mengusulkan kembali Survei Akreditasi bagi puskesmas yang belum dilakukan akreditasi pada tahun 2023
									Persentase rumah sakit yang terakreditasi	Persen	100	100					Tidak Ada Masalah	
									Persentase Ketersediaan Obat di Instalasi Farmasi di Provinsi (40 Item Obat)	Persen	100	100					Tidak Ada Masalah	
									Persentase SDM Kesehatan mendapat sertifikasi kompetensi	Persen	53,4	53,4					Tidak Ada Masalah	
							1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	Persen	50	57,97					Tidak Ada Masalah	
									Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	Persen	40	81,25					Tidak Ada Masalah	
							2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Labkes)	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	1	9.528.748.000	8.276.642.805			Tidak Ada Masalah	
							3	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	layanan	2	2	80.170.000	80.166.089			Tidak Ada Masalah	
							4	Pengembangan Unit	Jumlah	Unit	1	1	37.962.000	36.137.636			Tidak Ada Masalah	

							Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center							Masalah	
						5	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasyankes yang diampu (peminta konsultasi) di kabupaten/kota yang mampu melaksanakan telemedicine	Unit	1	1	84.201.712	80.323.900	Tidak Ada Masalah		
						6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1	1	126.754.000	116.556.093	Tidak Ada Masalah		
						7	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Paket Penyediaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	2	2	6.239.686.562	6.111.638.433	Tidak Ada Masalah		
						8	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota dengan cakupan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 95%	Persen	27,27	27,27	85.531.227.843	76.371.086.286	Kegiatan pelayanan antenatal dan neonatal esensial karena kurmod belum selesai ; Kgiatan blended learning pelatihan pelayanan kesehatan balita untuk piñata laksanaan balita sakit dan/ atau masalah gizi sudah dilaksanakan 2 kelas sebanyak 60 orang tidak dilanjutkan keangkatan berikutnya karena ketebatasan waktu dan jumlah	Menyampaikan ke Kementerian Kesehatan RI untuk mengeluarkan juknis di awal tahun dan modul kurmod disiapkan di awal tahun	

									Persentase Kab/Kota dengan cakupan Kunjungan Neonatal sesuai standar minimal 95%	Persen	27,27	45,45			-	Tidak Ada Masalah	
									Persentase Balita Berat Badan Kurang (BB/U)	Persen	14	3,7			-	Tidak Ada Masalah	
									Persentase Kab/Kota dengan cakupan D/S minimal 70%	Persen	27,27	27,27			-	Tidak Ada Masalah	
									Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	Persen	68	68			-	Tidak Ada Masalah	
									Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100			-	Tidak Ada Masalah	
									Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen	100	100			-	Tidak Ada Masalah	
									Persentase Kab/Kota yang mencapai Treatment Coverage TBC minimal 50% (Ditemukan dan Diobati)	Persen	27,27	0			-	Belum ada kab/kota yang mencapai target, Masih adanya kab/kota yang terlambat mencatat dan melaporkan data TBC kesistem informasi Tuberkolosis ; Pelaksanaan investigasi kontak belum dilaksanakasea ra maksimal ; Belum optimalnya penemuan kasus	Perlu adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang mewajibkan semua data TBC di semua faskes wajib dicatat dan dilaporkan serta ada sistem reward dan punishment ; Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program dalam pelaksanaan investigasi

																TBC berbasis wilayah	kontak ; perlu dilakukan pemetaan populasi berisiko berbasis wilayah dan menguatkan peran puskesmas dalam pemantauan terduga
								Persentase Pengobatan Kasus Malaria sesuai standar	Persen	95	100			-	Tidak Masalah	Ada	
								Persentase ODHA Baru yang memulai ARV	Persen	77	78			-	Masih ODHA yang belum memulai ARV karena belum memenuhi syarat		
								Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1%	Jumlah	1	1			-	Tidak Masalah	Ada	
								Persentase Kab/Kota yang 50% Puskesmas melakukan pemeriksaan dan tata laksana pneumonia melalui MTBS	Persen	55	54,55			-	Kurangnya dukungan dana untuk program ISPA/Pneumonia di Kab/Kota		Diharapkan dukungan dana baik Dinkes Provinsi maupun kab/kota dalam peningkatan pencapaian indikator program
								Persentase Kab/kota yang 80 % Puskesmasnya melaksanakan tata laksana diare sesuai standar	Persen	58	58			-	Tidak Masalah	Ada	
								Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat	Persen	88	62			-	Penemuan kasus oleh kab/kota sering terlambat		Petugas kesehatan melakukan pencarian kasus secara aktif agar kasus ditemukan secara dini (sebelum cacat)
								Persentase Kab/Kota yang	Persen	55	81,82			-	Tidak Masalah	Ada	

								mempunyai IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk								
								JumlahKab/Kota yang memiliki ≥ 20% Puskesmas rujukan Rabies Center	Jumlah	7	8		-	Tidak Ada Masalah		
								Jumlah Kab/kota yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan	Kab/Kota	5	9		-	Tidak Ada Masalah		
								Persentase kab/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert system) minimal 80%	Persentase	70	100		-	Tidak Ada Masalah		
								Persentase usia produktif ≥ 15 - 59 tahun yang beresiko PTM	Persentase	30	10,51		-	Belum semua kab/kota mampu menjangkau seluruh usia produktif untuk dilakukan screening	Perlu peran serta masyarakat secara mandiri untuk melakukan screening kesehatan secara mandiri	
								Persentase puskesmas yang melakukan pelayanan Pandu PTM	Persentase	30	30		-	Tidak Ada Masalah		
								Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang diintegrasikan sebagai Peserta JKN KIS	Jumlah	76.586	76.115			Sesuai dengan rencana kerja tahunan 2022, jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu diintegrasikan sebagai peserta JKN/KIS sebanyak 76.586 jiwa, tetapi realisasi sampai desember 2022 sebanyak 76.115 jiwa, terjadi selisih sebanyak 471 jiwa dikarenakan data peserta JKN/KIS provinsi jambi	- Diharapkan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk masyarakat miskin dan tidak mampu untuk diintegrasikan ke PBPU/PB Kabupaten/Kota dan Adanya komitmen Kabupaten/Kota untuk mencapai target UHC sehingga masyarakat banyak yang memiliki kartu JKN/KIS	

																masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditarik menjadi peserta JKN/KIS Nasional	
								Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mendapat kontribusi dari Pemerintah Provinsi	Jumlah	966.815	1.019.707					Tidak Ada Masalah	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada KondisiKejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Pada Kondisi Kejadian luar biasa Provinsi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	70	24.743	449.754.722	106.536.322			Tidak Ada Masalah	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	3	3	1.362.420.240	1.310.195.626			Tidak Ada Masalah	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan UsiaLanjut	Dokumen	3	3	111.850.000	111.270.000			Tidak Ada Masalah	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	3	832.211.200	728.254.844			Tidak Ada Masalah	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	7	7	63.800.000	59.600.000			Tidak Ada Masalah	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil PengelolaanPelayan an Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	4	656.546.300	623.806.060			Tidak Ada Masalah	
							Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan	Dokumen	2	2	380.738.000	363.036.772			Tidak Ada Masalah	

						2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	kesehatan Persentase puskesmas lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	40	56,7	2.582.399.240	2.131.848.800	Sebagian besar 9 jenis Nakes di PKM di isi oleh tenaga penugasan khusus Nusantara Sehat sehingga ketika habis masa kontrak NS (2th) maka posisi tsb kembali kosong ; Redistribusi penempatan nakes strategi yang tidak merata, menumpuk di Puskesmas perkotaan.	
								Persentase RSUD Kabupaten/Kota Kelas C yang memiliki 7 Dokter Spesialis lengkap	Persen	95	100			Tidak Ada Masalah	
								Persentase Puskesmas Tanpa Dokter	Persen	2	0,48			Tidak Ada Masalah	
								Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar	Persen	53,4	51,38			Pelatihan di Bapelkes baru dilaksanakan pada pertengahan tahun sehingga tidak semua pelatihan bias terlaksana pada tahun 2022	Jadwal pelatihan diatur diawal tahun sehingga seluruh pelatihan dapat terlaksana
						1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDMK di Fasyankes sesuai standar	Persen	40	56,7	138.800.980	126.110.550	Tidak Ada Masalah	
						2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasyankes	Orang	19.045	23.800	138.800.980	126.110.550	Tidak Ada Masalah	
						3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	Persen	78,53	78	2.443.598.260	2.005.738.250		
								Akreditasi layanan	Klasifikasi	B	B		-	Tidak Ada	

									Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi standar pelatihan							Masalah	
									Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pelatihan terstandar	Persen	100	100		-		Tidak Ada Masalah	
								Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (Bapelkes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi meningkat	Orang	450	539	2.103.161.680	1.692.073.350		Tidak Ada Masalah	
								Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	11	11	340.436.580	313.664.900		Tidak Ada Masalah	
						3		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alkes yang berizin	Persen	100	100	727.815.070	690.549.438		Tidak Ada Masalah	
						1		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pedagang besarfarmasi (PBF) yang memenuhi ketentuan perizinan	Persen	100	100	407.372.794	391.802.422		Tidak Ada Masalah	
									Persentase Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan perizinan	Persen	100	100		-		Tidak Ada Masalah	
						2		Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan tindak lanjut penerbitan perizinan	Sarana	40	40	205.862.700	192.928.985		Tidak Ada Masalah	
								Penyediaan dan pengelolaan Data PerizinanPengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah data Perizinan Pengakuan PBF Cabang yang memenuhi ketentuan perizinan	dokumen	2	2	201.510.094	198.873.437		Tidak Ada Masalah	

									berusaha dan Cabang PAK Berbasis Elektronik								
								Penerbitanizin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan perizinan	Persen	100	100	320.442.276	298.747.016	Tidak Masalah	Ada	
								Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka Penerbitan dan tindak lanjut penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	3	3	217.389.152	204.413.644	Tidak Masalah	Ada	
								Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen hasil Data Sarana UKOT Yang Sudah Menerapkan Perizinan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	1	103.053.124	94.333.372	Tidak Masalah	Ada	
						4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kabupaten/Kota Sehat	Kab/kota	6	4	353.789.712	337.279.700	Tidak Masalah	Ada		
						1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang menerapkan kebijakan germas	Persen	54,55	54,55	296.230.412	279.720.400	Tidak Masalah	Ada		
								Persentase Desa/ Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)/ODF	Persen	40	63,19			Tidak Masalah	Ada		
						2	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (Promkes +Kesling)	Jumlah dokumen hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	2	2	296.230.412	279.720.400	Tidak Masalah	Ada		
						3	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tema Pesan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program kesehatan	Jumlah	10	10	57.559.300	57.559.300	Tidak Masalah	Ada		

						4	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	57.559.300	57.559.300	Tidak Ada Masalah	
02			BIDANG KESEHATAN	RSUD RADEN MATTAR PROVINSI JAMBI	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP/PREDIKAT SAKIP				379.165.232.188	355.975.962.626,12		
						1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	6	6	373.895.000	313.477.365	Tidak ada	
						1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	136,904,000.00	119,445,417.00		
						2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	1	1	111,188,000.00	102,070,148.00		
						3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dokumen	1	1	10,000,000.00	250,000.00		
						4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1	5,000,000.00	1,352,200.00		
						5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Dokumen	1	1	2,500,000.00	700,000.00		
						6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan	Dokumen	1	1	45,834,000.00	37,576,100.00		

										hasil koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
							7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62,469,000.00	52,083,500.00			
							2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	14	14	136.506.949.227	130.258.780.433	Tidak ada		
							1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	135,760,514,227	129,604,359,433			
							2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				746,435,000	654,421,000			
							3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	200	200	814.090.000	698.877.096	Tidak ada		
							1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200	200	814.090.000	698.877.096			
							4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	75	73	2.511.042.760	2.206.469.777			
							1	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor Yang Disediakan	Orang	120	120	1,283,452,760	1,087,417,681	2 item barang discontinue		
							2	Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Item	91	91	74,340,000	69,140,750			
							3	Sub Kegiatan Barang cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Pengadaan Yang Disediakan	Kali	240	240	200,000,000	198,741,793			
							4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				953,250,000	851,169,553			

								5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Bulan	12	12	15.392.663.080	12.856.712.150		
								1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Bulan	12	10	6,698,391,080	6,192,639,130		
								2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan				8,694,272,000	6,664,073,020	Pelaksanaan Satpam dimulai bulan Februari dan Cleaning Service dimulai bulan April	Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan di awal Tahun
								6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Miliki Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	Unit	46	46	1.696.180.000	1.373.039.650	Tidak ada	
								1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Di Pelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Item	169	169	1,097,820,000	820,592,150		
								2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	21	21	96,360,000	57,450,000		
								3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Di Pelihara /Di Rehabilitasi				502,000,000	494,997,500		
								7	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Raden Mattaher	Nilai	85	85	221.870.412.121	208.268.606.155,12		
								1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Nilai	85	85	221.870.412.121	208.268.606.155,12		
								2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN DAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Raden Mattaher Jambi				49.088.156.764	45.773.988.153		
								1	Kegiatan Penyediaan	Persentase				44.521.460.916	41.782.490.408		

								Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKUM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Ketersediaan fasilitas Pelayanan, sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Raden Mattaher Jambi Yang Tersedia								
								1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah sakit beserta Sarana dan Perasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1 : 1000	Gedung	6	5	2,925,000,000.00	2,621,214,047.00	Pembangunan travo listrik tidak dapat terealisasi mengingat jangka waktu pelaksanaan yang terbatas	
								2	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Yang Dilakukan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jenis (Paket)	40	40	9,302,208,268.00	9,052,824,140.00		
								3	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan, Alat Penunjang Medik, Fasilitas Kesehatan Yang Disediakan	Unit	148	148	20,897,050,825.00	20,329,751,116.00		
								4	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, makanan dan Minum serta Fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan Dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Yang Disediakan	Jenis	1500	1500	11,397,201,823.00	9,778,701,105.00	2 item barang stok kosong di LPSE, 5 item barang dibekukan, 2 item barang melebihi pagu	
								2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instalasi Pemerintah (SAKIP)	Pasien	120.000	120.000	4.566.695.848	3.991.497.745		
								1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pasien	120.000	120.000	4.566.695.848	3.991.497.745	Kontrak mulai bulan Februari	Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan di awal Tahun
03			BIDANG KESEHATAN	RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAMBI			1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat sakip	Peringkat	B	B	62.579.110.641	59.508.870.615			
								1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen	Persen	85%	100%	202.505.995	133.088.606		
								1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen	3	3	66.152.000	33.809.239	Tidak Ada Kendala	

								2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	8	8	54.910.995	47.271.915	Tidak Kendala	Ada	
								3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Dokumen	2	2	81.440.000	52.007.452	Tidak Kendala	Ada	
								2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan	Persen	100%	100%	33.497.966.596	31.718.586.274			
								1	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode Pembayaran	Bulan	14	14	33.497.966.596	31.718.586.274	Tidak Kendala	Ada	
								3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan	Persen	95%	40%	135.505.000	91.002.119			
								1	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Orang	40	16	135.505.000	91.002.119	Tidak Kendala	Ada	
								4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan	Persen	96%	100%	1.292.798.028	1.163.253.044			
								1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan & perlengkapan kantor (set)	Set	92	92	590.564.568	530.300.634	Tidak Kendala	Ada	
								2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan & penggandaan yang diadakan	Set	33	13	296.430.480	295.248.252	Tidak Kendala	Ada	
								3	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan koordinasi dan konsultasi	Orang	30	30	406.103.280	337.704.158	Tidak Kendala	Ada	
								5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan	Persen	98%	158,33%	7.567.472.223	6.704.955.007			
								1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim per tahun (lembar)	Kg	48	90	2.991.000	832,3	Tidak Kendala	Ada	
								2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening Koran	Bulan	12	12	1.124.100.000	1.034.484.122	Tidak Kendala	Ada	
								3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Periode penyediaan jasa kebersihan kantor dan laundry	Bulan	12	12	6.440.381.223	5.669.638.585	Tidak Kendala	Ada	
								6	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	95%	72.92	1,335,768,200	1,294,041,723			
								1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	48	35	534,090,000	504,684,325	Tidak ada kendala		

								2	dinas jabatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Periode Peralatan Gedung Kantor & Peralatan Penunjang Pelayanan yang Terpelihara	Tahun	1	1	801,678,200	789,357,398	Tidak ada kendala	
							7	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	persen	82%	100%	18,547,097,599.	18,403,943,842		
								1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Tahun	1	1	15,000,000,000	18,403,943,842	Tidak ada kendala	
						2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							15.156.093.497	14.055.479.051		
						1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			Persentase Fasilitas Pelayanan, sarana & prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi	Persen	95%	140,70%	9.097.331.103	8.802.213.352		
								1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung Sarana Prasarana Pendukungnya yang dibangun	Dokumen	1	1	952,113,000	949,893,000.00	Tidak ada kendala	
								2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medic Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kedokteran / Kesehatan yang Diadakan	Unit	4	4	3,360,136,723	3,225,475,948	Tidak ada kendala	
								3	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Diadakan	Buah	27	20	148,131,387	138,827,190	Tidak ada kendala	
								4	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Seprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai RS	Buah	36	35	504,922,410	503,770,200.00	Tidak ada kendala	
								5	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat PenunjangMedikFasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Pemeriksaan Sampel Air Limbah, Air Bersih & Pemusnahan Sampah Medis	Paket	4	4	124,530,583	111,095,899	Tidak ada kendala	

							6	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Jenis Obat yang Dibutuhkan Pasien RSJ dan Bahan Medis Pakai yang Dibutuhkan Pasien RSJ	Item	57	57	4,007,497,000	3,873,151,115	Tidak ada kendala	
							2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKKM dan UKM Rujukan tingkat daerah provinsi	Persentase Layanan	Persen	95%	105,98%	6.058.762.394	5.253.265.699		
							1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Orang	150	110	2.112.853.600	1.550.825.014	Tidak ada kendala	
							2	Pengelolaan Pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan promosi kesehatan	Kali	10	13	160.550.994	91.366.000	Tidak ada kendala	
							3	Pengelolaan pelayanan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah dokumen Pengelolaan pelayanan orang dengan masala kesehatan jiwa (ODMK)	Kali	198	144	165.003.000	161.960.200	Tidak ada kendala	
							4	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Orang	177	300	3.620.354.800	3.449.114.485	Tidak ada kendala	

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
		BIDANG PEKERJAAN UMUM	DINAS PUPR		1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR								
					1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah KABUPATEN/Kota								
					1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dok	1	95,80	1.020.946.227	95,80		
					2 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dok	1	95,64	193.914.587	95,64		
					3 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahan, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahan, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Dok	5	95,65	888.139.109	95,65		
					4 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dok	8	98,46	3.831.374.815	98,46		
					5 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	titik	1	95,13	1.204.959.270	95,13		
					6 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	keg	15	94,92	37.188.983.903	94,92		
					7 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	0,43	97,31	3.323.667.619	97,31		
					8 Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	3	97,13	9.087.577.171	97,13		
					9 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	3	99,91	428.486.677	99,91		
					10 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dok	2	95,07	4.921.981.619	95,07		

							4	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Km	11	96,97	53.119.649.000	96,97		
							5	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	KM	20	97,50	138.755.028.000	97,50		
							6	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	6	97,22	20.946.893.000	97,22		
							7	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	38	98,77	17.288.510.000	98,77		
							8	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	175	98,00	54.127.900.000	98,00		
							9	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M	217	71,22	1.950.865.250	71,22		
							10	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M	451	95,19	Rp2.326.977.000	95,19		
							11	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dok	12	93,43	Rp13.211.505.000	93,43		
						3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM									
						1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota									
						1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dok	1	94,10	836.899.993	94,10			
						2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Peningkatan SPAM regional	Dok	1	99,22	3.700.000.000	99,22			
						4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL									
						1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional									
						1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	jumlah rencana,Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi yang disusun	Dok	4	47,35	499.900.000	47,35			
						2	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	kelompok masyarakat	2	0	150.000.000	0			
						3	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Jumlah Dokumen Sarana dan Prasarana Persampahan	dok	2	96,90	1.700.000.000	96,90			

						5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGMEBANGAN SUMBER AIR LIMBAH										
						1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional										
						1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategis dan Teknis Sistem Air Limbah Domestik yang Tersusun	Dok	12	93,18	750.000.000	93,18				
						6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										
						1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi										
							Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dok	5	99,79	350.000.000	99,79				
							Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah konsultasi supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Pekotaan	Dok	5	99,95	100.000.000	99,95				
							Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit	6	94,99	2.995.814.200	94,99				
						7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										
						1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi										
						1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dok	10	65,10	70.544.769.070	65,10				
						2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	Unit	1	78,23	7.832.394.500	78,23				
						3	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar	Unit	2	94,36	1.950.052.200	94,36				

							Pemerintah Provinsi	Budaya yang Dilestarikan								
						4	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Unit	10	98,57	200.084.000	98,57			
						5	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	Dok	150	0	251.108.000	0			
					8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA										
						1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
						1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Kebijakan Strategis, dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	Dok	1	100	766.177.100	100			
						2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	kawasan	1	98,47	500.000.000	98,47			
						3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	2	98,73	45.266.134.687	98,73			
					9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										
						1	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi									
						1	Penyiapan Instruktur/ Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Instruktur/ Asesor/ Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	dok	1	100	442.611.095	100			

[illegible]

								Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								
							2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	35	100	51.809.492				
							3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	100	100.274.500	100			
							4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap	1	100	77.014.080	100			
							5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	99	804.909.128	99			
							6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	100	2.172.262.700	100			
						12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										
							1	Penyelenggaraan Jalan Provinsi									
							1	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Dok	1	99	27.354.504.900	99			
						13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										
							1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi									
							1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dok	1	99	1.356.178.400	99			
							2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dok	1	99	103.599.850	99			
							3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dok	2	99	311.180.900	99			
							4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Dok	1	93	109.062.950	93			
							5	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Dok	1	99	103.082.850	99			
							6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dok	1	99	1.231.627.700	99			

No.		Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	01.01	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	DINAS PUPR		1 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN								
					1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi								
					1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Sistem Jaringan	1	95,08%	7.275.955.039	95,08%		
					2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								
					1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								
					1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dok	3	100	384.553.398	100		
					2 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi								
					1 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana		orang	50	100	75.000.000	100		
					3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN								
					1 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha								
					1 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Lap	2	100	75.000.000	100	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

							2	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Dok	1	100	833.642.750	100		
							3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	lap	1	100	400.000.000	100		
							2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								
							1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dok	2	99	315.000.000	99		
							2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit	550	100	13.902.381.428	100		
							3	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/ Dipugar	Ha	10,6	98	3.799.860.350	98		
							4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)								
							1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman								
							1	Perencanaan Penyediaan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dok	2	99	3.624.948.889	99	Perencanaan Penyediaan Penyelenggara an PSU Permukiman	
							2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	103	98	26.581.456.397	98	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi	

							6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok	1	100	53.500.850	100		
							5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DAerah								
							1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	15	96	303.247.787	96		
							6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DAerah								
							1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	98	15.040.752	98		
							2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	96	1.167.888.881	96		
							3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	100	168.850.100	100		
							4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	2	98	2.336.537.200	98		
							7	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
							1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	90	99	1.235.907.503	99		
							2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	100	309.707.500	100		
							3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	100	359.113.438	100		
							6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
							1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
							1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	89	590.766.048	89		

							2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	9	100	95.243.244	100		
							3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	9	100	99.707.470	100		
							4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	9	100	98.159.293	100		
							5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	2	97	423.625.128	97		
							6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lap	2	92	369.140.097	92		

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	5	1	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022	Jumlah Belanja					30.023.701.563	28.785.683.897		
						1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Predikat SAKIP	Indeks	BB		23.676.418.723	22.603.334.315		
						1 KegiatanPerencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan komponen SAKIP	%	100	100	196.991.850	176.086.800		
						1 Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	2	2	25.352.700	22.466.500		
						2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran	Dokumen	1	1	3.850.200	2.374.300		
						3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran perubahan (RKA)	Dokumen	1	1	3.438.300	2.244.300		
						4 Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Dokumen	1	1	4.290.400	3.685.400		
						5 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Dokumen	1	1	4.085.650	2.902.400		
						6 Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Laporan	4	4	4.467.300	3.528.400		
						7 Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	5	5	151.507.300	138.885.500		
						2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	100	21.814.794.063	20.918.921.628		
						1 Penyediaang aji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	Bln	14	14	21.657.788.563	20.768.642.828		
						2 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Periode penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Bln	12	12	142.222.200	141.542.200		
						3 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Periode pelaksanaan akuntansi SKPD	Bln	12	12	4.135.600	3.750.600		
						4 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	1	1	2.306.700	-		
						5 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	kegiatan	1	1	3.548.600	783.600		
						6 Koordinasi dan	Jumlahlaporankeuangan	laporan	2	2	2.307.700	2.307.700		

								penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	semesteran SKPD								
							7	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	laporan	1	1	2.484.700	1.894.700			
							3	Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	100	167.943.000	137.657.491			
							1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	stel	180	180	117.000.000	116.810.000			
							2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah diklat pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	paket	1	1	30.135.000	13.029.491			
							3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang - undangan	kegiatan	2	1	20.808.000	7.818.000			
							4	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	83,33	630.285.606	554.898.469			
							1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	4	4	18.898.900	18.897.680	-	-	
							2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	paket	6	6	46.674.679	46.668.675	-	-	
							3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	paket	1	-	45.738.000	-	Spesifikasi harga barang dalam DPA lebih rendah dari harga pasar	Tidak direalisasikan	
							4	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah bahan logistic kantor	paket	1	1	42.400.000	34.144.350	-	-	
							5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	paket	3	3	43.084.310	43.034.310			
							6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Periode koordinasi dan konsultasi SKPD	bln	12	12	433.489.717	412.153.454			
							5	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	%	100	100	57.424.320	57.400.000			
							1	Sub kegiatan pengadaan meubel	Jumlah pengadaan meubel	paket	2	2	30.000.000	30.000.000			
							2	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	paket	1	1	27.424.320	27.400.000			
							6	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemenuhan jasa kantor	%	100	100	304.465.484	259.031.577			
							1	Sub kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln	12	12	147.898.024	112.002.534			
							2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Periode penyediaan jasa umum kantor	bln	12	12	156.567.460	147.029.043			

								5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi PamongPraja dan SatuanPerlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Satpol PP dan linmas	kegiatan	3	3	200.000.000	189.289.200		
								6	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase jumlah layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Pergub	%	100	-	45.000.000	-	Tidak adanya warga negara yang terdampak akibat penegakan Perda dan Perkada	Tidak direalisasikan
								9	Kegiatan Penegakan peraturan daerah provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	254.283.040	247.474.050		
								1	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	Jumlah sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur	kegiatan	6	6	87.887.040	83.885.550		
								2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur	Jumlah pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang memuat sanksi	laporan	37		70.876.000	69.584.200		
								3	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur	Jumlah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang diselesaikan	pelanggara n	630		95.520.000	94.004.300		
								10	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi	Jumlahfasilitasipengembangkapasitas dan karier PPNS	%	100	100	84.039.800	78.277.150		
								1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	org	1	1	48.515.800	46.203.600		
								2	Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak peraturan daerah, dukungan pelaksanaan sidang di tempat dan penguatan secretariat bersama PPNS	Jumlah pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS penegak peraturan daerah, dukungan pelaksanaan sidang di tempat dan penguatan secretariat bersama PPNS	kegiatan	2	2	35.524.000	32.073.550		
1	5	4						3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	100	82,55	207.783.500	204.358.900	Keterbatasan SDM , sarana dan prasana damkarkab/kota sehingga luas jangkauan WMK relatifterbatas	Meningkatkan koordinasi dgn kab / kota dalam upaya peningkatan SDM, Sapras serta sosialisasi serta pelatihan aparaturn damkar

							11	Kegiatan Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran	Persentase data pemetaan daerah rawan kebakaran	%	100	100	207.783.500	204.358.900		
							1	Sub kegiatan penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan petarawan kebakaran	Jumlah data dan informasi	Dokumen	1	1	67.011.100	66.685.100		
							2	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten / kota	Jumlah pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten / kota	Kegiatan	2	2	53.066.000	50.568.600		
							3	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Kegiatan	1	1	52.706.400	52.616.200		
							4	Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan	Jumlah data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan yang disajikan	Laporan	1	1	35.000.000	34.489.000		
2	1	1					1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
							1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	272.605.591	272.496.720	Tidak Ada Kendala	
							1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pemenuhan Dokumen Perencanaan	Dokumen	9	9	272.605.591	272.496.720	Tidak Ada Kendala	
							2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	93	4.303.632.689	4.022.740.425	Tidak Ada Kendala yang tidak terserap merupakan anggaran penyediaan gaji dan Tunjangan	
							1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerimagaji dan Tunjangan ASN	Orang	100	23	3.973.688.005	3.710.895.372	Tidak Ada Kendala	
							2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	329.944.684	311.845.053	Tidak Ada Kendala	
							2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah	Persen	100	99	89.854.400	89.200.000	Tidak Ada Kendala	
							1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	72	72	69.854.400	69.300.000	Tidak Ada Kendala	

								2	Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	25	23	20.000.000	19.900.000	Tidak Ada Kendala	
								3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	100	99	609.037.696	601.681.109	Tidak Ada Kendala	
								1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi umum	Paket	1	1	34.992.132	28.847.132	Tidak Ada Kendala	
								2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	50.000.000	49.320.000	Tidak Ada Kendala	
								3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	Paket	1	1	48.000.000	47.872.500	Tidak Ada Kendala	
								4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan - Undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Dokumen	1	1	9.999.942	9.950.000	Tidak Ada Kendala	
								5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan yang tersedia	Laporan	1	1	466.045.622	465.691.477	Tidak Ada Kendala	
								4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Dokumen Perencanaan	Persen	100	100	99.998.756	99.800.000	Tidak Ada Kendala	
								1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	1	1	99.998.756	99.800.000	Tidak Ada Kendala	
								5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	99	285.105.335	281.817.795	Tidak Ada Kendala	
								1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	100	5	3.998.324	3.400.000	Tidak Ada Kendala	
								2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	12	143.119.286	141.026.272	Tidak Ada Kendala	
								3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	1	89.999.991	89.580.000	Tidak Ada Kendala	
								4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	47.987.734	47.811.523	Tidak Ada Kendala	
								6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemeliharaan Barang	Persen	100	100	991,199,991	990,309,470	Tidak Ada Kendala	

								Pemerintah Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	58	58	743.199.991	743.199.991	Tidak Ada Kendala	
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	Gedung	1	1	248.000.000	247.109.479	Tidak Ada Kendala	
								2 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Resiko Bencana	Nilai Indeks	138,14	135.32	8,563,121,795	8,275,930,825	Tidak Ada Kendala	
								1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persen	100	88	180,000,000	157,727,430	Tidak Ada Kendala	
								1 Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	180,000,000	157,727,430	Tidak Ada Kendala	
								2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan pasca bencana	Persen	100	94	2,494,716,651	2,352,171,278	Tidak Ada Kendala	
								1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	Dokumen	1	1	350,000,000	341,287,674	Tidak Ada Kendala	
								2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Warga	80	80	190,000,000	186,675,400	Tidak Ada Kendala	
								3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/kota	Dokumen	2	2	445,050,000	416,600,435	Tidak Ada Kendala	
								4 Penanganan Pasca Penanganan Bencana Provinsi	Persentasae Penanganan Pasca Bencana	Persen	100	100	352,865,396	352,858,209	Tidak Ada Kendala	
								5 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Jumlah Personil	100	90	398,256,000	346,231,784	Narasumber Pusat Hadir melalui Zoom Meeting sehingga Anggaran Tidak Bisa Digunakan dan Untuk Paket Fullboard anggaran tidak mencukup isehingga untuk seminar kit nya juga menyesuaikan	Akan di analisa kembali di Tahun Anggaran berikutnya dan dihitung secara efektif

							6	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah Aparatur	100	60	100,000,000	98,156,363	Tidak Ada Kendala	
							3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	97	3,809,010,556	3,683,839,288	Kendala Di Sub Kegiatan Respon Cepat PenangananDa rurat Bencana dan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Akan di analisa kembali di Tahun Anggaran berikutnya
							1	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPBD yang ditetapkan paling lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil dokumen Laporan Kaji Cepat	SK	2	2	2,699,999,920	2,595,234,700	Pembayaran Makan Minum Petugas Bencana akan dibayarkan sesuai dengan Jadwal Piket dan Pembayaran Perjalanan Dinas peruntukan Kebencanaan akan dibayarkan Sesuai dengan Kondisi Bencana di Lapangan sehingga Dana tidak terserap.	Untuk kedepannya Makan Minum Petugas Bencana akan dibayarkan sesuai dengan jadwal piket dan Pembayaran Perjalanan Dinas akan di maksimalkan sesuai dengan kondisi bencana di Lapangan
							2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana	Korban	430	430	635,583,368	573,563,786	Sewa Angkutan Sungai Tidak Bisa digunakan karena tidak ada bencana ditahun ini untuk pengangkutan logistic kelokasi tersebut dan Sewa Mobil Angkutan tidak ada bantuan logistic sehingga tidak bias digunakan anggarannya.	Untuk kedepannya akan di koordinasikan dengan Pusat terkait bantuan yang akan di dapat BPBD Provinsi Jambi

							3	Respon CepatBencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	SK	0	0	473,427,268	459,299,150	Tidak Ada Kendala	
							2	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	100	100	2,259,394,588	2,239,920,259	Tidak Ada Kendala	
							1	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	JumlahDokumenTatakel olakelembagaanBencana Daerah	Dokumen	1	1	2,142,800,000	2,135,063,700	Tidak Ada Kendala	
							2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jambi	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	4	4	116,594,588	104,856,559	Tidak Ada Kendala	

No.		Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	01.01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi		1 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan Kualitas Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Program Kessos	Persentase	0,10%		2.952.085.6690	2.784.379.897		
					1 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 Provinsi	Persentase	12,50%	30	74.834.026	63.461.486		
					1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang	Dokumen	25	30	74.834.026	63.461.486	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
					2 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Persentase PSKS yang terlibat dalam Pelayanan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	persentase	2,21%		2.877.251.643	2.720.918.411		
					1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Provinsi	Orang	40	35	418.589.975	401.035.926		
					2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang meningkat kapasitasnya	Orang	40	141	535.373.864	520.543.200		
					3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang meningkat kapasitasnya	Keluarga	641	569	1.295.140.766	1.263.715.872		
					4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan provinsi	Lembaga	5	12	628.147.038	535.623.413		
					2 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang di Fasilitasi	Persebtse	25%	95,23%	190.000.000	176.368.500		

								Disabilitas	penyandang disabilitas kewenangan Provinsi								
							9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Provinsi	Orang	150	30	171.171.000	125.976.900			
							10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Provinsi	Orang	150	13	122.650.000	108.495.000			
						2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	Persentase	0,11%			1.594.536.083	1.339.608.086			
						1	Pengasuhan	Jumlah anak yang yang mendapatkan layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang	25	25	2.897.156	2.655.826				
						2	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal Kewenangan Provinsi	Orang	25	25	323.947.431	246.316.331				
						3	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan provinsi	Orang	25	25	71.303.730	66.437.059				
						4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan provinsi	Orang	25	25	873.432.040	815.466.210				
						5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Provinsi	Orang	25	25	10.098.060	6.083.496				
						6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik , mental dan spiritual kewenangan Provinsi	Orang	25	25	74.705.727	60.262.309				
						7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah peserta Bimbingan aktivitas hidupsehari hari kewenangan Provinsi	Orang	25	25	63.699.290	44.168.355				
						8	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Provinsi	Orang	25	25	66.011.649	27.445.500				
						9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan Pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Provinsi	Orang	25	15	108.441.000	70.773.000				
						3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dalam panti	Persentase	0,35%			2.339.430.337	2.071.479.168			

3.3.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
01				Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pemenuhan pelayanan pendaftaran penduduk	Persentase	99%	81,25%	697.788.778	581.977.124		
	1.01					1	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase	99%	62,5%	118.694.566	84.713.731	Tidak Ada	Tidak Ada
		01				1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	jumlah dokumen kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk berdasarkan kebijakan nasional yang diterapkan	Dokumen	5	5	17.777.000	15.511.600	Tidak Ada	Tidak Ada
		02				2	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	Dokumen	11	5	100.917.566	69.202.131	Tidak Ada	Tidak Ada
						2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase pelayanan Pendaftaran penduduk dari Kabupaten/ Kota	Persentase	75%	100%	579.094.212	497.263.393	Tidak Ada	Tidak Ada
						3	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Laporan	11	11	133.872.420	92.867.767	Tidak Ada	Tidak Ada
						4	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Laporan	2	2	445.221.792	404.395.626	Tidak Ada	Tidak Ada

						2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil	Persentase	94%	59%	398.571.856	337.291.486		
1.01						3	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Persentase pemenuhan pelayanan pencatatan sipil	Persentase	94%	100%	106.583.700	75.338.129	Tidak Ada	Tidak Ada
	01					5	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di kab/kota	Laporan	11	11	106.583.700	75.338.129	Tidak Ada	Tidak Ada
						4	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Persentase Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase		18%	291.988.156	261.953.357		
						6	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil		Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis terkait pencatatan sipil	Laporan	11	2	291.988.156	261.953.357	Tidak Ada	Tidak Ada
	02					3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Persentase Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase	80%	145%	745.630.166	660.244.792		
	03					5	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase	80%	91%	140.336.100	123.413.759	Tidak Ada	Tidak Ada
						7	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	Laporan	11	11	73.123.100	64.595.740	Tidak Ada	Tidak Ada
						8	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	11	9	67.213.000	58.818.019	Tidak Ada	Tidak Ada
						6	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Persentase pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan	Persentase	80%	200%	605.294.066	536.831.033		
						9	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan	Laporan	11	11	346.804.866	316.982.429	Tidak Ada	Tidak Ada

									Informasi Administrasi Kependudukan	informasi administrasi kependudukan							
								10	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Laporan	22	55	258.489.200	219.848.604	Tidak Ada	Tidak Ada
						4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Persentase Pengelolaan Profile kependudukan	Persentase	100%	100%	28.037.747	24.490.700		
							7	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi		Jumlah dokumen penyediaan data kependudukan provinsi	Dokumen	2	2	4.019.280	2.463.000	Tidak Ada	Tidak Ada
								11	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	jumlah dokumen penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain	Dokumen	1	1	24.018.467	22.027.700	Tidak Ada	Tidak Ada

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
01			Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai AKIP		B (62,5)	B (69,95)	17.466.182.253	16.598.865.622		
	1.01					1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun	Laporan/Dokumen	17	16	701.749.400	652.641.399	Tidak Ada	Tidak Ada
		01				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	84.123.800	83.737.300	Tidak Ada	Tidak Ada
		02				2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2	3.000.000	3.000.000	Tidak Ada	Tidak Ada
						3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	5.525.600	5.525.600	Tidak Ada	Tidak Ada

							4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	7	7	7.100.000	7.100.000	Tidak Ada	Tidak Ada
							5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	1	602.000.000	553.278.499	Jadwal pelaksanaan Monev Kegiatan BioCF tidak sesuai dengan anggaran kas karena menunggu selesainya pelaksanaan survey lokasi serta akses jalan menuju desa lokasi kesulitan mendapatkan BBM	Mempercepat pembentukan dan penurunan tim untuk melaksanakan monev kegiatan BioCF setelah survey lokasi dilaksanakan
							2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Laporan/ Dokumen	34	34	13.763.697.502	13.391.175.167		
							6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	101	101	13.763.697.502	13.391.175.167	Adanya peraturan terkait kenaikan tunjangan fungsional	Pengajuan nota dinas untuk penambahan anggaran gaji dan tunjangan pada APBD Perubahan
							3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	orang	28	28	9.860.000	9.860.000		

							7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	orang	28	28	9.860.000	9.860.000	Penawaran diklat yang masuk ke DLH kebanyakan diklat teknis yang berbayar	Pergeseran anggaran untuk mengikuti diklat/bimtek berbayar
							4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase	100	100	369.560.571	355.323.594	Tidak Ada	Tidak Ada
							8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4	14.997.520	14.997.520	Tidak Ada	Tidak Ada
							9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	2	2	82.729.120	82.574.660	Tidak Ada	Tidak Ada
							10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	850	850	36.050.000	36.020.000	Tidak Ada	Tidak Ada
							11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	53.371.331	53.371.331	Tidak Ada	Tidak Ada
							12	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	8.000.000	8.000.000	Tidak Ada	Tidak Ada
							13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	26	21	174.412.600	160.360.083	Beberapa acara rakor dan konsultasi tidak dapat diikuti secara langsung	Mengikuti acara rapat atau undangan secara virtual (via zoom meeting)
							5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Unit	15	13	1.550.252.150	1.137.140.800		

								14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	10	9	362.252.150	307.844.250	Anggaran pengadaan mesin tidak sesuai untuk speksifikasi alat secara lengkap	Pengajuan anggaran pada APBDP tahun berikutnya
								14	Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	5	4	1.188.000.000	829.296.550	Pengajuan permintaan survey jaringan/ instalasi listrik untuk pembangunan falilitas pengelolaan LB3 oleh Dinas LH Provinsi Jambi terlambat ditindaklanjuti oleh PLN Kab. Bungo	Pengajuan anggaran pada APBD P tahun berikutnya
							6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	348	348	607.650.230	603.771.462		
								15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	300	300	3.000.000	3.000.000	Tidak Ada	Tidak Ada
								16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	36	259.758.030	255.955.987	Tidak Ada	Tidak Ada
								17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	344.892.200	344.815.475	Tidak Ada	Tidak Ada
							7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dipelihara	Unit	103	103	463.412.400	448.953.200		

								18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	19 (16 unit pajak dan 8 unit service)	19 (16 unit pajak dan 8 unit service)	150.204.800	149.855.400	Tidak Ada	Tidak Ada
								19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	82	82	249.910.000	235.820.000	Peralatan dan mesin yang rusak tidak dapat diperbaiki	Memasukkan peralatan dan mesin yang tidak bisa diperbaiki ke dalam kelompok aset rusak dan menganggarkan pengadaan pada tahun berikutnya
								20	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	63.297.600	63.277.800	Tidak Ada	Tidak Ada
						2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Kualitas perencanaan lingkungan hidup sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan	Persentase	100	100	735.000.000	652.702.429		
							8	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi disusun	Dokumen	2	2	735.000.000	652.702.429	Tidak Ada	Tidak Ada	
								21	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	Dokumen	2	2	735.000.000	652.702.429	Tidak Ada	Tidak Ada

						3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	IKLH = 64,09 (IKU 84,42; IKA 61,19; IKAL 77,19; IKEG 73,89)	IKLH = 70,32 (IKU 89,85; IKA 49,49; IKAL 81,67; IKEG 71,10)	1.540.000.030	1.476.163.249		
						9	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan	Titik	24	24	1.290.000.030	1.237.377.401		
						22	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		Jumlah Uji Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	12	12	230.000.030	209.986.388		
						23	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	laporan/ bulan	225 (2700 laporan/tahun)	3452 laporan/tahun	1.060.000.000	1.027.391.013		
						10	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang dipulihkan	Lokasi	9	9	250.000.000	238.785.848		

								24	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	Dokumen	2	2	40.000.000	31.922.600	Tidak tersedianya data yang diminta ke kab/kota yang memiliki lahan gambut dan lahan bekas terbakar	1.) Melaksanakan sosialisasi pengendalian karhutla terhadap masyarakat dan usaha/kegiatan. 2.) Melakukan follow up terkait ketersediaan data"
								25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Dokumen	5	5	210.000.000	206.863.248	Tidak dilakukannya reklamasi pasca tambang dari kegiatan pertambangan dan galian C	Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat dan usaha/kegiatan
						4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3	Persentase	80	100	140.000.000	137.894.348		
							11	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota yang terinventarisasi	Perusahaan	4	6	140.000.000	137.894.348		

							26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	5	5	140.000.000	137.894.348		
						5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase	45,45% (5 perusahaan)	89,47%	1.080.095.623	369.414.400		
							12	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan untuk pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Perusahaan	23	19	1.080.095.623	369.414.400		

							27	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diberikan	Dokumen	23	16	855.665.616	158.051.286	1. Penilaian dokumen Amdal dari PP 27/2012 ke PP 22/2021 masih dalam proses penyempurnaan petunjuk teknis (KPA ke Tim Uji Kelayakan) 2. Waktu penilaian Amdal tidak mencukupi karena keterlambatan pengesahan Perubahan APBD 3. KLHK belum memberikan jadwal untuk penilaian dokumen Amdal karena banyaknya permintaan pembahasan Amdal di KLHK	1. Percepatan penyesuaian dengan terbitnya regulasi yang memunculkan Perstek baru. 2. Pembuatan dokumen lingkungan (Dokumen Evaluasi LH)
							28	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas dan diangkat menjadi fungsional PPLHD	Orang	12	12	21.492.462	17.682.940		
							29	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen	23	19	150.280.895	144.638.771	Kurangnya komitmen dunia usaha terhadap izin lingkungan yang diberikan	Memberikan sanksi yang sesuai kepada kegiatan usaha yang terbukti lalai dalam mentaati izin lingkungan

								30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	9	9	52.656.650	49.041.403	Perbedaan pemahaman PPLH terhadap peraturan perundang-undangan	Penguatan kompetensi PPLH
						6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi	Persentase	100	100	2.238.000.000	1.899.556.906		
							13	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui	MHA	30	30	500.000.000	406.845.024		
								31	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	30	30	500.000.000	406.845.024		

							14	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Jumlah pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi	Kelembagaan	30	30	1.738.000.000	1.492.711.882		
								32	Pemberdayaan, Kemitraan, pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	Dokumen	7	6	1.738.000.000	1.492.711.882	Pelaksanaan workshop/sosialisasi pengantar SESA/ESMF tidak terlaksana karena penuhnya jadwal narasumber dari KLHK	workshop/ sosialisasi SESA akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan anggaran dari KLHK
						7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengelolaan pengaduan kasus lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif	Persentase	100	100	355.111.701	331.649.994			
							15	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Terlaksananya tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup	Kasus	18	24	355.111.701	331.649.994		

								33	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ ditangani	Dokumen	18	24	166.111.701	143.628.393	1.) Masyarakat belum begitu memahami SOP pengaduan lingkungan, 2.) Budaya masyarakat yang merasa khawatir akan kerahasiaan identitas pengadu.	1.) Dinas LH akan kerjasama dengan diskominfo terkait aplikasi satu pintu yang dikembangkan yaitu SP4N Lapor, serta pembuatan dan penyebaran pamflet terkait SOP dan hotline pengaduan lingkungan, 2.) Pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait pengaduan lingkungan.
								34	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penydikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penydikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	18	24	189.000.000	188.021.601	1.) Rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian kasus lingkungan tidak sesuai dengan jadwal 2.) Adanya kasus yang tidak bisa langsung ditangani ke tingkat penydikan	1.) Mempercepat persiapan bahan rapat tindak lanjut hasil pengawasan 2.) Pengajuan usulan untuk mengisi jabatan fungsional PPNS ke BKD
						8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Persentase penanganan pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi	Persentase	26	19,51	664.088.000	648.376.475		
							16	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			ton/tahun	183,738,86	35,843.83	664.088.000	648.376.475		

								35	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	8	8	664.088.000	648.376.475	Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan sampah (tahap pemilahan di sumbernya)	Sosialisasi tentang pengelolaan persampahan dan pembentukan bank sampah di setiap desa atau kecamatan dengan membentuk "Kampung Mantap"

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
09	01		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik, dan Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Tahun Berkenaan	Persentase	100	96,93	12.689.547.385	12.072.208.963		
	1.01					1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya Dok Kinerja OPD, Dok Perencanaan, Dok Evaluasi, Dok Renstra dan Renja, Koord dan Sinkronisasi Perencanaan, tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Dokumen	5	5	565.776.150	544.814.587		
	1.01	01					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	159.414.000	159.414.000	Tidak Ada	Tidak Ada
	1.01	02					2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	11	11	43.817.750	37.767.750	Tidak Ada	Tidak Ada
	1.01	04					3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Laporan	2	2	84.450.000	84.450.000	Tidak Ada	Tidak Ada

	1.01	06						4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	106.153.000	91.241.437	Tidak Ada	Tidak Ada
	1.01	07						5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	171.941.400	171.941.400	Tidak Ada	Tidak Ada
	1.02						2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	Laporan	2	2	9.897.296.577	9.315.265.115	Tidak Ada	Tidak Ada
	1.02	01						6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	66	61	9.542.896.077	8.962.377.115	Tidak Ada	Tidak Ada
	1.02	02						7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	32.438.000	32.438.000	Tidak Ada	Tidak Ada
	1.02	03						8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	220.860.000	220.660.000	Tidak Ada	Tidak Ada
	1.02	04						9	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	15.650.000	15.487.500	Tidak Ada	Tidak Ada
	1.02	05						10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	22.655.000	22.640.000	Tidak Ada	Tidak Ada
	1.02							11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2	2	5.662.500	5.662.500	Tidak Ada	Tidak Ada

								12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Laporan	12	12	22.950.000	22.905.000	Tidak Ada	Tidak Ada

									Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD							
							13		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	2	2	34.185.000	33.095.000	Tidak Ada	Tidak Ada
						3			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya SDM Aparatur yang berkualitas	Persentase	82	100	18.450.000	18.450.000	Tidak Ada	Tidak Ada
							14		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti dan Pelatihan	Orang	20	20	18.450.000	18.450.000	Tidak Ada	Tidak Ada
						4			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	72	80,9	1.607.014.258	1.601.950.469	Tidak Ada	Tidak Ada
							15		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	5.227.200	5.215.000	Tidak Ada	Tidak Ada
							16		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	16.770.000	15.905.400	Tidak Ada	Tidak Ada
							17		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	1	1	58.125.000	57.509.600	Tidak Ada	Tidak Ada
							18		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	65.652.780	65.651.830	Tidak Ada	Tidak Ada
							19		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	21.963.960	21.960.000	Tidak Ada	Tidak Ada
							20		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	1.439.275.318	1.435.708.639	Tidak Ada	Tidak Ada
						5			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	0	0	0		

								21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	0	0	0		
							6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pelayanan Penunjang Perkantoran	Persen	100	98,49	261.078.476	257.126.866		
								22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	39.100.000	39.100.000	Tidak Ada	Tidak Ada
								23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12	103.966.500	102.730.206	Tidak Ada	Tidak Ada
								24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	50.655.576	50.400.000	Tidak Ada	Tidak Ada
								25	Penyedia Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	67.356.400	64.896.660	Tidak Ada	Tidak Ada
							7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	98,43	339.931.924	334.601.926		
								26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20	20	252.060.000	246.747.762	Tidak Ada	Tidak Ada
								27	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gegung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	2	42.630.000	42.628.664	Tidak Ada	Tidak Ada
								28	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	2	18.484.924	18.470.000	Tidak Ada	Tidak Ada
								29	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	2	2	26.757.000	26.755.500	Tidak Ada	Tidak Ada

									dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi							
						2			PROGRAM SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah Desa Mandiri Pangan	Desa	31	31	2.670.510.880	2.652.997.640		
										Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persen	19,61	70,07				
							8		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan pada Berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi Jambi	Terwujudnya Kemandirian Pangan di Daerah Rentan Rawan Pangan	Unit	5	9	2.670.510.880	2.652.997.640		
							30		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	0	0	0	0		
							31		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang tersedia	Unit	5	2	482.595.000	482.045.000		
							32		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia	Unit	5	7	2.126.047.880	2.109.084.640		
							33		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	2	2	18.868.000	18.868.000		
							34		Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	2	2	43.000.000	43.000.000		
						3			PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	Skor	92,5	93,4	4.234.971.180	4.216.295.594		
										Konsumsi Beras	Kg/kap/thn	88,2	88,1				
										Konsumsi Energi	Kkal/kap/hr	2090,3	2070				
										Konsumsi Protein	Gr/kap/hr	61	60,7				
										Skor PPH ketersediaan	Skor	87,5	86,2				
										Ketersediaan energi	Kkal/kap/hr	3010	2819				
										Ketersediaan protein	Gr/kap/hr	81,5	70,25				

										Stabilitas Harga Pangan Pokok	CV<10%	CV<10%	CV<2,8%				
										Stabilitas Harga Pangan Strategis	CV<30%	CV<30%	CV<12,6%				
							9	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Lacarnya Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pokok	Kab/Kota	11	11	2.438.636.864	2.421.616.626			
							35	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	2	2	74.324.764	74.324.764			
							36	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	Laporan	1	1	1.536.255.000	1.536.243.200			
							37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	3	3	49.465.000	49.465.000			
							38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	3	3	710.594.000	693.585.562			
							39	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang dikembangkan	Unit	5	5	67.998.100	67.998.100			
							40	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	1	0	0	0			
							10	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Tercapainya Jumlah Cadangan Pangan dan Kebutuhan Pangan Lokal	Kab/Kota	11	11	1.578.326.079	1.578.176.068			
							41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan	2	2	182.566.772	182.566.772			
							42	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	1	1	44.555.000	44.405.000			
							43	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan	Laporan	2	2	50.000.100	50.000.100			

									Pemerintah Provinsi	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi							
							44		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton	61	61	1.301.204.207	1.301.204.196		
						11			Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Menetapkan Harga Acuan Pemerintah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Kab/Kota	11	11	50.000.000	50.000.000		
							45		Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	2	2	50.000.000	50.000.000		
						12			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kali	1	1	168.008.237	166.502.900		
							46		Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	1	68.000.237	66.494.900		
							47		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	3	3	50.000.000	50.000.000		
							48		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	2	2	50.008.000	50.008.000		
						4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	7,5	4,90	2.022.951.500	2.018.906.500		
										Persentase Penduduk Berisiko Rentan Rawan Pangan	Persen	7,5	12,14				
						13			Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Diketahuinya Indeks Ketahanan Pangan dan Daerah Rentan Rawan Pangan Kecamatan	11 Kab/Kota (143 Kec) (1.562 Desa)	11	11	173.175.500	172.175.500		

									dan Desa se Proviinsi Jambi							
							49	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang dimutakhirkan	Dokumen	2	2	173.175.500	172.175.500		
							14	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Terdeteksinya Secara Dini Daerah Rentan Rawan Pangan dan Menurunnya Daerah Berisiko Rentan Rawan Pangan	11 Kab/Kota (143 Kec) (1.562 Desa)	11	11	1.849.776.000	1.846.731.000		
							50	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	2	2	1.799.776.000	1.796.731.000		
							51	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan	Dokumen	3	3	50.000.000	50.000.000		
						5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	69,21	88,24	560.302.948	536.910.442		
							15	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	Persen	69,21	88,24	560.302.948	536.910.442		
							52	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Dokumen	1	1	49.999.400	49.956.500		
							53	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan	Sertifikat	22	22	60.631.598	52.834.112		

									Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Segar Asal Tumbuhan							
								54	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1	1	49.997.440	49.994.940		
								55	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1	1	49.906.520	46.366.500		
								56	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1	1	349.767.990	337.758.390		

No.	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	83,97		4.883.353.632,74	4.708.225.522		
					1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Nilai	BB		568.950.878	538.510.595		
					1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	200.546.320	172.913.541		
					2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	4	225.574.368	222.817.214		
					3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	142.830.190	142.779.840		
					2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan dan laporan barang milik daerah	Laporan	4	4	14.203.509.977	13.498.998.758		
					4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	14	14.203.509.977	13.498.998.758		
					3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang terlaksana	Persen	100	48	31.000.000	14.920.000		
					5 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	9	31.000.000	14.920.000		
					4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana	Persen	100	98	1.163.734.459	1.147.200.161		
					6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	17	17	104.121.920	104.121.920		
					7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9	9	146.071.356	146.071.356		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
						8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	9	9	347.799.000	346.120.430		
						9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	60.000.000	57.455.100		
						10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	121.617.190	121.249.690		
						11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	106	384.124.993	372.181.665		
					5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	Persen	100	100	624.616.229	562.557.650		
						12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	30	624.616.229	562.557.650		
					6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	Persen	100	100	910.204.074,74	894.788.997		
						13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	35	35	642.006.574,74	632.648.997		
						14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	268.197.500	262.140.000		
					7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	Persen	100	100	1.584.847.992	1.550.248.119		
						15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	47	47	398.550.000	376.020.400		
						16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	7	7	1.072.384.992	1.060.314.719		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dan Bangunan Lainnya							
				17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	60	60	113.913.000	113.913.000		
				2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah seni budaya Jambi yang ditetapkan	Karya	27	27	4.692.283.162	4.047.873.431	
						Jumlah apresian di Taman Budaya	Apresian	51.000	52.150			
				8	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi seni budaya	Kelompok	53	57	1.863.383.292	1.774.799.049	
				18	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Objek	1	8	1.020.718.590	1.018.235.357	
						Jumlah tampilan misi kesenian di dalam dan luar negeri	Kali	40	101			
						Jumlah partisipasi pada festival seni budaya di dalam dan luar daerah	Kegiatan	4	2			
						Jumlah Bujang dan Gadis Provinsi Jambi	Orang	30	30			
						Jumlah perwakilan peserta Gita Bahana Nusantara	Orang	4	4			
						Jumlah pelaku/organisasi seni yang difasilitasi melalui pertunjukan/festival/ event seni budaya di dalam negeri dan luar negeri	Kali	6	14			
				9	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan	Orang	50		842.664.702	756.563.692	
						Jumlah fasilitasi legalitas organisasi seni budaya	Kelompok	33	24			
						Jumlah organisasi seni budaya yang menerima bantuan pemerintah bidang kebudayaan	Kelompok	5	19			

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah publisitas seni budaya daerah Jambi melalui media cetak/media elektronik dan media lainnya	Kali	2					
					Jumlah peserta pada rembug budaya Jambi	Orang	50					
					Jumlah dokumen/peraturan/produk hukum bidang kebudayaan yang disusun/direview/direvisi	Dokumen	1	1				
				10	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi seni budaya tradisional	Karya	33	29	584.161.134	558.765.328	
				19	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Objek	3	4	584.161.134	558.765.328	
					Jumlah fasilitasi pendaftaran karya seni budaya Jambi ke HKI	Karya	22	22				
					Jumlah fasilitasi pendaftaran karya seni budaya Jambi menjadi WBTB Nasional	Karya	5	5				
					Jumlah karya seni budaya tradisi Jambi yang didokumentasikan	Karya	1	4				
					Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persen	17	17				
				11	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah fasilitasi lembaga adat	Lembaga	12	1	2.244.738.736	1.714.309.054	
				20	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah objek pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	Objek	1	1			
				21	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM, lembaga, dan pranata adat yang dibina	Orang	150	190			

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
						22	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah fasilitasi kegiatan/sarana dan prasarana terhadap Lembaga Adat Melayu Prov Jambi	Lembaga	1	1	2.244.738.736	1.714.309.054		
				3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			Jumlah sertifikasi SDM kebudayaan	Kali	2		2.481.508.020	2.475.761.185	Sumber daya baik berupa data maupun materi seni sehingga tidak bisa menghadirkan lebih banyak perwakilan dari masing-masing kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jambi.	Perlu dilakukan upaya pendataan, baik itu pelaku maupun materi seni daerah secara komperhensif dan menyeluruh
								Jumlah peningkatan pelaku seni	Orang	310	397				
				12	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah karya yang diapresiasi	Karya	130	153	2.481.508.020	2.475.761.185		
						23	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan latihan (ditingkatkan kompetensinya)	Orang	200	250	1.388.988.220	1.384.020.220		
								Jumlah fasilitasi sertifikasi SDM seni budaya	Karya	2					
						24	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	47	75	1.092.519.800	1.091.740.965		
								Jumlah temu karya	Kali	2	1			Penyelenggara Temu Karya tidak melaksanakan kegiatan	Koordinasi pelaksanaan kegiatan sebaiknya dilaksanakan di awal-awal penganggaran
								Jumlah fasilitasi karya apresiasi	Karya	10	12				
								Jumlah karya hasil pengolahan	Karya	12	12				
								Jumlah dokumentasi seni	Karya	130	153				
								Jumlah festival/lomba seni	Kali	4	3			Festival/ lomba di bidang seni rupa	Meningkatkan koordinasi

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
														tidak dilaksanakan karena memang tidak dianggarkan	dengan komunitas seni rupa yang ada di Provinsi Jambi
								Jumlah pameran seni rupa	Kegiatan	2	2				
				4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Jumlah cagar budaya teregristrasi	Buah	100	7	495.000.102	486.275.693		
					13	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi	Objek	2	2	495.000.102	486.275.693		
					25	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya		Jumlah ODCB yang didaftarkan	Objek	50	355				
								Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Objek	100	2				
					26	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	Objek	1	7				
								Jumlah penetapan cagar budaya peringkat provinsi	Kali	2	2				
					27	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		Jumlah TACB tingkat Provinsi Jambi	Orang	7	20				
					28	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas tenaga Pelestari Cagar Budaya		Jumlah tenaga pelestari cagar budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	30	36				
								Jumlah sertifikasi cagar budaya	Orang	30	36				
								Jumlah peserta pada workshop/sosialisasi cagar budaya	Orang	30	25				
								Jumlah fasilitasi komunitas cagar budaya	Komunitas	1	1				
								Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah	Persen	17	17				
				5	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			Jumlah SDM dan lembaga sejarah yang terlibat dalam kegiatan	Orang	80					
					14	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		Jumlah karya tulis lokal	Karya Tulis	1	1				

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
						29	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah SDM dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	Orang	40					
								Jumlah penulisan sejarah lokal	Karya Tulis	1	1				
								Jumlah fasilitas komunitas sejarah	Komunitas	1	1				
								Jumlah peserta seminar/ lokakarya/ sosialisasi permuseuman	Orang	40	1				
					6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase peningkatan kunjungan ke museum	Persen	16	16,3	4.136.057.309	4.050.571.660		
					15	Pengelolaan Museum Provinsi		Jumlah kunjungan museum	Orang	37.500	37.874	4.136.057.309	4.050.571.660		
						30	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan	Koleksi	560	560	1.211.665.165	1.191.578.350	Terdapat beberapa koleksi yang membutuhkan peralatan khusus, seperti koleksi filologi dan tekstil. Namun sampai sekarang belum ada. Hasil survey yang dilaksanakan mendapati beberapa koleksi yang ada di masyarakat dalam kondisi memprihatinkan yang seharusnya bisa diselamatkan oleh museum namun dikarenakan tiadanya anggaran untuk pengadaan koleksi maka hal tersebut belum dapat dilaksanakan.	Pengadaan koleksi guna penyelamatan koleksi di masyarakat melalui APBD.
								Jumlah museum yang dikelola	Museum	3	3				

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
						31	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah SDM permuseuman yang ditingkatkan mutu dan kapasitasnya	Orang	12	26	389.463.000	375.575.396	Kurangnya koordinasi antar lembaga, terutama lembaga pendidikan. Tidak memiliki website khusus museum.	Peningkatan kapasitas/ kompetensi pegawai melalui pelatihan-pelatihan.
						32	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum	Orang	37.500	37.874	2056.465.456	2.005.461.112	Kurangnya koordinasi antar lembaga terutama lembaga pendidikan. Tidak memiliki website khusus museum.	Meningkatkan kerjasama antar lembaga terutama dengan lembaga pendidikan. Membuka akses publikasi seluas-luasnya melalui media sosial dan membuat web khusus museum . Meningkatkan mutu SDM dan sarana yang diperlukan.
						33	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia	Museum	3	3	478.463.688	477.956.802	Sarana dan prasarana yang ada sudah berusia tua dan sudah banyak yang tidak layak pakai (rusak)	Dibutuhkan pengadaan dan peremajaan sarana dan prasarana yang tidak layak pakai dan sudah tua tersebut, seperti salah satu contoh CCTV.

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	UU Nomor 43 Tahun 2007	1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,3	63,75	1.785.193.611	1.696.035.633		
					Indeks pembangunan literasi masyarakat		21,5	21,58				
				1 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan perpustakaan provinsi	Persen	100	100	1.547.562.611	1.458.430.776		
				1 Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah buku yang telah diperbaiki	Eks	500	500	110.857.107	96.041.391		
				2 Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengadaan perabot penunjang layanan perpustakaan	Jenis	8	8	516.480.000	514.450.000		
				3 Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan SMA sederajat yang telah dibina	Perpustakaan	22	22	45.554.000	45.554.000		
				4 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang dibina	Orang	50	50	123.184.600	122.720.321		
				5 Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	180.000	180.000	279.040.795	273.030.260		
				6 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi buku	Eks	1.150	1.150	472.446.109	406.634.804		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
					2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase tingkat gemar membaca Provinsi Jambi	Persen	39	63,75	237.631.000	237.604.857		
					7	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi	Kegiatan	4	4	124.491.000	124.491.000		
					8	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat	Perpustakaan	30	30	113.140.000	113.113.857		
		Kearsipan		1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Predikat Pengawasan Kearsipan	Predikat	B	BB	465.593.873	451.383.102		
					1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase pengelolaan arsip dinamis	Persen	100	100	27.661.773	27.515.273		
					1	Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan arsip dinamis	OPD	4	5	27.661.773	27.515.273		
					2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase peningkatan pengelolaan arsip statis	Persen	100	100	171.274.000	166.511.043		
					2	Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah daftar pencarian arsip	DPA	2	2	171.274.000	166.511.043		
					3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase arsip yang dikelola dalam SIKN dan JIKN	Persen	100	100	266.658.100	257.356.786		
					3	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah informasi, akses dan layanan kearsipan nasional tingkat provinsi	Berkas	25	166	48.112.500	45.404.173		
					4	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi peraturan penyelenggaraan kearsipan	Instansi	10	43	218.535.600	211.952.613		

No.				Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1				2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
			Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			Nilai AKIP	Nilai	B+ (93.74)	B+ (93.74)	11.805.232.637	11.066.552.461		
						1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Dokumen	8	8		177.622.800	174.052.000		
							1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	8	8		177.622.800	174.052.000		
						2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Periode penyediaan administrasi keuangan	Bulan	12	12		9.921.517.496	9.470.021.661		
						3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12		9.570.600.946	9.119.105.111		
						4	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Periode pembayaran administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	12		350.916.550	350.916.550		
						3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai dan PTT DPMP TSP Provinsi Jambi	Orang	50	50		45.032.000	29.809.903		
						5	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	Orang	50	50		45.032.000	29.809.903	Penawaran diklat yang masuk ke DPM-PTSP kebanyakan diklat teknis yang berbayar	Pergeseran anggaran untuk mengikuti diklat/bimtek berbayar
						4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Periode penyediaan administrasi umum	Item dan Bulan	Jumlah	Jumlah		734.839.085	697.147.007		
						6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik	Item	8	8		45.049.360	44.982.000		
						7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Item	10	10		324.650.156	323.567.000		
						8	Penyediaan bahan logistik kantor		Periode penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	12		51.300.000	49.755.200		
						9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah persediaan barang cetak dan penggandaan	Item	5	5		26.214.360	26.172.000		
						10	Penyelenggaraan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Periode penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12		287.625.209	252.670.807		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah	Bulan	12	12	556.849.256	331.005.590		
				11	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Periode pembayaran rekening listrik, telpon, PDAM dan Internet	Bulan	12	12	419.520.245	194.794.690		
				12	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Periode pelayanan umum kebersihan kantor	Bulan	12	12	137.329.011	136.210.900		
				6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Periode pemeliharaan barang milik daerah	Unit	Jumlah	Jumlah	369.372.000	364.516.300		
				13	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan	Unit	24	24	307.172.000	302.316.300		
				14	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan	Unit	24	24	62.200.000	62.200.000	Peralatan dan mesin yang rusak tidak dapat diperbaiki	Memasukkan peralatan dan mesin yang tidak bisa diperbaiki ke dalam kelompok aset rusak dan menganggarkan pengadaaan pada tahun berikutnya
				2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Persen	99,17	99,17	226.999.934	225.109.922		
				7	Pembuatan peta potensi Investasi Provinsi	Jumlah realisasi investasi	Kab/Kota	5	5	226.999.934	225.109.922		
				15	Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah provinsi	Tersusunnya rencana umum penanaman modal beserta pembinaannya	Kab/Kota	5	5	226.999.934	225.109.922		
				3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan rencana investasi	Persen	10	10	441.999.962	388.944.688		
				8	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Jumlah rencana investasi	Triliun Rupiah	7,78	7,78	441.999.962	388.944.688		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
						16	Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal kewenangan provinsi	Jumlah pelaksanaan pameran dan temu bisnis	Nilai	6	6	441.999.962	388.944.688		
				4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	90	250.000.000	238.785.848		
					9	Penanaman modal yang menurut ketentuan Peraturan Perundang Undangan menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	Izin dan Orang	560	687	803.123.650	745.785.774		
						17	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	Izin	560	463	245.000.000	232.332.205		
						18	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan	Izin	100	114	332.000.000	296.629.500		
						19	Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah pelayanan dan pengaduan yang diterima	Orang	110	110	226.123.650	216.824.069		
				5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Persentase peningkatan pelaku usaha yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan melaporkan LKPM	Persen	3	86	140.000.000	137.894.348		
					10	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi		Jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan melaporkan LKPM	Pelaku Usaha	4	6	787.261.000	694.805.956		

No.				Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1				2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
								20	Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pelaku usaha yang dibina	Pelaku Usaha	300	231	531.384.444	484.552.694		
								21	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan PMDN yang diawasi	PMDN	40	51	255.876.556	210.253.262		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas P3AP2 Provinsi Jambi		1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (Ipg)	Indeks	91,5	89,5	905.319.192	881.504.745		
					1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi tentang perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	11	11	124.333.392	118.502.466		
					1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi tentang perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Kab/Kota	11	11	124.333.392	118.502.466		
					2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Orang	50	50	279.877.000	269.826.789		
					2	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan	Orang	50	50	279.877.000	269.826.789		
					3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	20	20	501.108.800	493.175.490		
					3	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Orang	20	20	501.108.800	493.175.490		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
								Kewenangan Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya							
				2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan Tppo Mendapatkan Pelayanan Komprehensif	Persen	100	100	493.909.600	487.702.209		
					4	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	77.810.000	74.784.204	
						4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	77.810.000	74.784.204
					5	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	339.293.600	337.060.547	
						5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	339.293.600	337.060.547
					6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			Jumlah peserta	Orang	80	80	76.806.000	75.857.458	
						6	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (DAK)			Jumlah peserta	Orang	80	80	76.806.000	75.857.458
				3	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK							191.479.000	182.916.750		
					7	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	85.000.000	78.914.550	

No.				Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1				2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
								7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	85.000.000	78.914.550		
								8	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	106.479.000	104.002.200		
						4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			Indeks Perlindungan Anak	Indeks	67	66,26	458.515.000	360.812.384		
							8	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	83.521.000	82.459.003		
								9	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	83.521.000	82.459.003		
								10	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan Provinsi (DAK)	Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	112.950.000	97.673.136		
							9	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	262.044.000	180.680.245		
								11	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi (DAK)	Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	262.044.000	180.680.245		
				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		1	PROGRAM PENATAAN DESA			Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	90	90	93.500.000	87.891.400		
							1	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat									

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
						1	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah kab/kota	Kab/Kota	10	10	93.500.000	87.891.400		
				2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			Persentase Peningkatan Pelaksanaan Kerja Sama Desa	Persen	50	50	200.000.000	198.892.244		
					2	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi									
						2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kab/kota	Kab/Kota	10	10	200.000.000	198.892.244		
				3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			Persentase Fasilitas Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	100	100	807.522.539	795.602.832		
					3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa									
						3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Orang	400	400	466.841.439	460.951.136		
						4	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba desa dan Kelurahan	Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	200.692.900	196.030.123		
						5	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah kab/kota	Kab/Kota	10	10	139.988.200	138.621.573		
				4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	40	40	2.092.959.840	2.022.765.486		
					4	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum adat yang sama berada di Lintas daerah Kabupaten/Kota									
						6	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat	Jumlah kab/kota	Kab/Kota	10	10	210.433.100	203.939.912		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
							Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
						7	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan asli Daerah	Jumlah kab/kota	Kab/Kota	10	10	200.000.000	199.518.084	
						8	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemerintah Desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Desa	10	10	181.787.540	178.931.770	
						9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga yang difasilitasi	Orang	100	100	1.500.739.200	1.440.375.720	
			Pengendalian Penduduk dan KB		1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Laju Pertumbuhan Penduduk	Indeks	1,7	1,34	250.000.000	248.659.000	
					1	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas penduduk								
						1	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah kab/kota	Kab/Kota	11	11	250.000.000	248.659.000	
					2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi	Persen	65,44	63,85	120.737.280	117.540.806	
					2	Pengembangan Desain Program, Pengelplaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan								
						2	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konsling kesehatan Reproduksi dan Hak-hak reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga	Modul	1	1	120.737.280	117.540.806	

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
								Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
					3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA (Ibangga)	Persen	60,82	55,01	136.023.880	133.923.960	
					3	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah provinsi dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga									
						3	Peningkatan Kapasitas mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pengelolaan Program Katahanan Keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang ditingkatkan kapasitasnya	Ormas	11	11	136.023.880	133.923.960

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai saki	Indeks	70,01	65,88	21.108.478.356	21.005.600.271		
				1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran PD				281.674.082	280.437.945		
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah data perencanaan serta rapat koordinasi perencanaan	Laporan	7	7	96.384.582	95.934.582		
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang diselesaikan	Laporan	4	4	185.289.500	184.503.363		
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				18.875.483.320	18.875.328.514		
				3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	12	18.875.483.320	18.875.328.514		
				3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan				51.184.800	46.404.000		
				4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan	Persen	100	100	51.184.800	46.404.000		
				4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				367.230.735	340.277.760		
				5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Persen	100	100	23.343.000	23.343.000		
				6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan dan perlengkapan kantor	Persen	100	100	61.980.660	57.165.078		
				7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan logistik kantor	Persen	100	100	19.565.000	14.933.950		
				8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang digandakan dan dicetak	Persen	100	100	47.480.250	32.274.750		
				9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat dan konsultasi	Persen	100	100	214.861.825	212.560.982		

No.	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
					5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan peralatan dan mesin kantor				133.266.344	123.466.200		
					10	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor	Persen	100	100	36.944.960	36.741.000		
					11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pelayanan Umum kantor	Persen	100	100	43.779.600	36.369.600		
					12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya perawatan kendaraan Dinas kantor	Persen	100	100	52.541.784	50.355.600		
					6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapn Kantor				796.192.120	775.696.252		
					13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persen	100	100	334.260.520	313.961.852		
					14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan jasa kebersihan kantor	Persen	100	100	461.931.600	461.734.400		
					7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				603.446.955	563.989.600		
					15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan kantor yang dirawat	Persen	100	100	259.592.600	229.094.010		
					16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Persen	100	100	20.594.100	20.594.100		
					17	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	Persen	100	100	323.260.255	314.301.490		
				2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja	Persen	100	100	72.260.750	69.585.559		
					8	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen RTKD yang tersusun				72.260.750	69.585.559		
					18	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah dokumen RTKD yang tersusun	Persen	100	100	72.260.750	69.585.559		
				3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase peningkatan tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat	Persen	5,10	8,95	7.218.999.821	6.366.442.287		
					9	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan yang terlaksana				7.218.999.821	6.366.442.287		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
						19	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pendidikan dan pelatihan keterampilan yang terlaksana	Paket	85	85	7.018.999.839	6.190.432.005		
						20	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah koordinasi lintas lembaga yang dilaksanakan	Persen	100	100	99.999.982	97.999.982		
					10		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengukuran kompetensi dan produktifitas				100.000.000	78.010.300		
						21	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pengukuran kompetensi dan produktifitas	Paket	3	3	100.000.000	78.010.300		
				4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			Persentase peningkatan tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan		30,10	30,83	717.641.481	657.834.249		
					11		Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan antar kerja				524.641.631	474.144.942		
						22	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah pelayanan antar kerja	Orang	20	20	99.945.870	78.531.275		
						23	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah layanan antar kerja	Orang	12	12	199.999.961	173.514.426		
						24	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah layanan antar kerja	Orang	56	56	224.695.800	222.099.241		
					12		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah calon PMI/PMI yang terlindungi				192.999.850	183.689.307		
						25	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah calon PMI/PMI yang terlindungi	Orang	160	160	192.999.850	183.689.307		
				5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			Persentase penurunan pelanggaran norma - norma tenaga kerja	Persen	9,6	12,4	419.999.895	116.182.065		
					13		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penurunan pelanggaran norma-norma tenaga kerja				199.999.895	23.226.500		
						26	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah kerjasama tripartit	Kegiatan	3	3	199.999.895	23.226.500		

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
						14	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		Jumlah UMP				220.000.000	92.955.565		
							27	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah UMP	Kegiatan	4	4	220.000.000	92.955.565		
					6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			Persentase penurunan pelanggaran norma - norma tenaga kerja	Persen	76	88,35	582.999.790	482.041.449		
						15	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		Terlaksananya Pengawas Ketenagakerjaan				582.999.790	482.041.449		
							28	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan	Perusahaan	84	84	225.000.000	181.743.400		
							29	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Turunannya pelanggaran kasus norma ketenagakerjaan	Kasus	3	3	125.000.000	93.292.000		
							30	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah layanan kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan	Orang	20	20	232.999.790	207.006.049		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PREDIKAT AKIP PERANGKAT DAERAH	INDEKS NILAI	71 BB	69, 73 (B) Nilai sakip 2021 NILAI IKM =88,9				
				1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Persentase	100 %	100%				
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah data perencanaan serta rapat koordinasi perencanaan	Dokumen	2	2	55.000.000	55.000.000		
				2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang diselesaikan	Laporan	4	4	72.191.450	69.872.340		
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Persentase	100	100				
				3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	70	70	8.257.973.244	8.029.328.630		
				3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang Disiplin dan Mengikuti Pelatihan	Persentase	100	100				
				4	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	60	60	24.700.000	22.750.000		
				4	Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100				
				5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	10	10	29.137.090	29.137.090		
				6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	4	222.857.804	227.807.400		
				7	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	400	400	35.400.000	35.282.000		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
						8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	Paket	15	15	80.080.559	80.056.000		
						9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Paket	2	2	589.502.079	589.455.134		
					5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100				
						10	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Item	4	4	176.793.660	175.561.000		
					6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100	100				
						11	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	112.304.000	112.300.000		
						12	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	1	1	257.739.502	250.447.417		
						13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	1	2.861.000	2.861.000		
						14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	328.680.000	328.680.000		
					7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase	100 %	100 %				
						15	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	30 unit	30 unit	516.840.000	503.906.126		
						16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	70 unit	70 unit	116.404.000	115.736.048		
						17	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3 unit	3 unit	501.117.800	498.627.190		
				2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			JUMLAH PENYELESAIAN PERIZINAN USAHA SIMPAN PINJAM	KSP/USP	20	10	125.000.000	120.343.160		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				8	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyelesaian Perizinan Usaha Simpan Pinjam	KSP/USP	20	10				
				18	Fasilitasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang memiliki usaha simpan pinjam	KSP/USP	20	10	125.000.000	120.343.160		
				3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI BERKINERJA BAIK	PERSENTASE	40 %	66,66%	300.000.000			
				9	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dinilai Kepatuhan	Unit/usaha	20	20				
				19	Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundangan-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	Unit/usaha	20	20	150.000.000	146.660.337		
				10	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	Unit/usaha	21	21				
				20	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Unit/usaha	21	21	150.000.000	136.849.500		
				4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI SEHAT DAN CUKUP SEHAT	PERSENTASE	40 %	70%	210.000.000	202.654.500		
				11	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Dinilai Kesehatannya	Koperasi	20	20				

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
						21	Penilaian permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian permodalan kualitas aktiva produktif manajemen, efisiensi, likuiditas, jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit/usaha	20	20	210.000.000	202.654.500		
				5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			PERSENTASE SDM APARATUR, PELAKU USAHA KOPERASI DAN UKM YANG MENDAPATKAN PELATIHAN SETIAP TAHUN	PERSENTASE	5 %	3,45%	2.718.155.947	2.584.268.126		
					12	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase SDM Aparatur, Pelaku Usaha Koperasi dan UKM yang Mendapatkan Pelatihan Setiap Tahun	PERSENTASE	5 %	3,45%				
						22	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	500	452	2.718.155.947	2.584.268.126		
				6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME USAHA KOPERASI	PERSENTASE	2,69 %	(-0,64%)				
					13	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	PERSENTASE	2,69 %	(-0,64%)				
						23	Perluasan akses pasar, akses pembiayaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Jumlah unit usaha yang memenuhi standarisasi dan restrukturisasi usaha				229.999.930	221.816.414		
						24	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha				475.000.000	440.413.206		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
				7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)			PERSENTASE PENINGKATAN UMKM BINAAN	PERSENTASE	19,6 %	22,49%				
				14	Pemberdayaan Usaha Kecil yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			Persentase Peningkatan UMKM Binaan	PERSENTASE	19,6 %	22,49%				
				25	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan			Jumlah unit usaha UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan			,	21.166.930.860	20.469.884.320	pada sub kegiatan ini terdapat kegiatan program dumsake berupa pemberian bantuan modal kerja bagi UMKM sebanyak Rp. 20 milyar kendala / permasalahan yang ditemui untuk pelaksanaan program ini antara lain : a)Belum ada Pedum/ Pergub terkait Program Dumsake (Regulasi)	Menyusun Juknis Dumsake dengan didampingi oleh Tim Ahli Gubernur terkait Program Dumsake dan pendampingan oleh Inspektorat
														(b) Nomor rekening yang pas untuk bantuan uang yang diserahkan ke masyarakat sewaktu menyusun RKA 2022 belum tersedia sehingga harus dilakukan perubahan pada APBD-P dari Rekening Bansos ke Rekening Belanja uang dan /atau yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat (sesuai arahan dari Inspektorat) baru muncul pada KEPMENDAGRI no 050-5889 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutahiran Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah s	Mengajukan nota dinas ke TAPD untuk melakukan perubahan anggaran terkait perubahan rekening dan perubahan nama calon penerima
														(c) terjadi perubahan nama calon penerima bantuan ,	Melakukan rapat dengan instansi terkait untuk

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
														semula hanya 62 orang dari pelaku usaha yang terdaftar di DTKS (Data terpadu Keluarga Sejahtera menjadi 542 orang , sehingga perlu dilakukan revisi	minta masukan terkait regulasi dan pencairan antara lain, Kejaksaan, BPKP, Biro Huum, Bappeda,BPKPD, Inspektorat dan Kepolisian
															Terus melakukan koordinasi dengan Tim TAPD mulai dari penyusunan anggaran, penyusunan Juknis dan pencairan
					8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			PERSENTASE PERTUMBUHAN OMSET USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BINAAN	Persen	0,07				
						15	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan	Persen	0,07%	(- 684,4%)			
						26	Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desan dan teknologi		Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi produksi dan pengolahan pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Jumlah UMKM	128 UMKM		349.999.620	310.981.760	

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Komunikasi dan Informatika	Dinas Kominfo Provinsi Jambi		1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan kualitas komunikasi dan informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah daerah	Persen	75%					
				1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Persentase	100 %	100%				
				1	Sub Kegiatan Pengelolaan Media komunikasi Publik	Meningkatnya Kualitas pengelolaan Informasi dan media informasi	11 Kab/Kota se Provinsi Jambi	70%	75%	14,525,861,361	14,493,885,236	SDM yang kurang berkompeten pada bidangnya	perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis kepada para aparatur yang secara langsung bertugas dalam pengelolaan informasi publik dan media
				2	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara berkelanjutan di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	34 Perangkat Daerah(PD)di lingkup Provinsi Jambi	75%	100%	340,388,580	317,611,143	SDM yang kurang berkompeten pada bidangnya	perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis kepada para aparatur yang secara langsung bertugas dalam pengelolaan informasi publik dan media
				3	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Monitoring Opini dan aspirasi publik pada media cetak dan online	Media	70 Media	175 media Online dan 4 Media cetak	394.341.700	379.559.698	Belum Adanya Aplikasi terkait pemantauan media, Selama	Tahun depan akan dibuat Aplikasi Terkait

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
														Ini masih bekerjasama dengan pihak ke III.	Pemantauan Media
						4	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.	Jumlah SDM pengelola Informasi dan Pengelolaan penunjang operasional media informasi Provinsi Jambi yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	60 Orang	120 Orang	226.421.778	252.628.750	Volume jumlah pelaksanaan kegiatan yang seharusnya ditambah.	Diharapkan Adanya Penambahan anggaran.
						5	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kab/Kota Se Provinsi Jambi.	Kelompok KIM	Jumlah KIM di 11 Kab/Kota SE provinsi Jambi	Baru 6 Kab/Kota Provinsi Jambi yang membentuk KIM, dengan total KIM berjumlah 44 KIM dari 6 Kab/Kota	496.644.350	459.804.299	Volume jumlah pelaksanaan kegiatan yang seharusnya ditambah.	Diharapkan Adanya Penambahan anggaran.
								Jumlah Tim Bakohumas Tingkat Provinsi Jambi dan Tim Bakohumas Tingkat Kab/Kota se Provinsi Jambi.	Tim	1 tim Bakohumas Tingkat Provinsi dan 11 tim Bakohumas Kab/Kota	1 tim Bakohumas Tingkat Provinsi dan 11 Kab/Kota masih dalam proses			Volume jumlah pelaksanaan kegiatan yang seharusnya ditambah.	Diharapkan Adanya Penambahan anggaran.
								Fasilitasi Penganggaran dan Penyerahan Dana Hibah Uang kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi	Lembaga	Fasitasi 1 lembaga 1 tahun KPID Jambi	Fasitasi 1 lembaga 1 tahun KPID Jambi dari dana hibah Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1.400.000.000	1.400.000.000	Volume jumlah pelaksanaan kegiatan yang seharusnya ditambah.	Diharapkan Adanya Penambahan anggaran.
					2	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Indeks SPBE	Indeks	2,7	2,19				
					2	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah									
					6	Sub Kegiatan Penatalaksanaan		Persentasi pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain	Persentase	100%	87.77	168,502,214	147,892,854	Penganggaran menggunakan	

No.	Urusan Pemerintahan			Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2			3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
									dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi						SIPD yang mencantumkan item-item yang sudah baku, sehingga terjadi silfa, lebih kurang Rp.20,609,360	
							3		Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								
								7	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jml Dokumen	2	2	230,924,000	210,184,262		
								8	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jml aplikasi	5	5	662,403,621	636,364,369		
								9	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Desa yang terlayani jaringan telekomunikasi	Desa	285	129	5,150,000,000	5,150,000,000	terbatasnya anggaran yang didapat untuk menjalankan program internet desa	akan dilaksanakan bertahap setiap tahun
										Jumlah titik interkoneksi jaringan e-gov yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	OPD	46	46	176,000,000	173,128,600		
										Tersedianya ruang server dan peralatan server pemerintah Provinsi Jambi	Persentase	100	80				
								10	Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief information Officer (GCIO)	Persentase perangkat daerah yang dapat menggunakan sistem aplikasi dan terkoneksi ke jaringan internet Pemerintah	Percentase	70%	70%	14,767,867,855			
										Pembangunan Command Center / Jambi Analitic Data Center	Paket	1	1				
										Meningkatnya Penyelenggaraan e-Government dalam	Persentase	45%	45%				

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
							penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi							
	STATISTIK			2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persentase	50%	50%				
					4	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik								
					11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bandwidth yang tersedia di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	Mbps	950 Mbps	1,5 GB	2,988,001,050	2,964,000,000		
					12	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan Data Statistik Sektoral Provinsi Jambi		50%	50%	320,694,417	294,199,847		
					13	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang terintegrasi	Tersedianya Data Statistik Sektoral Provinsi Jambi		50%	50%	181,915,825	159,700,787		
					14	Memangun Metadata Statistik Sektoral	Tersedianya Data Statistik Sektoral Provinsi Jambi		50%	50%	326,886,327	304,662,049		
	PERSANDIAN			3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Indeks kematangan, keamanan informasi	Indeks	1	1				
					5	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi								
					15	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamann Informasi dan Entitas Jaring Komunikasi Sandi	Dokumen	1	1	107,239,028	104,778,012	Dokumen yang tersedia saat ini masih berbentuk Draft	Akan dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum

No.				Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1				2	3	4	5				6		7	8	9	10	11	12	13
									16	Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah ASN yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi	Orang	2	2	309,784,800	308,524,462			
											Jumlah Dokumen Audit Keamanan Informasi di Pemerintah Provinsi	Dokumen	1	1					
											Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Workshop/Bimtek terkait Keamanan Informasi	Kegiatan	3	3					
									17	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi Provinsi dan Kab/Kota	Dokumen	12	12	141,618,836	136,371,706			
											Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi	OPD	5	5					
											Jumlah Sistem Elektronik yang telah memanfaatkan Sertifikat Elektronik	Sistem Elektronik	1	1					
									18	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Elektronik yang nilai resikonya renda/kategori aman	Aplikasi/Web	10	10	551,176,648	502,762,703			
											Persentase Insiden Keamanan Informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan (10 insiden/tahun)	Persentase (%)	20	20					
											Persentase Pemenuhan infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, dan/atau fasilitas teknologi keamanan informasi (35 unit)	Persentase (%)	57	57					

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Indeks	B	B				
				1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah								
				1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Peserta Rakor Program kepemudaan dan keolahragaan	Orang	60	60	417.363.982	352.038.121		
						Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	3	3				
				2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	5	249.700.608	201.226.577		
				2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
				3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Periode Penyediaan Gaji ASN	Bulan	14	14	11.438.030.239	11.030.671.018		
				4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Orang	45	45	209.224.800	209.213.699		
				3	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
				5	Pemyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	2	2	35.071.320	35.063.768		
				4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK	Set	5	5	136.176.156	136.136.677		
				5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peserta Rapat/Tamu/DII	Orang	300	300	25.140.000	24.945.650		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
						6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	7	7	83.577.000	75.510.952		
						7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar	1728	1728	5.384.112	5.352.500		
						8	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	OH	504	364	445.656.167	322.197.274		
					4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
						9	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Jenis Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	Jenis	5	5	354.097.834	352.846.500		
					5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
						10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode Pembayaran Rekening	Bulan	12	12	947.514.000	839.642.462		
						11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode Pemakaian Jasa Kebersihan Kantor	Bulan	12	12	1.011.586.200	994.883.265		
					6	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
						12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit	48	48	534.299.600	506.912.231		
						13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	Unit	83	83	81.953.032	81.428.600		
						14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	Gedung	14	14	604.265.600	602.334.402	Secara umum Provinsi Jambi belum memiliki fasilitas bangunan tempat olahraga yang berstandar nasional, akan tetapi kita tetap berusaha berupaya dengan fasilitas yang ada kita juga mampu menciptakan bibit-bibit muda atlet yang mampu berprestasi nasional	Kiranya pemerintah Provinsi Jambi mampu menyerap dana pusat untuk memenuhi hal dimaksud dengan cara perbanyak melaksanakan iven nasional uang

No.	Urusan Pemerintahan			Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan			
1	2			3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13			
																	merupakan agenda pemerintah pusat			
						2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Peningkatan Kapasitas Pemuda	Persentase								
							7	Penyadaran,Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi												
								15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi				Jumlah Pemuda yang Difasilitasi Dalam Pengembangan Kepemudaan	Orang	100	100	417.040.664	381.811.086	Tidak semua Kab/Kota Menganggarkan seleksi pemuda pelopor di tingkat Kab/Kota. Sehingga tidak semua kab/kota mengirimkan utusan calon pemuda pelopor tingkat provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
								16	Koordinasi, Sinkronisasi Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi				Jumlah Kelompok Pemuda Terbaik yang Difasilitasi Melalui KWP Dalam Rangka Pemberdayaan Pemuda	Kelompok	20	10	356.502.184	347.105.657	Bantuan dalam bentuk uang di alihkan ke kegiatan pelatihan selama 3 hari dikarenakan tidak adanya pengajuan proposal dari kelompok wirausaha	Kedepannya diharapkan kegiatan wirausaha diberikan dalam bentuk pelatihan, magang dan pendampingan
								17	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				Jumlah Kader Terbaik yang Difasilitasi Melalui Program KPN Dalam Rangka Pengembangan Pemuda	Orang	3	0				
													Jumlah Pemuda Kader Terbaik yang Difasilitasi Melalui Program PPAN Dalam Rangka Pengembangan Pemuda	Orang	3	1	339.954.248	317.746.580	Berdasarkan surat dari Kemenpora No. B/PP.04.01/3.7.13.DII-6/2022 bahwa permintaan peserta hanya di kirim 1 orang.	akan menyesuaikan permintaan dari kemenpora
								18	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				Jumlah Peserta Paskibraka yang Memenuhi Kriteria, Berkualitas dan Memiliki Kompetensi	Orang	56	56	2.682.523.712	2.618.600.540		
							8	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi												

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
						19	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	Jumlah Peserta Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan	Orang	80	40	362.950.250	328.878.483	Berkurangnya target di karenakan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan pelatihan sebanyak 80 orang	untuk memenuhi target tersebut di tahun 2023 akan di tambah jumlah target dan anggarannya .
				3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			Peningkatan prestasi olahraga	Medali	13					
					9		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi								
						20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah Cabor yang Diberikan Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga	Cabor	5	5	5.737.853.827	5.657.594.354		
								Jumlah Sarana dan Prasarana Baru yang Dibangun	Unit	4					
								Jumlah Venue yang direhab	Unit	3	6				
					10		Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga								
						21	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan kejuaraan Multievent dan Single event Tingkat Provinsi	Event	5	9	7.483.530.920	6.491.798.411		
						22	Penyelenggaran Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan paralimpik Pelajar Provinsi	Persentase Atlet Paralimpik Pelajar Provinsi yang Lolos ke Tingkat nasional	%	0.8	0.18	1.031.035.700	977.401.620		
								Persentase Atlet Paralimpik Provinsi yang Lolos ke Tingkat Nasional	%	0.8					
						23	Partisipasi dan keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Jumlah Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan kejuaraan Multi Event dan Single Event	Event	10	26	8.222.654.507	7.697.265.048		
								Peringkat pada Event Nasional PON	Peringkat	Peringkat 13	Peringkat 18				

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	12	13
								Peringkat pada Event Nasional PEPARNAS	Peringkat	Peringkat 20	Peringkat 12				
								Peringkat pada Event Nasional PEPARPENAS	Peringkat	Peringkat 12	13				
								Peringkat pada Event Nasional POPNAS	Peringkat	Peringkat 9	10				
								Peringkat pada Event PORWIL	Peringkat	Peringkat 8					
								Peringkat pada EventPRA POPNAS	Peringkat	Peringkat 5	Peringkat 4				
					11	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional									
					24	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi PPLP dalam Rangka Pembinaan Olahraga	Orang	50	46	2.541.602.082	2.369.109.127	
				4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Peningkatan Kapasitas Pemuda	Persentase	100	100				
					12	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi									
					25	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi			Jumlah Peserta Pembinaan Kepramukaan	Orang	60	60	2.700.000.000	2.700.000.000	

No.	Ururan Pemerintahan			Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2			3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
				Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1. Nilai SAKIP 2. IKM	Indeks	1. 70 2. 75	1. 68,47 2. 80	11.864.230.197	10.956.525.119		
						1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan	persen	100	100	8.808.402.182	8.259.335.482		
							1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	12	12	8.530.148.027	8.012.058.182	
							2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bulan	12	12	278.254.155	247.277.300	
						2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian	persen	100	100	264.156.020	206.513.313		
							3	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	6	6	205.926.020	204.643.313	
							4	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jenis	1	1	58.230.000	1.870.000	
						3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	persen	100	100	1.247.172.144	1.146.732.746		
							5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	bulan	12	12	30.901.115	30.800.500	
							6	Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	bulan	12	12	152.680.505	149.414.343	
							7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	200.030.000	199.818.500	
							8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	26.983.259	22.940.000	
							9	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Fasilitas kunjungan tamu	bulan	12	12	87.930.400	86.950.300	
							10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	bulan	12	12	748.646.865	656.809.103	

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
							SKPD							
					4		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	866.257.399	757.233.400	
						11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		bulan	12	0	106.090.000	-	
						12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	paket	2	2	301.470.400	300.740.400	
						13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	bulan	12	12	402.326.999	400.123.000	
						14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bulan	12	12	56.370.000	56.370.000	
					5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	404.680.612	354.609.878	
						15	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat	bulan	12	12	18.860.000	18.860.000	
						16	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	253.815.800	204.037.915	
						17	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	bulan	12	12	132.004.812	131.711.963	
					6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	100	273.561.840	232.100.300	
						18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bulan	12	12	273.561.840	272.261.840	
					2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		1. Rasio penyediaan fasilitas keselamatan transportasi	1. Persen	1. 60	1. 100	16.180.820.672	14.129.853.250	
									2. Indeks	2. 0,55	2. 0,55			

No.	Ururan Pemerintahan			Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2			3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
									2. Kinerja lalulintas							
						7	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	persen	100	100	1.783.854.075	1.754.992.198		
						19	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	dokumen	7	7	1.523.382.875	1.512.728.198		
						20	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	bulan	12	12	260.471.200	242.264.000		
						8	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi		Jumlah penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi	paket	30	30	4.467.836.586	4.411.772.648		
						21	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi		Jumlah Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi	paket	28	28	4.163.606.576	4.120.122.648		
						22	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan		Jumlah Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	paket	2	2	304.230.010	291.650.000		
						9	Pengelolaan terminal penumpang type B		Persentase pengelolaan terminal penumpang type B	persen	100	100	2.320.046.400	2.162.238.900		
						23	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	-	-	-	-	-		
						24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal type B	paket	12	12	1.346.221.000	1.304.292.000		
						25	Peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal type B		Jumlah Peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal type B	bulan	12	12	973.825.400	857.946.900		
						10	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi		Persentase Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi	persen	100	100	452.619.200	437.995.759		
						26	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu		Jumlah Penataan Manajemen dan	bulan	12	12	364.022.400	350.263.000		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
							Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi						
						27	Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi	Jumlah Pengawasan dan pengendalian efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Provinsi	bulan	12	12	88.596.800	87.732.759	
						11	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	persen	100	100	47.597.000	44.898.000	
						28	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	bulan	12	12	47.597.000	44.898.000	
						12	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	persen	100	100	207.087.146	206.666.054	
						29	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang ikut lomba pelajar pelopor	Kabupaten/Kota	12	12	207.087.146	206.666.054	
						13	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Persentase Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	persen	100	100	4.872.692.200	3.091.096.193	
						30	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah koridor yang dilintasi oleh BRT	koridor	2	2	2.130.804.000	1.108.300.193	
						31	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan	Jumlah Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum	bulan	12	12	2.741.888.200	1.982.796.000	

No.	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
							orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi							
					14	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengemudi ojek yang diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	orang	5.000	5.000	1.771.500.000	1.771.382.100		
					32	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengemudi ojek yang diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	orang	5.000	5.000	1.771.500.000	1.771.382.100		
					15	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Persentase Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	persen	100	100	257.588.065	248.811.398		
					33	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	bulan	12	12	91.279.000	88.299.000		
					34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	bulan	12	12	166.309.065	160.512.663		
					3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio konektivitas pelayanan angkutan	persen	53,9	53,9	2.126.240.742	2.033.365.984		
					16	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan	Jumlah dokumen perencanaan teknis Pelabuhan Pengumpan	dokumen	8	8	1.135.160.000	1.125.911.030		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
						(DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Regional							
						35 Pelaksanaan Penyusunan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah dokumen perencanaan teknis Pelabuhan Pengumpan Regional	dokumen	8	8	1.135.160.000	1.125.911.030		
					17	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	persen	100	100	823.350.724	779.898.920		
						36 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan prasarana dan fasilitas Pelabuhan Sungai dan danau	paket	6	6	429.334.384	418.019.704		
						37 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalm 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	bulan	12	12	394.016.340	361.879.216		
					18	Penerbitan izin usaha untuk badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin	bulan	12	12	167.730.018	127.556.034		
						38 Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin untuk badan usaha pelabuhan pengumpan regional	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin	bulan	12	12	167.730.018	127.556.034		
TOTAL														

3.3.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

No.		Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
3	3.25	KEALUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI											
	3.25.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		NILAI SAKIP	INDEKS	BB	BB	22.380.514.688	21.644.963.891		
	3.25.01.1.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan dan kinerja dinas kelautan dan perikanan	Laporan	2	2	429.625.000	417.729.696		
	3.25.01.1.01			01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah pertemuan rakortek dan pertemuan sinkronisasi penyusunan DAK	Kali	1	1	129.625.000	124.263.943		
	3.25.01.1.01			06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	10	10	100.000.000	97.271.340		
	3.25.01.1.01			07	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen statistik kelautan dan perikanan	Dokumen	1	1	200.000.000	196.194.413		
	3.25.01.1.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terkelolanya administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	19.865.068.807	19.264.286.676		
	3.25.01.1.02			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun	1	1	19.462.278.907	18.933.586.776		
	3.25.01.1.02			02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah tenaga administrasi keuangan	Orang	22	22	402.789.900	330.699.900		
	3.25.01.1.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Tersusunnya laporan keuangan	%	100	100	104.000.000	96.318.811		
	3.25.01.1.03			06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan keuangan yang disusun	Dokumen	2	2	104.000.000	96.318.811		

3.25.01.1.0 5						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya disiplin ASN Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahun	1	1	217.894.956	165.927.036		
3.25.01.1.05	0 9					Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kali	1	1	105.375.000	58.707.080		
3.25.01.1.05	1 0					Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pertemuan penatausahaan kepegawaian	Kali	1	1	112.519.956	107.219.956		
3.25.01.1.0 6						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan	Tahun	1	1	462.926.410	459.390.357		
3.25.01.1.06	0 1					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Tahun	1	1	10.000.000	10.000.000		
3.25.01.1.06	0 2					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tahun	1	1	97.928.826	97.912.150		
3.25.01.1.06	0 4					Penyediaan bahan logistik kantor		Tahun	1	1	20.000.000	20.000.000		
3.25.01.1.06	0 5					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Tahun	1	1	40.000.000	39.988.000		
3.25.01.1.06	0 6					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Tahun	1	1	4.998.000	4.998.000		
3.25.01.1.06	0 9					Penyelenggaraan rapat koordinasi konsultasi SKPD		Tahun	1	1	289.999.584	289.541.207		
3.25.01.1.0 7						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan	Bulan	12	12	52.869.863	48.941.963		
3.25.01.1.07	0 6					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan pengadaan kantor	Tahun	1	1	29.997.863	26.079.463		
3.25.01.1.07	1 0					Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor	Tahun	1	1	22.872.000	22.862.500		
3.25.01.1.0 8						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan	Bulan	12	12	520.245.573	513.976.349		

3.25.01.1.08	0 1						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar masuk	Tahun	1	1	5.000.000	5.000.000		
3.25.01.1.08	0 2						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Tahun	1	1	515.245.573	508.976.349		
3.25.01.1.09							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terkelolanya administrasi umum pada dinas kelautan dan perikanan	Bulan	12	12	727.884.079	678.393.003		
3.25.01.1.09	0 1						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Tahun	1	1	450.597.360	420.996.163		
3.25.01.1.09	0 2						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Tahun	1	1	120.214.283	104.096.640		
3.25.01.1.09	0 9						Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab dan terpelihara	Tahun	1	1	132.073.196	131.993.000		
3.25.01.1.09	1 0						Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Tahun	1	1	24.999.240	21.307.200		
3.25.02							PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PENGELOLAAN RUANG LAUT OLEH MASYARAKAT PESISIR MAUPUN PENGUSAHA SESUAI PERDA RZWP3K	IZIN	2	0	1.346.000.000	1.318.637.478	Dengan adanya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja & PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) harus mendapat persetujuan Menteri Kelautan dan	Menunggu penetapan Perda RTRW beserta turunannya

[illegible]

[illegible]

3.25.04.1.0 5							Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Meningkatnya pengelolaan pembudidayaan ikan	Jenis	9	9	2.667.766.100	2.656.692.762		
3.25.04.1.05	0 2						Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di laut	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di laut	Paket	1	1	100.000.000	99.900.000		
3.25.04.1.05	0 3						Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Jenis	7	7	2.028.766.100	2.019.603.202		
3.25.04.1.05	0 5						Penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota	Jenis	6	6	306.000.000	305.416.510		
3.25.04.1.05	0 6						Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di laut dan lintas daerah kabupaten/kota	Terselenggaranya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan di kawasan budidaya ikan	Kawasan	4	4	233.000.000	231.773.050		
3.25.05							PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase unit usaha perikanan yang taat terhadap peraturan perundang- undangan	%	60	84	534.000.000	532.447.400		
								Persentase penanganan	%	50	50				

3.25.05.1.0 1						Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase pelaku usaha perikanan yang terawasi	%	62	30	416.000.000	414.448.200	Menyesuaikan ketersediaan anggaran	Dilakukan penambahan anggaran kegiatan tersebut
3.25.05.1.01	0 2					Pengawasan usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	Jumlah hari operasional pengawasan usaha perikanan tangkap	Hari	18	9	416.000.000	414.448.200	Anggaran operasional kapal hanya cukup untuk 9 hari operasi	Penambahan anggaran untuk operasional kapal pengawas
3.25.05.1.0 2						Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya persentase pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan umum daratan	%	72	51	118.000.000	117.999.200	Karena sesuai anggaran yang tersedia	Penambahan anggaran
3.25.05.1.02	0 1					Pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya	Jumlah wilayah pengawasan perikanan tangkap	Kab/Kota	10	10	118.000.000	117.999.200		
3.25.06						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PENINGKATAN ANGKA KONSUMSI IKAN	Kg/Kapita/Tahun	40,60	40,20	1.750.965.872	1.593.990.435	Masih kurangnya alokasi anggaran	Perlu alokasi anggaran
3.25.06.1.0 1						Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbitnya jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Izin	4	4	842.000.000	801.692.786		
3.25.06.1.01	0 1				./	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Tersusunnya SOP	Dokumen	1	1	50.000.000	47.789.900		
3.25.06.1.01	0 3					Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah	Tersedianya data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Dokumen	3	3	792.000.000	753.902.886		

								kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi											
	3.25.06.1.0 2							Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala menengah dan Besar	Jumlah UPI yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Kelompok	3	3	372.000.000	370.753.249					
	3.25.06.1.02	0 1						Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Terlaksananya bimbingan dan penerapan persyaratan usaha pengolahan dan pemasaran	Kali	3	3	222.000.000	221.826.550					
	3.25.06.1.02	0 2						Pelaksanaan bimbingan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing	Jumlah produk hasil perikanan yang teruji	Produk	25	25	150.000.000	148.926.699					
	3.25.06.1.0 3							Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dokumen	1	1	536.965.872	421.544.400					
	3.25.06.1.03	0 2						Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan	Kelompok	5	12	496.965.872	385.281.400					
	3.25.06.1.03	0 3						Pengembangan sistem informasi manajemen logistik ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Tersedianya informasi manajemen logistik ikan	Dokumen	1	1	40.000.000	36.263.000					

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
01	3.26.02		Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan tata kelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan	Persen	15		3.696.378.156	2.481.968.047,00		
	3.26.02	1.01					Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah daerah tujuan wisata unggulan provinsi	DTW	3		2.224.000.000	1.072.569.441,00		
	3.26.02	1.01.01					Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah lokasi daya tarik wisata unggulan provinsi	Lokasi	4	4	150.000.000	136.779.245,00		
								Jumlah DTW unggulan provinsi yang ditetapkan	DTW	3					
								Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,19					
								Jumlah pergerakan wisatawan nusantara	Pergerakan	950.000	1.834.204				
								Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Kunjungan	2.000	3.093				
	3.26.02	1.01.03					Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah lokasi DTW unggulan provinsi sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	Lokasi	1	1	2.074.000.000	935.790.196,00	Keterbatasan waktu untuk pengadaan kapal wisata	Untuk tahun selanjutnya dianggarkan pada APBD murni
								Jumlah peserta pelatihan SDM objek wisata provinsi	Peserta	30					
	3.26.02	1.02					Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kawasan	Dokumen	2		772.245.050	725.824.293,00		

									Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi							
	3.26.0 2	1.04.0 4							Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Laporan	1	1	408.746.620	408.634.620,00		
	3.26.0 3						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	Persen	15	17,5	3.117.164.004	2.950.707.392,00			
	3.26.0 3	1.01						Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah pelaksanaan event	Event	6	7	3.117.164.004	2.950.707.392,00			
	3.26.0 3	1.01.0 1							Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Dokumen	6	4	2.102.440.600	2.000.047.946,00		
	3.26.0 3	1.01.0 2							Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Laporan	1	1				
										Jumlah keikutsertaan pada event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.	Kegiatan	2	1				
	3.26.0 3	1.01.0 3							Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi , Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	Dokumen	3	1	814.722.544	754.477.509,00	Kurangnya supporting staf khusus data analisis Belum Ada Supporting Anggaran Untuk Pengadaan Perangkat IT & Digital	Menggu nakan jasa tenaga ahli PSPPKD Unja Merekru t jasa tenaga ahli

																Kurangnya dukungan perangkat IT & SDM promosi	desain grafis & jasa tenaga ahli IT
									Jumlah peserta pelatihan sistem informasi pariwisata.	Peserta	25	50				Kegiatan terlaksana dengan baik namun tidak dilanjutkan untuk tahun berikutnya	Perlu danya komitmen Penganggaran untuk memperluas dan Mengembangkan Talenta Digital
	3.26.0 3	1.01.0 4						Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Dokumen	1	3	200.000.860	196.181.937,00			
									Jumlah stakeholders kerjasama pemasaran pariwisata	Stakeholder	43	25					
	3.26.0 4							PROGRAM PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor ekonomi kreatif	Persen	16		479.245.200	466.432.590,00			
	3.26.0 4	1.01						Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah dokumen pendukung kota kreatif	Dokumen	1						
	3.26.0 4	1.01.0 5						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah data pelaku kreatif pemula	Dokumen	1	1					
	3.26.0 4	1.02						Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen analisa ekonomi kreatif	Dokumen	1		479.245.200	466.432.590,00			
	3.26.0 4	1.02.0 3						Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah pendanaan dan pembiayaan bagi	Laporan	1	1	370.904.855	364.336.700,00			

										pelaku ekonomi kreatif							
										Jumlah fasilitasi dan suporting pemasaran ekonomi kreatif	Kegiatan	2	6				
										Nilai tambah ekonomi kreatif	Juta Rp	350	275				
	3.26.04	1.02.07							Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen hasil pencatatan atas hak cipta dan hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku ekraf, serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekraf	Dokumen	1		108.340.345	102.095.890,00	Banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memenuhi persyaratan pendaftaran HKI	Perlu bimtek lanjutan HKI terkait upaya memenuhi persyaratan pendaftaran HKI
										Jumlah pelaku ekraf yang mengikuti sosialisasi HKI	Orang	80	40				
										Jumlah fasilitasi HKI di bidang ekraf	Produk	10					
	3.26.05								PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persen	16		69.401.800,00	58.437.000,00	Dari 17 sub sektor ekonomi kreatif, baru dapat mengakomodir beberapa sektor karena keterbatasan akses dan data pelaku ekraf yang belum memadai	Akan dilakukan evaluasi dan koordinasi dengan kab/kota untuk update data pelaku ekraf
	3.26.05	1.02							Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah fasilitasi manajemen pemasaran bagi pelaku ekraf	Orang	80		69.401.800,00	58.437.000,00		
	3.26.05	1.02.01							Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	Orang	35	40	69.401.800,00	58.437.000,00		

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
3	3.27		Bidang Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1											
	3.27.01										B	B	40.232.688.970	37.758.703.709		
	3.27.01.1.01															
	3.27.01.1.01	01														
	3.27.01.1.01	06														
	3.27.01.1.01	07														
	3.27.01.1.02															
	3.27.01.1.02	01														
	3.27.01.1.02	02														
	3.27.01.1.05															
	3.27.01.1.05	04														

3.27.01.1.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Kantor	Laporan Rutinitas	Laporan	7	7	278.872.966	278.772.717		
3.27.01.1.06	01					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	12	12	9.988.350	9.988.100		
3.27.01.1.06	02					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	12	12	31.345.516	31.322.717		
3.27.01.1.06	04					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	12	12	33.369.000	33.355.000		
3.27.01.1.06	.05					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Paket	12	12	19.999.970	19.998.000		
3.27.01.1.06	.06					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Dokumen	3	3	2.532.530	2.520.000		
3.27.01.1.06	.09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	12	12	181.637.600	181.588.900		
3.27.01.1.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis		4	4	942.711.767	942.110.150		
3.27.01.1.08	02					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Laporan	12	12	777.604.400	777.147.400		
3.27.01.1.08	03					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Laporan	12	12	27.140.000	27.130.000		
3.27.01.1.08	04					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Laporan	12	12	137.967.367	137.832.750		
3.27.01.1.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Unit		319	319	1.778.161.000	1.766.254.163		
3.27.01.1.09	01					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara		Unit	309	309	736.661.000	735.059.163		

							Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan Dibayarkan Pajaknya										
3.27.01.1.09	09						Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lain	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	1.041.500.000	1.031.195.000					
3.27.02							Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan Sarana pertanian	%	13	13	12.200.133.178	11.636.450.529					
3.27.02.1.01							Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan Koordinasi, Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (	Kab/Kota	11	11	4.553.773.372	4.479.330.771					
3.27.02.1.01	01						Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	11	11	4.517.773.372	4.443.330.771					
3.27.02.1.01	02						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	1	1	36.000.000	36.000.000					
3.27.02.1.02							Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terawasinya dan tersertifikasinya benih tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu	Kab/Kota	11	11	1.551.000.000	1.506.627.725					
3.27.02.1.02	01						Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	100	100	316.000.000	312.863.184					
3.27.02.1.02	02						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	4	4	769.000.000	768.510.731					
3.27.02.1.02	03						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	7	7	466.000.000	425.253.810					
3.27.02.1.04							Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan	Meningkatnya ketersediaan benih/bibit ternak dan benih/bibit tanaman	Kab/Kota	11	11	5.575.352.728	5.156.415.013					

							Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	pakan ternak yang bermutu								
3.27.02.1.04	01						Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	8	8	4.137.556.728	3.759.190.137			
3.27.02.1.04	02						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan	3	3	1.384.237.800	1.343.819.876			
3.27.02.1.04	03						Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang	11	11	53.558.200	53.405.000			
3.27.02.1.07							Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Kab/Kota	11	11	520.007.078	494.077.020			
3.27.02.1.07	01						Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	6.000	6.000	86.000.000	78.649.200			
3.27.02.1.07	02						Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton	500	500	434.007.078	415.427.820			

[illegible]

3.27.04.1.02	01						Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan	11	11	178.307.012	145.835.800		
3.27.04.1.03							Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terperiksanya sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Sampel	2.000	2.000	423.000.000	421.369.128		
3.27.04.1.03	03						Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	1	423.000.000	421.369.128		
3.27.05							Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase areal yang terkendali dan penanggulangan bencana OPT	%	26	26	706.992.922	691.674.950		
3.27.051.01							Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Terkendalinya wilayah yang terdampak serangan OPT, Perubahan Iklim (DPI), Kebakaran lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kab/Kota	11	11	706.992.922	691.674.950		
3.27.051.01	01						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	100	100	616.892.222	603.218.850		
3.27.051.01	03						Pencegahan Penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	3	3	90.100.700	88.456.100		
3.27.06							Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	10	10	24.999.910	24.772.260		
3.27.06.1.01							Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Kabupaten/Kota	Laporan	3	3	24.999.910	24.772.260		

3.27.06.1.01	03						Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	3	3	24.999.910	24.772.260		
3.27.07							Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian Yang Aktif	%	2	2	305.442.962	301.694.016		
3.27.07.1.02							Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya penerapan penyuluhan pertanian di Kab/Kota	Kab/Kota	11	11	220.059.250	217.626.318		
3.27.07.1.02	01						Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	5	5	80.059.250	79.028.448		
3.27.07.1.02	02						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	10	10	140.000.000	138.597.870		
3.27.07.1.03							Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi petani/peternak	Kab/Kota	11	11	85.383.712	84.067.698		
3.27.07.1.03	04						Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	10	10	85.383.712	84.067.698		

No.		Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
3	3.27.01	Bidang Pertanian	Dinas Perkebunan		1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Nilai AKIP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	1) Nilai 2) Nilai	1) 67,00 2) 83,65	1) 67,74 2) 84,65	17.292.271.604	16.457.783.895		
	3.27.01.1.01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengangara	Dokumen	9	9	360.112.000	359.761.400		
	3.27.01.1.01.1					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	83.396.500	83.396.500		
	3.27.01.1.01.2					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	86.750.500	86.364.900		
	3.27.01.1.02.					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan dan Akuntansi Keuangan	Laporan	5	5	426.324.100	418.314.117		
	3.27.01.1.02.1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	108/14	90/14	387.608.000	379.846.417		
	3.27.01.1.02.2					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adm Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	38.716.100	38.467.700		
	3.27.01.1.03					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian	Laporan	3	3	18.000.000	10.500.000		
	3.27.01.1.03.1					Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tupoksi	Jumlah Pegawai yang ikut Diklat	Orang	20	10	18.000.000	10.500.000		
	3.27.01.1.04					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Kegiatan Rutinitas Kantor	Laporan	7	7	541.897.195	540.900.468		
	3.27.01.1.04.1					Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket	6	6	67.427.000	67.427.000		
	3.27.01.1.04.2					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	48	48	100.730.040	100.049.764		
	3.27.01.1.04.3					Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga.	Paket	24	24	63.795.134	63.795.134		

3.27.01.1.04.4							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Paket	2	2	10.958.450	10.818.000		
3.27.01.1.04.5							Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	298.986.571	298.810.570		
3.27.01.1.04.6							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	181.637.600	181.588.900		
3.27.01.1.05							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jenis	2	2	860.205.627	842.111.145		
3.27.01.1.05.1							Pengadaan kendaraan dinas operasional/lapangan	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas (Roda 2) operasional/lapangan	Unit	6	4	604.177.200	593.684.750		
3.27.01.1.05.2							Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Paket	6	6	76.881.852	76.837.250		
3.27.01.1.05.3							Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	20	20	179.146.575	171.589.145		
3.27.01.1.06							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Unit	88	61	1.064.993.760	1.052.043.419		
3.27.01.1.06.1							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya Jasa dan Jumlah pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit	61	61	474.353.760	462.012.596		
3.27.01.1.06.2							Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	27	2	87.270.000	87.217.623		
3.27.01.1.06.3							Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehab gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	8	8	503.370.000,00	502.813.200,00		
3.27.01.1.07							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis	4	4	343.788.480,00	329.080.826,00		
3.27.01.1.07.1							Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	21.480.000,00	21.480.000,00		
3.27.01.1.07.2							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	1	1	322.308.480,00	307.600.826,00		
3.27.02							PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan Sarana Pertanian yang sesuai	Persen	14,5	14	12.067.348.704,00	10.520.554.745,00		

[illegible]

[illegible]

	3.27.06.2.01							Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	4	98,43	401.196.522,00	367.624.838,00		

No.		Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijaka n	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalah an	Upaya Mengatasi Permasalah an
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
3	3.27	Bidang Kehutanan	Dinas Kehutanan		1	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
	3.28.03.1.02		Dinas Kehutanan			RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK)								
	3.28.03.1.02.01					Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan yang tersusun	Unit	3 KPHP/L	3 KPHP	260.000.000	247.981.059	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah dokumen RKTP (Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi) Jambi yang disusun	Dokumen	1 Dokumen RKTP	1 Dokumen RKTP				
	3.28.03.1.03		Dinas Kehutanan			PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG								
	3.28.03.1.03.08					Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Penyusunan Rancangan Teknis Penanaman Tanaman Endemik di KEE Pantai Cemara	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.522.126.600	1.128.098.500	Pengadaan bibit pinang yang seharusnya belanja bahan bibit tanaman pada aplikasi SIPD di kelompokan kedalam belanja modal	Rasionalisas i alokasi belanja bibit pinang belum sesuai dengan ketentuan
	3.28.03.1.03.04					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi	Unit	11 UPTD KPHP	11 KPHP	116.103.000	90.583.441	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	

3.28.03.1.04			Dinas Kehutanan			PELAKSANAAN REHABILITASI DILUAR KAWASAN HUTAN NEGARA									
3.28.03.1.05. 1						Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pengamanan Hutan	Kali	10 Kali	46,42%	467.284.600	202.263.760	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)		
							Jumlah Patroli Rutin dan Patroli Masyarakat	Kali	14 Kali	14 Kali					
							Jumlah Pemantauan Berkala oleh Pemegang Izin untuk Pelaksanaan HCV dan HCS	Kali	1 Kali	1 Kali					
							Jumlah Operasi Gabungan dan Penegakkan Hukum								
							Jumlah pengamanan peredaran hasil hutan								
3.28.03.1.05. 2						Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Sosialisasi Hutan dan Perlindungan Hutan	kali	6 Kali	6 Kali	180.675.000	164.934.800	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)		
							Pendidikan/Kesadaran tentang Studi Program	kali	3 Kali	3 Kali					
							Sosialisasi KEE	kali	1 Kali	1 Kali					
3.28.03.1.05. 4						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kegiatan Perlibatan Masyarakat, Dunia Usaha dan Pemerintah dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Unit	11 UPTD KPHP	11 UPTD KPHP	2.251.235.2 00	445.442.691	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)		
3.28.03.1.06			Dinas Kehutanan			PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)									
3.28.03.1.06. 04						Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah unit management PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang memiliki hak akses SI- RPBBPHH	UPTD KPHP	4 UPTD KPHP	4 UPTD KPHP	52.691.000	39.909.992	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)		
3.28.03.1.07			Dinas Kehutanan			PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI <6000 M3/TAHUN									

3.28.03.1.07.02						Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH (Kayu dan/Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kabupaten	4 Kabupaten	4 Kabupaten	240.588.000	212.142.720	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
						PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA								
3.28.04.1.02			Dinas Kehutanan			PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI DAN / ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN (AppSeEn,MdiSx)I CITES (CONVERSION ON INTERNATIONAL)								
3.28.04.1.02.01						Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah pelaksanaan monitoring pengawasan dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar	UPTD	11 UPTD	11 UPTD	108.318.200	93.966.075		
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
3.28.05.1.01			Dinas Kehutanan			PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
3.28.05.1.01.01						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Sekolah lapang agroforestri melibatkan petani, fasilitator, PPL	Kali	5 Kali	5 Kali	245.625.000	256.685.000	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah Sekolah lapang agroforestri melibatkan petani, fasilitator, PPL							
							Jumlah fasilitasi penguatan kelembagaan dan SDM bagi petani hutan							
							Jumlah penghargaan yang diraih oleh penyuluh kehutanan dan binaannya							
							Seri Pelatihan Staff untuk GIS, Resolusi Konflik, Rencana Bisnis, SOP, Petugas Kehutanan dan Penyuluh							
							Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya							

3.28.05.1.01.02						Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah fasilitasi pertemuan desa/kelompok	Paket	12 Paket	12 Paket	158.400.000	55.490.000	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah penyediaan sarana ekonomi produktif	Paket	1 Paket	1 Paket				
3.28.05.1.01.03						Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Fasilitasi Mediasi Konflik	Kali	25 Kali	25 Kali				
							Fasilitasi penguatan manajemen kelompok	Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok				
							Jumlah FGD belajar bersama pemegang izin Perhutanan Sosial	Kali	2 Kali	2 Kali				
							Jumlah FGD penyiapan rencana bisnis	Kali	2 Kali	2 Kali				
							Frekuensi Fasilitasi pembangunan BUMDES Kelompok Perhutanan Sosial dan pelaku usaha lainnya	Kali	2 Kali	2 Kali				
							Jumlah Fasilitasi Pengembangan Bisnis	Kali	2 Kali	2 Kali				
							Frekuensi Fasilitasi akses permodalan ke BLU dan lembaga keuangan lainnya	Kali	1 Kali	1 Kali				
						PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)								
3.28.06.1.01			Dinas Kehutanan			PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN DLM DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI								
3.28.06.1.01						Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	77.359.400	65.871.249	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
						PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
3.28.03.1.05			UPTD KPHP KERINCI UNIT I			PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI								
3.28.03.1.05.05						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah training dan pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api)	MPA	2 MPA	59,70%	195.040.000	142.536.628	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi	

																		SIPD (EFISIENSI)	
								Jumlah sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan	KALI	2 KALI	2 KALI								
								Jumlah pengendalian/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	HARI	45 HARI	45 HARI								
								Jumlah patroli pencegahan/pengendalian kebakaran hutan dan lahan	KALI	48 KALI	48 KALI								
								Jumlah koordinasi, sinkronisasi ke instansi stakeholder terkait kebakaran hutan dan lahan	KALI	8 KALI	8 KALI								
3.28.03.1.06								PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)											
3.28.03.1.06. 01								Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit management PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang memiliki hak akses SI- RPBBPHH	Lokasi	14 Lokasi	14 Lokasi	98.590.000	82.285.282			Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)		
								PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											
3.28.05.1.01								PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											
3.28.05.1.01. 03								Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah pelatihan pada KUPS	KUPS	6 KUPS	6 KUPS	190.000.000	135.027.290			Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)		
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											
3.28.03.1.01								PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI											
3.28.03.1.01								Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Pengadaan GPS	Unit	2 Unit	2 Unit	139.000.000	138.125.250			Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)		
								Jumlah paket pengadaan meja, kursi dan lemari	paket	1 Paket	1 Paket								

							kantor untuk kantor KPHP, kantor resort dan pos jaga								
							Pengadaan Drone	Unit	1 Unit	1 Unit					
							Pengadaan Drone	Unit	1 Unit	1 Unit					
3.28.03.1.03			UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III				PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG								
3.28.03.1.03. 01							Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Pemetaan Potensi Sumber Daya Hutan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000	32.324.000	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.03.1.04			UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III				PELAKSANAAN REHABILITASI DILUAR KAWASAN HUTAN NEGARA								
3.28.03.1.04. 04							Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah pengadaan bibit aren untuk kegiatan agroforestry	Batang	7500 Batang	7500 Batang	224.928.000	189.808.400	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
								Jumlah pengadaan bibit kopi untuk kegiatan agroforestry	Batang	5126 Batang	5126 Batang				
								Jumlah Pengadaan dan penanaman bibit kayu untuk naungan	Batang	500 batang	500 batang				
3.28.03.1.04. 06							Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah pembangunan Kebun Bibit Kehutanan dan MPTS untuk Penyediaan Kebutuhan Bibit Rehabilitasi (2 unit)	Batang	25000 Batang	25000 Batang	250.000.000	10.099.000	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.03.1.04. 08							Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi	Kali	12 Kali	12 Kali	15.000.000	12.284.000	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.03.1.05			UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III				PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI								
3.28.03.1.05. 01							Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekwensi Pengawasan berkala kepada pemegang izin terhadap implementasi	Kali	20 Kali	20 Kali	213.041.000	50.109.850	Silpa dari penganggar an yang	

								perlindungan areal HCV (High Conservation Value dan HCS (High Conservation Stock)(UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)							tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)		
								Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan (patroli reguler dan Patroli Komunitas)	Kali	12 Kali	12 Kali						
								Jumlah pelaksanaan operasi gabungan	Kali	2 Kali	2 Kali						
3.28.03.1.05.02							Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Pendidikan (pelatihan) mengenai Perlindungan hutan	Kali	5 Kali	5 Kali	66.430.000	66.280.000		Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)		
								Jumlah sosialisasi kesadaran Publik Tentang Penyebaran Hutan dan Perlindungan Hutan	Kali	2 Kali	2 Kali						
3.28.03.1.05.05							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kelompok MPA (Masyarakat Peduli Api) yang dilatih	Kali	6 Kali	6 Kali	391.153.400	122.222.550		Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)		
								Jumlah paket pengadaan peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan	paket	1 Paket	1 Paket						
								Jumlah Pembangunan Pos Penjagaan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	Unit	1 Unit							
								Jumlah Pengadaan kendaraan patroli roda 2	Unit	3 Unit							
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN										
3.28.05.1.01							UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III	PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									
3.28.05.1.01.01								Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah penyuluh kehutanan yang dilakukan peningkatan kapasitasnya	paket	1 Paket	1 Paket	95.000.000	90.187.718		Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	

3.28.05.1.01.02						Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah fasilitasi Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas KTH dan PS	Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	223.470.000	140.417.460	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah Pelatihan Petani dan staf KPH untuk Pengembangan Budidaya	Kali	1 Kali	1 Kali				
							Jumlah luas Penanaman dan Pemeliharaan	Ha	20 Ha	20 Ha				
3.28.05.1.01.03						Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial	Kali	2 Kali	2 Kali	1.158.478.600	334.686.021	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah pelaksanaan Assesment Konflik untuk pembalakan liar, perambahan hutan, dan konflik sosial Kegiatan Pemantauan sumber daya alam, penegakan hukum, dan resolusi konflik	Kali	20 Kali	20 Kali				
							Jumlah Pelaksanaan Mediasi Konflik	Ha	20 Ha	20 Ha				
							Jumlah pengembangan model (bisnis) dataran tinggi dan dataran rendah) termasuk kemitraan desa hijau yang dikelola swasta	Kali	1 Kali	1 Kali				
							Jumlah pertemuan bisnis untuk membangun kemitraan pemasaran dengan pihak lain	paket	1 Paket	1 Paket				
							Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana produksi kopi	paket	1 Paket	1 Paket				
						PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
3.28.03.1.03			UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V dan VI			PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG								
3.28.03.1.03.01						Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi secara Berkala	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	40.000.000	49.644.500	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	

3.28.03.1.03.08						Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah penyusunan Rancangan Teknis (Rantek) untuk rehabilitasi hutan Kegiatan Kemitraan Konservasi untuk Melestarikan sebagian besar Hutan yang tersisa di Jambi	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1.511.000.000	997.655.200	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Luas pelaksanaan Penanaman (reboisasi dan penghijauan) Kegiatan Mengembangkan Pengembangan Bisnis Model Community untuk mata pencaharian alternatif	Ha	125 Hektar	125 Hektar				
							Luas Pemeliharaan Tanaman Kegiatan Mengembangkan Pengembangan Bisnis Model Community untuk mata pencaharian alternatif	Ha	122 Hektar	122 Hektar				
3.28.03.1.04			UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V dan VI			PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA								
3.28.03.1.04.02						Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dibangun diluar kawasan hutan negara	Ha	40 Ha	40 Ha	172.269.800	154.109.175	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.03.1.04.06						Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah pengadaan dan penanaman bibit kayu	Batang	800 batang	800 batang	290.000.000	141.400.000	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah pengembangan pembibitan tanaman hutan	Batang	2500 batang	2500 batang				
3.28.03.1.04.08						Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	Kali	10 Kali	10 Kali	16.200.000	9.300.000	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.03.1.05			UPTD KPHP MERANGIN			PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI								

[illegible]

							Jumlah Paket Pelatihan petani dan staf KPH untuk pengembangan budidaya Aren	Kali	1 Kali	1 Kali				
							Jumlah Paket Pelatihan Petani dan Staf KPH untuk pengembangan budidaya kopi	Kali	1 Kali	1 Kali				
3.28.05.1.01.02							Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	50.000.000	44.800.000	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.05.1.01.03							Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kali	6 Kali	6 Kali	1.000.000.000	780.512.921	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah pelaksanaan Fasilitasi mediasi konflik	paket	2 Paket	2 Paket				
							Jumlah Kelompok yang difasilitasi penguatan manajemen grup PS Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas	paket	1 Paket	1 Paket				
							Jumlah penyediaan sarana dan prasarana produksi Pemasaran Gula Aren	Ha	30 Ha	30 Ha				
							Jumlah penyediaan sarana dan prasarana produksi Pemasaran Kopi	Ha	30 Ha	30 Ha				
							Jumlah Penanaman dan perawatan Agroforestry Aren Kegiatan Pengembangan Model (dataran tinggi dan dataranrendah) termasuk Kemitraan Desa Hijau yang dikelola Swasta	Kali	3 Kali	3 Kali				
							Jumlah Penanaman dan perawatan Agroforestry Kopi Kegiatan Pengembangan Model (dataran tinggi dan dataran rendah) termasuk Kemitraan Desa Hijau yang dikelola Swasta	Kali	2 Kali	2 Kali				
							Jumlah Identifikasi Potensi Bisnis untuk Komoditi Terpilih	Kali	6 Kali	6 Kali				

							Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan bisnis	Kali	2 Kali	2 Kali				
							Jumlah pelaksanaan Pertemuan bisnis untuk membangun kemitraan pemasaran dengan pihak lain (toko retail, toko online, dll) produk Gula Aren dan Kopi	Kali	2 Kali	2 Kali				
							PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN							
3.28.3.1.05			UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANG UN				PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI							
3.28.3.1.05.05						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah training dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Kali	1 Kali	1 Kali	203.310.000	154.132.303	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah hari Pengendalian/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Hari	45 Hari	45 Hari				
							Jumlah Koordinasi, sinkronisasi ke instansi stakeholder terkait	Kali	6 Kali	6 Kali				
3.28.03.1.06			UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANG UN				PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)							
3.28.03.1.06.01						Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit management PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang memiliki hak akses SI-RPBBPHH	Kali	1 Kali	1 Kali	98.590.000	81.312.359	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
3.28.05.1.01			UPTD KPHP LIMAU UNIT VII HULU SAROLANG UN				PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN							
3.28.05.1.01.03						Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial	KUPS	2 KUPS	2 KUPS	100.000.000	87.421.750	Silpa dari penganggaran yang	

3.28.03.1.05			UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANG UN			PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI								
3.28.03.1.05. 01						Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Pengawasan berkala pemegang izin atas pelaksanaan perlindungan kawasan HCV dan HCS	Kali	8 Kali	8 Kali	276.089.267	160.062.000	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah Patroli rutin dan Patroli komunitas	Kali	30 Kali	30 Kali				
							Jumlah Operasi gabungan	Kali	10 Kali	10 Kali				
3.28.03.1.05. 02						Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah patroli pengamanan kawasan hutan	Kali	2 Kali	2 Kali	20.000.000	19.781.850	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.03.1.05. 05						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Paket Pengadaan alat pemadam kebakaran	paket	4 Paket	4 Paket	436.000.000	220.924.810	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah Pembangunan pos penjagaan	Unit	4 Unit	4 Unit				
							Jumlah Pelatihan kelompok MPA	Kali	3 Kali	3 Kali				
							Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua)	Unit	2 Unit	2 Unit				
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
3.28.05.1.01			UPTD KPHP UNIT VIII HILIR SAROLANG UN			PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
3.28.05.1.01. 01						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah paket Sekolah Lapang Agroforestry melibatkan petani, pendamping, PPL	SL	1 SL	1 SL	120.000.000	98.020.950	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	

3.28.05.1.01.02						Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Fasilitasi Penguatan Kelembagaan	Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	22.820.000	4.600.000	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah Fasilitasi desa/Pertemuan kelompok	Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok				
							Jumlah Penyusunan Rancangann Teknis Kegiatan Penanaman Agroforestry	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen				
3.28.05.1.01.03						Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Fasilitasi untuk membangun kerjasama kelompok PS dengan BUMDES dan pelaku usaha lainnya	Kali	1 Kali	1 Kali	309.915.000	136.774.420	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah Sosialisasi Perhutanan Sosial	Kali	1 Kali	1 Kali				
							Jumlah Fasilitasi Pengembangan Bisnis	Kali	1 Kali	1 Kali				
							Jumlah pelaksanaan Assesment Konflik untuk pembalakan liar, perambahan hutan, dan konflik sosial Kegiatan Pemantauan sumber daya alam, penegakan hukum, dan resolusi konflik	Kali	4 Kali	4 Kali				
							Jumlah Fasilitasi Mediasi Konflik	Kali	5 Kali	5 Kali				
						PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
3.28.03.1.03			UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX			PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG								
3.28.03.1.03.09						Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penyelesaian piutang macet	Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	96.020.538	49.474.815	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.3.1.05			UPTD KPHP TEBO BARAT UNIT IX			PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI								
3.28.3.1.05.05						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah training dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Kali	2 Kali	2 Kali	98.590.000	30.356.000	Silpa dari penganggaran yang tertuang	

3.28.05.1.01.03						Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan perhutanan sosial	KTH	2 KTH	2 KTH	94.986.348	48.425.800	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
						PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN								
3.28.03.1.01			UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII			PENGLOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KEWENANGAN PROVINSI								
3.28.03.1.01.01						Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah tersusunnya perencanaan rancang bangun tata hutan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	104.188.000	69.870.142	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.03.1.07			UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII			PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI								
3.28.03.1.07.02						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah training dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Kali	6 Kali	6 Kali	203.310.000	156.334.004	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.03.1.07			UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII			PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI <6000 M3/TAHUN								
3.28.03.1.07.02						Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000m3/Tahun	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan PBPHH (Kayu dan/Atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Kali	12 Kali	12 Kali	41.695.000	27.360.600	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
3.28.05.1.01			UPTD KPHP BATANGHARI UNIT XI DAN XII			PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
3.28.05.1.01.03						Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan perhutanan sosial			27,66%	100.000.000	23.118.400	Silpa dari penganggaran yang	

																		tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.03.1.07			UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
						PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI													
3.28.03.1.07.02						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah training dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Kali	12 Kali	83,79%	139.090.000	92.070.100	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)						
3.28.03.1.07			UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII			PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS <6000 M3/TAHUN													
3.28.03.1.07.02						Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah unit manajemen yang melaksanakan tertib pelaporan RKOPHH untuk pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Industri	15 Industri	15 Industri	98.590.000	90.735.200	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)						
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
3.28.05.1.01			UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII			PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN													
3.28.05.1.01.03						Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan perhutanan sosial	KUPS	2 KUPS	2 KUPS	229.687.200	98.676.600	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)						
						PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN													
3.28.03.1.03			UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV			PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG													
3.28.03.1.03.05						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan, pengendalian	Kali	5 Kali	5 Kali	97.990.000	88.083.402	Silpa dari penganggaran yang						

							Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	dan pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi							tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.03.1.07			UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV				PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI									
3.28.03.1.07.02							Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah training dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	202.685.000	102.901.652		Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									
3.28.05.1.01			UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV				PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									
3.28.05.1.01.02							Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang didampingi penguatan kelembagaannya	Unit	7 Unit	7 Unit	415.802.000	405.572.500		Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.05.1.01.03							Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk perhutanan sosial	KUPS	1 KUPS	1 KUPS	100.000.000	36.320.800		Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
								Jumlah Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kelas KUPS	KPS	2 KPS	2 KPS					
							PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN									
3.28.03.1.03			UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, VI & XVII				PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG									
3.28.03.1.03.08							Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah luas kawasan hutan yang direhabilitasi	Ha	129 Ha	129 Ha	2.223.000.000	1.369.349.600		Pengadaan bibit pinang yang seharusnya	

														belanja bahan bibit tanaman pada aplikasi SIPD di kelompokan kedalam belanja modal	
							Monitoring dan evaluasi RHL	Paket	1 Paket	1 Paket					
3.28.03.1.03.09						Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengembangan Bisnis Model Community untuk mata pencaharian alternatif dan Pengembangan Bisnis HHBK dan Jasling	Ha	2 Ha	2 Ha	27.000.000	21.310.000		Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.03.1.04			UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, VI & XVII			PELAKSANAAN REHABILITASI DILUAR KAWASAN HUTAN NEGARA									
3.28.03.1.04.06						Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Penyediaan bibit yang berkualitas	Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000	9.444.000		Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.03.1.05			UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, VI & XVII			PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI									
3.28.03.1.05.01						Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Frekuensi Patroli dalam rangka Perlindungan Hutan	Kali	24 Kali	24 Kali	229.715.000	206.097.750		Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.3.1.05.05						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah training Masyarakat Peduli Api (MPA)	Kali	4 Kali	4 Kali	612.470.000	148.035.730		Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	

							Pendirian Infrastruktur/fasilitas pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Paket	1 Paket	1 Paket				
							Jumlah hari Pengendalian/Penanggulan gan Kebakaran Hutan dan Lahan	Hari	90 Hari	90 Hari				
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
3.28.05.1.01			UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, VI & XVII			PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN								
3.28.05.1.01.02						Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah KTH yang didampingi penguatan kelembagaannya	Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	57.500.000	54.942.800	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Jumlah Paket Sekolah Lapang Agroforestry Melibatkan Petani, Pendamping, PPL	Kali	1 Kali	1 Kali				
3.28.05.1.01.03						Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah pelaksanaan Assesment Konflik untuk pembalakan liar, perambahan hutan, dan konflik sosial Kegiatan Pemantauan sumber daya alam, penegakan hukum, dan resolusi konflik	kali	1 Kali	1 Kali	75.000.000	30.770.500	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
							Fasilitasi Mediasi Konflik	kali	2 kali	2 kali				
							Jumlah Fasilitasi Pengembangan Bisnis	kali	1 Kali	1 Kali				
3.28.04.1.01			UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)			PEMANFAATN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG								
3.28.04.1.01.01						Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Patroli Pengamanan di UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)	Kali	24 Kali	24 Kali	283.829.430	327.245.062	Silpa dari penganggar an yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.04.1.01.05						Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai	Jumlah Luas Rehabilitasi di Areal TAHURA	Ha	25 Ha	25 Ha	240.220.567			

						Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi		Dokumen						
						Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Desain Tapak	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	174.045.000	283.237.860	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
3.82.01.1.01			Dinas Kehutanan			PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH								
3.82.01.1.01.01						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perangkat	Persen	100%	75,66%	238.612.900	152.955.686	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.82.01.1.01.06						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban	Persen	100%	92,52%	21.732.000	16.787.500	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.82.01.1.01.07						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian laporan monitoring evaluasi dan update data kehutanan	Persen	100%	68,49%	182.233.000	111.766.165	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.02			Dinas Kehutanan			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH								
3.28.01.1.02.03						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Persen	100%	84,94%	434.171.200	413.702.103	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.02.06						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan laporan keuangan berkala dan tahunan	Persen	100%	52,01%	98.955.000	125.618.500	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi	

																		SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.05			Dinas Kehutanan																
3.28.01.1.05. 09																			
3.28.01.1.06			Dinas Kehutanan																
3.28.01.1.06. 01																			
3.28.01.1.06. 02																			
3.28.01.1.06. 05																		Silpa dari penganggar an yang tertutang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.06. 09																		Silpa dari penganggar an yang tertutang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.08			Dinas Kehutanan																
3.28.01.1.08. 01																			
3.28.01.1.08. 02																		Silpa dari penganggar an yang tertutang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.08. 04																		Silpa dari penganggar an yang tertutang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.09			Dinas Kehutanan																
3.28.01.1.09. 01																		Silpa dari penganggar an yang	

							Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.09.10							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	3 unit	3 unit	75.097.800	58.694.000		Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.07			Dinas Kehutanan				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
3.28.01.1.07.02							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang diadakan (roda 2,3)	Unit	20 unit	20 unit	871.000.000	471.000.000		Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.07.06							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	19 unit	19 unit	572.445.760	424.022.600		Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.06			UPTD KPHP KERINCI UNIT I				ADIMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
3.28.01.1.06.02							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan pemenuhan alat tulis kantor	Persen	100%	100,00%	5.000.000	4.993.100			
3.28.01.1.06.05							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan	Persen	100%	100,00%	1.500.000	1.500.000			
3.28.01.1.06.09							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi rapat dan koordinasi	Persen	100%	91,88%	42.150.198	43.407.202		Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.06			UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III				ADIMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
3.28.01.1.06.02							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan pemenuhan alat tulis kantor	Persen	100%	100,00%	5.000.000	5.000.000			

3.28.01.1.06.05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persen	100%	100,00%	1.500.000	1.500.000		
3.28.01.1.06.09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi rapat dan koordinasi	Persen	100%	87,56%	43.980.700	37.198.944	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.08			UPTD KPHP BUNGO UNIT II DAN III			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
3.28.01.1.08.03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Hari Penyewaan kendaraan operasional roda 4 (empat)	Hari	176 Hari	176 Hari	198.000.000	149.111.798	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.06			UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V dan VI			ADIMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								
3.28.01.1.06.02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000	4.938.700		
3.28.01.1.06.05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lembar	6000 Lembar	6000 Lembar	1.500.000	1.500.000		
3.28.01.1.06.09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	45.659.400	42.084.900	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.07			UPTD KPHP MERANGIN UNIT IV, V dan VI			PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
3.28.01.1.07.06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	11 Unit	11 Unit	199.000.000	55.454.190	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.06			UPTD KPHP MERANGIN			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								

[illegible]

[illegible]

3.28.01.1.06.09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	Persen	100%	80,26%	78.996.200	67.866.555	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.06			UPTD KPHP MUARO JAMBI UNIT XIII			ADIMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								
3.28.01.1.06.02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	Persen	100%	100,00%	5.000.000	2.582.000	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.06.05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	Persen	100%	100,00%	1.500.000	1.180.000		
3.28.01.1.06.09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Operasional Rutin Kantor Dinas	Persen	100%	99,69%	45.490.000	44.365.600		
3.28.01.1.06			UPTD KPHP TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV			ADIMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								
3.28.01.1.06.02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Alat dan Perlengkapan Kantor	Persen	100%	100,00%	5.000.000	4.836.600		
3.28.01.1.06.05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persen	100%	100,00%	1.375.000	1.250.000		
3.28.01.1.06.09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persen	100%	66,59%	45.259.400	31.997.452	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.06			UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, VI & XVII			ADIMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								
3.28.01.1.06.02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	Persen	100%	100,00%	5.000.000	5.000.000		

3.28.01.1.06.05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan	Persen	100%	100,00%	1.500.000	1.500.000		
3.28.01.1.06.09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi rapat dan koordinasi	Persen	100%	74,44%	98.870.950	83.549.000	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.08			UPTD KPHP TANJUNG JABUNG BARAT UNIT XV, VI & XVII			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
3.28.01.1.08.03						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan operasional yang disewa	Hari	160 Hari	160 Hari	180.000.000	140.238.868	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	
3.28.01.1.06			UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH								
3.28.01.1.06.02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan alat tulis kantor	Persen	100%	100,00%	5.000.000	4.856.400		
3.28.01.1.06.05						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan	Persen	100%	100,00%	1.500.000	1.500.000		
3.28.01.1.06.09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi rapat dan koordinasi	Persen	100%	75,55%	60.334.000	42.721.319	Silpa dari penganggaran yang tertuang pada aplikasi SIPD (EFISIENSI)	

No.		Urusan Pemerintah an	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan an	Upaya Mengatasi Permasalah an
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3.30	Bidang Perdagang an	Dinas Perindustri an dan Perdagang an		1								
	03.30.02			a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital pelayanan masyarakat dan dunia usaha	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penyelesaian rekomendasi perizinan, pendaftaran dan perizinan yang sesuai peruntukannya	%	100%	100%				
						Persentase Tertib Usaha	%	60%	60%				
	3.30.02.1.03				Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah pengendalian usaha perdagangan	Pelaku Usaha	11Pelaku Usaha	8 Pelaku Usaha				
	3.30.02.1.03.02				Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya	Pelaku Usaha	5Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	69.561.200	66.400.262	Tidak ada Permasalah an	
						Jumlah Pemeriksaan Legalitas Gudang	Gudang	6Gudang	4 Gudang				
	03.30.04			Penguatan akses pasar, mengoptimalka n kerja sama perdagangan, hingga mendorong industri kecil dan menengah (IKM)	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	90%	90%				
						Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	5,90%	5,90%				
	3.30.04.1.02				Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada	Periode pengendalian harga dan informasi ketersediaan stok	Bulan	12 Bulan	12 Bulan				

						Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Bapak dan Bapokting								
3.30.04.1.02.01						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen prognosa	-	-		140.000.000	134.774.880	Tidak ada Permasalahan		
							Jumlah pemantauan Bapak di tingkat distributor dan pasar tradisional	tradisional							
3.30.04.1.02.02						Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pendistribusian sembako pasar murah HBKN	Paket	11000Paket	11000Paket	8.594.715.556	1.449.294.260			
							jumlah operasi pasar	Kali	11Kali	11Kali					
3.30.04.1.03						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Kabupaten Kota yang dilakukan pengawasan Pupuk Bersubsidi	Kab/Kota	11Kab/Kota	11Kab/Kota					
3.30.04.1.03.01						Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Izin Perdagangan Pupuk Bersubsidi	Dokumen Perizinan	7Dokumen Perizinan	7Dokumen Perizinan	62.299.000	61.821.800,00			
							Jumlah Pemeriksaan Perizinan Bidang Perdagangan	Pelaku Usaha	8Pelaku Usaha	8Pelaku Usaha					
3.30.04.1.03.03						Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	Kali	11Kali	11Kali	105.196.100	104.465.040,00			
03.30.05					a. Peningkatan promosi ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	6%	6%					
3.30.05.1.01					b. Mempermudah dan mempercepat pelayanan surat keterangan asal (SKA) barang ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Produk Ekspor Unggulan Provinsi Jambi	Produk	6Produk	6Produk					

3.30.05.1.01 .05				c. Peningkatan fasilitas perdagangan dalam proses perizinan ekspor-impor			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelatihan Ekspor	Kali	2Kali	2Kali	219.700.000	219.322.250,00		
				d. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) berorientasi ekspor e. Menyediakan pelatihan bagi para calon eksportir baru, khususnya industri kecil dan menengah (IKM)											
03.30.06				a. Kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	100 %	100 %				
								Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	40 %	40 %				
								Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	60 %	60 %				
								Nilai IKM Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	(Indeks B)	77 (indeks B)	77 (indeks B)				
3.30.06.1.01							Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	Kab/Kota	11Kab/Kota	11Kab/Kota				
3.30.06.1.01 .01							Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen	Kali	3Kali	3Kali	189.885.140	183.883.024,00		
								Jumlah BPSK yang dibentuk	BPSK	1BPSK	1BPSK				
3.30.06.1.01 .03							Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen	Sidang	40Sidang	40Sidang	306.778.549	304.318.266,00		
								Periode pengawasan terhadap barang	Kali	2Kali	2Kali				

[illegible]

							Jumlah jasa pelayanan kalibrasi alat	Alat	464Alat	464Alat						
							Jumlah Sosialisasi lab. Kalibrasi UPTD BPSMB	Kab/Kota	11Kab/Kota	11Kab/Kota						
							Jumlah pelaksanaan asesmen Lab. Kalibrasi	Kali	0Kali	0Kali						
3.30.06.1.03							Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	11Kab/Kota	11Kab/Kota						
3.30.06.1.03.01							Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Produk	9Produk	9Produk	240.302.500	293.005.587,00				
							Jumlah Sample produk yang diuji	Sampel	9Sampel	9Sampel						
03.30.07				Penguatan akses pasar, mengoptimalkan kerja sama perdagangan, hingga mendorong industri kecil dan menengah (IKM)			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pasar Modern yang memasarkan produk dalam negeri	%	45%	45%					
3.30.07.1.01							Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Kali	5Kali	5Kali						
3.30.07.1.01.01							Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Misi Dagang dan Temu Usaha UMKM Dalam Negeri	Orang	9orang	9orang	310.588.488	296.340.298,00			
							Jumlah pameran dalam negeri yang diikuti	Kali	2Kali	2Kali						
							Jumlah partisipasi pada pawai kendaraan hias	Kali	1kali	1kali						
							Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi mengikuti pameran	Orang	6Orang	6Orang						
							Jumlah peserta sosialisasi penggunaan produk dalam negeri	Orang	100Orang	100Orang						
03.31.02				a.Mengembangkan infrastruktur dasar kawasan industri dan belum			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	%	1	1%					

[illegible]

								Persentase pertambahan jumlah industri besar di Provinsi	%	1%	1%					
3.31.02.1.01 .02							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Pelatihan Audit Internal ISO 19011:2018 dalam Penerapan ISO 9001:2015	Kali	1Kali	1Kali	63.331.650	62.024.275,00			
								Jumlah Pelatihan Pemahaman Proses Sertifikasi Industri Hijau	Kali	1Kali	1Kali					
								Jumlah Pelatihan Sistem Manajemen Mutu Industri ISO 9001:2015	Kali	1Kali	1Kali					
								Jumlah Pelatihan HACCP	Kali	1Kali	1Kali					
								Jumlah Koordinasi tentang Perwilayahan Industri	Kali	10Kali	10Kali					
3.31.02.1.01 .03							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pelaku usaha industri yang dilatih	Orang	20Orang	20Orang	950.581.055	838.119.372,0 0			
								Jumlah pelatihan teknologi industri	Pelatihan	3Pelatihan	3Pelatihan					
3.31.02.1.01 .05							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pameran IKM yang Diikuti	Kali	5Kali	5Kali	1.267.298.0 82	1.267.298.082			
								Jumlah IKM yang Difasilitasi mengikuti Pameran	IKM	15IKM	15IKM					
								Jumlah Lomba Kegiatan Pengembangan Desain Berbasis Budaya		2Kali	2Kali					
								Jumlah Studi Tiru Kegiatan Pengembangan Desain Berbasis Budaya Daerah		1Kali	1Kali					
								Jumlah Rapat Koordinasi Dewan Kerajinan Nasional Daerah		1Kali	1Kali					
								Jumlah Fasilitasi Digitalisasi Marketing Produk IKM	Bulan	12Bulan	12Bulan					
								Periode Fasilitasi Pengembangan	Bulan	12Bulan	12Bulan					

								Perajin Unit Promosi								
3.31.02.1.01.06							Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Evaluasi RPIK yang dilaksanakan	Kab/Kota	11Kab/Kota	11Kab/Kota	88.528.760	80.937.486,00			
03.31.03				a.Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital pelayanan masyarakat dan dunia usaha			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin sesuai kewenangan yang dikendalikan	%	20%	20%					
3.31.03.1.01							Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	100%					
								Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100%	100%					
								Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100					
								Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100					
3.31.03.1.01.02							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI,	Jumlah Perusahaan yang diawasi	Perusahaan	30Perusahaan	30Perusahaan	101.888.960	100.110.379,00			
								Jumlah rekomendasi teknis	Rekomendasi	2Rekomendasi	2Rekomendasi					

							IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	yang diterbitkan/dikeluarkan									
03.31.04				a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital pelayanan masyarakat dan dunia usaha			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	5%	5%						
3.31.04.1.01							Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Data dan Informasi Industri Berbasis SIINas	Unit	1115Unit	1115Unit						
								Periode penyampaian informasi Industri Kewenangan Provinsi	Bulan	12Bulan	12Bulan	75.000.000	68.984.900,00				
3.31.04.1.01.01							Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil pendataan IKM	Dokumen	1Dokumen	1Dokumen						
03.31.01							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat AKIP	Predikat	B	B						
								Predikat AKIP Perangkat Daerah		Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah						
3.31.01.1.01							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	Dokumen	7Dokumen	7Dokumen						
3.31.01.1.01.01							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6Dokumen	6Dokumen	371.771.000	323.889.225,00				
								Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Kali	1kali	1kali						
								Periode Pelayanan Sarana Informasi	Bulan	12bulan	12bulan						
3.31.01.1.01.07							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Program Kegiatan Perangkat Daerah	Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	63.342.947	62.047.305,00				
3.31.01.1.02							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Keuangan	Bulan	12Bulan	12Bulan						
3.31.01.1.02.01							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14Bulan	14Bulan	12.345.525.992	12.052.116.950,00				
3.31.01.1.02.02							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Periode penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12Bulan	12Bulan	155.850.000	155.850.000,00				
3.31.01.1.02.07							Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah laporan keuangan dan	Dokumen	5Dokumen	5Dokumen	9.842.960	9.842.500,00				

						Kuangan Bulan/Triwulan/Seme- steran SKPD	Bulan/Semester an								
3.31.01.1.05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Dokumen	3Dokumen	3Dokumen					
3.31.01.1.05 .04						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Kepegawaian	Dokumen	5Dokumen	5Dokumen	58.789.750	56.592.818,00			
3.31.01.1.05 .09						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang diikuti	Orang/Kali	30Orang/Kali	12 Orang/Kali	101.895.000	41.788.884,00			
3.31.01.1.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Periode penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12Bulan	12Bulan					
3.31.01.1.06 .01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jenis	20Jenis	20Jenis	49.983.000	49.580.000,00			
3.31.01.1.06 .02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode penyediaan alat tugas kantor	Bulan	12Bulan	12Bulan	115.549.663	113.752.710,00			
3.31.01.1.06 .05						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Item	5Item	5Item	50.534.000	35.507.500,00			
3.31.01.1.06 .06						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan	Eksemplar	60Eksemlar	60Eksemlar	7.027.660	6.950.940,00			
3.31.01.1.06 .09						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	Orang/Kali Orang/Kali	580Orang/ Kali 168Orang/ Kali	580Orang/ Kali 168Orang/ Kali	515.869.404	467.203.831,00			
3.31.01.1.07						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah	Unit	13Unit	13Unit					
3.31.01.1.07 .06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Item	6 Item	6 Item	95.850.000	88.680.000,00			
3.31.01.1.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12Bulan	12Bulan					
3.31.01.1.08 .01						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar pertahun	Surat	3500Surat	3500Surat	73.600.000	66.100.000,00			
3.31.01.1.08 .02						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pembayaran rekening listrik, telepon dan PDAM	Bulan	12Bulan	12Bulan	350.168.797	295.666.171,00			
3.31.01.1.08 .04						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Periode pemakaian jasa kebersihan kantor	Bulan	12Bulan	12Bulan	147.720.000	111.545.918,00			

	3.31.01.1.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Periode Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12Bulan	12Bulan				
	3.31.01.1.09.01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional roda 4 dan roda 2	Unit	25Unit	25Unit	358.120.000	356.990.300,00		
	3.31.01.1.09.06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Unit	20Unit	20Unit	36.950.000	36.948.600,00		

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13
3	3.32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Nakertrans		1										
	3.32.02					PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Persentase peningkatan penempatan Transigrasi sesuai calon lokasi penempatan				151.999.922	147.871.010		
	3.32.02					1,01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah tanah yang di cadangkan				151.999.922	147.871.010		
	3.32.02						1.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah tanah yang di cadangkan	Dokumen	1	1	151.999.922	151.999.922	Tidak ada kendala	
	3.32.03					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Persentase permukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang berkualitas				72.999.750	67.879.300		
	3.32.03					1,01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan antar Daerah				72.999.750	67.879.300		
	3.32.03						1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan antar Daerah	Lokasi	1	1	72.999.750	67.879.300	Tidak ada kendala	
	3.32.04					PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Persentase permukiman				379.999.914	374.898.250		

								dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera							
	3.32.04					1,01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan				379.999.914	374.898.250		
	3.32.04						1.01.02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	Jumlah penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	1	1	379.999.914	374.898.250	Tidak ada kendala	

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
3	29		Energi Dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM											
	29.01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		NILAI SAKIP		BB	B				
	29.01.1.01						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	9	9	44.968.000,00	42.117.900,00		
		01					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	1.948.000,00	1.948.000,00		
		02					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.110.000,00	1.110.000,00		
		03					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1.110.000,00	1.110.000,00		
		04					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1.900.000,00	1.900.000,00		
		05					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	1	1.900.000,00	1.900.000,00		

								Perubahan DPA-SKPD								
	06						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	35.127.000,00	32.276.900,00			
29.01.1.02							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	14	9.497.049.310,00	9.223.058.698,00			
29.01.1.03							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100						
	04						Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah SKPD	Laporan	1	1	80.520.000,00	80.491.900,00			
29.01.1.05							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100						
	09						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	20	4	18.000.000,00	15.693.000,00			
29.01.1.06							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100						
	01						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	14.996.330,00	14.994.500,00			
	02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	1	1	42.244.735,00	42.084.064,00			

								Perlengkapan Kantor Yang Disediakan								
	04							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	38.425.000,00	37.701.676,00		
	05							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Paket	1	1	33.251.000,00	33.102.700,00		
	06							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Praturan Perundang--undangan Yang Disediakan	Paket	1	1	8.154.432,00	7.802.360,00		
	09							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	603.857.260,00	594.494.558,00		
	10							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	8.461.100,00	8.460.700,00		
29.01.1.07								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Unit	7					
	06							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	Unit	5	5	227.383.189,00	216.200.392,00		
29.01.1.08								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Laporan	6	6				
	01							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	6.630.490,00	6.530.500,00		
	;02							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	1	1	136.503.000,00	76.272.160,00		
	;03							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	6.261.024,00	5.100.000,00		
	04							Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Laporan	3	3	490.203.000,00	477.224.910,00		

							Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan								
29.01.1.09							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat penyelesaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Persen	100	100					
	;01						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dan dibayar pajaknya	Unit	8	8	174.500.000,00	165.912.462,00			
	02						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang pelihara dan dibayar pajaknya dan perizinannya	Unit	28	28	152.960.000,00	99.949.965,00			
	06						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	40	40	23.090.000,00	18.900.000,00			
	09						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	Unit	4	4	136.961.000,00	136.801.000,00			
29.02							PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Terjaganya Kualitas air tanah melalui penyusunan zonasi konservasi air tanah dan NPA wilayah sungai pengabuan lahan	Persen	20	20					
29.02.1.01							Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi	Jumlah Dokumen Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi								
	01						Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Yang Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	173.480.000,00	154.005.868,00			
29.02.1.03							Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tersedianya data, Revisi Pergub NPA, pemanfaatan air tanah yang								

							Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi\	Perizinan IUPTL Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik								
29.06.1.02							Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Persentase pemegang IUTPLS yang tertib administrasi dan teknis	Persen	100	100					
	02						Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	114.317.078,00	86.857.700,00			
	03						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan	4	4	160.427.000,00	155.744.980,00			
29.06.1.05							Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Persentase pemegang IUJPTL yang tertib administrasi dan teknis	Persen	100	100					
	02						Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Jumlah Surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri	Dokumen	1	1	20.809.000,00	8.569.600,00			
	;03						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha	Laporan	4	4	30.901.300,00	22.247.293,00			

								Negeri	dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri								
29.06.1.06								Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Persentase peningkatan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan	Persen	100						
	01							Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen	1		251.454.555,00	134.895.055,00			
	03							Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Laporan	1		49.999.168,00	0,00	Kegiatan Fisik tidak terlaksana		
	04							Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah yang terkumpul terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen	1		49.999.842,00	11.821.999,00			
	05							Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaaan	Laporan	3		31.969.700,00	25.139.900,00			
	06							Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana Yang Terbangun Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum	Unit	120		293.193.000,00	76.793.300,00	Proses Pengadaan tidak selesai sehingga kegiatan	Akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023	

									Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						tidak dapat dilaksanakan karena waktu tidak mencukupi	
		07						Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana dan Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan	1		20.560.000,00	5.600.000,00	Kegiatan Fisik tidak terlaksana	

3.3.4 Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Urusan Keuangan	BPKPD Provinsi Jambi		1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	OPINI BPK		WTP					
						1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu		2 Perda APBD dan 2 Perkada Penjabaran APBD		2.089.589.4	1.859.335.4		
						1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2 Dok		415.000.000,	403.472.166,		
						2	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 Perda APBD dan 2 Perkada Penjabaran APBD Murni dan Perubahan		1.674.589.429,	1.455.863.234,		
						2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD Kab/Kota yang disusun tepat waktu		11 SK		836.142.971,	764.925.110,		
						1	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		11 SK	150	560.851.540,	505.080.969,		
						2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		11 SK	7	146.476.406,	138.944.8		

							3	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		36 Orang		128.815.025,	120.899.305,		
							3	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyelesaian administrasi Perbendaharaan Daerah	persentase	100%		1.369.617.287,	1.241.009.314,		
							1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	dokumen	12		324.060.787,	302.284.094,		
							2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	dokumen	12		315.339.290,	295.667.572,		
							3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	dokumen	12		445.787.930,	410.154.533,		
							4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	dokumen	12		284.429.280,	232.903.115,		
							4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian administrasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	persentase	100		735.822.214,	655.016.928,		
							1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	dokumen	12		115.130.700,	102.699.422,		
							2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		1 Dokumen Perda dan 1 Dokumen Perkada		230.788.100,	206.935.334,		
							3	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1		103.469.165,	102.086.873,		
							4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	10		192.194.700,	158.441.150,		

							5	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Doku men Kebija kan		94.239.549,	84.854.149,		
							5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyelesaian Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase	100		956.603.207.6	934.884.080.2		
							1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	12		159.100.000.000,	156.600.000.000,		
							2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	4		28.884.765.344,	9.665.638.000,		
							3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	4		768.618.442.260,	768.618.442.258,		
							6	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	persentase	100		500.046.004,	483.060.485,		
							1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	172		500.046.004,	483.060.485,		
							2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah		79,50%					
							1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah		79,50%		3.464.742.442,	3.187.308.152,		
							1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1		293.497.300,	292.195.363,		
							2	Inventarisasi Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	laporan	12		817.850.971,	791.662.251,		
							3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	4		1.093.108.051,	1.010.265.041,		
							4	Penilaian Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	4		337.722.702,	270.830.059,		
							5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Laporan	12		665.736.374,	581.520.555,		

							6	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	12		256.827.044,	240.834.883,		

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Urusan Pendapatan	BPKPD Provinsi Jambi		1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		5,25%					
						1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		5,25%		15.869.427.141	14.875.860.137		
						1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		12 Laporan		455.406.504,	451.898.571,		
						2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		49 Saran a dan Prasar ana		5.494.555.325,	4.999.008.074,		
						3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		49 Saran a dan Prasar ana		5.406.531.087,	5.108.438.074,		
						4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	4		3.141.531.915,	3.140.993.915,		
						5	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		1 LHP		392.722.338,	309.578.149,		
						6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan	4		461.416.322,	412.480.751,		
						7	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12		517.263.650,	453.462.603,		

No.				Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Kepegawaian	BKD Provinsi Jambi	Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Predikat SAKIP	Indeks	BB	BB	14,590,327,660.00	13,529,262,433.00			
								Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Indeks	78	86					
							1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase	100	100	181,163,200.00	154,971,257.00		
							1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	doc	2	2	20,663,200.00	18,623,150.00		
							2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	doc	1	1	135,000,000.00	120,314,951.00		
							3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	25,500,000.00	16,033,156.00		
							2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	97.22	11,846,141,088.00	10,926,427,811.00		
							1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1080	1080	11,691,141,088.00	10,773,476,933.00		
							2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	doc	12	12	145,000,000.00	143,632,912.00		

								3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	10,000,000.00	9,317,974.00		
								3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	100	195,104,092.00	190,559,148.00		
								1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	1	59,800,000.00	59,800,000.00		
								2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	10	23,600,000.00	23,585,000.00		
								3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	70	111,704,092.00	107,174,148.00		
								4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	99.76	695,071,783.00	688,891,702.00		
								1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Kantor	Paket	1	1	13,146,782.00	13,119,274.00		
								2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	191,935,000.00	191,935,000.00		
								3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	28,550,000.00	27,845,000.00		
								4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dokumen	1	1	14,607,500.00	14,607,500.00		

[illegible]

							3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	257,042,204.00	256,934,945.00		
							7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	893,889,400.00	828,222,316.00		
							1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	25	25	303,329,400.00	246,624,950.00		
							2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	25	25	26,410,000.00	25,970,000.00		
							3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	1	550,000,000.00	541,917,366.00		
							4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	10	10	14,150,000.00	13,710,000.00		
						2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	250	100	5,756,377,243.00	4,252,668,171.00		
									Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70	30				
									Persentase tercapainya IPSM ASN & IPA ASN	Persentase	100	43.26				
							1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase	90	95.13	2,038,261,328.00	1,168,953,133.00		
							1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah	Dokumen	1	1	1,113,568,696.00	348,450,905.00	Tidak Ada Penerimaan CPNS Tahun 2022, yang ada hanya	

									Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN							penerimaan PPPK, Pemprov Jambi	
									Jumlah Formasi yang terisi atas Pelaksanaan Pengadaan CPNS	Orang	310	0				mendapatkan alokasi 140 formasi PPPK, yang terdiri dari 108 formasi guru, 20 tenaga kesehatan dan 12 tenaga teknis	
							2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	1	1	119,999,568.00	99,719,616.00			
									Jumlah SK Pensiun yang terselesaikan	SK	400	520					
							3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang di Fasilitasi	Lembaga	1	1	515,607,000.00	490,661,757.00			
							4	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan	1	1	289,086,064.00	230,120,855.00			
									Jumlah Pengelolaan, Pemeliharaan Data Informasi Kepegawaian	Informasi	1	1					
									Jumlah Pengelolaan, Pelayanan dan Fasilitas Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG), kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU)	Usulan Kartu	100	131					
						2	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang terfasilitasi pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase	95	84.89	1,792,471,625.00	1,615,541,082.00			
						1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana	Dokumen	1	1	138,718,825.00	128,032,518.00				

[illegible]

[illegible]

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05	01.01	Pendidikan dan Pelatihan	BPSDM Provinsi Jambi	Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PREDIKAT SAKIP DAN IKAM		B				
	01.1.01				1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi keuangan	Persentase	100	99,93	404.882.886	404.617.498	
	01.1.01.01				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	100	99,86	182.772.159	182.517.645	
	01.1.01.06				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	200	99,98	45.909.517	45.900.000	
	01.1.01.07				3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	176.201.210	176.199.853	
	01.1.02			Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2022;	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pertanggungjawaban administrasi keuangan	persentase	100	100	14.661.909.350	13.567.328.084	
	01.1.02.01				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Org/bln	150	150	14.399.631.350	13.305.953.084	
	01.1.02.02				2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	7	7	262.278.000	261.375.000	
	01.1.05				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD	persentase	100	99,58	169.571.000	168.864.417	
	01.1.05.09				1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	75	75	169.571.000	168.864.417	
	01.1.06				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi umum PD		100	99,84	1.125.667.005	1.123.861.51	
	01.1.06.01				1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	2	209.723.295	209.640.000	
	01.1.06.02				2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	paket	8	8	399.329.441	398.602.298	

	01 . 1.06 .04					3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	4	4	80.239.269	80.065.900		
	01 . 1.06 .05					4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	7	7	30.301.000	29.480.000		
	01 . 1.06 .09					5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	2	2	406.074.000	406.073.320		
	01 . 1.08					5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	persentase	100	99,61	1.512.251.891	1.506.341.687		
	01 . 1.08 .01					1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	5.596.472	2.504.000		
	01 . 1.08 .02					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	3	3	756.438.604	754.811.474		
	01 . 1.08 .03					3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	3	47.589.492	47.547.000		
	01 . 1.08 .04					4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	4	702.627.323	701.479.213		
	01 . 1.09					6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan BMD	persentase	100	100				
	01 . 1.09 .02					1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	29	29	1.287.968.896	1.271.140.124		
	01 . 1.09 .06					2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	50	50	241.140.000	228.316.624		
	01 . 1.09 .09					3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	10	10	225.480.000	224.812.500		
					2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase penyelenggaraan pengembangan SDM Aparatur							
								Persentase kelulusan peserta sertifikasi/uji kompetensi dan peserta pengembangan kompetensi							
	02 . 1.01					1	Pengembangan Kompetensi Teknis	persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi teknis							
	02 . 1.01 .03					1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi teknis, umum, inti dan pilihan							

								Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum								
	02 . 1.02					2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Peserta yang lulus sertifikasi/ uji kompetensi, pengembangan kompetensi manajerial, fungsional	orang	237 dan - 468	89,53	4.882.941.886	4.691.488.35		
	02 . 1.02 . 03					1		1 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	orang	237	195	354.483.850	295.752.564		
	02 . 1.02 . 04					2		2 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	2	2	351.407.000	344.942.078		
	02 . 1.02 . 05					3		3 Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	2	2	147.341.750	142.617.785		
	02 . 1.02 . 07					4		4 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dan fungsional	orang	445	169	4.029.709.286	3.908.175.924		

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
			Penelitian dan Pengembangan	BALITBANGDA PROVINSI JAMBI		1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<i>Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya</i>	Persentase	60	100					
							1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengkajian Peraturan	<i>Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan</i>	Persentase	60	100	468.218.970	447.923.875		
							1	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</i>	Laporan	1	1	240.467.770	229.911.293		
							2	Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>	Laporan	1	1	127.751.200	121.691.372		
							3	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</i>	Laporan	1	1	100.000.000	96.321.210		
							2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	<i>Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/Model yang yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya pada bidang Bidang Sosial dan Kependudukan</i>	persentase	60	100	128.984.400	126.561.880		
							1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial</i>	Dokumen	1	1	128.984.400	126.561.880		

						3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi/Naskah Akademik/ Model yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya pada Bidang Ekonomi dan Pembangunan	persentase	60	100	720.000.000	690.158.248		
						1	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen	2	2	290.000.000	282.283.392		
						2	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	1	290.000.000	272.775.120		
						3	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	1	140.000.000	135.099.736		
						4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi yang diaplikasikan perangkat daerah atau pihak lainnya	persentase	60	100	997.780.000	959.367.131		
						1	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1	120.000.000	116.593.388		
						2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	laporan	5	5	397.780.000	381.440.165		
						3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	laporan	3	3	265.000.000	255.744.306		
						4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	laporan	3	3	140.000.000	132.575.080		
						5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	laporan	1	1	75.000.000	73.014.192		
						2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	NILAI SAKIP		BB	BB				
						1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	persentase	100	100	Rp461.920.000,00	Rp429.752.217,00		

[illegible]

[illegible]

No.	Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.01 . 01	Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpo 1 Provinsi Jambi		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Meningkatnya Predikat SAKIP	Kategori	BB	BB	9.538.293.48	9,190.091.884		
				1 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya program Kegiatan dan Renja Badan Kesbangpol	Persen	100	100	251.210.060	244.678.437		
				1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	84.200.000	83.704.300		
				2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Ralisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	12	167.010.060	160.974.137		
				3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5		-	-		
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	7.768.276.223	7.434.819.389		
				1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhnya Gaji dan Tunjangan ASN Badan Kesbangpol Provinsi Jambi	Bulan	14	14	7.497.812.856	7.164.359.433		
				2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bulan	12	12	270.463.367	270.459.956		
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertatanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	10	10	17.656.000	17.656.000		
				1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian pegawai	Stel	74	-	-	-		
				2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhnya kebutuhan pegawai mengikuti diklat/ kursus jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang/ Tahun	10	20	17.656.000	17.656.000		
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	628.444.299	624.202.870		
				1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhnya komponen listrik kantor	Bulan	12	12	175.804.236	174.643.624		
				2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya kegiatan rapat rapat	Bulan	12	12	49.550.000	46.543.000		

						3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	42.446.000	42.387.000		
						4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terakomodirnya informasi secara akurat	Media Cetak	12	12	14.081.496	14.081.496		
						5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terdukungnya koordinasi kedalam dan luar daerah	Tahun	1	1	346.562.567	346.547.750		
					5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terakomodir Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	123.214.073	123.211.500		
						1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksana Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mobil Motor						
						2	Pengadaan Kendaraan Dinas Opraasional atau Lapangan	Terlaksana Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mobil Motor						
						3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	Unit	21	21	123.214.073	123.211.500		
					6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	174.578.830	174.103.680		
						1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk	Tahun	1	1	5.400.000	5.400.000		
						2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Tahun	1	1	119.335.264	119.333.274		
						3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	Tahun	1	1	49.843.566	49.370.406		
					7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	574.914.600	571.420.008		
						1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Tahun	1	1	229.880.000	226.610.000		
						2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaanya peralatan kerja	Tahun	1	1	78.800.000	78.800.000		
						3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Bulan	12	12	266.234.600	266.010.008		
	8.01 . 02				2	Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan		Persentase pelaksanaan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	76	76	713.357.160	709.951.092		
					1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Terlaksananya Pembinaan Idiologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI	Persen	100	100	713.357.160	709.951.092		

						1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Teknis Program dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	Program Kerja	5						
						2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi tenaga pendidik dan tokoh Masyarakat.	Dokumen	3						
						3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Demokrasi dengan baik di Provinsi Jambi	Kab/kota	4						
						4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat ttg Ideologi Pancasila dan karakter bangsa	Peserta	210	210	287.365.000	285.211.582			
						5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya pembinaan FPK kab/kota yang sudah terbentuk di Provinsi Jambi.	Kab/kota	9	9	425.992.160	424.739.510			
	8.01 . 03				3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		<i>Persentase pelaksanaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</i>	Persen	77	77	5.782.737.400	5.781.117.768			
					1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Terlaksana Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persen	100	100	5.782.737.400	5.781.117.768			

							1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Tersusunnya Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik.	Program Kerja	6						
							2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terealisasinya Bantuan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Jambi.	Peserta	80	80	5.272.969.880	5.272.788.200			
							3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terselenggaranya rakor bidang politik 2022 dan terpantaunya situasi politik daerah di Provinsi Jambi Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Politik.	Kab/Kota	6	6	446.495.340	445.067.222			
							4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya pemantauan dan sosialisasi Peratran Bantuan Parpol di Provinsi Jambi	Kab/kota	6	6	63.272.180	63.262.346			
	8.01 . 04					4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Tersusunnya Program Pemberdayaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	95	95	921.000.000.	918.357.532			
						1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasikemasyarakatan	Persen	95	95	921.000.000.	918.357.532			

							1	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terbentuknya Database pendataan Ormas, Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daeerah Provinsi Jambi	Ormas	168	168	137.150.000	136.385.866		
							2	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terjalinnnya Kerja sama Pemerintah Kesbangpol dalam dengan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Jambi.	Ormas	60	60	668.650.000	666.895.833		
							3	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Termonitornya eksistensi/keberadaan serta permasalahan ormas, Provinsi Jambi.	Ormas	53	53	115.200.000	115.075.833		
	8.01 . 05					5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	85	85	636.000.080	632.997.914		
						1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya		Terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi KUB dan penghayat kepercayaan	Persen	85	100	636.000.080	632.997.914		
							1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Terbentuknya Database Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Program Kerja	8	8	90.000.000	88.804.992		
							2	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi kerukunan umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Provinsi Jambi.	Dokumen	12	12	506.000.000	504.197.342		
							3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi antar Tim Pencegahan Narkotika, Forum Kerukunan Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Provinsi Jambi.	Kab/kota	11	11	40.000.080	39.995.580		
							4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Terlaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Kab/kota	11					

								Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.							
	8.01 .06				6			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persen	78	78	1.989.800.000	1.979.146.461		
					1			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persen	78	78	1.989.800.000	1.979.146.461		
						1		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terwujudnya peningkatan kewaspadaan dini, pemantauan orang asing/TKA/ Lembaga asing serta penanganan konflik di daerah.	Program Kerja	6					
						2		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Tim Terpadu Penanganan konflik sosial Daerah dan Pusat dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah, pemantauan orang Asing/TKA. Serta Koordinasi antar Pimpinan Daerah	Dokumen	11	11	500.000.000	499.522.128		
						3		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terkoordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Kab/kota	11	11	203.300.000	202.256.300		
						4		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Kasus	8	8	286.500.000	286.418.033		

								Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
							5	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Komunikasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jambi.	Persen	12	100	1.000.000.000	990.950.000		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.01.01	Pengawasan	INSPEKTOR AT DAERAH	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persen		87,43	27.227.970.24	26.475.595.925	Pelaksanaan rekomendasi yang terlambat ditindaklanjuti oleh OPD	Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan OPD
				1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persen		97,06	1.156.451.846	1.096.574.111	-	-
				1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	4	612.858.972	609.578.883	-	-
				2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	17	16	543.592.874	486.995.228	-	-
				2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persen		100	18.290.737.303	18.065.082.549	-	-
				1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai pertahun yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/Tahun	98	98	18.290.737.303	18.065.082.549	-	-
				3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persen		92,86	2.750.239.632	2.584.366.588	-	-
				1 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	70	65	2.750.239.632	2.584.366.588	-	-
				4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persen		95,97	2.107.994.963	2.085.191.267	-	-
				1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Paket	12	12	35.087.545	35.049.395	-	-
				2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	12	89.030.118	88.845.737	-	-
				3 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	Paket	28	26	151.075.000	137.206.533	-	-
				4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Paket	12	12	87.641.300	84.857.744	-	-
				5 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Paket	12	10	5.285.280	4.140.000	-	-
				6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	500	498	1.739.875.720	1.735.091.858	-	-

						5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persen		84,76	1.009.470.568	856.390.958	-	-
						1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	210	178	1.009.470.568	856.390.958	-	-
						6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen		85,42	866.004.933	799.471.898	-	-
						1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	12	8	101.978.620	60.763.372	Penggunaan anggaran digunakan sesuai kebutuhan	Untuk anggaran Tahun 2023 akan disesuaikan dengan kebutuhan
						2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	laporan	12	12	242.271.970	229.623.272	-	-
						3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	laporan	12	10	29.170.000	25.100.000	-	-
						4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	laporan	12	12	492.584.343	483.985.254	-	-
						7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persen		91,28	1.047.071.000	988.518.554	-	-
						1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	unit	7	6	269.130.000	251.109.070	-	-
						2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit	19	19	182.080.000	181.022.208	-	-
						3	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit	170	135	120.197.800	95.654.500	-	-
						4	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Unit	4	4	475.663.200	460.732.776	-	-
	6.01.02			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	2	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persen		99,54	7.329.773.347	6.832.215.815	Pelaksanaan rekomendasi yang terlambat ditindaklanjuti oleh OPD	Melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD	
					1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Persen		94,23	6.109.546.525	5.646.272.985	-	-	
					1	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah laporan terhadap pengawasan kinerja pemerintah daerah	Laporan	52	51	1.343.363.560	1.327.363.131	-	-	
					2	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan terhadap Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Laporan	39	37	1.441.836.950	1.385.036.880	-	-	

							3	Reviu laporan kinerja	Jumlah laporan terhadap Reviu laporan kinerja	Laporan	21	21	125.758.000	122.958.000	-	-
							4	Reviu laporan keuangan	Jumlah laporan terhadap Reviu laporan keuangan	Laporan	55	55	520.778.060	520.751.744	-	-
							5	Pengawasan umum dan teknis kabupaten/kota	Jumlah Laporan terhadap Pengawasan umum dan teknis kabupaten/ kota	Laporan	21	19	1.538.269.755	1.358.231.160	-	-
							6	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksanaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksanaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	155	127	1.139.540.200	931.932.070	-	-
						2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Persen		97,37	1.220.226.822	1.185.942.830	-	-
							1	Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah laporan Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Laporan	2	2	163.743.210	163.367.510	-	-
							2	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	19	18	1.056.483.612	1.022.575.320	-	-
	6.01.03				3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				Persen		78,87	2.965.794.252	2.824.543.975	Sering terjadi pergantian Kepala OPD/pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi	Melaksanakana pembinaan dan pelatihan pada OPD di Lingkup Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi terkait pencapaian kinerja OPD
						1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			Persen		58,82	45.930.000	28.260.000	-	-
							1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rekomen dasi	17	10	45.930.000	28.260.000	Ada perubahan kebijakan Penerapan ISO menjadi membangun aplikasi Tindak Lanjut (TL) yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan	Untuk anggaran Tahun 2023 akan disesuaikan dengan kebutuhan
						2	Pendampingan dan Asistensi			Persen		98,91	2.919.864.252	2.796.283.975	-	-
							1	Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	OPD	43	43	259.059.300	257.793.000	-	-
							2	Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	OPD	43	43	150.531.660	147.543.443	-	-

							3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah persentase pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	46	44	2.393.088.232	2.282.573.970	-	-
							4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	OPD	3	3	117.185.060	108.373.562	-	-

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan		
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13		
01	01.01		Penunjang Urusan Pemerintahan	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		NILAI SAKIP				96.259.729.645	91.090.949.572			
							1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen				288.315.379	288.315.379		
								1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	doc	10	10	288.315.379	288.315.379		
							2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan				9.011.100.824	8.851.808.611		
								1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	metode pembayaran gaji dan tunjangan ASN SEKWAN PROVINSI JAMBI	bln	14	14	7.944.164.166	7.828.535.990		
								2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya Kesejahteraan Bagi Pegawai	bln	12	12	931.480.679	894.971.621		
								3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	doc	1	1	11.917.500	10.800.000		
								4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran	doc	1	1	123.538.479	117.501.000		
								3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah				600.269.002	487.712.375,93	
							1		Pengamanan Barang Milik Dearah SKPD	Terjaminnya Barang/Asset Milik Daerah	unit	50	41	600.269.002	487.712.375,93		
							4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah				680.883.840	557.419.665		
								1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan atribut bagi ASN dan PTT	stel	127	127	309.143.840	216.087.000		
								2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bertambahnya Pengetahuan ASN	kali	10	7	371.740.000	341.332.665		
							5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Umum				6.310.082.695	5.972.818.134		

							1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Listrik & Elektronik Penerangan Kantor	jenis	28	28	63.558.702	63.239.450		
							2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode penggunaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	75	62	531.400.704	447.145.494		
							3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Dinas	jenis	13	13	497.956.000	494.497.230		
							4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pelayanan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Dewan	ok	46321	46321	2.091.004.000	2.015.712.000		
							5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor	jenis	86	75	728.519.739	608.017.310		
							6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eks	80722	70165	805.534.800	799.781.660		
							7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi, Monitoring & Pelayanan Kegiatan Dewan	kali	24	24	1.592.108.750	1.544.424.990		
							6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.798.124.548	9.640.362.032		
							1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	8	8	1.332.544.000	1.309.300.000		
							2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Bangunan Lainnya	jenis	13	13	8.465.580.548	8.331.062.032		
							7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah				2.103.034.375	2.010.905.026		
							1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai Dan Benda Pos Lainnya	lembar	1700	1236	94.199.340	69.995.500		
							2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Telepon, Air, Listrik, dan Jasa Lainnya	jenis	2	2	2.008.835.035	1.940.909.526		
							8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyelesaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah				25.565.727.382	24.855.382.002		

								1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan diperpanjang izinnya	unit	83	73	1.770.997.260	1.588.740.175		
								2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor & Rumah Dinas	unit	5	5	20.806.664.442	20.373.815.167,74		
								3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor & Rumah Dinas	unit	24	23	2.988.065.680	2.892.826.659		
								9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				39.046.191.600	35.790.473.275		
								1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terselenggaranya administrasi keuangan DPRD	bln	14	14	37.806.239.470	34.868.264.175		
								2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas dan atribut DPRD	stel	340	282	1.006.418.850	876.088.600		
								3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terjaminnya Tingkat Kesehatan Pimpinan & Anggota Dewan	org	55	10	233.533.280	46.120.500		
								10	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD				2.856.000.000	2.635.753.072		
								1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Jenis Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	bln	12	12	2.856.000.000	2.635.753.072		
								2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PERSENTASE PERDA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU				66.027.667.841	59.316.799.343		
								1	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD				11.058.704.067	10.158.946.019		
								1	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Ranperda yang dibahas dan ditetapkan	ranperda	15	12	10.608.716.067	9.894.761.019		
								2	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik	naskah	6	2	449.988.000	264.185.000		
								2	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD				12.990.192.520	9.791.852.479		
								1	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	kali	5	4	4.051.761.500	1.426.066.833		
								2	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna Dewan	kegiatan	5	4	6.562.431.020	6.019.785.646		

							3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terlaksananya Pembayaran Honorarium Kelompok Pakar dan Tim Ahli	kelompok	5	10	1.728.000.000	1.698.000.000		
							4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Fraksi	kelompok	9	8	648.000.000	648.000.000		
							3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti				22.216.039.244	20.451.548.604		
							1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan kerja dan Peninjauan Lapangan	kali	12	5	3.054.254.244	2.593.558.104		
							2	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Kegiatan Reses	kali	3	3	19.161.785.000	17.857.990.500		
							4	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Tugas DPRD yang ditindaklanjuti				19.762.732.010	18.914.452.241		
							1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	kali	24	24	17.061.217.500	16.968.939.162		
							2	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitas Tugas DPRD	kali	12	6	2.701.514.510	1.945.513.079		

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Fungsi Lainnya	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PREDIKAT AKIP	INDEKS NILAI	BB	BB				
						1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					7.060.850.352	6.912.522.756		
						1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.580.125.918	6.457.545.756		
						2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					480.724.434	454.977.000		
						2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					192.287.507	192.068.537		
						1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					192.287.507	192.068.537		
						3 Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.696.174.011	2.695.528.355		
						1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik.Penerangan Bangunan Kantor					40.173.300	40.172.500		
						2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					228.569.539	228.076.101		
						3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor					811.220.529	811.196.477		
						4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					67.073.143	66.947.200		
						5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.549.137.500	1.549.136.077		
						4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					773.064.000	731.067.760		
						1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					564.080.000	522.900.000		
						2 Pengadaan Mebel					208.984.000	208.167.760		
						5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.405.241.292	2.370.954.190		
						1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat					54.510.000	54.504.000		
						2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.297.492.100	1.284.036.290		
						3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					101.395.008	101.366.000		
						4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					951.844.184	931.047.900		
						6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.786.784.130	1.687.572.113		

							1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.159.006.130	1.114.472.328		
							2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						196.364.000	184.941.490		
							3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						431.414.000	388.158.295		
						2	PRORAM PELAYANAN PENGHUBUNG							744.694.400	734.832.905		
						1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung							744.694.400	734.832.905		
							1	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat						49.983.200	49.983.200		
							2	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						694.711.200	684.849.705		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fungsi Lainnya	Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
				1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan internal perangkat daerah	Persen	100	100	165.678.847	165.598.478		
				1 SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan peralatan alat tulis kantor yang difasilitasi	Persen	100	100	58.396.920	58.321.970		
				2 SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Persentase barang cetakan dan penggandaan	Persen	100	100	39.539.386	39.537.504		
				3 SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang difasilitasi	Persen	100	100	67.742.386	67.739.004		
				2 PROGRAM PEMERINTAH DAN OTONOMI DAERAH	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,900	Nilai	2600	2,849	3.759.724.153	3.621.348.222		
				1 Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.	Persen	76	70,5	2.734.043.37	2.644.353.302		
				1 Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Laporan kebijakan teknis adm. Pertanahan	dokumen	1	1	2.385.051.291	2.311.513.302		
				2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Laporan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kabupaten/Kota dalam Penerapan SPM dan SPM Prov.	dokumen	1	1	106.775.560	104.011.612		
				3 Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase penyelesaian batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.	persen	76	70,5	242.216.522	228.829.027		
				2 Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Tersusun LKPJ Provinsi Jambi	Dokumen	1	1	778.563.130	734.326.337		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Pelayanan Urusan KDH/WKDH, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota	persen	100	100	161.101.900	138.733.213		
				Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah koordinasi pengembangan otda dan penataan urusan	Dokumen	1	1	159.656.410	147.865.516		
				Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jambi > 2,900	nilai	2600	2,849	457.805.820	447.727.608		

							3	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerjasama yang difasilitasi	kali	9	30	247.117.650	242.667.944		
							1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Jumlah bahan perumusan kebijakan untuk forum forum kerjasama yang difasilitasi, tersusunnya data potensi daerah dalam rangka Kerjasama Luar Negeri skala provinsi, Jumlah ijin ASN Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta pim	kali	5	12	96.657.150	94.338.294		
							2	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah bahan perumusan kebijakan untuk forum forum kerjasama dengan badan usaha yang difasilitasi	kali	9	18	55.235.250	54.872.150		
							3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah dokumen evaluasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah, badan usaha dan swasta	kali	3	3	95.225.250	93.457.500		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Fungsi Lainnya	Biro Hukum		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	100	421.500.000	411.416.700	
					1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	BB	BB	16.500.000	14.868.000	
					1 <i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Dokumen	2	2	5.000.000	4.440.000	
					2 <i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	2	2	5.000.000	4.950.000	
					3 <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	6.500.000	5.478.000	
					2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi yang terpenuhi	Persen	100	100	395.000.000	386.995.200	
					1 <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	3	85.000.000	84.995.200	
					2 <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	310.000.000	301.915.875	
					3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	10.000.000	9.553.500	
					1 <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1	1	10.000.000	9.553.500	
					2 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Produk hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Persen	100	100	2.143.000.000	2.052.673.201	
					1 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Persen	100	100	1.166.000.000	1.119.058.565	

							1	<i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan</i>	Jumlah Produk Hukum pengaturan yang disusun	dokumen	60	110	338.000.000	291.068.465		
							2	<i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan</i>	Jumlah Produk Hukum penetapan yang disusun	dokumen	600	800	148.000.000	148.000.000		
							3	<i>Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya</i>	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan dikelola informasi hukumnya	dokumen	660	852	300.000.000	300.000.000		
							4	<i>Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota</i>	Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	dokumen	90	203	380.000.000	379.990.100		
						2	Fasilitasi Bantuan Hukum		Persentase penyelesaian Permasalahan hukum dan HAM Provinsi Jambi yang difasilitasi	Persen	80	100	977.060.000	933.614.636		
							1	<i>Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum</i>	Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	Kasus	10	14	765.060.000	755.589.736		
							2	<i>Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM</i>	Jumlah masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan	Kasus	11	11	212.000.000	178.024.900		

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4.	01.	01.01.106	Fungsi Lainnya	Biro Kesra Setda Provinsi Jambi		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip		75		941.141.754	775.784.896		
						1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	935.478.956	774.874.896		
						1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	40	40	215.815.836	199.491.174		
						2	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Peserta Rapat/tamu/dll	peserta	480	480	33.120.000	27.154.185		
						3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetakan dan pengandaan	jenis	4	4	168.092.500	163.762.137		
						4	Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	kali	2	2	518.450.620	384.467.400		
						2	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen	100	100	5.662.800	910.000		
						1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	jumlah	822	822	5.662.800	910.000		
						2	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	persen	100	100	90.677.543.477	66.893.155.060		
						1	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Jumlah Dokumen	dokumen	4	4	80.227.823.969	57.803.811.001		
						1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang diKelola	unit	3	3	52.866.963.916	41.579.221.796		
						2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang difasilitasi	lembaga	2	2	27.360.860.053	16.224.589.205		
						2	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen	dokumen	6	6	9.674.740.050	8.422.899.636		
						1	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah dokumen	dokumen	2	2	8.534.356.500	7.440.772.560		
						2	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah dokumen	dokumen	2	2	411.788.300	377.612.324		
						3	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan	Jumlah dokumen	dokumen	2	2	728.595.250	604.514.752		

								Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial								
							3	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Dokumen	dokumen	6	6	774.979.458	666.444.423		
							1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen	dokumen	2	2	324.964.860	285.681.600		
							2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen	dokumen	2	2	224.367.610	193.099.604		
							3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen	dokumen	2	2	225.646.988	187.663.219		

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
4.01.	01.		Fungsi Lainnya	Biro Administrasi Pembangunan		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian program penunjang	persen	100	100				
4.01.	01.1.01					1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Indeks	B	B				
4.01.	01.1.01.01					1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2	2	22.168.200	21.680.900	tidak ada kendala	
4.01.	01.1.01.07					2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	12	12	36.170.000	34.419.900	tidak ada kendala	
4.01.	01.1.06					2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi kantor yang difasilitasi	persen	100	100				
4.01.	01.1.06.02					1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	35.823.234	35.823.234	tidak ada kendala	
4.01.	01.1.06.05					2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	paket	2	2	25.883.840	25.883.840	tidak ada kendala	
4.01.	01.1.06.09					3	Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	60	304.747.744	304.747.738	tidak ada kendala	
4.01.	01.1.08					3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang difasilitasi	persen	12	12	22.760.000	22.719.250		
4.01.	01.1.08.03					1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	22.760.000	22.719.250	tidak ada kendala	
4.01.	08.					2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Bahan Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan	persen	100	100				
4.01.	08.1.01					1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	laporan	12	12	714.382.500	710.490.664		
4.01.	08.1.01.01					1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	4	4	264.100.000	264.100.000	tidak ada kendala	
4.01.	08.1.01.02					2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi APBN	Laporan	4	4	107.162.500	103.289.864	tidak ada kendala	

									Pelaksanaan Pembangunan APBN							
4.0 1.	08.1. 01.0 3						3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	4	4	343.120.000	343.100.800		
4.0 1.	08.1. 02						2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan/ dokumen	12	12	405.638.566	403.603.636		
4.0 1.	08.1. 02.0 1						1	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Yang disediakan	dokumen	4	4	130.999.999	130.379.867		
4.0 1.	08.1. 02.0 2						2	Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	laporan	4	4	155.269.027	154.339.713		
4.0 1.	08.1. 02.0 3						3	Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	dokumen	4	4	119.369.540	118.884.056		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	u	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Fungsi Lainnya	Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 Progrsm Perekonomian dan Pembangunan 1 Pengelola Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian 1 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persentase percepatan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentasi percepatan masalah perekonomian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Persen Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Persen Paket Persen Persen	100 4 5 2 100 5 1 1 100 1 100 100	100 4 5 2 100 5 1 1 100 1 100 100	53,386,933 35,797,000 10,857,900 6,732,033 340,481,470 293,977,400 20,360,000 26,144,070 69,355,840 69,355,840 461,480,100 294,080,100	51,540,215 34,196,215 10,848,000 6,496,000 333,489,348 287,313,464 20,325,000 25,850,884 68,914,730 68,914,730 446,501,752 286,304,343		

							2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	18	18	167,400,000	160,197,409		
							2	Pengelola kebijakan koordinasi SDA	Persentasi percepatan kebijakan masalah SDA	dokumen	12	12	735,793,650	685,816,852		
							1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persen	100	100	362,797,050	326,877,590		
							2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	dokumen	15	15	151,299,800	147,725,050		
							3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	dokumen	10	10	221,696,800	211,214,212		
							3	Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	Persentasi percepatan kebijakan masalah BUMD dan BLUD	dokumen	12	12	831,450,900	756,924,996		
							1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Persen	100	100	536,166,300	464,095,564		
							2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	dokumen	15	15	140,799,800	140,556,532		
							3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Bidang BLUD yang difasilitasi di Provinsi Jambi	dokumen	12	12	154,484,800	152,272,900		

No.			Ururan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerj a	Realis asi Kinerj a	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasala han	Upaya Mengatasi Permasalahan		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Fungsi Lainnya	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi		1	Program Administrasi Umum		Persen	100	83.33	1,663,880,74	1,469,752,894.9			
						1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Adminitrasi Umum Perangkat Darah	Persen	100	83.33	1,043,741,981	871,303,031.00			
							1	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tercapainya Pelayanan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi dalam maupun Luar Daerah	Persen	100	83.33	1,043,741,981	871,303,031.00		
						2	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Penunjang Penataan Adminitrasi Umum	Persen	100	91.67	620,138,763	598,449,863.96			
							1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Penataan Administrasi Umum	Persen	100	91.67	620,138,763	598,449,863.96		
						2	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa		Persen	100	91.67	3,746,110,854	3,556,506,259.1			
						1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tercapainya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	91.67	876,410,100	823,512,654.20			
							1	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Inventarisasi Paket Pengadaan,Jumlah Riset dan Analisis Pasar	Persen	100	91.67	207,449,600	187,049,752.80		
							2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan tepat Waktu	Persen	100	91.67	390,474,900	367,537,611.68		
							3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Periode Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	91.67	278,485,600	268,925,289.72		
							4	Pembinaan Sumber Daya Manusia	Jumlah peningkatan kompetensi SDM UKPBJ	Persen	-	-	-	-		
							2	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tepat Waktu	Persen	100	91.67	1,409,124,600	1,344,527,778.60	
						1	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Periode Pengelolaan SPSE	Persen	100	91.67	1,181,695,040	1,126,706,522.80			
							2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Periode Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	91.67	168,716,800	159,924,091.40		
							3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Periode Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	91.67	58,712,760	57,897,164.40		
						3	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	91.67	1,460,576,154	1,388,465,826.3		
							1	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kelembagaa Pengadaan Barang dan Jasa yang dibina	Persen	100	91.67	550,517,975	525,710,609.52		

							2	Pendampingan Konsultasi dan / atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pendampingan/Konsultasi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa dan jumlah peserta bintek	Persen	100	91.67	910,058,179	862,755,216.80		

No.		Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	01.01	Fungsi Lainnya	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik berbasis teknologi dan informasi	1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	PREDIKAT SAKIP BIRO	Predikat	BB	BB	462,082,630	462,082,630		
					1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Biro	Nilai	BB	BB	66,624,300	66,624,300		
					1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	41,896,300	41,896,300		
					2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	1	1	9,963,000	9,963,000		
				2. Pelaksanaan prosedur kerja yang efektif dengan memanfaatkan teknologi	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Dokumen	1	1	6,885,000	6,885,000		
					4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	4,635,000	4,635,000		
				3. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan perizinan	5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	3,245,000	3,245,000		
					2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	Indeks	88,74	88,74	356,508,330	356,508,330		
					1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	76,709,980	76,709,980		
					2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	19,692,850	19,692,850		
					3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	47,694,500	47,694,500		
					4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket	25	25	212,411,000	212,411,000		
					3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Biro Organisasi	Indeks	88,74	88,74	38,950,000	38,950,000		
					1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	1	1	38,950,000	38,950,000		

						2	Program Penataan Organisasi	SKOR PMPRB PROVINSI JAMBI	Skor	61.50	62.74	1,504,378,750	1,422,232,263	Untuk realisasi SKOR PMPRB masih memakai realisasi Tahun 2021, karena hasil SKOR PMPRB Tahun 2022 akan dikeluarkan oleh Menpan RB pada bulan 3/Maret Tahun 2023	
						1	Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai Tingkat Kematangan Kelembagaan PD Provinsi	Nilai	1290	1352	248,445,000	248,445,000		
								Persentase Rekomendasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota yang diterbitkan	Persentase	100	100	211,187,000	211,154,750		
								Indeks Tingkat Efisiensi Unit dan Persentasi Unit Pemerintah Prov.Jambi	Indeks	1.3	1.192	142,617,500	142,617,500		
						1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen hasil Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Dokumen	1	1	248,445,000	248,445,000		
						2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Dokumen	1	1	211,187,000	211,154,750		
						3	Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja ,dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	1	1	142,617,500	142,617,500		
						2	Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Predikat Reformasi Birokrasi “B”	Persentase	18	27	160,399,400	150,091,325		
								Persentase PD Pemprov dengan Predikat Akuntabilitas ≥B	Persentase	23.25	86	268,391,850	240,409,000		
								Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan Predikat Akuntabilitas ≥B	Persentase	81.81	100				
								Persentase PD yang menerapkan Budaya Kerja	Persentase	34	11.62	168,730,000	125,089,804	Seiring dengan terbitnya surat Edaran Menpan No. 20 Tahun 2021 tentang Core Values BerAkhlaq Pengembangan Budaya Kerja lingkup Daerah Pemprov Jambi untuk sementara ditinjau ulang pelaksanaannya, kegiatan yang dilaksanakan fokus pada pelaksanaan Road Map tahun pertama Core Values ASN	

																berAkhla berupa sosialisasi dan internalisasi 7 nilai dan 21 perilaku ASN berAkhla pada pemerintah Kab/Kota	
								Persentase Pemerintah Kab/Kota yang memiliki kebijakan Budaya Kerja	Persentas e	9	27.27						
								Persentase PD yang memiliki Peta Proses Bisnis	Persentas e	23	51.16	121,850,000	121,789,250				
								Persentase PD yang mengimplementasikan SOP	Persentas e	23	34.88						
								Persentase PD dengan IKM kategori "A"	Persentas e	18	20.93	182,758,000	182,635,634				
								Persentase Pemerintah Kab/Kota dengan IKM kategori "B"	Persentas e	18	72.72						
							1 Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1	1	160,399,400	150,091,325				
							2 Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	1	1	268,391,850	240,409,000				
							3 Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	1	1	168,730,000	125,089,804				
							4 Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	1	1	121,850,000	121,789,250				
							5 Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	1	1	182,758,000	182,635,634				

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Fungsi Lainnya	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi		1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
						1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
						1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	4	4	186.389.600	183.968.396		
						2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja	dokumen	3	3	77.466.306	74.846.234		
						2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
						1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Pendataan Administrasi Kepegawaian Lingkup Setda Provinsi Jambi	dokumen	36	36	267.415.200	265.567.520		
						2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan dan pendidikan	orang	22	22	221.024.000	216.901.202		
						3 Administrasi Umum Perangkat Daerah								
						1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	jenis	2072	2592	191.801.851	175.428.836		
						2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan	jenis	1040	1480	39.461.200	39.461.000		
							Jumlah Cetak DPA Murni							
							Jumlah Cetak DPA Perubahan							
							Jumlah Cetak RKA Murni							
							Jumlah Cetak RKA Perubahan							
							Jumlah Cetak Amplop Dinas							
							Jumlah Cetak Blangko Kwitansi Dinas Kerja NCR							
							Jumlah Cetak Blangko Raming Kertas NCR							
							Jumlah Cetak Map Biro							
						3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	media	36	35	106.743.840	101.022.172		

							4	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	kali	2165	4351	642.010.954	630.034.208		
							4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
							1	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	unit	48	37	36.690.000	36.310.000		
							5	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan								
							1	<i>Penyiapan Materi Pimpinan</i>	Jumlah Materi, Komunikasi dan Dokumentasi pimpinan yang disusun	dokumen	240	240	200.640.200	198.775.200		
									Jumlah materi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disiapkan							
							2	<i>Fasilitasi Komunikasi Pimpinan</i>	Jumlah pidato KDH dan WKDH yang disusun	dokumen	729	1440	239.534.000	232.312.736		
									Jumlah dokumen yang berisi masukan kepada Gubernur/Wagub terkait info tertentu							
									Jumlah penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan Gubernur dan Wagub							
							3	<i>Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan</i>	Jumlah periode Layanan Dokumentasi terhadap Kepala Daerah	periode (bulan)	12	12	1.022.987.600	982.409.502		
							6	Fasilitasi Keprotokolan								
							1	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara</i>	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	kali	750	750	995.361.950	964.389.869		
							2	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	kali	150	148	408.716.800	374.913.000		
							3	<i>Pengelolaan Hubungan Keprotokolan</i>	Jumlah Koordinasi Hubungan Keprotokolan se-Provinsi Jambi	kali	3	3	142.868.180	140.269.660		

No.	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Fungsi Lainnya	Biro Umum Setda Provinsi Jambi	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	 Dokumen Orang Dokumen Laporan Laporan Dokumen Laporan Laporan	 8 8 475 9 9 12 4 18 9	 8 8 475 9 9 12 4 18 9	 269,555,681 59,842,575,073 811,906,300 70,090,680 164,520,000 269,600,000 334,869,380 377,263,042	 267,764,743 59,842,575,073 809,866,300 64,282,500 164,520,000 231,668,979 334,207,171 268,852,806	 	

							4	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
							1	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	761,752,788	759,483,870				
							2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	15	4,744,662,156	4,744,662,156				
							3	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	10	10	261,775,874	230,038,000				
							4	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14	14	1,674,309,743	1,670,650,250				
							5	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8	1,354,355,504	1,349,894,448				
							6	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	4	1,916,308,717	1,907,487,800				
							7	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	4	230,676,000	229,888,780				
							5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
							1	<i>Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	6	6	5.033.191.488	4,900,617,750				
							6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
							1	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	118,587,200	98,609,270				
							2	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	4,524,190,380	3,785,687,552				
							3	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10	10	2,490,009,380	2,489,755,768				
							4	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	5,984,652,800	5,922,629,200				
							7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
							1	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	7	6,652,828,310	6,649,436,891				

							2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	125	125	2,099,182,916	2,035,007,346		
							3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	7	7	731,660,000	731,283,400		
							4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	16	16	61,720,000	61,720,000		
							5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	17	17	4,687,774,377	4,680,828,692		
							8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
							1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	24	24	3,399,257,906	3,107,638,647		
							9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								
							1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	20	20	15,611,239,104	15,400,992,223		
							2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	18	18	5,932,755,764	5,398,531,492		
							3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	3	3	2,843,703,617	2,839,510,865		

No.			Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1			2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Perencanaan	BAPPEDA Provinsi Jambi		1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					15.903.133.556	15.014.693.373		
						1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					211.073.235	210.335.000		
						1	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD					21.387.500	21.005.000		
						2	Evalusi Kinerja Perangkat Daerah					122.455.000	122.450.000		
						3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					17.230.735	17.180.000		
						4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					50.000.000	49.700.000		
						2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					13.080.344.077	12.496.401.096		
						1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					12.807.592.677	12.228.084.896		
						2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD					236.755.200	232.320.000		
						3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD					19.996.200	19.996.200		
						4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					16.000.000	16.000.000		
						3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					238.254.000	49.959.759		
						1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					50.000.000	49.959.759		
						2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					188.254.000	0		
						4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					980.335.246	979.627.892		
						1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					10.000.000	10.000.000		
						2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					486.376.881	485.669.527		
						3	Fasilitasi Kunjungan Tamu					138.960.000	138.960.000		
						4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					344.998.365	344.998.365		
						5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					857.281.320	743.051.148		

							1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					320.401.320	256.812.148		
							4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					536.880.000	486.239.000		
							6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					535.845.678	535.318.478		
							1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan per orangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					9.100.000	8.853.600		
							2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					492.100.000	491.819.200		
							3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					34.645.678	34.645.678		
						2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						5.844.898.549	4.492.966.648		
							1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					3.364.694.300	2.907.710.886		
							1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					2.031.413.800	1.696.433.302		
							2	Pelaksanaan Konsultasi Publik					60.241.200	59.391.200		
							3	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD					23.089.900	23.089.900		
							4	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi					364.575.600	353.311.200		
							5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi					885.373.800	775.485.284		
							2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					205.026.700	159.353.385		
							1	Analisis data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					149.110.700	128.503.385		
							2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan SKPD					55.916.000	30.850.000		
							3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					2.275.177.549	1.425.902.377		
							1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					2.256.647.549	1.407.372.377		
							2	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kab/Kota					18.530.000	18.530.000		
						3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN						5.487.105.000	5.219.959.839		

							PEMBANGUNAN DAERAH												
						1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							850.000.000	787.518.349				
						1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)							55.786.700	48.414.410				
						2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							80.704.100	79.733.400				
						3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan							72.283.600	47.452.100				
						4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD,dan RKPD)							130.490.000	118.750.469				
						5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							358.753.700	358.056.970				
						6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia							151.981.900	135.111.000				
						2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							3.937.015.000	3.744.285.330				
						1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian							350.000.000	332.329.479				
						2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA							717.785.000	633.673.323				
						3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA							2.869.230.000	2.778.282.528				
						3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							700.090.000	688.156.160				
						1	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							33.874.976	33.874.890				
						2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen							128.751.200	128.465.200				

								Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
							3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					277.990.800	275.246.346		
							4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					31.294.024	31.293.924		
							5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					101.511.200	99.423.200		
							6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					126.667.800	119.852.600		

3.4 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan strategis yang ditetapkan. Pada prinsipnya kebijakan strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi telah menetapkan kebijakan strategis melalui Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. Adapun uraian kebijakan strategis tersebut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Kebijakan Strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022

NO.	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4
1.	Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
2.	Penyusunan dan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda)	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda)	Mengoptimalkan peran dan fungsi dalam menggerakkan perekonomian daerah
3.	Penyusunan dan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah provinsi jambi	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (Perseroda)	Meningkatkan Pertumbuhan dan Pengembangan Perekonomian Daerah
4.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Terwujudnya kemandirian pesantren melalui pengakuan, penguatan dan faslitasi pesantren
5.	Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Memperkuat pondasi masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta memahami wawasan kebangsaan.
6.	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah
7.	Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi ASN	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan disiplin, motivasi, prestasi, kinerja dan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
9.	Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo	1. Menjaga Kelestarian Ekosistem di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo 2. Peningkatan Sosial, Ekonomi serta Budaya Masyarakat
10.	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023	Menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi jambi dalam menyusun KUAPPAS Tahun 2023 dan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023

11.	Penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu sistem pemerintahan berbasis elektronik
12.	Rencana Aksi Daerah untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat Daerah yang terpadu dan berkelanjutan	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	1. Penurunan jumlah penggunaan Merkuri; dan 2. Ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri.
13.	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Provinsi Jambi Tahun 2023	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023	Menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Renja Anggaran PD Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 dan RAPBD Tahun 2023
14.	Penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa	1. Pemerataan pembangunan desa di Kab/Kota; 2. Membantu meningkatkan kemampuan keuangan desa; 3. Membantu desa dalam mengurangi angka kemiskinan; dan 4. Membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
15.	Penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Penataan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
16.	menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jambi yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel
17.	Kedudukan Protokol dan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokol dan Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi	Sebagai pedoman pelaksanaan kedudukan protokol, serta hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi
19.	Pengaturan Tata Kelola Data yang Terintegrasi	Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi	Untuk Mewujudkan Keterpaduan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan di Daerah dengan Data yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, dapat Dipertanggungjawabkan, mudah diakses serta dikelola secara seksama, Terintegrasi dan Berkelanjutan
20.	Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 26/Kep.Gub/BPBD/2022 tentang Perpajakan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2022	Upaya dalam rangka mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan serta pemulihan korban <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Provinsi Jambi

21.	Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 27/Kep.Gub/BPBD/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022	Upaya dalam mengorganisasikan dan menggerakkan sumber daya penanganan Covid-19, menjadi pusat informasi terpadu bagi masyarakat dalam penanganan Covid-19 dan memperkuat kontribusi dalam upaya penanganan non bencana alam
22.	Penyelenggaraan jalan khusus sebagai sarana transportasi distribusi hasil pertambangan dan hasil usaha perkebunan	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 69/Kep.Gub/Setda.PRKM/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Jalan Khusus di Provinsi Jambi	Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan lalu lintas akibat transportasi distribusi hasil pertambangan dan hasil usaha perkebunan
23.	Pengendalian inflasi daerah tahun 2022-2024 secara terpadu dan terkoordinasi	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 90/Kep.Gub/Setda.PRKM/2022 tentang Penetapan Peta Jalan (road map) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022	Pedoman dalam mengambil langkah untuk mendukung tercapainya sasaran pengendalian inflasi di masing-masing perangkat daerah dan instansi terkait
24.	Pengendalian Inflasi	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 99/Kep.Gub/Setda.PRKM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022	Mengantisipasi gejala inflasi/perkembangan ekonomi Provinsi Jambi
27.	Rumusan Kebijakan Perencanaan dan Pemantauan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jambi	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 308/Kep.Gub/Bappeda-3.3/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2022	Sebagai upaya dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi
28.	Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 362/Kep.Gub/Bappeda-3/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi	Mengkoordinasikan, mensinergikan dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Secara Efektif, Konvergen dan Terintegrasi dengan Melibatkan Lintas Sektor ditingkat Provinsi
29.	Siaga bencana kebakaran hutan dan lahan	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 420/Kep.Gub/BPBD/2022 tentang Penunjukan Personil dan Organisasi Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2022	Upaya Pengendalian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi Tahun 2022
30.	Pelaporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 452/Kep.Gub/ITPROV-6/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola <i>Whistleblowing System</i> di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Upaya Penanganan dan Tindakan Cepat, Tepat dan Bertanggungjawab atas Pengaduan ASN Terhadap Penyimpangan didalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
31.	Optimalisasi Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Jambi	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 497/Kep.Gub/DP3AP-2.2/2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Jambi	Terbentuknya Kelompok Kerja untuk Memfasilitasi Pengarusutamaan Gender
32.	Pengendalian Gratifikasi	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 557/Kep.Gub/ITPROV/2022 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Jambi	Upaya Pencegahan Praktek Gratifikasi Provinsi Jambi
33.	Penataan dan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batu Bara	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 675/Kep.Gub/Bappeda-2.2/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Angkutan Batu Bara di Provinsi Jambi Tahun 2022	Sebagai bentuk Upaya Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum Angkutan Batu Bara di Provinsi Jambi
34.	Percepatan Pembangunan Proyek Strategis di Provinsi Jambi	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 824/Kep.Gub/Setda.PRKM-1.1/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Proyek Strategis di Provinsi Jambi	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Mendukung Perekonomian Nasional, melalui Upaya Percepatan Proyek-Proyek yang dianggap Strategis

35.	Pembangunan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 825/Kep.Gub/DP3AP2-2/2022 tentang Pembentukan Pengurus Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi Periode 2022-2024	Wujud Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
36.	Kebijakan penanggulangan dampak inflasi	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 962/Kep.Gub/DKP-1.2/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial berupa Uang Kepada Nelayan atas Dampak Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Tahun 2022	Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial untuk Nelayan yang Terkenan Dampak Kenaikan Harga BBM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur
37.	Program Dumisake	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 977/Kep.Gub/DPUPR-7/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Bedah Rumah Program Dumisake Kegiatan Perbaikan Rumah tidak Layak Huni dalam kawasan permukiman dengan luas 10 Ha sampai dengan di bawah 15 Ha pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022	Mewujudkan Program Dumisake yang Tepat Sasaran melalui Kegiatan Bedah Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022
38.	Pengendalian Dampak Inflasi	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1023/Kep.Gub/Dishub/2022 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial atas dampak kenaikan harga BBM kepada Pengemudi Ojek di Provinsi Jambi	Efektifitas Penyaluran Bantuan Sosial untuk Pengemudi Ojek yang terkena Dampak Kenaikan Harga BBM
39.	Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1032/Kep.Gub/DISKES-4.2/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 440/Kep.Gub/Diskes-4.2/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan dalam rangka pencegahan, Pengendalian dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) Provinsi Jambi	Dalam rangka pencegahan, Pengendalian dan Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) Provinsi Jambi dengan Kategori Suspek dan Konfirmasi Covid-19 Gejala Sedang dan Berat
40.	Program Dumisake	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1051/Kep.Gub/Diskop.UKM-1/2022 tentang Penetapan Penerima Modal Bantuan Kerja bagi usaha mikro, kecil dan menengah dari keluarga penerima manfaat program keluarga harapan data terpadu kesejahteraan sosial kabupaten/kota se provinsi jambi tahun 2022	Tercapainya Program Dumisake yang Tepat Sasaran berupa Pemberian Bantuan Modal Kerja bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2022 Berdasarkan Data Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
41.	Bantuan Sosial kepada Kelompok Tani	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1083/Kep.Gub/DISHANPAN-1.1/2022 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan Sosial berupa uang sektor Ketahanan Pangan Tahun 2022	Tercapainya Program yang Tepat Sasaran berupa Pemberian Uang Sektor Ketahanan Pangan
42.	Pengendalian Dampak Inflasi	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1096/Kep.Gub/Sosdukcapil-1.1/2022 tentang Penetapan Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Langsung Tunai Tukang Becak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi Tahun 2022	Tercapainya Program yang Tepat Sasaran berupa Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Tukang Becak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
43.	Hibah kepada Pelaku UMKM	Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1103/Kep.Gub/DISKOP.UKM-1/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Peralatan Mesin Pencabut Bulu Ayam untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022	Sebagai bentuk Dukungan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Pelaku UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber: JDIH Provinsi Jambi dan Data Olahan Biro Hukum

3.5 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAMBI ATAS LKPJ GUBERNUR JAMBI TAHUN ANGGARAN 2021 YANG DITINDAKLANJUTI PADA TAHUN ANGGARAN 2022

Tabel 3.4
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun 2021 Provinsi Jambi
yang ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2022

BIDANG : PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

NO.	REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021	TINDAKLANJUT	TUJUAN/ MASALAH YANG DISESUAIKAN	PERANGKAT DAERAH/ BIRO
1.	Sebagaimana di jelaskan dalam pembahasan LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2021 terhadap dua Indikator yang belum tercapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu indikator cakupan petugas perlindungan masyarakat dan indikator tingkat waktu tanggap (<i>Respons Time Rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran DPRD menilai bahwa SatPol PP perlu memperkuat koordinasi antar Kabupaten/Kota dapat dioptimalkan. Begitu juga berkenaan dengan keterbatasan SDM dan sapras pemadam kebakaran di Kabupaten/Kota DPRD menilai bahwa pematangan tahapan perencanaan yang dibuat melalui kajian, evaluasi, dan inventarisir kebutuhan.	1. Minimnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap pemberdayaan serta pembentukan anggota Satlinmas Kabupaten/Kota 2. Perekrutan Anggota Satlinmas bersifat sukarela 3. Sumber Daya Manusia yang terbatas 4. Sosialisasi pembentukan Satlinmas Desa/Kelurahan belum maksimal 5. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan pada kabupaten/kota 6. Menyurati Dinas Damkar kabupaten/kota serta Satpol PP terkait laporan WMK per-triwulan 7. Monitoring dan Evaluasi 8. Melaksanakan Rapat Kerja Damkar Kab/Kota se-Provinsi Jambi 9. Melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi Pembinaan Aparatur Damkar di kab. Tanjab Barat	1. Dukungan Pemerintahan Kab/Kota 2. Penambahan anggaran 3. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan terkait pembentukan Satlinmas Desa/Kelurahan berdasarkan Permendagri No. 26 Tahun 2020 4. Meningkatkan sosialisasi terkait pembentukan Satlinmas ke Kabupaten/Kota di desa/kelurahan 5. Agar Kabupaten/Kota menganggarkan Pos Damkar di masing-masing kecamatan, guna tercapainya Response Time Rate 6. Menambah armada Damkar 7. Membentuk Relawan Damkar 8. Diklat bagi Aparatur Damkar 9. Menambah Anggaran pada OPD tersebut	Satpol PP Provinsi Jambi
2.	Berkenaan dengan capaian indikator kinerja BPSDM Provinsi Jambi bila diukur dengan jumlah peserta yang dinyatakan telah selesai dan lulus dengan nilai minimal baik saat mengikuti ujian pengembangan SDM memang realisasi indikator kinerjanya mencapai 100% dari target kinerja 100%. Namun jika dibandingkan jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 767 (tujuh ratus enam puluh tujuh) orang dari target 840 (delapan ratus empat puluh) orang realisasinya belum mencapai 100%, sedangkan jumlah pegawai Pemerintahan Provinsi Jambi sebanyak 10585 orang. Apalagi bila merujuk pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203, bahwa	1. BPSDM Provinsi Jambi telah merumuskan Peraturan Gubernur Tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi 2. BPSDM Provinsi Jambi akan melaksanakan pengembangan kompetensi secara daring, blended learning, podcast, seminar, webinar 3. BPSDM Provinsi Jambi sebagai lembaga terakreditasi dalam menyelenggarakan pengembangan SDM, akan mensosialisasikan peran BPSDM dan berkoordinasi mengenai data pengembangan SDM yang dilaksanakan	1. Penyusunan kebijakan pengembangan SDM 2. Pemenuhan sarana dan prasana pengembangan SDM	BPSDM Provinsi Jambi

	Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Pansus I DPRD Provinsi Jambi menilai bahwa peserta yang mengikuti ujian pengembangan SDM sebanyak dalam 767 dalam satu tahun masih sangat minim dan belum optimal. Oleh karena Pemerintah Provinsi Jambi melalui BPSDM perlu menambah daya tampung jumlah peserta yang perlu diikuti dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan tersebut. Terkait dengan seluruh kegiatan-kegiatan Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan Pemerintahan Provinsi agar dapat di Pusatkan di gedung Diklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi. Begitu juga dengan kegiatan seminar, workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh lintas OPD Pemerintah Provinsi Jambi agar dilaksanakan di Gedung diklat BPSDM Provinsi, dengan harapan agar dapat menjadi Inkam PAD Provinsi Jambi. Kemudian berkenan dengan pelayanan masih terdapat kekurangan dan perlu dibenahi yaitu mengenai pengawasan, pelayanan dan sarana jangkauan internet serta pelaksanaan Pendidikan dan Latihan dengan pola Hybrid serta program dan kegiatan yang terintegrasi dengan kebutuhan daerah dan program pusat.	oleh OPD lain 4. BPSDM secara bertahap akan menetapkan BPSDM menjadi <i>corporate university</i> 5. BPSDM akan melengkapi sarana dan prasarana dalam pelayanan pengembangan SDM		
3.	1. Berkenaan dengan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebagaimana Permen PAN RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka DPRD mendorong agar Pemerintah Provinsi Jambi segera mungkin menindak lanjuti dan melakukan penyetaraan jabatan sebelum jatuh tempo sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/2237/OTDA tanggal 28 Maret 2022 hal Tindak Lanjut Proses Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota, bahwa bagi Pemerintah Daerah yang belum menyelesaikan pelaksanaan Penyetaraan Jabatan dapat diusulkan kembali ke Menteri Dalam Negeri dan melaksanakan	Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan pelantikan terhadap 90 jabatan yg disetarakan sesuai SK Gubernur Jambi Nomor : 1113/Kep.Gub/BKD-4.3/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021. Adapun untuk jabatan lainnya saat ini pemprov jambi tengah melakukan evaluasi terhadap efektifitas sistem kerja penyetaraan jabatan sehingga nantinya tidak menghambat kinerja pemprov jambi dan merugikan pns terkait	Untuk efektifitasnya kinerja Pemerintah Provinsi Jambi	BKD Provinsi Jambi

	pelantikan sampai dengan 31 Mei 2022.			
	2. Menindak lanjuti Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 4047/SE/BKD-3.1/2021 tentang Moratorium Mutasi PNS Masuk ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, agar moratorium tersebut benar-benar menjadi acuan dan dapat menjadi pedoman dalam melakukan Mutasi PNS ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Jika dalam kondisi tertentu mengharuskan melakukan mutasi dan perpindahan PNS dari daerah ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, agar dapat dilakukan dengan selektif sesuai dengan kebutuhan, termasuk perpindahan Tenaga Pendidik tingkat SLTA.	Rekomendasi telah dipedomani, terkait Poin 6 Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 4047/SE/BKD-3.1/2021 tentang Moratorium Mutasi PNS Masuk ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi disebutkan Mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi Jambi dapat dikecualikan apabila terdapat formasi yang sangat dibutuhkan dan belum dapat terpenuhi secara internal, dengan persetujuan dari PPK. Dikarenakan kondisi SDM Pemerintah Provinsi Jambi pada formasi tertentu seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan beberapa tenaga teknis lainnya masih sangat kekurangan, sehingga berpedoman pada penjelasan poin 6 diatas, Gubernur Jambi selaku PPK dapat mengakomodir permohonan mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi jambi guna mengisi gap jumlah personil saat ini.	Mutasi dan perpindahan PNS dari daerah ke lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, telah dilakukan selektif sesuai dengan kebutuhan dalam ANJAB & ABK	BKD
4.	Dengan minimnya data yang dimiliki oleh Biro Hukum terkait dengan jumlah Perda yang telah memiliki aturan turunan atau Pergub, maka DPRD menilai bahwa Biro Hukum masih belum menginventarisir Perda yang telah memiliki aturan turunan atau Pergub di Provinsi Jambi, sehingga data inventaris Biro Hukum belum optimal, oleh karena itu DPRD menyarankan agar segera benahi dan data inventaris Produk Hukum baik berupa Perda maupun Pergub di Provinsi Jambi.	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD, Biro Hukum telah melakukan inventarisir terhadap Perda yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan turunan atau Pergub dan hasil inventarisir disusun dalam Daftar Rekap Perda yang belum ditindaklanjuti. Selanjutnya Biro Hukum telah menyurati dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah pemrakarsa Perda agar segera menyusun rancangan Peraturan Gubernur sebagai aturan turunan dari Perda terkait.	Setelah dilakukan inventarisir dapat diketahui perda yang perlu ditindaklanjuti dengan aturan turunan, dan aturan turunan atau pergub dapat segera disusun oleh perangkat daerah pemrakarsa, sehingga tercipta produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Biro Hukum
5.	1. Berkenaan dengan wewenang Biro Pemerintahan terhadap penyusunan LKPJ Gubernur, DPRD menilai Pemerintah Provinsi perlu memperkuat koordinasi antar OPD agar dapat menyamakan persepsi terkait dengan pedoman, format, mekanisme dan aturan penyusunan LKPJ. 2. Selanjutnya sebagaimana temuan DPRD di lapangan berkenaan dengan penataan pejabat di daerah yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang Pendidikan, DPRD menilai bahwa Biro Pemerintah perlu mencari celah agar Pemerintah	1. Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan OPD lain dalam hal penyamaan persepsi dan penguatan pemahaman baik secara substansi maupun mekanisme penyusunan LKPJ, sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Menindaklanjuti		Biro Pemerintahan dan Otda

	Provinsi bisa memberikan masukan dan pandangan terhadap penentuan pejabat di daerah khususnya Camat. Oleh karena itu diperlukan kegiatan rapat koordinasi camat se-provinsi Jambi dan kegiatan rapat koordinasi Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Seyogyanya kegiatan tersebut sangatlah penting karena menyangkut reward atas prestasi kinerja dan dapat mendorong Pemerintah Daerah agar memilih Pejabat Daerah yang berkualitas sesuai dengan kompetensinya yang dibutuhkan.	rekomendasi mengenai penataan pejabat di daerah yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang Pendidikan, Biro Pemerintahan dan OTDA telah melaksanakan kegiatan berupa : a. Terkait penentuan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang memuat kriteria dan kualifikasi latar belakang pendidikan diatur oleh Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di bawah koordinasi Biro Organisasi; b. Biro Pemerintahan dan OTDA telah melaksanakan rapat koordinasi Camat se Provinsi Jambi yang dilaksanakan 2 (dua) kali pada tahun anggaran 2022. Rapat dimaksud dilaksanakan pada tiap semester tahun anggaran berjalan, dengan mengusung tema terkait isu-isu strategis di Provinsi Jambi; c. Dalam rangka menilai dan mengapresiasi kinerja camat, Gubernur Jambi melalui Biro Pemerintahan dan OTDA melaksanakan kegiatan pemilihan Camat Teladan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran dengan memberikan <i>reward</i> berupa uang pembinaan untuk camat peringkat 6 (enam) besar pada penilaian tersebut; d. sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas camat, pada tahun Anggaran 2023 Biro Pemerintahan dan OTDA akan menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis peningkatan kapasitas camat dengan menghadirkan 144 camat se Provinsi Jambi.		

6.	Yang menjadi catatan bagi DPRD terkait dengan laporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ialah berkenaan dengan data awal yang menggambarkan sejauh mana tingkat pengetahuan wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh masyarakat atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program peningkatan wawasan kebangsaan, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan sasaran. Selanjutnya DPRD belum melihat dengan jelas alat ukur keberhasilan penerapan program tersebut, indikator atau standar nilai tingkat keberhasilan. Sehingga nilai ukurnya masih abstrak dan subjektif.	Dalam pelaksanaan kegiatan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi sejauh ini telah melaksanakan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat yang diisi oleh Narasumber dari Pihak Tni/Polri Akademisi dari Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan sertifikat dan juga Pimpinan Forum Kemasyarakatan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi dimana jenis kegiatan yang dilaksanakan berupa: 1. Sosialisasi kesadaran Belanegara yang diikuti oleh Generasi Muda sebanyak 100 orang peserta sosialisasi 2. Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang diikuti oleh 100 orang peserta dari tenaga pendidik di sekolah dengan tujuan lebih meningkatkan pemahaman tenaga pendidik terhadap wawasan kebangsaan sehingga dapat ditularkan kepada anak didiknya di sekolah dan lingkungan sekitar 3. Pembinaan Forum Wawasan Kebangsaan diikuti oleh 120 orang peserta rakor yang terdiri dari tokoh etnis masyarakat adat yang ada sekabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi serta 28 orang anggota pengurus forum pembauran kebangsaan provinsi jambi 4. Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi dalam bentuk rapat koordinasi daerah yang diikuti oleh 120 orang peserta dimana kegiatan ini merupakan hasil rekomendasi dari DPRD provinsi jambi terhadap penambahan dana bagi Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Sehingga sejauh ini masyarakat yang telah mendapatkan pemahaman peningkatan wawasan kebangsaan sebanyak 440 orang peserta, dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Provinsi Jambi seluruh peserta sangat antusias. dengan ditujukannya banyaknya diskusi tanya jawab antara	Kesbangpol Prov.Jambi

	peserta dengan Narasumber. Terkait indikator tingkat keberhasilan dari pendidikan wawasan kebangsaan ini tidak dapat dilihat secara nominal angka dikarenakan wawasan kebangsaan merupakan upaya pembentukan karakter masyarakat dimana pemahaman masyarakat bisa saja pendalamannya pada saat pemberian materi akan tetapi pada pengaplikasiannya tergantung pada keadaan lingkungan sekitar. Diharapkan dengan adanya pendalaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dapat sedikit saja menyangkut pada cara berpikir peserta. Menurut kondisi saat ini keberhasilan dari pendalaman wawasan bagi masyarakat sudah bisa dikatakan mendapatkan hasil yang baik karena terciptanya situasi Provinsi Jambi yang aman tertib dan terkendali. Perhitungan persentase hasil yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Pada Anggaran Tahun 2021 terkait kegiatan wawasan kebangsaan sebesar 209,5 % melebihi target Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi sebesar 200 orang peserta (Berdasarkan rencana strategi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi) dan target peserta yang mendapat pemahaman wawasan kebangsaan sebanyak 440 orang. Hal ini terwujud berkat bantuan DPRD Provinsi jambi yang memberikan rekomendasi alokasi dana, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan wawasan kebangsaan dapat melebihi target Badan Kesbangpol Provinsi Jambi yang telah tertuang kedalam rencana strategi Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	

7.	Berkenaan dengan program penelitian yang dilaksanakan oleh Balitbangda semestinya tema penelitian jangan hanya didominasi oleh beberapa kelompok bidang saja. Namun perlu menyandingkan tema penelitian dengan visi misi dan program kerja yang akan dijalankan pemerintah akan datang, termasuk tema mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, kondisi adat dan Lembaga adat yang akan menjadi sasaran program Dumisake dimasa yang akan datang, sehingga pemerintah provinsi dapat mengukur dan memetakan masalah sebelum menerapkan program tersebut. Kemudian dari laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi tidak ditemukan persoalan dan solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebagaimana format penyusunan LKPJ.	Terhadap Rekomendasi DPRD Provinsi Jambi atas Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Gubernur Jambi Tahun 2021 yang intinya perlu menyandingkan tema penelitian dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, pada prinsipnya kami sangat sependapat dan sudah ditindaklanjuti pada penelitian Tahun 2022 diantaranya tentang Pengembangan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Geopark Merangin Jambi menuju warisan dunia dan identifikasi Potensi daerah dan pengembangan Komoditas Sektor Basis menuju Kawasan Ekonomi baru SENTUSA. Terhadap tema lain akan dilanjutkan dengan menyampaikan surat permintaan topic penelitian pada setiap perangkat daerah yang diarahkan pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Jambi.	Untuk Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan Balitbangda Provinsi Jambi agar Rekomendasi/ Naskah Akademik/Model hasil penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan oleh Stakeholder.	Balitbangda
8.	Sebagaimana dijelaskan pada bagian penjelasan berkenaan dengan usulan pembetulan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak disetujuinya oleh Kemendagri, DPRD merekomendasikan agar dapat dilakukan pengkajian kembali dan diusulkan kembali. DPRD menilai pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut sangat penting dan mendesak untuk dilakukan dalam waktu yang cepat dalam rangka menghadapi Pemilu serentak tahun 2024	Penataan kelembagaan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan penataan terhadap Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut : 1. Perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional RI Nomor B-544/I/OT.00.00/6/2022 tanggal 13 Juni 2022 Hal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi. 2. Pengembangan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi menjadi		Biro Organisasi

		2 (dua) Dinas, yaitu Dinas Sosial Provinsi Jambi, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi. 3. Perubahan nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Jambi. Mempedomani ketentuan ayat (2) Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi telah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Otonomi Daerah usulan permohonan penataan Perangkat Daerah dan UPTD untuk difasilitasi. Permohonan tersebut telah kami sampaikan melalui 3 (tiga) surat Gubernur Jambi, yaitu: 1. Surat Nomor S-061/1298/Setda.Org.1.1/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Penataan Perangkat Daerah dan UPTD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi; 2. Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/1801/Setda.Org.1.1/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Mohon Kesiediaan Waktu Memfasilitasi Penataan Perangkat Daerah dan UPTD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi; dan 3. Surat Gubernur Jambi Nomor S-061/1829/Setda.Org.1.1/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Mohon Persetujuan/Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Balitbangda Provinsi Jambi menjadi BRIDA Provinsi Jambi. Dari beberapa Perangkat Daerah dan UPTD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang diusulkan untuk difasilitasi dan mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri, sampai dengan saat ini hanya perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan	

		Pengembangan Daerah Provinsi Jambi menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jambi yang telah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi. Sementara usulan penataan Perangkat Daerah dan UPTD lainnya belum mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.		
9.	Beberapa hal yang patut menjadi perhatian terhadap laporan biro umum ialah tidak ditemukan menjelaskan mengenai persoalan dan solusi pada laporan biro umum sebagaimana mekanisme dan Format LKPJ yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu biro umum diharapkan dapat berkoordinasi dengan biro yang membidangi dan dapat mengikuti mekanisme penyusunan LKPJ.	Biro Umum Setda Provinsi Jambi telah berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi Jambi, sehingga mekanisme dan format laporan LKPJ telah sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Mekanisme dan format LKPJ yang sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Biro Umum
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jambi, DPRD menilai penting Terkait dengan kegiatan gemar membaca tingkat Provinsi yang menjadi salah satu kegiatan sekali mengetahui persentase tingkat kesadaran membaca masyarakat Jambi, hal ini dianggap perlu karena dapat dijadikan acuan dan standar serta tolak ukur dalam menentukan sasaran kegiatan Gemar Membaca Tingkat Provinsi tersebut.	Pada Tahun 2022, Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Provinsi Jambi sebesar 63,75 dengan kategori tinggi. Dibandingkan dengan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Provinsi Jambi pada Tahun 2021 sebesar 57,52 dapat dikatakan bahwa kegemaran membaca masyarakat meningkat.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi telah melakukan Kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia di Provinsi Jambi secara mandiri. Dengan pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang perpustakaan dapat meningkatkan kegemaran membaca masyarakat khususnya di Provinsi Jambi.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
11.	Dari penjabaran persoalan yang disampaikan dalam LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2021, khususnya berkenaan dengan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi maka DPRD merekomendasikan beberapa hal yang dianggap cukup penting, diantaranya provinsi Jambi perlu memiliki aplikasi jaringan terintegrasi antar pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota se-Provinsi Jambi. Aplikasi jaringan terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota dalam meningkatkan akses dan mempermudah akses dalam penyelenggaraan pemerintahan	Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan terintegrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah telah menetapkan tiga aplikasi umum yang telah digunakan oleh K/L/D yaitu : LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) Aplikasi yang telah ditetapkan sebagai aplikasi umum wajib diterapkan dan digunakan di Daerah, jika ada aplikasi serupa akan dilakukan evaluasi untuk proses integrasi		Diskominfo

		dengan aplikasi umum, hal ini dimaksudkan untuk menata pembangunan aplikasi di Daerah yang pembangunannya memerlukan anggaran cukup besar namun kurang memberikan hasil maksimal. Diluar aplikasi umum Dinas Kominfo Provinsi Jambi telah berbagi pakai aplikasi Sistem Absensi Online (SiAbon) dengan kota Sungai Penuh dimana aplikasi Siabon juga digunakan oleh Kota Sungai Penuh dalam upaya peningkatan disiplin ASN melalui penerapan absen online. Sedangkan untuk aplikasi yang terintegrasi antara Provinsi dan Kabupaten Kota telah dibangun oleh Dinas Kominfo beberapa aplikasi yang dikelola oleh OPD di Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota yaitu : Aplikasi Pelaporan Dinas Kesehatan Aplikasi Peminjaman Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan. (DTPHP) Aplikasi Si Gadis Jambi (Sistem Informasi Keluarga Dasa Wisma) PKK Provinsi Jambi		
12.	1. Rendahnya atau tidak tercapainya Persentase Target peningkatan kontribusi Mess Jambi terhadap PAD dan rendahnya persentase capaian indikator kinerja Peningkatan Kunjungan Wisata ke Anjungan Jambi TMII (domestik dan mancanegara). DPRD mendorong agar pemerintah Provinsi Jambi menertibkan aturan yang mendukung peningkatan pendapatan Mess Jambi, khususnya berkaitan dengan kewajiban bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas agar memanfaatkan Mess yang disediakan dan dikelola oleh Badan Penghubung. 2. Badan Penghubung perlu mempersiapkan SDM yang berkualitas dan mampu menjawab tentang dimasa akan datang. 3. Rendahnya persentase capaian indikator kinerja Peningkatan Kunjungan Wisata ke Anjungan Jambi TMII (domestik dan mancanegara). Kemudian terkait dengan kegiatan dan peningkatan	Diimplementasikannya Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 92/SE/GUB.BAPEGDAPRO V-1/V/2022 tanggal 24 April 2022 oleh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Terkait kesiapan SDM dengan di Anggarkannya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tahun 2023. Untuk Mendorong Peningkatan kunjungan dan Inovasi Seni Budaya didorong melalui Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelesatarian Seni Budaya, menggandeng Kabupaten/Kota terlibat event-event Nasional. Serta Sanggar SPM (Selaras Pinang Masak) wadah berkesenian milik Anjungan Jambi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selalu berinovasi dan tampil diajang-ajang kompetisi.		Badan Penghubung

	kunjungan ke anjungan di TMII Badan Penghubung perlu melakukan inovasi-inovasi kegiatan sehingga peran dan fungsi anjungan tersebut bisa optimal			
13.	Berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh DPRD terhadap LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2021, DPRD menilai bahwa realisasi anggaran yang hanya 61.58% tersebut sangatlah tidak optimal. Beberapa urusan/bidang urusan pemerintahan daerah badan program kegiatan capaian pelaksanaannya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, diantaranya persentase peningkatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah persentasenya hanya mencapai 68,89%, peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Daerah hanya mencapai 26,67% kemudian pada tahun 2021 pelaksanaan Medical Check Up DPRD 0%. Berdasarkan pengkajian dan analisa terhadap kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Jambi dan dari penelusuran dokumen LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggran 2021, DPRD menilai bahwa dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah belum dilakukan dengan baik dan belum dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kedepannya perlu dioptimalkan terutama pada saat tahapan perencanaan harus melakukan inventarisir kebutuhan yang didasarkan pada pelaksanaan program tahun sebelumnya serta berdasarkan atas kajian tantangan dan persoalan yang akan dihadapi akan datang. Pada Tahun 2021 yang lalu, Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD banyak yang tidak terakomodir dengan baikh satunya karena adanya reconfusing anggaran. Mohon kiranya menjadi perhatian pada tahun mendatang. Pokir ini merupakan dokumen yang sangat penting karena di himpun langsung oleh para anggota DPRD ketika reses yang merupakan aspirasi masyarakat. Pokok-pokok pikiran ini merupakan dasar yang strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar sejalan dengan visi-misi Pembangunan Provinsi Jambi. Mohon kiranya di Tahun mendatang Program Usulan	Perlunya pengoptimalan terutama pada tahapan perencanaan harus melakukan inventarisir kebutuhan yang didasarkan pada pelaksanaan program pada tahun sebelumnya serta berdasarkan atas kajian tantangan dan persoalan yang akan dihadapi akan datang. Terkait rekomendasi pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Tahun Anggaran 2021masih belum terakomodir, dikarenakan <i>refocusing</i> anggaran, bahwasanya anggaran pokok-pokok pikiran DPRD ditindaklanjuti dan dibahas pada forum perangkat daerah, khususnya Sekretariat DPRD Provinsi Jambi hanya memfasilitasi anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat (Reses). Kemudian ditindaklanjuti pada forum perangkat daerah, rekomendasinya akan saling berkoordinasi terkait merancang dalam, pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga usulan anggaran pokok-pokok pikiran DPRD tercapai sesuai targetnya.	Terkait rekomendasi DPRD terhadap program kegiatan Sekretariat DPRD yang belum optimal di antaranya : 1. kegiatan administrasi barang milik daerah 2. kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 3. kegiatan medichal check up DPRD dari kegiatan tersebut untuk penyelesaian dari sekretariat DPRD lebih memperhatikan kebutuhannya dan melaksanakannya sesuai dengan target renja sekretariat DPRD	Setwan

	Proposal DPRD Provinsi Jambi dijadikan perhatian yang harus direalisasikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan agar predikat yang WTP (wajar tanpa pengecualian) yang merupakan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi yang disampaikan oleh BPK RI pada tahun 2021 merupakan yang ke 9 (Sembilan) kalinya diperoleh Provinsi Jambi. Tentunya ini menjadi Prestasi yang patut dibanggakan dan dipertahankan. Untuk itu agar kiranya tindak lanjut terhadap temuan catatan dan rekomendasi agar bisa segera dilaksanakan dengan baik.			
BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN				
14.	1. Agar Dinas TPHP benar-benar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang bersifat hibah dan pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi kelompok petani dan peternak lokal serta penyiapan tenaga PPL yang representatif. Selain bersungguh-sungguh dalam penjangkaran aspirasi/usulan masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangannya. 2. Dinas TPHP benar-benar mempedomani dan mengikuti petunjuk Kementerian Pertanian, khususnya dalam kegiatan hibah ternak yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Mengingat kelemahan yang terjadi selama ini berupa ketidakseriusan meneruskan maupun memverifikasi usulan kelompok masyarakat yang ditunjukkan pada kementerian terkait.	1. a Untuk Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Dinas TPHNAK telah menyediakan dana di DPA tahun anggaran 2022 untuk pada sub sector Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertenakan Provinsi Jambi b. Pada Dinas TPHNAK Provinsi Jambi menganggarkan Bimtek Pengembangan Kapasitas KEP (Kelembagaan Ekonomi Petani) c. Untuk penjangkaran aspirasi/usulan masyarakat pada sub sector Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertenakan, Dinas TPHNAK telah melakukan tahapan mulai dari Musrenbangtan Provinsi, Pengajuan Proposal secara regular atau Pokir diajukan ke Gubernur Jambi. 2. a Dalam proses pengusulan kegiatan APBN melalui aplikasi BIMA e-proposal sesuai dengan Permentan Nomor 41/Permentan/OT.14 0/3/2014 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis <i>E-PLANNING</i> b. Kegiatan APBN Kementerian Pertanian Ditjen Pertenakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan secara 2 metode : -Melalui DIPA Dinas	1. a Telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan pada sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pertenakan untuk kegiatan yang bersifat diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk barang, benih ataupun bibit ternak Meningkatkan jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) melalui Bimtek yang diikuti oleh Penyuluh Pertanian (PPL) b. Menerima aspirasi/usulan masyarakat sesuai dengan syarat, ketentuan, tupoksi dan kewenangannya 2. Menerima dan memverifikasi usulan kelompok masyarakat sesuai syarat, ketentuan, tupoksi dan kewenangannya.	DINAS TPHP

		TPHNAK Prov. Jambi -Melalui DIPA Kementan Ditjen PKH Untuk kegiatan yang berasal dari DIPA Dinas TPHNAK Prov. Jambi, kita berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam penentuan CPCL dan memverifikasi e-proposal yang sesuai dengan dan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk kegiatan yang berasal dari DIPA Kementan Ditjen PKH, mereka melakukan proses pengadaan dan langsung mengirimkan/dropping ternak ke kelompok tani di Kabupaten/Kota, sedangkan Dinas Provinsi hanya sebatas pengawalan dan pengawasan tanpa dilibatkan dalam proses penunjukkan dan pengadaannya.		
15.	1. Agar Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Jambi dapat saling berkoordinasi, utamanya dalam hal penyajian data-data penting seperti realisasi penggunaan dana desa sebesar Rp. 60 Juta/desa/kelurahan. Mengingat Bakeuda berperan sebagai penyalur bantuan dan bertanggungjawab dalam transfer serta bukti transfer dari PPKD ke Rekening RKUD Kab/Kota. Sedangkan pertanggungjawaban pemanfaatan dana merupakan kewajiban desa/kelurahan sebagai pengelola dan bantuan tersebut. Untuk pelaksanaan teknis atas pemberian keuangan desa/kelurahan adalah dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang berperan dalam hal pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan keuangan desa/kelurahan tersebut. Informasi yang Pansus terima, bahwa data pemanfaatan tersebut belum dikoordinasikan sehingga belum tersaji dalam LKPJ Gubernur tahun 2021 2. Agar Bakeuda Provinsi Jambi dapat benar-benar meningkat PAD yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan	1. Pada tahun 2022 akan disajikan data bantuan keuangan desa dan kelurahan di LKPJ Gubernur 2. Pada prinsipnya kami setuju atas rekomendasi dari DPRD Provinsi Jamb, dimana BPKPD Provinsi Jambi akan melaksanakan Pemutihan Total pada tahun 2023 sehingga masyarakat yang masih memiliki plat luar provinsi jambi dapat memutasikan kendaraannya dan untuk kendaraan yang jatuh tempo dapat mempergunakan kesempatan pemutihan ini	1. Akan tergambarkan seluruh penggunaan pagu kegiatan di LKPJ Gubernur 2. Masyarakat yang masih memiliki kendaraan plat luar masih ada kesempatan untuk memutasikan kendaraan tersebut menjadi plat provinsi jambi	BPKPD

	BBN KB. Diantaranya dengan cara penerbitan, mendesak murasi kendaraan bermotor polisi luar Jambi menjadi kendaraan bernopol Jambi. Hal ini untuk mendukung besarnya beban belanja daerah untuk perbaikan ruas-ruas jalan strategis terutama yang dilalui oleh kendaraan umum di Provinsi Jambi. Terlebih data yang disampaikan, ribuan kendaraan baik jenis roda dua dan roda empat setiap tahun masuk ke Provinsi Jambi, yang tentu saja menjadi potensi Pajak yang sangat besar			
16.	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kiranya dapat membangun menyusun tupoksi kerja yang jelas, tepat, terukur dan sesuai perundang-undang yang berlaku hal ini penting mengingat antara kedua Dinas seringkali terjadi tumpang tindih kegiatan pada objek yang sama, antara Industri Kecil dan Menengah dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu melakukan upaya terstruktur dan sistematis untuk menetapkan suatu bentuk mekanisme atau aturan agar dapat meningkatkan kesadaran dan mengharuskan pihak perusahaan untuk dapat melaporkan hasil produksinya secara rutin dan benar	1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan kerjasama dengan BSPJI (balai standardisasi dan pelayanan jasa industri) Palembang terkait survey kebutuhan infrastruktur dalam rangka pengembangan industri pengolahan Sumber Daya alam (karet dan kopi), dan melakukan koordinasi dengan stakeholder dan pihak ketiga seperti Bank Indonesia dalam rangka pengembangan Industri di Provinsi Jambi. 2. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis dan state holder terkait pengawasan dan pelaporan perusahaan industri.		DISPERINDAG
17.	Terhadap Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kiranya dapat membangun menyusun tupoksi kerja yang jelas, tepat, terukur dan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting mengingat antara kedua dinas sering kali terjadi tumpang tindih kegiatan pada objek yang sama antara industri kecil dan menengah dengan usaha mikro kecil dan menengah	1. Tupoksi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi; Untuk UKM Adalah : a. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; b. Pelaksanaan pengorganisasian		DINAS KOPERASI DAN UMKM

		pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; c. Pelaksanaan pengorganisasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; d. Dari hal di atas maka tupoksi dari Dinas koperasi lebih ditujukan pada peningkatan UMKM disegi manajerial dan kelembagaan UMKM yang semula non formal jadi formal dan berusaha serta meningkatkan UMKM naik Kelas dari Usaha Kecil ke Menengah e. Jika pun ada pelatihan bagi UMKM untuk peningkatan keterampilan, maka UMKM yang menjadi target adalah usaha Mikro yang sudah berjalan minimal 6 Bulan dan tujuan dari pelatihan adalah peningkatan kualitas produk yang dihasilkan agar meningkatkan nilai jual produk UMKM yang dihasilkan 2. Pelatihan yang diberikan antara lain : a. Pelatihan kemasan produk bagi UMKM Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi b. Workshop e-Commerce bagi UKM Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi c. Pelatihan Pembuatan NIB d. Fasilitasi Pemberian Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM e. Fasilitasi Perizinan BPOM, HKI, Kemitraan (PLUT) Dinas koperasi sudah Menyusun/membahas tentang rekomendasi DPR diatas untuk lebih fokus		

		melaksanakan ketugas pokok dan fungsi dinas koperasi sesuai dengan Pergub Jambi Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi, untuk kemudian diminta fasilitasi oleh Bappeda agar bisa Bersama-sama membahas lebih lanjut hal tersebut Bersama Dinas perindustrian dan perdagangan. Untuk penyusunan Tupoksi dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi dengan Perindag dikembalikan lagi kepada Biro Organisasi sebagai OPD Penanggung Jawab jawab penyusunan Perda dan Pergub terkait tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi		
18.	1. Pansus mendesak KT Pantang Mundur dengan PT. WKS segera melakukan finalisasi draft dan penandatanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama berupa usulan kemitraan kehutanan untuk subjek 409 KK dengan objek seluas ± 2.610 Ha yang terdiri dari tiga blok yaitu 1500 Ha blok silvofishery, 500 Ha untuk blok agroforestry dan 610 Ha untuk HHBK khususnya lebah madu Terhadap areal yang disengketakan masuk ke dalam kawasan lindung gambut (kubah gambut), pansus meminta kepada Dirjen PHL KLHK RI memastikan letak objek seluas ± 2.610 Ha untuk 409 KK anggota KT Pantang Mundur Desa DanauLamo, Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi tanpa harus dalam satu hamparan 2. a. Pansus mendesak Pemerintah Kab. Batanghari segera membentuk Pokja khusus terkait penyelesaian konflik KTH sumber Rezeki dengan PT. WKS sesuai hasil kesepakatan rapat dengar pendapat yang diinisiasi DPD RI pada tanggal 17 Maret 2022 b. Pansus meminta kepada Timdu PKS Kab. Batanghari untuk memfasilitasi negosiasi jenis kemitraan dan objek	1. PROGRES : 1) Rapat pembahasan penyelesaian konflik di Pansus DPRD Prov. Jambi pada 24 Maret 2022, PT. WKS menyampaikan kendala resolusi konflik karena objek berada di kubah gambut (kawasan lindung gambut) 2) Lokasi objek konflik telah dikunjungi dan mendapat perhatian dari Komisi IV DPR RI pada Bulan April 2022 3) Rapat di Dishut Prov Jambi tgl 08 April 2022, PT. WKS diminta segera menyiapkan peta kubah gambut di objek konflik dan dokumen pemulihan lingkungan pada rapat selanjutnya 4) Hasil pembahasan Resolusi Konflik di Ditjen PHL KLHK RI antara bulan Mei-Juni 2022, menghasilkan kesepakatan sesuai surat Dirjen PHL KLHK RI No. S.347/PHL/PUPH/HP L.1/6/2022 tanggal 6 Juni 2022 : Ditjen PHL, Ditjen PPKL dan Ditjen PSKL menyetujui kemitraan kehutanan antara PT. WKS dengan Kelompok Tani Pantang Mundur di		DINAS KEHUTANAN

	lahan untuk mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak di Desa Rantau Kapas Tuo, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batanghari 3. a. Pansus mendesak kepada Kelompok Tani Panglimo Berambai segera mengajukan surat keberatan sekaligus meminta evaluasi kepada Dirjen PSKL KLHK RI terhadap izin 5 koperasi (Alam Tumbuh Hijau, Rimbo Karimah Permai, Alam Sumber Sejahtera, Hijau Tumbuh Lestari dan Pajar Hutan Kehidupan) dengan alasan tidak <i>clean and clear</i>. Lokasi keseluruhan IUPHHK-HTR seluas 3.142 Ha dengan rincian : Koperasi Rimbo Karimah Permai dengan luas 725,33 Ha, Koperasi Alam Tumbuh Hijau seluas 556,63 Ha, Koperasi Hijau Tumbuh Lestari seluas 678,10 Ha, Koperasi Pajar Hutan Kehidupan seluas 517,24 Ha, dan Koperasi Alam Sumber Sejahtera seluas 665,17 Ha b. Pansus mendesak kepada Dinas Kehutanan Prov. Jambi memfasilitasi/mediasi penyelesaian konflik antar Kelompok Panglimo Berambai dengan HTR 5 Koperasi (Alam Tumbuh Hijau, Rimbo Karimah Permai, Alam Sumber Sejahtera, Hijau Tumbuh Lestari dan Pajar Hutan Kehidupan) sehingga mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak c. Pansus mendesak kepada Satuan Pelaksanaan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan KemenLHK RI untuk mengidentifikasi dan memverifikasi tanaman sawit dalam lokasi yang disengketakan 4. a. Pansus mendesak Dirjen PSKL KemenLHK untuk mendorong percepatan kesepakatan antara KT Sekato Jaya dengan PT. WKS yang diikat ke dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK), sesuai PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan	Desa Danau Lamo seluas ± 50 Ha dan dapat dilakukan dengan tanaman campuran dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat;- Juga dapat dilakukan kegiatan silvofishery terhadap kanal-kanal yang ada a. Direktur PKTHA KLHK RI menyurati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk memfasilitasi pertemuan KT. Pantang Mundur dengan PT. WKS guna menjelaskan usulan kemitraan tersebut b. Pada Tanggal 13 Juni 2022, hasil kesepakatan di KLHK dijelaskan kepada PPJ sebagai pendamping KT Pantang Mundur, namun PPJ dan KT Pantang Mundur akan menolak dan bereaksi keras atas luasan usulan objek kemitraan seluas ± 50 Ha. c. Rapat Tanggal 11 Juli 2022 di Dinas Kehutanan menghasilkan : a) KT Pantang Mundur, PPJ dan Kades Danau Lamo menolak rekomendasi kemitraan berbasis agroforestry dari KLHK seluas 50 Ha, b) Para pihak meminta KLHK memutuskan penyelesaian konflik tersebut d. Tanggal 20 Juli 2022, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Jambi menyurati Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK RI melaporkan hasil fasilitasi usulan kemitraan dari KLHK yang ditolak KT. Pantang Mundur e. Tanggal 27 Juli 2022, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK menyurati Dirjen PSKL dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK untuk membahas kembali objek kemitraan kehutanan antara KT Pantang Mundur dengan PT.	

	PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial b. Pansus mendesak Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian LHK RI mengevaluasi penegasan batas areal kebun sawit KT Sekato Jaya, Lubuk Mandarsah Kabupaten Tebo dengan areal kerja PT. WKS, sesuai PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan 5. 1) Pansus mendesak Pemerintah Kab. Tanjabbar melakukan pendalaman terhadap temuan forum masyarakat Teluk Nilau yaitu baik 4 kelompok tani maupun PT. WKS tidak melaksanakan kepatuhan dalam membayar pajak daerah, sementara hasil kerjasama berupa pemanenan kayu telah dilakukan beberapa kali daur 2) Sesuai surat nomor 001/FMKTN/XI/2020 perihal permohonan putusan terkait konflik Forum Masyarakat Teluk Nilau yang ditujukan kepada Bupati Tanjabbar selaku ketua Timdu PKS Kab. Tanjabbar, Pansus meminta kepada Pemerintah Kab. Tanjabbar segera memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut dengan menghadirkan para pihak terkait 3) Pansus mendesak Pemkab Tanjabbar bersama Kanwil BPN Prov. Jambi, Dinas Kehutanan Prov Jambi, dan kelompok tani baik forum masyarakat Teluk Nilau maupun 4 Kelompok Tani (KT Adi Jaya, KT Jaya Makmur, KT Pematang Tungkung dan KT Sidodadi) melakukan verifikasi penetapan batas wilayah administrasi, asal Sporadik dan keabsahannya di Penggunaan Lain (APL) seluas 1000 Ha tersebut 6. 1) Pansus meminta kepada Ditjen PSKL KemenLHK RI untuk memfasilitasi kemitraan kehutanan antara kedua belah pihak	WKS f. Pada tanggal 20 Oktober 2022, dilaksanakan rapat yang difasilitasi Dirjen PHL KLHK dan dihadiri Ditjen lingkup KLHK, Dinas Kehutanan Prov. Jambi dan PT. WKS dengan hasil : a) PT. WKS akan melakukan negosiasi ulang dengan KT Pantang Mundur, b) Meminta KLHK mengundang KT. Pantang Mundur dan langsung menerangkan kepada KT Pantang Mundur kenapa luasan kemitraan kehutanan yang bias dilakukan hanya 50 Ha saja di lokasi yang dipersengketakan tersebut 2. a. Rapat di DPD RI tanggal 21 Juni 2022, memperkuat kesepakatan rapat tanggal 17 Maret 2022 yaitu kedua belah pihak sepakat melaksanakan kemitraan kehutanan b. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah membentuk pokja khusus penyelesaian konflik KTH Sumber Rezeki dan PT. WKS Pada tanggal 2-3 November 2022, telah dilaksanakan pengecekan lapangan (objek konflik) oleh Timdu PKS/Pokja Kab.Batanghari, dimana dari hasil pengecekan Dinas Kehutanan Prov Jambi di lokasi objek terdapat sekitar 200-an Ha berada di luar konsesi PT. WKS yang dimungkinkan menjadi areal perhutanan sosial c. Proses resolusi konflik sedang berlangsung di Timdu Penanganan Konflik Sosial Kab. Batanghari 3. a. Pada tanggal 10-12 Agustus 2022, Dinas Kehutanan Prov. Jambi bersama-sama dengan Badan Kesbangpol Prov. Jambi melaksanakan observasi dan Fasilitasi penyelesaian		

	sesuai 2) Pansus meminta Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian LHK RI dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk melakukan evaluasi pencabutan atas perizinan PT/ LKU dengan dugaan perusahaan tersebut tidak melakukan aktivitas di atas areal kerja sejak izin diterbitkan sesuai SK.327/Kpts-II/1998 di dalam lampiran III Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.01/MENLHKSETJEN/KUM.I/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 3) Pansus mendesak kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk berkoordinasi dengan Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Ditjen PSKL Kementerian LHK RI terkait tindaklanjut pengaduan Kelompok Tani Desa Olak Kemang, Desa Ale Mandiri dan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo 7. 1) Pansus meminta KTH Alam Rimbo Lestari menindaklanjuti jawaban Direktorat Jenderal PSKL yaitu surat nomor 019/KTH.ALM/X/2021 tanggal Oktober 2021 perihal Permohonan Persetujuan Pengelolaan HKm kepada KTH Alam Rimbo Lestari 2) Atas ketidakhadiran PT. APTP dalam tiga kali rapat dengar pendapat bersama Pansus Konflik Lahan, Pansus meminta kepada Kementerian LHK RI untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen PT. APTP 3) Pansus meminta kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk memfasilitasi antara KTH Alam Rimbo Lestari dengan PT. Samhutani terkait usulan skema Kemitraan Kehutanan seluas 13 Ha 8. Pansus mendesak kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memfasilitasi penyelesaian konflik KT Napal Abadi dengan PT. RHM terkait jumlah subjek dan luasan objek di Desa Sukoawin Jaya Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi sehingga dapat ditemukan jalan	konflik di lapangan (Desa) Belanti Jaya dan Desa Sengkati Baru, Kec. Mersam, Kab. Batanghari), tim meminta analisis spasial (peta) Objek yang dikuasai Kelompok Panglimo Berambai dari masing-masing pihak (Kelompok Panglimo Berambai dan 5 Koperasi HTR). Setelah peta objek Disampaikan masing-masing pihak, maka objek penguasaan Kelompok Panglimo Berambai akan Dioverlaykan, untuk menjadi bahan mediasi dengan opsi revisi areal kerja 5 Koperasi HTR b. PPJ sebagai pendamping Kelompok Panglimo Berambai sedang mengusahakan pemetaan objek, namun sekitar Oktober 2022 terjadi perpecahan antara Kelompok Panglimo Berambai dengan PPJ sehingga pemetaan belum disampaikan c. Saat ini Dinas Kehutanan Prov. Jambi masih menunggu pemetaan objek untuk menjadi bahan negosiasi objek di rapat mediasi 4. a. Tuntutan pelepasan kawasan hutan b. Walhi sebagai pendamping KT. Sekato Jaya telah mengadakan permasalahan kepada Komnas HAM RI dan Kementerian LHK RI c. Sesuai dengan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 130 ayat (1) : "Menteri melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak", Pasal 142 ayat (1) "Penyelesaian penguasaan tanah	

	penyelesaian melalui pola kemitraan kehutanan 9. 1) Pansus mendesak kepada Kementerian LHK untuk mengidentifikasi dan memverifikasi tuntutan kelompok tani Semantung Bersama terkait pelepasan dari kawasan hutan seluas 211 Ha, sesuai PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan 2) Pansus mendorong KemenLHK dan Dinas Kehutanan Prov. Jambi memfasilitasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani Semantung Bersama dan PT. WKS, sesuai PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial 3) Pansus meminta kepada Timdu Kab. Tanjung Jabung Barat bersama Timdu Provinsi Jambi melakukan penanganan konflik antara kelompok tani Semantung Bersama dengan PT. WKS terkait aspek legalitas perusahaan, verifikasi objek dan subjek serta penegakan hukum.	dalam kawasan hutan melalui inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat)" d. Dinas Kehutanan Prov. Jambi masih menunggu pembentukan Tim Inver PPTPKH oleh Kementerian LHK dimana Dinas Kehutanan menjadi bagian dari Tim tersebut e. Mekanisme pelepasan kawasan hutan berada di tingkat Pemerintah Pusat 5. Proses Resolusi Konflik berada di Timdu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat 6. 1) Pada tanggal 9 - 11 Maret 2022 Dinas Kehutanan Prov Jambi menurunkan Tim dengan hasil sebagian besar masyarakat Desa Olak Kemang menolak kemitraan yang ditawarkan PT. Limbah Kayu Utama 2) Hasil koordinasi dengan Direktorat PKTHA KLHK pada tanggal 25 Mei 2022, konflik masyarakat Desa Olak Kemang dengan PT. Limbah Kayu Utama belum menjadi prioritas penyelesaian dan masih dalam tahap diskusi internal Direktorat PKTHA KLHK RI 3) Beberapa warga Desa Olak Kemang (an. Kelompok Suparno dkk) setuju atas tawaran kemitraan kehutanan dari PT. Limbah Kayu Utama. Hal ini ditindaklanjuti dengan menurunkan Tim Dinas Kehutanan pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2022 untuk mengadakan pertemuan dengan Kelompok Suparno yang berjumlah sekitar 20 orang dimana hasilnya beberapa warga Desa	

		Olak Kemang tersebut menerima skema Kemitraan Kehutanan yang ditawarkan perusahaan namun kelompok tersebut menghadapi ancaman dikucilkan oleh masyarakat lainnya. 4) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berupaya mengadakan komunikasi dengan Kepala Desa Olak Kemang sejak bulan Juli s/d Agustus 2022 untuk penjadwalan sosialisasi terkait perhutanan sosial di tingkat Desa, namun pelaksanaan belum dapat terwujud karena kesibukan/kegiatan Pemerintahan Desa 5) Sesuai dengan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan , pasal 130 ayat (1) : "Menteri melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak", pasal 142 ayat (1) "Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat)" 6) Dinas Kehutanan Prov. Jambi masih menunggu pembentukan Tim Inver PPTPKH oleh Kementerian LHK dimana Dinas Kehutanan menjadi bagian dari Tim tersebut 7) Mekanisme pelepasan kawasan hutan berada di tingkat Pemerintah Pusat 7. 1) Dengan terbitnya Kepurusan Menteri LHK Nomor		

		SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Sampai Dengan Tahun 2020, objek KTH Alam Rimbo Lestari mengalami perubahan, dari 65 Ha terdiri dari 52 Ha APL dan 13 Ha nya merupakan kawasan hutan yang masuk dalam konsesi PT. Samhutani 2) Telah dilaksanakan sosialisasi tentang kemitraan kehutanan kepada pihak PT. Samhutani bertempat di Dinas Kehutanan Prov. Jambi tanggal 24 Mei 2022 3) KTH Alam Rimbo Lestari belum mengajukan usulan kemitraan kehutanan seluas 13 Ha kepada PT. Samhutani 4) PT. APTP merupakan perusahaan sektor perkebunan, proses pengajuan HGU mekanismenya berada di Kanwil BPN Provinsi Jambi 5) Hasil koordinasi Tim Dinas Kehutanan Prov. Jambi pada tanggal 14 September 2022 dengan Lurah Gunung Kembang, Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dimana objek secara administratif berada : a) Di objek 13 Ha tersebut terdapat klaim juga dari KTH Tuah Mandiri dan KTH Gunung Kembang Maju Lestari, b) Kelompok Tani kurang tertarik untuk mengajukan kembali skema kemitraan kehutanan karena luasan yang tersisa cukup kecil 6) Proses resolusi konflik PT. APTP, KTH Alam Rimbo Lestari dan PT. Samhutani berada di Timdu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sarolangun 8. 1) Rapat Tanggal 12 Mei 2022 di Dinas Kehutanan menghasilkan kesepakatan atas	

		objek dalam rangka penyelesaian konflik seluas 494 Ha 2) PT. WKS masih menunggu keputusan kemitraan kehutanan dari manajemen di tingkat pusat 3) Pada tanggal 17 November 2022, telah ditandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan antara KT. Napal Abadi dengan PT. Rimba Hutani Mas dalam rangka penyelesaian konflik tenurial antara kedua belah pihak yang disaksikan Dinas Kehutanan Prov. Jambi, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV KLHK, Badan Kesbangpol Prov. Jambi, Camat Sekernan, Kades Sukoawin Jaya, PPJ dan KPHP. Isi kesepakatan berupa : a) Subjek 211 KK, b) Objek seluas 383 Ha, terdiri dari BLOK REHABILITASI KAWASAN KONSERVASI 10 Ha, BLOK HUTAN TANAMAN POLA KEMITRAAN 373 Ha, c) Budidaya ternak lebah madu dengan setup 100 kotak 9. 1) Pada Bulan Maret 2022, Walhi pendamping KT Semantung Bersama telah melaporkan konfliknya ke Komnas HAM dan KLHK RI 2) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah menurunkan Tim untuk melaksanakan observasi lapangan atas kasus konflik tenurial Kelompok Tani Semantung Bersama pada tanggal 12 s/d 14 April 2022 dimana didapat beberapa hasil berupa : a. Kelompok Tani Semantung Bersama menduduki objek yang disengketakan dan di lokasi objek sudah terdapat beberapa permukiman, 1 Musholla dan Tempat Pendidikan Qur'an serta pemakaman. b. Pada pertemuan di	

		Balai Desa Sungai Paur, Kelompok Tani Semantung Bersama dengan tegas menolak usulan kemitraan kehutanan dengan PT. Wirakarya Sakti dan menuntut pelepasan kawasan hutan 3) Sesuai dengan PermenLHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 130 ayat (1) : "Menteri melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak", Pasal 142 ayat (1) "Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui inventarisasi dan verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat)" 4) Dinas Kehutanan Prov. Jambi masih menunggu pembentukan Tim Inver PPTPKH oleh Kementerian LHK dimana Dinas Kehutanan menjadi bagian dari Tim tersebut 5) Mekanisme pelepasan kawasan hutan berada di tingkat Pemerintah Pusat	

19.	Dinas Kelautan dan Perikanan dituntut terus dapat memberikan dukungan penuh bagi pemenuhan kebutuhan pakan ikan bagi kelompok-kelompok pembudidayaan ikan. Serta berupaya meningkatkan PAD yang berasal dari keberadaan 2 PPI di Provinsi Jambi.	Untuk peningkatan PAD secara umum pada tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan telah mencapai target PAD yang telah ditetapkan sebesar Rp. 262.500.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 262.527.225 atau sekitar 100,01% - Untuk peningkatan PAD yang berasal dari 2 PPI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi telah mengajukan beberapa objek baru (sewa gedung, es balok, sewa lahan) tapi pada saat ini masih terganjal pada Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah - Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan, Seksi Pakan dan Teknologi melakukan: a. Pengendalian kualitas dan mutu pakan mandiri melalui uji laboratorium proksimat b. Fasilitasi kerja sama penyediaan bahan baku dan mesin cetak pakan ikan dengan pihak Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya c. Pemberian bantuan berupa mesin cetak pakan ikan bagi kelompok budidaya ikan d. Melakukan pembinaan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
20.	1. Agar Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, dapat menjembatani desakan masyarakat untuk kegiatan replanting kelapa sawit serta meningkatkan jumlah dan kualitas penangkar benih untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman perkebunan di Provinsi Jambi yang terus meningkatkan setiap tahun. Selain terus memperhatikan akses jalan-jalan produksi dari sentra perkebunan menuju pusat-pusat perekonomian masyarakat 2. Dinas Perkebunan bersama-sama Bakeuda Provinsi Jambi, diharapkan dapat menindaklanjuti adanya Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang	1. Dinas Perkebunan telah menganggarkan dana untuk kegiatan Evaluasi kelayakan Peredaran Benih melalui dana APBD TA. 2022 dan APBN TA. 2022 2. Dinas Perkebunan akan berkoordinasi dengan Bakeuda terkait Biaya Operasional Tidak Langsung bagi pelaku usaha perkebunan. dan perlu di Sosialisasikan terkait dengan BOTL dimaksud bersama dengan Lembaga/ Asosiasi Pengusaha Perkebunan di Provinsi Jambi 3. Dinas Perkebunan telah melakukan Pembinaan kepada seluruh Pelaku	1. Benih/Bibit Komoditi Perkebunan yang berkualitas 2. Kesepakatan bersama tentang BOTL (Biaya Operasional Tidak Langsung) 3. Adanya Komitmen bersama untuk menjaga dan mengelola Lahan sesuai dengan Peruntukannya.	DINAS PERKEBUNAN

	Pedoman Penetapan TBS Perkebunan. Yang salah satu isinya memuat tentang Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) yang wajib dikeluarkan untuk perkebunan (petani) atau lembaga perkebunan sebagai biaya pembinaan. Potensi ini menjadi sebuah peluang besar bagi PAD Jambi, terutama untuk meningkatkan akses dan kesejahteraan petani dan pekebun di Provinsi Jambi 3. Semakna dengan rekomendasi Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi mendorong Dinas Perkebunan untuk benar-benar memperhatikan berbagai rekomendasi dan win-win solution yang ditawarkan untuk meminimalisir konflik tenurial yang dapat terjadi di kemudian hari	usaha perkebunan terkait Konflik Lahan dan Kebun melalui dana APBD Provinsi Jambi		
21.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, untuk dapat meningkatkan kinerja perangkat daerahnya. Mengingat Tupoksi Utama Dinas untuk menjamin kecukupan dan kesediaan pangan, mengatasi Kerentanan Pangan serta mengambil langkah-langkah Strategis menghadapi gejolak harga pangan pokok secara merata diseluruh Kab/Kota se Provinsi Jambi	Terkait Rekomendasi tersebut, kami akan berupaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam menjamin kecukupan dan ketersediaan pangan, mengatasi kerentanan pangan serta mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi gejolak harga pangan pokok secara merata di seluruh Kab/Kota se Provinsi Jambi.	Sebagai Tindak Lanjut dari rekomendasi tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan akan mengupayakan : 1. Bekerjasama dengan Dinas Lingkup Pertanian dan Perikanan dalam rangkamenjamin kecukupan dan ketersediaan pangan, dikarenakan Dinas Teknis tersebut berkontribusi terhadap kesediaan pangan. 2. Menggali Potensi - Potensi Daerah Kab/Kota terkait potensi pangan apa yang bisa dikembangkan di daerah Kab/Kota tersebut 3. Berdasarkan Hasil Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022, secara komposit terlihat bahwa telah terjadi penurunan jumlah daerah rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) yang mana pada tahun 2021 terdapat 10 Kecamatan yang masuk kategori 1 - 3 menjadi 7 Kecamatan di Tahun 2022 dari 7 Kecamatan yang masuk prioritas 1-3 tersebut, kedepan akan dilihat lagi desa-desa mana yang masih merah tersebut.	DINAS KETAHANAN PANGAN

			diupayakan akan dilakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok taninya melalui pemberian bantuan pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota kelompoknya. pembinaan ini tentunya perlu didukung oleh Kab/Kota, mengingat lokasi kegiatan dan kewenangannya berada pada Kab/Kota. 4. Langkah-Langkah strategis dalam menghadapi gejolak harga pangan pokok maupun pangan strategis diantaranya : a. Melakukan pemantauan harga pangan pokok/pangan strategis di setiap Kab/Kota melalui petugas dari Dinas /Instansi yang menangani Ketahanan Pangan. b. melakukan pengawasan harga dan stok pangan pangan/pangan melalui Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, maka Tim Satgas Pangan akan melakukan Sidak (inspeksi Mendadak) ke 11 Kab/kota terkait harga, ketersediaan dan kecukupan pangan dilapangan. c. Mengupayakan adanya semacam peraturan/surat keputusan/surat edaran Gubernur Jambi terkait dengan harga pangan, diupayakan agar harga pangan berada pada kisaran harga normal, (tidak terlalu melonjak tinggi). d. Melakukan gerakan pangan murah/gelar pangan murah di 11 Kab/Kota, dengan harapan masyarakat dapat	

			membeli kebutuhan pangannya dengan harga terjangkau. 5. Jika kemungkinan, ada semacam dana talangan yang disediakan Pemda Provinsi Jambi untuk kegiatan tunda jual (untuk sementara komoditas padi), dimana disaat petani panen raya, biasanya harga gabah rendah, kita minta mereka tidak langsung menjual hasil panennya ke pedagang pengumpul, melainkan ditunda selama beberapa hari menjelang harga normal kembali, untuk kebutuhan petani dan keluarganya tersebut kita gunakan dana talangan yang telah disiapkan yang dipinjamkan kepada petani, dan pada saat harga gabah sudah normal kembali, petani dapat membayarkan kembali dana pinjaman tadi.	

BIDANG PEMBANGUNAN

22.	1. Kepada Pemerintah agar dapat mengembalikan penyusunan LKPj Gubernur Provinsi Jambi kepada Bappeda. 2. Kepada Bappeda Provinsi Jambi untuk dapat melakukan kajian terhadap revisi RPJMD mengingat berdasarkan hasil RDP bersama mitra kerja Pansus III, target Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur masih jauh dari target yang di tetapkan dalam RPJMD terutama dalam implementasi program DUMISAKE.	1. Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur pada pasal 4 point 2(dua); bahwa LKPJ Gubernur disusun oleh Tim Penyusun dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan Sekretaris Daerah Provinsi sebagai Ketua Tim Penyusun 2. Terkait dalam hal ini bahwa untuk revisi RPJMD 2021-2026 akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Lalu untuk implementasi Program Dumisake Jambi Mantap 2024 telah berjalan pada Tahun 2022.	1. Hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang dikomadoi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan sebagai Leading Sector adalah Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi 2. Untuk Pelaksanaan revisi RPJMD sudah dianggrakan pada tahun 2023. Dan Program DUMISAKE Jambi Mantap 2024 sudah memasuki Tahun ke-dua Implementasinya yaitu Tahun 2023	BAPPEDA
23.	1. Kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk mensosialisasikan metode perhitungan Rasio Elektrifikasi kepada masyarakat sehingga pencapaian 99.99%	1. Dinas ESDM akan melakukan sosialisasi pada stakeholders tentang metode perhitungan Rasio Elektrifikasi. 2. Dinas ESDM akan	1. Menghilangkan persepsi stakeholders yang berbeda-beda terhadap capaian Rasio Elektrifikasi yang tinggi sedangkan masih ada 8 desa di	DINAS ESDM

	dipahami bukan diartikan bahwa masyarakat Provinsi Jambi telah teraliri listrik, sementara kondisi real dilapangan masih ada 8 desa yang belum masuk jaringan listrik. 2. Kepada Pemerintah menerapkan program kerja yang tepat untuk meningkatkan program EBT 3. Dinas ESDM agar memfasilitasi perusahaan mineral dan batubara di Provinsi Jambi yang ingin mengajukan perizinan ke pemerintah pusat.	memproses Pergub untuk percepatan realisasi program EBT sesuai dengan Kewenangan Provinsi. 3. Dinas ESDM akan membantu proses perizinan sesuai kewenangan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Investor	Provinsi yang belum teraliri listrik PLN. 2. Capaian target bauran energi Provinsi Jambi akan tercapai seperti yang telah di rencanakan dalam Perda RUED Provinsi Jambi. 3. Pihak Investor memahami prosedur proses perizinan sehingga lebih cepat realisasinya.	
24.	Dari penyerapan anggaran dinas lingkungan hidup secara umum masih belum dapat mendukung capai indikator kinerja utama (IKU) antara lain : Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target 53.34 dan realisasi 48.96 hal ini tidak mencapai target RPJMD yang Renstra 2016-2021 dan terjadi penurunan realisasi dari tahun 2020 sebesar 56,65. Indeks Kualitas Udara (IKU) juga tidak mencapai target RPJMD dan Renstra 2016-2021 tetapi terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya (2020) sebesar 85.55. Penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan program kampung iklim (proklam), tetapi hal ini masih belum memperlihatkan hasil yang optimal dapat terlihat dari persentase penurunan emisi gas rumah kaca yang realisasinya tidak mencapai target sebesar 1.75% dari target sebesar 30.5%. Hal ini terjadi di karenakan kurangnya dukungan politiknya anggaran dari pemerintah pada program ini sehingga dalam mengimplementasikan kegiatannya tidak di dukung oleh anggaran. Untuk nilai IKU dari nilai AKIP dan IKM sebesar 84.03. realisasi ini telah mencapai target RPJMD dan Renstra 2016-2021. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, merekomendasikan : 1. Agar pemerintah daerah berkomitmen mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama dalam RPJMD, sehingga target yang telah di tetapkan dalam RPJM dapat tercapai. 2. Dalam rangka mendukung program Batanghari bersih maka perlu komitmen	1. Dinas Lingkungan Hidup telah berusaha mengalokasikan anggaran dengan memperhatikan program dan kegiatan/sub kegiatan yang diprioritaskan. 2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi telah menambah anggaran untuk Program Pencanangan Batanghari Bersih. Selain itu, untuk menindaklanjuti Pencanangan Batanghari Bersih, pada APBD Perubahan TA. 2022 dianggarkan program Kampung Mantap pada program pengelolaan sampah yang merupakan wujud program Batanghari Bersih.	1. Alokasi anggaran sesuai dengan program dan kegiatan prioritas akan mendukung pencapaian indikator kinerja utama dalam RPJMD 2. Pencanangan Batanghari Bersih dan Program Kampung Mantap merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi untuk mengendalikan pencemaran air sungai, dimana indeks kualitas air (sungai) pada tahun 2021 sebesar 48,96 poin, berada pada kategori “kurang baik”.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	pemerintah mengalokasikan anggaran untuk progran-program yang mendukung progran tersebut,sehingga indeks kualitas air yang merupakan bagian dari IKU dapat tercapai. Hal ini tahun 2021 harapan itu jauh dari capaian indikator yang di harapkan artinya target RPJMD juga tidak tercapai.			
25.	Dinas Perhubungan memiliki arah pembangunan urusan Perhubungan yang diimplementasikan melalui program dan kegiatan tahun 2021 lebih di arahkan pada peningkatan penyelenggaraan pelayanan sektor transportasi yang efektif, efisien dan taat aturan. Trans Siginjai merupakan bantuan khusus dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Trans Siginjai merupakan sistem transportasi Bus rapid transit diciptakan untuk memudahkan mobilitas warga Jambi agar mau menggunakan transportasi publik. Transportasi ini beroprasi di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Transportasi ini sangat berpihak kepada masyarakat. Angkutan Siginjai terdiri dari 2 koridor, dimana koridor 1 dari perkantoran Telanaipura sampai ke Pijoan dengan tarif Rp.5000/Penumpang. Koridor 2 dari bandara Sultan Thaha Jambi-Telanaipura-Sengeti Kab Muaro Jambi tarif Rp.6000/Penumpang. Transportasi ini sangat menguntungkan masyarakat karna adanya subsidi pemerintah sehingga mengurangi beban masyarakat yang seharusnya membutuhkan biaya yang dikeluarkan lebih kurang Rp.50.000. Kelemahannya pelaksanaan operasional terhenti di awal Tahun Bulan Januari-Februari yang disebabkan proses lelang yang tidak tepat waktu. Pada tabel Capaian Target Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan dapat kami sampaikan bahwa seluruh realisasi pada tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan oleh karena itu, Merekomendasikan: 1. Kepada pemerintah untuk pelaksanaan Tender dilakukan lebih awal (Tender Dini) pada bulan Desember tahun	1. Untuk pelaksanaan Tender Tahun Anggaran 2022 diupayakan pelaksanaan tender lebih awal agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan bulan Januari 2023, sehingga operasional BRT tidak terhenti di awal tahun 2023 2. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan sudah menyurati Kementerian Perhubungan RI terkait dengan bantuan penambahan armada untuk operasional Bus BRT, sehingga operasional Bus BRT dapat maksimal 3. Pemerintah Provinsi Jambi terus bekerja secara maksimal dan mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan angkutan batubara, ini terbukti dengan keluarnya Keputusan Gubernur Jambi nomor: 675/KEP.GUB/SETDA-PRKM-2.2/2022 tanggal 04 Agustus 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawas, Pengendalian dan Penegakan Hukum Angkutan Batubara di Provinsi Jambi. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam terkait pembuatan jalan khusus yang nantinya akan digunakan oleh angkutan batubara dalam rangka merealisasikan Ranperda Nomor 13 Tahun 2022 tentang angkutan batubara	1. Operasional BRT tidak terhenti di awal tahun 2. Penambahan armada Bus BRT serta penambahan koridor pada daerah yang belum dilalui bus BRT 3. Pengendalian Angkutan batubara	DINAS PERHUBUNGAN

	sebelumnya agar di awal Tahun kegiatan sudah berkontrak dan operasional dapat berjalan semestinya. 2. Kepada pemerintah untuk dapat mengusulkan kepada Kementrian Perhubungan penambahan armada Bis Trans Siginjai dan menambahkan Koridor pada daerah yang belum dilalui oleh Bis Trans Siginjai karena saat ini jumlah armada yang tersedia hanya berjumlah 5 unit dan ini belum dapat mengakomodir animo masyarakat dalam menggunakan transportasi publik. 3. Selain itu Pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan draft ranperda tentang Angkutan Batubara dan mendorong untuk segera dilakukannya pembangunan jalan khusus angkutan batubara agar dapat meminimalisir tingginya tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan angkutan yang melebihi dari standar kemampuan jalan di Provinsi Jambi			
25.	Peran Biro Administrasi Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi gubernur dan wakil gubernur sebagai unsur penunjang yang melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah maka Pansus III Merekomendasikan: 1. Biro Administrasi Pembangunan sebagai pusat informasi pembangunan untuk dilingkungan sekitar daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan dari hasil pengendalian pembangunan. 2. Dalam rangka untuk menunjang kinerja fungsi Biro Admintrasi Pembangunan perlu melakukan pemeliharaan kepada sistem aplikasi yang sudah ada dalam rangka melakukan pengtendalian program pembangunan serta perlu disupport Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi IT. Sehingga ketetapan pelaporan setiap bulannya dapat dilaporkan kepada Gubernur dalam upaya untuk mengantisipasi kegagalan program	Uji coba Simantap di Lingkup Prov. Jambi pada bulan Juni 2022 dan Sosialisasi Aplikasi Simantap pada tanggal 19 Desember 2022 di Lingkup Kab/Kota dalam Prov. Jambi.	Menyediakan 1 orang tenaga IT yang bertugas selama 12 bulan untuk mengoperasikan Aplikasi Simatap dan disediakan anggaran pendukung untuk Rakor OPD dan operasional kegiatan monev terhadap pelaksanaan pekerjaan yang berada di wilayah Kab/Kota. Selain itu juga disediakan 2 unit laptop untuk operasional Aplikasi Simantap	Biro Adm. Pembangunan

	kegiatan setiap tahunnya.			
26.	1. Mempersiapkan proses administrasi pengadaan barang dan jasa yang dimasukkan ke dalam Sirup setelah dilakukan pengesahan RAPBD menjadi APBD. 2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa meningkatkan koordinasi dan pembinaan berkaitan pengadaan barang dan jasa kepada seluruh OPD. 3. Merekomendasikan kepada Gubernur untuk mensupport Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pengadaan barang dan jasa yang profesinya dan berintegritas sehingga proses pengadaan barang dan jasa lebih meningkat secara kualitas. Hal ini masih kita temui proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pengulang-pengulangan padahal pemenang lelang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemenang lelang	1. Sejak Tahun 2022, persentase penginputan SiRUP Pemerintah Provinsi Jambi menjadi semakin baik. Terhitung akhir bulan Maret 2022, penginputan SiRUP oleh OPD telah mencapai 100%. 2. Sejak Tahun 2022, dalam rangka penyamaan persepsi informasi dan data dan peningkatan kualitas terkait PBJ maka Biro PBJ telah membentuk beberapa Tim Pendampingan sebagai berikut : a. Tim Pendampingan Entry data Rencana Umum Pengadaan b. Tim Pendampingan Entry data Siswas P3DN dan SIPD P3DN c. Tim Pendampingan untuk OPD dan untuk UMKM/IKM pada Aplikasi Marketplace. d. Tim Pendampingan untuk OPD dan untuk UMKM/IKM pada Aplikasi E Katalog Lokal. e. Mulai tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerapkan kebijakan dengan menetapkan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jambi berasal dari UKPBJ Provinsi Jambi. Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 74A ayat (8)"Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ". f. Ini diterapkannya aturan ini maka koordinasi dan pembinaan berkaitan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan menjadi lebih mudah dilaksanakan. g. Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jambi mulai menggiatkan proses pengadaan barang		Biro Pengadaan Barang dan Jasa

		dan jasa Pemerintah dengan metode pengadaan secara elektronik (e-purchasing) melalui e-Katalog Lokal dan Toko Daring (Marketplace). Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden 2 tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Bangsa Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah h. Realisasi belanja melalui katalog elektronik lokal Provinsi Jambi tahun 2022 sebesar Rp31.255.469.620,- (tiga puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) dari 31 etalase yang telah tersedia. i. Realisasi belanja barang Pemerintah Provinsi Jambi melalui Toko Daring tahun 2022 sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) 3. Jumlah personil PBJ yang masih sangat kurang. a. Jumlah Personil Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa saat ini masih sangat kurang, dari 26 (dua puluh enam) personil berdasarkan hitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja baru terpenuhi 12 (dua belas) orang personil fungsional Pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut: b. Pengembangan SDM bidang pengadaan barang dan jasa hingga saat ini masih sangat minim.		

		Ini disebabkan oleh ketersediaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia baik itu untuk jabatan Fungsional PBJ maupun pejabat Struktural dan pejabat fungsional lainnya di UKPBJ Provinsi Jambi yang sangat sedikit. c. Belum optimalnya ketersediaan alat kerja untuk personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi seperti laptop/pc, printer, infocus, dan alat kerja lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya para anggota Pokmil masih menggunakan alat kerja milik pribadi seperti laptop, printer, dan alat kerja lainnya d. Belum tersedianya gedung kantor/ruang kerja yang memadai untuk personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Kondisi kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak dalam 1 (satu) bangunan gedung yang sama di mana Kantor Biro berada di komplek kantor Gubernur di Telanaipura sementara Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa di mana para Pokmil bertugas berkedudukan di kantor Sungai Kambang. Pemisahan ini disebabkan terbatasnya ruangan pada kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi. Kantor Sungai Kambang ini adalah milik Pemerintah Kota Jambi yang digunakan oleh		

		Pemerintah Provinsi Jambi dengan pola Pinjam Pakai. Saat ini Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi yang mengelola pelaksanaan tender/lelang paket pekerjaan dari seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi menempati gedung/bangunan milik Pemerintah Kota Jambi dengan status Pinjam Pakai kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Kondisi bangunan/gedung kantor tergolong sangat tidak memadai untuk mendukung proses kerja personil UKPBJ. Selain kondisi fisik Gedung yang sudah tua, ruangan-ruangan yang dibutuhkan untuk proses klarifikasi, bidding room, ruangan kerja para pejabat fungsional, dan gudang arsip/dokumen hasil proses pengadaan, tidak tersedia e. Tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan tahapan pemilihan pengadaan barang dan jasa seperti tidak adanya anggaran klarifikasi bagi kelompok kerja pemilihan serta belum tersedianya Anggaran untuk Kegiatan Pendampingan. f. Belum optimalnya ketersediaan dana anggaran untuk kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan bagi personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi. g. Belum memadainya TPP Khusus untuk seluruh personil Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jambi. h. Belum tersedianya bantuan hukum		

		bagi pelaku pengadaan lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa yakni pada Bagian Kelima Pelayanan Hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Pasal 84		
27.	1. Pemerintah dapat mendukung kebijakan politik anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 2. Mendorong Pemerintah agar berkomitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana Badan Penanggulanen Bencana Daerah (BPBD). 3. Mendorong Pemerintah agar berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas tenaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).	1. Dukungan Anggaran terhadap BPBD Provinsi Jambi 2. Pemerintah menambah anggaran logistik dan peralatan untuk kebencanaan 3. Mengusulkan formasi Tenaga Penanggulangan Bencana pada Analisis Kebutuhan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah	1. Tercapainya Penurunan Resiko Bencana di Wilayah Provinsi Jambi 2. Meningkatkan Upaya Penanggulangan Bencana 3. Terpenuhinya Formasi tenaga Penanggulangan Bencana pada Analisis Kebutuhan Pegawai pada Badan Kepegawaian daerah	BPBD
28.	1. Dinas PUPR untuk segera membentuk UPT Jalan Mantap yang dimana UPT ini berfungsi mengelola Pembangunan Infrastruktur Jalan, sehingga penanganan jalan dan jembatan dapat ditangani lebih fokus, lebih cepat, efektif dan efisien, selain itu Dinas PUPR sebaiknya berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan untuk memastikan tonase yang melewati jalan provinsi sesuai dengan spesifikasi jalan. Untuk mengantisipasi peningkatan jalan 90% diakhir masa jabatan Gubernur sesuai target RPJMD diharapkan dapat dilakukan dengan penanganan secara <i>multi years</i>. 2. Kepada Dinas PUPR lebih meningkatkan kinerja diseluruh tahap tersebut agar dana infrastruktur yang besar ini memang terserat dan menghasilkan fisik yang bermutu baik serta mengoptimalkan anggaran dan peralatan yang ada untuk dimanfaatkan sepenuhnya pada penanganan, pengawasan dan pemeliharaan jalan. 3. Kepada Dinas PUPR melakukan pengawasan terhadap seluruh	1. Sudah diusulkan melalui Biro Organisasi. 2. Mengoptimalkan peran UPTD LBK (Laboratorium Bahan Konstruksi) dalam hal pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan. 3. Telah dilakukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala 4. Bangunan tersebut telah dilakukan kepada penanggung jawab yaitu Dinas Pendidikan 5. Telah dilakukan pemetaan sehingga diperoleh data kawasan kumuh di Provinsi Jambi 6. Telah dilakukan kegiatan untuk menjaga fungsionalnya jaringan irigasi 7. Pemetaan wilayah sudah tergambar dalam dokumen RP3KP	1. Sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut. 2. Temuan atas kegiatan pada Bina marga menurun pada Paket pekerjaan jalan : 1. Jalan Mayjen Sutoyo Telanaipura 2. Jalan Jendral Sudirman (Ma. Bulian) 3. Jalan Tempino-Ma. Bulian 4. Jalan Sp. Pelawan-Sei. Salak 5. Jalan Simp. Sawmill-Simp Logpan 3. Telah kami lakukan terhadap pengawasan tersebut di dalam kegiatan monev yang ada di Dinas PUPR Provinsi Jambi 4. Akan dilakukan koordinasi tindak lanjut pada dinas pendidikan terhadap fungsi bangunan sekolah tersebut 5. Banyak kawasan kumuh yang belum mempunyai penetapan SK kepala daerah 6. Agar kami tindak lanjut pekerjaan irigasi tersebut sesuai dengan kewenangan Provinsi 7. Akan kami laksanakan pekerjaan tersebut sesuai	PUPR

	pekerjaan fisik dan melakukan percepatan pembangunan agar segera dapat dimanfaatkan bagi masyarakat. 4. Pemerintah Provinsi Jambi segera memanfaatkan dari pembangunan sekolah Titian Teras Babeko, karena apabila suatu pembangunan tidak memiliki manfaat dan kegunaan akan menimbulkan penafsiran yang mengarah kepada total loss dan masalah ini sudah terjadi sejak Tahun 2020 dan dilaporkan LKPJ Tahun 2020 juga telah direkomendasikan hal serupa. 5. Kepada Dinas PUPR dapat memetakan secara rinci dan detail daerah kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi dan tertuang dalam Surat Keputusan , dan juga melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk secara bersama-sama menata kawasan kumuh ini menjadi permukiman yang layak dan sehat. 6. Pemerintah agar lebih memperhatikan pembangunan jaringan daerah irigasi di Provinsi Jambi agar selalu fungsional dan berfungsi dengan baik, sehingga petani tidak berfikir untuk mengalih fungsikan lahannya. 7. Bidang perumahan melakukan pemetaan wilayah lingkungan yang belum layak huni, kemudian mengevaluasi dan melakukan penjaringan usulan dari masyarakat terkait pengajuan peningkatan tersedianya lingkungan layak huni (PSU) yang kemudian disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta mengevaluasi kinerja perusahaan yang berkontrak pada Bidang Perumahan Rakyat dan melakukan pengawasan lebih maksimal lagi sehingga target sesuai rencana.		dengan apa yang terdapat dalam dokumen RP3KP	
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT				
29.	1. Diperlukan keseriusan semua pihak untuk mencapai target-target kinerja bidang Pendidikan. 2. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi banyaknya guru-guru yang akan	1. Target kinerja tahun 2022 yang telah disusun pada Perjanjian Kinerja di masing-masing level jabatan merupakan pedoman dalam pencapaian tanda-	1. Hasil laporan capaian kinerja di tahun sebelumnya merupakan pedoman dalam menyusun perencanaan bidang pendidikan pada tahun 2022, berupa	Dinas Pendidikan

pensiun, 3. Harus dicarikan formula tertentu agar keterlambatan pembayaran honor bagi guru-guru di SMA, SMK dan SLB tidak terulang lagi. 4. Perlunya pemenuhan bahan dan alat ajar, ruang praktek termasuk ketersediaan peralatan yang ditemui di SLB. 5. Perlunya upaya nyata untuk peningkatan keterampilan, kompetensi dan profesionalitas Lulusan SMK agar terserap pada dunia usaha dan industri untuk mengurangi pengangguran terutama lulusan SMK. 6. Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan mutu pendidikan SMA/SMK di Provinsi Jambi. 7. Diperlukan langkah-langkah kongkrit untuk mencegah terjadinya persoalan PPDB. 8. Secepatnya menyusun roadmap dan pemetaan pendidikan di Provinsi Jambi yang paripurna tentang Pendidikan Menengah Atas dan SLB di Provinsi Jambi. 9. Perlunya koordinasi dan sinergi yang baik dengan Dinas lain dalam upaya menyelesaikan persoalan yang ada pada Dinas Pendidikan misalnya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindag, Balitbangda dan lainnya untuk menyelesaikan persoalan pengangguran SMK dan persoalan lainnya. 10. Perlunya koordinasi Pendidikan dengan Kabupaten/Kota.	tanda keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan setiap tahun 2. Pengangkatan PPPK secara Maksimal, 2. Penambahan Anggaran untuk Pembayaran Gaji Guru Non ASN 3. Sejak tahun 2022 Dinas pendidikan Provinsi Jambi melakukan langkah langkah dalam pembayaran PTT PTKNon PNS jenajng SMA, SMK dan SLB : Pembayaran secara langsung ke rekening masing-masing Guru dan TU dan dibayar setiap bulan. 4. Peningkatan DAK Peralatan dan Magang Industri 5. Peningkatan DAK Peralatan dan Magang Industri 6. Menyusun Aturan terkait PPDB sesegera mungkin setelah aturan dari pusat terbit, kemudian memastikan sosialisasi berjalan dengan baik dan tersampaikan kepala siswa kelas IX dan wali siswa, dan mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung PPDB berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Serta mengoptimalkan SMAN 7 , SMAN 12 dan sman 14 kota Jambi, dan juga SMAN 11 Muaro Jambi 7. Proses Penyusunan Perkada Roadmap SMK dan Proses Penyusunan data Awal Peta Jalan Pendidikan SMK 8. Melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi dengan DISPERINDAG,DISNAK ERTRANS dan Dunia Usaha 9. SMK :Berkoordinasi Dengan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Peridustrian Kab/Kota	indikator dan target kinerja. Untuk itu keseriusan ketercapaian target-target kinerja yang sudah direncanakan sudah dilakukan yang dapat dilihat pada hasil laporan kinerja 2. jika langkah-langkah tadi kita lakasanakan bisa mengatasi kebutuhan guru 3. Jika langkah-langkah tadi kita lakasanakan bisa mengatasi kebutuhan guru 4. Telah dilakukan peningkatan Jumlah peralatan praktek dan Ruangnya melalui dana DAK dan dilakukan pelatihan atau magang siswa pada DUDi dengan waktu sampai 6 Bulan/1 Semester, Kemudian juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan data kebutuhan atau tenaga kerja yang dibutuhkan pada Dunia Usaha/Dunia Industri 5. SMK: Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Implementasi kurikulum merdeka dalam rangka mewujudkan Merdeka Belajar dan Mensosialisasikan program SMK Pusat Keunggulan untuk mewujudkan SMK LINK and Matc dengan dunia usaha dan Industri 6. Terlambatnya informasi terkait PPDB khususnya Masalah cakupan zonasi sekolah yang merupakan usulan dari sekolah dan mkks. Dan untuk Pemerataan Jumlah peminat sekolah negeri khususnya di kota Jambi 7. Dinas Pendidikan melalui bidang pembinaan SMK dengan ketersediaan anggaran yang ada telah terus berusaha untuk menyusun roadmap dan Pemetaan pendidikan SMK di Provinsi jambi, baik proses regulasinya maupun penyusunan dokumen

			lainnya, namun ada kendala-kendala yang harus di perbaiki, sehingga bisa terwujud roadmap yang sesungguhnya. 8. Dinas Pendidikan melalui bidang PSMK Telah melaksanakan Komunikasi dan Koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja melalui Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK dalam acara Disikusi bersama yang diselenggarakan oleh DISNAKERTRAN, - Dinas Pendidikan juga sudah mengundang DISNAKERTRAN dalam acara Sosialisasi SMK Pusat Keunggulan, berkaitan dengan Aktualisasi PERPRES No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, kemudian Dinas Pendidikan melalui Bidang PSMK juga sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DISPERINDAG terkait dengan Data Jumlah Lulusan SMK berdasarkan Konsentrasinya dan Analisis Kompetensi Tenga Kerja Industri Tamatan SMK, kemudian juga berdiskusi dalam kegiatan FGD 9. SMK : Tujuan Dalam Rangka proses izin operasioanal BKK pada SMK dan Kebutuhan Tenaga Kerja pada Kab/Kota	
30.	Dibidang kesehatan Pansus IV telah mengidentifikasi berbagai persoalan terkait dengan kesehatan, oleh karena itu : 1. Perlu kebijakan dan langkah-langkah strategis agar terjadi penyebaran tenaga medis terutama dokter spesialis di Provinsi Jambi. 2. Perlunya sosialisasi untuk memberikan informasi yang jelas terkait rujukan di Rumah Sakit milik pemerintah Provinsi. 3. Perlunya pendataan terhadap penderita Gizi buruk dan Stunting. 4. Perlunya peningkatan jaminan cakupan kesehatan termasuk mengoptimalkan integrasi	1. Mengusulkan kembali penyusunan Peraturan Gubernur Tentang Penugasan Khusus bagi Tenaga Kesehatan Strategis termasuk dokter spesialis 2. Telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Jambi terkait dengan sistem rujukan dengan menggunakan Sistrute dan wajib di tindaklanjuti paling lambat 30 menit. apabila tidak ditindaklanjuti dalam 30 menit maka rujukan dari Kabupaten/Kota dapat di alihkan segera.	1. Tersedianya tenaga kesehatan strategis termasuk dokter spesialis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Khususnya Di Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Provinsi Jambi 2. Untuk mempercepat proses rujukan yang dilakukan oleh Rumah sakit dari Kabupaten/Kota ke Rumah Sakit Rujukan yang lebih tinggi 3. Tersedianya data balita beresiko masalah gizi (BGM,2T) serta balita dengan status gizi bermasalah yaitu gizi kurang, gizi	Dinas Kesehatan

	peserta BPJS dengan data DTKS. 5. Secara bertahap perlunya perluasan cakupan akreditasi Puskesmas. 6. Optimalisasi koordinasi dan sinergitas Dinas Kesehatan dengan RSUD Raden Mattaher dan RSDJ (sebagai BLUD Dinas Kesehatan) dan Perangkat daerah lainnya.	3. a. Peningkatan kunjungan ke Posyandu serta melakukan bulan pemantauan pertumbuhan setiap Februari dan Agustus untuk mendapatkan data status gizi balita b. Akselerasi pendataan status gizi balita dilakukan melalui aplikasi sigizi terpadu dan e-PPGBM c. Pelacakan dan konfirmasi balita gizi yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota 4. Koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jambi terkait dengan updating verifikasi dan validasi data DTKS dari Kabupaten/Kota setiap Triwulannya sehingga data yang ada merupakan data termutakhirkan 5. a. Setiap Tahunnya dilakukan persiapan survey akreditasi bagi Puskesmas yang akan disurvei, namun karena kondisi pandemic covid-19 selama 2 tahun terakhir, ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan untuk menghentikan sementara survey akreditasi b. Melakukan pembinaan ke Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan akreditasi bagi FKTP yang belum terakreditasi dan FKTP yang akan akreditasi c. Merekomendasikan Puskesmas yang akan diakreditasi setiap Tahun nya ke Kementerian Kesehatan. 6. Dinas Kesehatan telah mengikutsertakan RSUD Raden Mataher dan RSJD dalam kegiatan Perencanaan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan dikedua rumah sakit tersebut. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kolaborasi RS sebagai Unit Pelayanan Teknis dari Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan di Provinsi Jambi.	buruk serta gizi pendek <i>by name by adress</i> sehingga dapat dilakukan intervensi secara tepat sasaran. 4. Data DTKS yang ada merupakan data yang sudah terverifikasi dan tervalidasi setiap triwulannya sehingga cakupan kepesertaan PBI dan PBPU Provinsi dan Kabupaten/Kota tercapai 5. Semua Puskesmas terakreditasi dan bagi puskesmas yang habis masa akreditasinya akan dilakukan re akreditasi 6. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Raden Mattaher dan RSJD Provinsi Jambi	
31.	1. Perlunya sosialisasi tentang sistem informasi	1. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan sosialisasi	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	RSUD RD MATAHER

	yang ada di RSUD Raden Mattaher. 2. Secara berkala harus melakukan penilaian IKM terkait Kualitas Pelayanan dan optimalisasi Fasilitas Rumah Sakit Masih kurangnya jumlah dokter Spesialis Konsultan (Sp.2). 3. Memaksimalkan peran dokter spesialis yang ada di RSUD Raden Mattaher. 4. Peningkatan pelayanan Medical Check-Up dan pengembangan kapasitas UGD serta produk-produk layanan unggulan RSUD Raden Mattaher lainnya.	terkait SIMRS, sebagai berikut : a. Dilakukan sosialisasi SIMRS Raden Mattaher existing tanggal 4 April 2022 b. Dilakukan rapat evaluasi sistem SIMRS untuk farmasi tanggal 19 Mei 2022 c. Dilakukan sosialisasi sistem perpustakaan online tanggal 15 Juni 2022 d. Dilakukan pendampingan implementasi SIMRS Sistem keuangan tanggal 14 Juni 2022 e. Dilakukan koordinasi sistem Farmasi tanggal 16 Juni 2022 f. Dilakukan koordinasi, implementasi dan sosialisasi Sistem Aplikasi Smart Hospital tanggal 9 Agustus 2022 Tahun 2023, akan dilaksanakan kembali sosialisasi SIMRS pada bulan Februari 2023 2. Survey IKM merupakan salah satu tupoksi yang dilakukan secara berkala, persemester (setiap tahunnya). Semester I di bulan Januari s/d Juni dan Priode ke II dilakukan di Bulan Juli s/d Desember Adapun hasil dari survey IKM tersebut dengan nilai hasil Rata- rata katagori baik. • Hasil IKM Per semesternya: • Semester I dan II Tahun 2021 • Januari s/d Juni dengan Nilai : 83,47 • Juli s/d Desember dengan Nilai : 86,85 • Semester I dan II Tahun 2022 • Januari s/d Juni dengan Nilai : 81,17 • Juli s/d Desember dengan Nilai : 79,31 • Pengambilan data hasil survey dengan 2 (dua) metode yaitu E-Barcode dan Interview langsung dengan pasien atau keluarga pasien, selain itu untuk menjaga validitasi hasil survey	berjalan dengan baik	

		IKM dilakukan juga pembandingan yang dilakukan oleh pihak Independen (Pihak ke 2). 3. Terimakasih atas rekomendasinya. Pelayanan MCU akan ditingkatkan dengan mengusahakan sarana yang lebih luas, prasarana dan alat Kesehatan yang lengkap dan pelayanan yang terpusat dan terintegrasi di tempat tersebut. 4. Terimakasih atas rekomendasinya. Pengembangan Kapasitas IGD akan dilanjutkan Kembali karena dalam dua tahun kebelakang, ruangan IGD digunakan di set untuk ruangan khusus covid dan non covid. Sehingga kapasitas IGD masih menyesuaikan dengan standar ruangan penanganan penyakit infeksi menular 5. Saat ini RSUD Raden Mattaher di dalam Rencana Strategi tahun 2021–2026 akan melakukan pelayanan unggulan dan pengembangan pelayanan prioritas. Saat ini Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 jenis transformasi yang akan dilakukan, yakni transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan, dan Teknologi Kesehatan. Dalam mendukung transformasi Kesehatan ini, RSUD Raden Mattaher berperan aktif dalam peningkatan transformasi layanan rujukan. Langkah ini telah diawali dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dirut Rumah Sakit Kanker Dharmais dan Dirut Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Dr. dr.Mahar Mardjono pada tanggal 17 Juni		

		2022 lalu, Tranformasi layanan unggulan yang akan diwujudkan oleh RSUD Raden Mattaher saat ini adalah : • Bedah Jantung Terbuka • Stroke • Onkologi • Uronefrologi • Penyakit Infeksi Emerging • Kesehatan Ibu dan Anak Pelayanan Unggulan Jantung akan mewujudkan Bedah Jantung Terbuka setelah hampir 6 tahun ini RSUD Raden Mattaher telah mampu melaksanakan katerisasi jantung. Pelayanan stroke akan ditingkatkan sampai mewujudkan intervensi vascular bedah setelah sebelumnya telah mampu melakukan Tindakan intervensi non bedah. Sudah satu tahun ini RSUD Raden Mattaher telah membuka Unit Stroke dan tenaga medis kita telah mampu melakukan Tindakan intervensi vascular non bedah bagi pasien-pasien stroke. Pelayanan Onkologi atau kanker akan ditingkatkan sampai mewujudkan pelayanan Radioterapi setelah sebelumnya kita melakukan pelayanan kemoterapi Pelayanan Uronefrologi akan ditingkatkan sampai mewujudkan Transplantasi Ginjal setelah sebelumnya kita telah melakukan pelayanan Hemodialisa (cuci darah) dan Tindakan CAPD Pelayanan Infeksi Emerging akan ditingkatkan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi emerging yang berpotensi wabah seperti covid-19, MERS, Avian		

		Influenza dan lainnya Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak juga akan ditingkatkan sampai mewujudkan pelayanan yang berkualitas dalam meningkatkan angka harapan hidup bagi ibu dan janin Sebagai Rumah Sakit Rujukan Provinsi, maka RSUD Raden Mattaher Jambi harus mampu melayani pasien dengan berbagai jenis penyakit yang perlu mendapatkan tindakan dan penanganan dari dokter spesialis maupun sub spesialis oleh sebab itu RSUD Raden Mattaher Jambi harus mempunyai Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang memadai		
32.	1. Mendorong percepatan pencapaian indikator kinerja kabupaten/kota yang menyelenggarakan program Kesehatan Jiwa. 2. Perlunya program dan produk unggulan dalam rangka peningkatan BLUD.	1. Sosialisasi program kesehatan jiwa ke Kabupaten/Daerah 2. Meningkatkan kerjasama pelayanan dengan leading sektor terkait	1. Agar masyarakat mendapatkan manfaat dari pelayananan kesehatan jiwa 2. Meningkatkan pendapatan BLUD RS Jiwa	RS. JIWA
33.	1. Perlu secepatnya disusun Juknis dan SOP terkait hibah serta pedoman dan mekanisme bantuan bagi Tahfiz Quran, Guru Ngaji dan Pondok Pesantren serta Juknis dan SOP Beasiswa. 2. Perlunya Sosialisasi kepada para pihak terkait hibah dan Pokir. 3. Perlu dipercepat proses verifikasi dan validasi terkait dengan hibah. 4. Koordinasi dengan Perangkat daerah yang lain untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. 5. Penyusunan data base penerima hibah. 6. Perbaikan sistem pengelolaan dokumen-dokumen terkait dengan pengajuan hibah dan Pokir DPRD.	1. a Bantuan hibah mempedomani Pergub 25 Tahun 2025 Tentang Tata cara pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Prov. Jambi b. Juknis bantuan Tahfidz dan Bos telah dibuat dan dilaksanakan c. Juknis Bantuan Program Beasiswa Strata 1 dan Strata 3 Telah dibuat dan dilaksanakan, dengan Keputusan Sekretaris Daerah Jambi dengan Nomor 23/Kep.Sekda/Setda. Kesra.3-3/2022 d. Juklak Bantuan Program Beasiswa Strata 1 dan Strata 3 Telah dibuat dan dilaksanakan, dengan Keputusan Sekretaris Daerah Jambi dengan Nomor 22/Kep.Sekda/Setda. Kesra.3-3/2022 2. Sosialisasi telah dilaksanakan sebelum pelaksanaan	1. Agar pelaksanaan bantuan keagamaan dan beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Agar pemberian bantuan memahami mekanisme dan kewajiban sebagai penerima bantuan. 3. Guna percepatan proses pemberian bantuan dan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. a Agar dapat mensinergikan Program dan kegiatan di pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam Provinsi Jambi b. Melihat Sejauh mana progres dari program dan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Provinsi Jambi. 5. Guna tercapainya tertib Administrasi bantuan. 6. Guna tercapainya	BIRO KESRA

		penandatanganan dokumen pemberian bantuan 3. a. Biro Kesra Setda Provinsi Jambi telah menetapkan Koordinator wilayah. b. Penunjukan Tim pelaksanaan Bantuan dalam Proses Penetapan SK Gubernur Jambi. 4. a. Telah dilaksanakan Rakor Kesra Tingkat Provinsi Jambi b. Telah dilaksanakan Evaluasi Program dan kegiatan Bidang Kesra 5. a. Proses penyusunan data telah dilakukan berdasarkan Kab/Kota dalam Provinsi Jambi b. Perencanaan pembuatan aplikasi permohonan bantuan 6. a. Perencanaan pembuatan aplikasi permohonan bantuan, namun terkendala tupoksi, dana pembuatan dan pengelolaan aplikasi b. Pokir bantuan keagamaan melalui E-Pokir pada Bappeda Provinsi Jambi	tertib Administrasi bantuan.	
34.	1. Perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja untuk menekan tingkat pengangguran terbuka. 2. Perlunya koordinasi dengan pihak terkait untuk mewujudkan pembanguna BLK Nasional di Provinsi Jambi dan BLK Komunitas serta Workshop Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. 3. Diperlukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan dinas lainnya termasuk DUDI dan peningkatan kompetensi lulusan SMK untuk mengurangi pengangguran SMK dalam penyusunan program. 4. Peningkatan koordinasi dan sinergisitas dengan Dunia usaha dunia industri (DUDI) tentang peluang kerja. 5. Diperlukan kajian efektivitas dan pentingnya keberadaan UPTD pada masing-masing wilayah di Provinsi Jambi. 6. Perlunya sosialisasi yang lebih intensif akan program-program pelatihan pada UPTD Balai Latihan	1. Dalam Peningkatan kualitas Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan Kerja untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2022 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan 2 Program dalam APBD 2022 yaitu Program : 1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 7.210.999.821 dan 2. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan Anggaran sebesar Rp. 717.641.481. 2. Telah dilaksanakan Penandatanganan serah terima lahan dan bangunan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jambi antara Gubernur Jambi dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Pada tanggal 11 Januari 2023 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta.	1. Agar dapat menekan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi. 2. Tujuannya serah terima tersebut untuk meningkatkan Daya Manusia Jambi makin berkualitas dalam peningkatan lapangan pekerjaan di Provins Jambi. 3. Tujuannya agar pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 4. Dengan tujuan mempersiapkan calon tenaga kerja yang handal dan Matang dalam dunia kerja. 5. Meningkatkan Pelayanan Teknis terkait Pelayanan pengawasan Ketenagakerjaan diwilayah Kerja masing-masing. 6. Sebagai informasi kepada masyarakat maupun dunia usaha terkait dengan Program pelatihan	DISNAKERTRANS

	Kerja Provinsi Jambi untuk mempersiapkan tenaga siap pakai.	3. Melaksanakan Pelatihan berbasis kompetensi agar menghasilkan pelatihan yang menghasilkan <i>Linked and Match</i> (Pelatihan yang dilaksanakan mengacu pada dunia Kerja) 4. Telah melakukan penguatan <i>link and match</i> dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), untuk mempersiapkan calon tenaga kerja yang handal dan Matang. 5. Saat ini telah terbentuk 3 UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Wilayah 1 berada Muaro Jambi, Wilayah II di Kabupaten Bungo dan Wilayah III di Kabupaten Kerja. 6. Dalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan maupun penerimaan siswa di UPTD BLKP Provinsi Jambi, telah dilaksanakan Sosialisasi baik itu melalui Media Sosial maupun Cetak	yang dilaksanakan oleh UPTD BLK Provinsi Jambi.	
35.	1. Lakukan koordinasi dengan Dinas terkait lainnya termasuk Perguruan Tinggi untuk mengkaji potensi wisata dan mengatur masalah teknis pembangunan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek daya tarik wisata. 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi perlu melakukan pendataan analisa pasar pariwisata pada event-event pariwisata di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. 3. Perlunya <i>roadmap</i> pengembangan Kepariwisata di Provinsi Jambi. 4. Perlunya event-event bertaraf nasional dan internasional secara rutin dilaksanakan dalam rangka mendorong kepariwisataan di Jambi.	1. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan kerjasama dengan Universitas Jambi dan Kementerian terkait 2. Sebagaimana porsi anggaran yang tersedia untuk kegiatan analisa pasar telah dapat dilaksanakan walau dengan dukungan anggaran yang masih minim (Rp. 45.000.000) 3. Masih menunggu revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) yang masih dalam proses 4. Untuk event daerah yang bertaraf nasional kita sudah mempunyai Festival Batanghari namun perlu terus ditingkatkan dari sisi kualitas termasuk dukungan penganggaran yang berpihak pada pelaksanaan event. Untuk event yang bersifat keikutsertaan baik diluar daerah maupun diluar negeri kita belum bisa dapat melaksanakannya, mengingat dukungan anggaran yang masih	1. DAK Tematik yang diusulkan ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Dengan adanya kegiatan analisa pasar dapat diperkirakan pangsa pasar pariwisata Provinsi Jambi sehingga dapat menjadi acuan dalam mengusulkan/ melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahun berikutnya sesuai dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jambi 3. Revisi Rippar prov Dukungan anggaran pada Kabupaten/Kota 4. Mengingat adanya keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan event-event yang bertaraf nasional baik diluar daerah/luar negeri, telah dilaksanakan Kerinci Mountain Bike Grand Fondo 2022 dan Geopark Merangin Jambi Open Rafting 2022 bekerjasama dengan stakeholder terkait. 5. Pada kegiatan seperti	DISBUDPAR

		terbatas.	ini bertujuan dalam rangka bersinergi mengingat adanya keterbatasan dukungan anggaran tersebut, selain itu juga dengan lebih mendorong pengguna berbagai media sosial baik kepunyaan pemerintah (Disbudpar Prov. Jambi) maupun perorangan.	
36.	1. Maksimalisasi pelayanan dalam Panti, penanganan Lansia dan Disabilitas. 2. Mendorong perbaikan dan percepatan DTKS di Kabupaten/Kota 3. Perlunya pembaharuan dan validasi Data masalah Sosial. 4. Maksimalisasi sinergisitas dan kordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait masalah data. 5. Percepat penyusunan Pergub Lansia dan Disabilitas. 6. Perlunya evaluasi terhadap program KUBE dalam upaya penciptaan kesempatan berusaha dan lapangan usaha.	1. Melakukan optimalisasi pelayanan, Melakukan koordinasi dengan Kab/kota 2. Telah diterbitkan surat Gubernur kepada para Bupati/ Walikota Nomor S-1841/ Bappeda-3.2/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Pemanfaatan dan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Melakukan Rapat koordinasi dengan Dinas Sosial Kab /kota terkait Verval DTKS 3. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Dinas Sosial Kab/Kota terkait Verval DTKS 4. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Dinas Sosial Kab/Kota terkait Verval DTKS 5. Sudah terbit Perda Lansia dan Disabilitas Perda no. 16 th 2019 ttg kesejahteraan sosial lanjut usia, Sudah terbit Perda no. 3 tahun 2022 ttg perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas 6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1. Penambahan jumlah Penerima Manfaat, Penambahan jenis layanan (multi layanan) 2. Makin banyak kabupaten kota yang memutakhirkan DTKS, sehingga program-program penanggulangan Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota makin tepat sasaran 3. Makin banyak Kabupaten/Kota yang memutakhirkan DTKS, sehingga program-program penanggulangan Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota makin tepat sasaran 4. Dinas Sosial Kab/Kota melaksanakan Verval DTKS sesuai aturan yang berlaku dan membuat PKS dengan Dinas Dukupil Kab/Kota untuk perbaikan NIK karena NIK menjadi dasar dalam Verval DTKS 5. Untuk Pergub Lansia dan Pergub Disabilitas, sedang berproses penyusunan 6. Pemberian bantuan, menyesuaikan permohonan yang diajukan oleh Penerima Manfaat	SOSDUKCAPIL
37.	1. Perlunya penyusunan Pergub sebagai tindak lanjut Perda Penyelenggaraan Keolahragaan. 2. Perlunya penyusunan Rencana induk atau <i>roadmap</i> pengembangan olahraga di Provinsi Jambi. 3. Perlunya event-event rutin berskala nasional dan internasional. 4. Perlunya pemetaan olahraga unggulan yang akan dikembangkan dengan melibatkan perguruan tinggi, Koni dan dunia usaha.	1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi akan segera mengajukan penyusunan pergub dimaksud agar dapat ditindak lanjuti Biro Hukum Setda Provinsi Jambi 2. Dalam pelaksanaan Rakor Program Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jambi Tahun 2023 akan dibahas <i>roadmap</i>. Rencana Aksi pembinaan prestasi Olahraga sebagai	1. Legalitas penyusunan Pergub sebagai turunan Perda penyelenggaraan keolahragaan 2. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota dalam Implementasi rencana aksi pembinaan prestasi olahraga/desain besar olahraga nasional (DBON) 3. Untuk mengakomodir	DISPORA

	5. Perlunya pengembangan olahraga tradisional Provinsi Jambi. 6. Mempercepat pembangunan Sekolah Keberbakatan Olahraga. 7. Perlunya evaluasi terhadap program kewirausahaan pemuda, jika memberi dampak yang positif dan signifikan perlu diteruskan.	Implementasi Perpres 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional 3. Untuk event-event berskala Nasional/Internasional merupakan kewenangan pusat/Kemendikpora untuk menganggarkan pembiayaan penyelenggaraannya. Sedangkan kewenangan Provinsi hanya sebatas menganggarkan biaya partisipasi dalam penyelenggaraan event tingkat nasional sedangkan partisipasi keikutsertaan dalam event Internasional menjadi kewenangan pemerintah pusat 4. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi telah melakukan pemetaan olahraga unggulan dengan menyelenggarakan Pusat Pendidikan & Latihan Pelajar (PPLP). Cabor-cabor yang merupakan cabor unggulan Provinsi Jambi dengan melibatkan Perguruan Tinggi, Koni melalui Pengprov cabor 5. Perlunya pengenalan/sosialisasi olahraga tradisional sejak dini disemua jenjang Pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA Perguruan Tinggi. Sehingga dapat menarik minat dan bakat Siswa/Siswi tersebut untuk mengeluti olahraga tradisional itu sendiri 6. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk membuat kelas olahraga (Sekolah Olahraga) 7. Telah melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan kewirausahaan di Kab/Kota berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi terkait fasilitasi permodalan bagi UMKM milenial (pemuda)	atlet-atlet olahraga Provinsi Jambi maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi telah menganggarkan biaya partisipasi atlet-atlet Provinsi Jambi untuk mengikuti event-event tingkat nasional baik melalui penganggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga ataupun melalui Dana HIBAH ke KONI sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah 4. Untuk keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan olahraga unggulan masih belum maksimal dan belum terorganisir dengan baik, dan kedepannya diharapkan dilaksanakan penjajakan keterlibatan olahraga dapat dimuali dari penyelenggaraan gala diner/coffe morning untuk memohon dukungan swasta sebagai orang tua angkat cabor-cabor unggulan 5. Perlunya sinergitas antar semua pemangku kebijakan terkait olahraga tradisional, sehingga olahraga tradisional dapat dikenal disemua kalangan baik masyarakat luas maupun dalam dunia Pendidikan. 6. Belum terealisasinya sekolah olahraga dikarenakan menunggu kebijakan Diknas dari kelas olahraga satuan pendidikan 7. Menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan bagi pemuda melalui kegiatanpelatihan kewirausahaan	
38.	1. Memberikan ruang dan kesempatan kepada perempuan dalam kegiatan ekonomi, keterlibatan perempuan di parlemen,	1. Sudah dilaksanakan melalui kegiatan : a. Evaluasi PUG b. Pembinaan Organisasi	1. Meningkatnya Peran perempuan dalam pelaksanaan pembangunan 2. Meningkatnya	DP2AP3

	dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi dan teknisi. 2. Mendorong keberpihakan anggaran untuk pemenuhan hak-hak anak selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA).	Perempuan c. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT 2. Sudah dilaksanakan melalui kegiatan : a. KIE tentang Perlindungan Anak b. Penguatan Kelembagaan Gender dan Anak c. Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak	Pemenuhan Hak-Hak Anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak	

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan adalah penugasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah lain agar memperlancar urusan pemerintahan tersebut.

Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana tertuang pada Pasal 5 ayat (4), bahwa urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Penyelenggaraan tugas pembantuan adalah bentuk dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di samping itu, tugas pembantuan juga merupakan bentuk penugasan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang disertai dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat harus didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya

Pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi menerima alokasi dana APBN untuk penyelenggaraan tugas pembantuan sebesar Rp. 102.210.726.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 97.818.286.153,- atau setara dengan 95,70%.

Tugas pembantuan tersebut terbagi untuk 3 (tiga) bidang urusan yaitu:

1. Urusan Pekerjaan Umum dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi,
2. Urusan Pertanian dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh dua perangkat daerah, yaitu Dinas TPHP (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) dan Dinas Perkebunan; dan
3. Urusan Lingkungan Hidup dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

4.1.2 Dinas PUPR Provinsi Jambi

Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi ada 2 (dua) bidang Satuan Kerja (Satker) yang diberikan kewenangan oleh Ditjen Bina Marga dan Ditjen SDA Kementerian PUPR dalam pelaksanaan tugas pembantuan, antara lain :

1. Bidang Bina Marga (kode Satker 1090320); dan
2. Bidang Sumber Daya Air (kode Satker 109214).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di kementerian, wilayah kerja adalah cakupan wilayah yang menjadi kewenangan kerja UPT. Pedoman pelaksanaan kegiatan Kementerian PUPR yang merupakan kewenangan pemerintah dan dilaksanakan sendiri bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantu adalah Dinas PUPR Provinsi Jambi.

OPD-TP Dinas PUPR Provinsi Jambi berada di bawah tanggung jawab Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi, mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja yang telah dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Dekon/TP) dan menjamin terwujudnya output yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan serta realisasi anggaran, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan serta Realisasi Anggaran
Dinas PUPR Provinsi Jambi Tahun 2022

NO.	SATUAN KERJA	KODE SATKER	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN KEUANGAN
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	109032	Rp.8,391,377,000	Rp. 8,358,104,453	99.60%
		109214	6.632,621,000	6.479,002.375	97,68%

Sumber: Dinas PUPR, 2023

1. Bidang Bina Marga
- a. Program
- Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.
- b. Kegiatan
- Preservasi Jalan Lubuk Kambing–Merlung;

- Padat Karya Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Lubuk Kambing–Merlung;

- Revitalisasi Drainase Secara Padat Karya Ruas Jalan Lubuk Kambing–Merlung; dan

- Program Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga.
- Pemeliharaan Rutin Jalan/SYC (A) Rp. 2,698,127,000,- (100%);

• Pemeliharaan Rutin Jalan/Swakelola (B) Rp. 1,167,489,000,- (100%);

• Preservasi Rutin Jembatan/Swakelola (C) Rp. 71,000,000,- (100%);

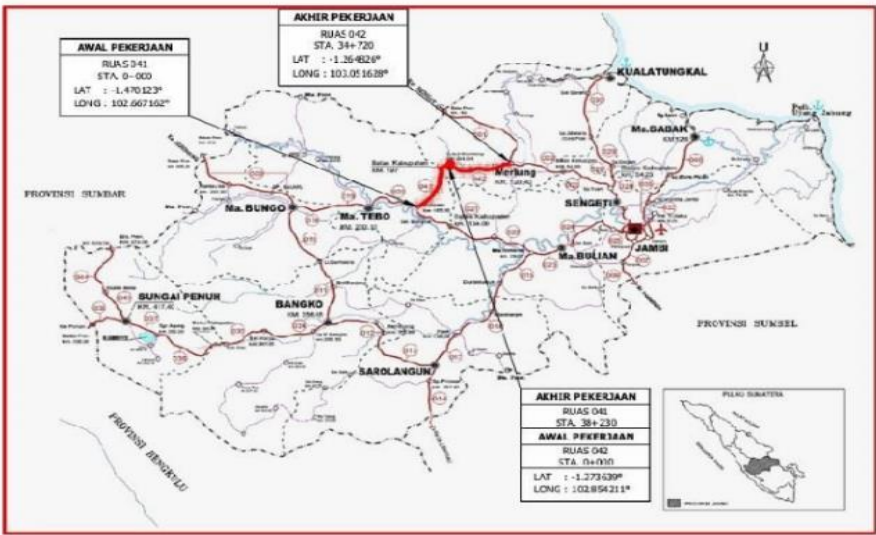
• Penanganan Drainase/Padat Karya (D) Rp. 2,712,596,000,- (100%);

• Program Dukungan Manajemen (E) Rp. 845,113,000,- (100%); dan

• Total (A+B+C+D+E) Rp. 7,494,325,000.

Gambar 4.1

PETA LOKASI KEGIATAN



Sumber: Dinas PUPR, 2023

- 2. Bidang Sumber Daya Air
 - a. Program
 - Program Ketahanan Sumber Daya Air
Anggaran Rp. 5.993.339.000,-
Realisasi : Rp. 5.993.339.000,-
 - Program Dukungan Manajemen
Anggaran Rp. 639.282.000,-
Realisasi Rp. 639.282.000,-
 - b. Kegiatan
Program Ketahanan Sumber Daya Air :
 - Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; dan
 - OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air.Program Dukungan Manajemen :
 - Dukungan manajemen Ditjen Sumber Daya Air; dan
 - Layanan dukungan manajemen internal.

Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas pembantuan dan Upaya Penyelesaian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi :

- 1. Pemasalahan teknis lapangan (pekerjaan fisik);
- 2. Permasalahan layanan organisasi dan tata kelola Internal;
- 3. Keterbatasan dana;
- 4. Terjadinya pergantian pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sehingga menyebabkan progres keuangan sedikit terhambat;

5. Terlambat terbitnya Surat Keputusan sehingga menghambat proses pencairan dana; dan
6. Dampak optimalisasi Anggaran 2022, membuat beberapa penyerapan anggaran kegiatan pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tidak dapat terlaksana 100%.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, dilakukan upaya penyelesaian sebagai berikut :

1. Peningkatan kerja sama antar instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi untuk melakukan pembebasan lahan sebagai langkah awal perencanaan awal jalan;
2. Perlunya pengalokasian dana yang sesuai dengan keperluan di lapangan. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melaksanakan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
3. Adanya upaya peningkatan kinerja untuk menjadi lebih baik; dan
4. Adanya upaya peningkatan kualitas dan kekompakan tim pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi.

4.1.3 Dinas TPHP Provinsi Jambi

Pada Tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi mendapat anggaran tugas pembantuan yang berasal dari dana APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Anggaran dan program kegiatan tersebut diperuntukkan untuk 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Anggaran Tugas pembantuan tersebut, antara lain :

1. Satker TP Tanaman Pangan (109119);
2. Satker TP Hortikultura (109905);
3. Satker TP Prasarana dan Sarana Pertanian (109125); dan
4. Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (109121).

1. Satker Tanaman Pangan (109119)

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana tugas pembantuan Ditjen Tanaman Pangan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.03.4.109119/2022, dengan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, sub kegiatan :
 - Koordinasi, bimtek, monev dan pelaporan, target yang di tetapkan 1 kegiatan dengan pagu Rp. 462.820.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 462.415.100,- (99,91%)

dan realisasi fisik 100%. Titik kritis pada pelaksanaan bantuan sarana pasca panen tanaman pangan adalah ketepatan penerima bantuan, untuk itu diperlukan verifikasi CPCL sehingga penerima bantuan tepat sasaran. Kegiatan verifikasi CPCL bantuan sarana pasca panen dilaksanakan pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi agar bantuan sarana pasca panen tanaman pangan tepat sasaran, untuk itu diperlukan verifikasi CPCL sehingga penerima bantuan tepat sasaran. Monitoring, evaluasi dan pelaporan sarana pengolahan hasil tanaman pangan diarahkan kepada operasional pendayagunaan sarana pengolahan yang telah disalurkan dengan beberapa kegiatan yaitu pelaksanaan verifikasi penerima bantuan sarana pengolahan, pembinaan dan pengawalan bantuan UPH ke Kabupaten/Kota. Kegiatan verifikasi dan pemberkasan penerima bantuan UPH dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Maret 2022, sedangkan kegiatan pembinaan dan pengawalan bantuan UPH ke Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Bulan April s.d. Desember 2022.

- Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan, target yang ditetapkan 5 (lima) layanan dengan pagu Rp. 173.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 173.500.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini pada Tahun 2022 sebanyak 5 (lima) layanan yaitu untuk Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Merangin dan Tanjung Jabung Timur. Petugas PIP pada 5 (lima) Kabupaten tersebut mendapatkan honor pada Tahun 2022 yang dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan sebesar masing-masing Rp. 500.000,- per bulan. Selain kegiatan PIP, pada Tahun 2022 juga terdapat alokasi kegiatan koordinasi peluang usaha ekspor dan atau substitusi impor produk tanaman pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan panduan/pedoman teknis tentang kegiatan pengawalan dan penguatan ekspor/substitusi impor produk tanaman pangan, jaminan pasar komoditas tanaman pangan serta memperluas akses pasar komoditas tanaman pangan dan investasi komoditas tanaman pangan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta yang terdiri dari petugas yang menangani Kegiatan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kabupaten/Kota/Provinsi, Operator Aplikasi Registrasi Kebun Suket Teki Tahun 2022 dan Petani Porang yang ada di Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di Hotel Aston Jambi pada Tanggal 21 s.d. 22 Juli 2022. Pada acara ini mengundang narasumber yang berasal dari Direktorat PPHTP Kementerian Pertanian Republik Indonesia, PT. Mitra Porang Nusantara Riau, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dan Balai Karantina Pertanian Kelas I Provinsi Jambi.
- Sertifikat Produk Tanaman Pangan, target yang ditetapkan 1 (satu) produk dengan pagu Rp. 56.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya data uji mutu 1 (satu) produk tanaman pangan (beras 5 sampel, jagung 3 sampel dan kedelai 2 sampel). Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok tani atau gapoktan yang sudah menjual beras dan kedelai kepada masyarakat. Kegiatan meliputi pengambilan sampel beras sebanyak 5 sampel, jagung 3 sampel dan kedelai 2

sampel, selanjutnya sampel beras, jagung dan kedelai tersebut di kirim ke Laboratorium Saraswanti Bogor untuk di uji residu pestisida, residu logam berat terhadap sampel produk yang dihasilkan poktan/gapoktan dan uji nutrisi yang terkandung di dalamnya.

- Sarana Pascapanen Tanaman Pangan, target yang di tetapkan 38 unit dengan pagu Rp. 1.342.346.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.339.754.011,- (99,81%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan verifikasi CPCL bantuan sarana pascapanen dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi pada Bulan Januari s.d. Maret 2022. Agar bantuan sarana pascapanen tanaman pangan tepat sasaran, untuk itu diperlukan verifikasi CPCL sehingga penerima bantuan tepat sasaran. Titik bagi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan adalah sebagai berikut :

1. *Power Tresher*

Kabupaten Kerinci = 2 unit

Kabupaten Sarolangun = 2 unit

Kabupaten Merangin = 2 unit

Kabupaten Bungo = 4 unit

Kabupaten Tebo = 2 unit

Kabupaten Batanghari = 2 unit

Kabupaten Tanjab Barat = 3 unit

Kabupaten Tanjab Timur = 3 unit

Provinsi = 3 unit

2. *Corn Sheller*

Kabupaten Kerinci = 2 unit

Kabupaten Merangin = 2 unit

Kabupaten Sarolangun = 2 unit

3. *Power Tresher Multiguna*

Kabupaten Tebo = 3 unit

4. *PTM Mobile*

Kabupaten Sarolangun = 1 unit

Kabupaten Tanjab Barat = 1 unit

5. *Husker/Polisher*

Kabupaten Sarolangun = 1 unit

Kabupaten Tanjab Barat = 1 unit

6. *Grading/Packing*

Kabupaten Sarolangun = 1 unit

Kabupaten Tanjab Barat = 1 unit

- Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan, target yang di tetapkan 12 unit dengan pagu Rp. 1.440.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.426.623.100,- (99,07%) dan realisasi fisik 100%.

- b. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan, sub kegiatan :
- Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, target yang ditetapkan 1 kegiatan dengan pagu Rp. 146.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145.069.200,- (99,36%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa sosialisasi dan pengawalan peningkatan produksi Akabi Provinsi dan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota (Kabupaten Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tanjab Timur, Tebo, Muaro Jambi dan Bungo).
 - Kawasan Kedelai (PEN), target yang ditetapkan 3.311 unit dengan pagu Rp. 4.786.157.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.748.082.116,- (99,20%) dan realisasi fisik 100%. Secara umum kegiatan pengembangan kawasan kedelai pada 7 Kabupaten tidak mengalami kendala yang berarti dapat dilihat dari realisasi tanam yang sudah mencapai 100% sebelum akhir tahun anggaran berakhir. Realisasi panen juga mencapai 100% yaitu seluas 1.500 Ha. Serangan OPT juga terpantau menyerang tanaman kedelai, tetapi tidak sampai mengakibatkan Puso karena adanya Gerakan Pengendalian dari BPTPH Provinsi Jambi sehingga OPT bisa diatasi. Untuk realisasi keuangan pengadaan bantuan fisik kegiatan pengadaan bantuan pemerintah kegiatan Kawasan kedelai Tahun Anggaran 2022 telah selesai dilaksanakan sebanyak 99,20%. Proses kontrak pengadaan dilakukan tepat waktu. Dalam rangka pencapaian sasaran produksi tahun 2022 Pemerintah melalui dana APBN-ABT Tahun Anggaran 2022 memberikan bantuan stimulant berupa benih kedelai bersertifikat dan sarana produksi (saprodi) lainnya untuk areal seluas 5.000 Ha di 7 Kabupaten. Bantuan tersebut dialokasikan melalui Dana Tugas pembantuan di Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Kegiatan budidaya kedelai dapat dilaksanakan dengan pola tanam monokultur ataupun tumpangsari, seperti dengan jagung, padi atau tanaman lainnya. Dari target yang diberikan semula seluas 5.000 Ha, hanya 1.811 Ha yang dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan musim tanam kedelai di beberapa Kabupaten yang telah lewat. Beberapa petani mengusahakan beberapa komoditi untuk dibudidayakan, biasanya mereka menggilir lahan mereka untuk budidaya tanaman pangan lainnya seperti padi atau jagung. Permasalahan lain yang juga ditemui pada pengembangan kawasan kedelai ABT ini adalah beberapa petani penerima bantuan kegiatan yang kurang berpengalaman, karena kebiasaan mereka yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan seperti sawit. Kurang aktifnya peran serta penyuluh lapangan menyebabkan petani merugi dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka sehingga hasil panen tidak sesuai harapan. Selain hal tersebut diatas, kurangnya minat petani terhadap usaha tani kedelai juga merupakan suatu kendala yang menyebabkan target luasan hanya mampu terpenuhi sedikit. Umumnya petani mengeluhkan hasil panen mereka yang terkendala pada pemasaran. Dari segi harga, hasil panen kedelai dinilai kurang menjanjikan bagi petani. Kurangnya jumlah industri hilir di Provinsi Jambi juga merupakan penyebab

rendahnya minat petani untuk membudidayakan tanaman kedelai. Peran serta instansi terkait dan *off taker* sangat dibutuhkan demi keberlangsungan dan suksesnya program pengembangan kawasan kedelai di Provinsi Jambi.

c. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, sub kegiatan :

- Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, dengan target yang ditetapkan 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 68.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.799.000,- (97,52%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa sosialisasi dan pengawalan peningkatan produksi Akabi Provinsi dan 3 (tiga) Kabupaten (Kabupaten Kerinci, Merangin dan Tanjab Barat).
- Kawasan Padi Kaya Gizi, dengan target yang di tetapkan 762 unit dengan pagu Rp. 1.196.340.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.187.868.100,- (99,29%) dan realisasi fisik 100%. Alokasi kegiatan padi bioforti untuk Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 seluas 762 Ha yang tersebar di 2 Kabupaten (8 Kecamatan, 13 Desa dan 34 Kelompok Tani). Kabupaten penerima bantuan yaitu Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Merangin yang merupakan Lokus Fokus Stunting yang ditetapkan pada Kepmen Bappenas No. 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021. Bantuan yang diberikan pada Kegiatan Padi Bioforti 2022 adalah benih dengan pagu sebanyak 25 Kg/Ha, NPK 100 Kg/Ha dan Pupuk Hayati 1 paket. Dari hasil pengembangan Padi Inpari Nutrizinc seluas 462 Ha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 telah menghasilkan produksi padi sebesar 2.679 ton GKG dengan provitas 58 ton/Ha, sedangkan untuk Kabupaten Merangin belum tanam disebabkan karena terkendala oleh ketersediaan benih dimana benih baru *droping* di Bulan Desember sehingga menyebabkan perubahan jadwal tanam.

d. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan, sub kegiatan :

- Koordinasi, Bimtek, Monev dan pelaporan, dengan target yang di tetapkan 1 Kegiatan dengan pagu Rp. 61.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.124.000,- (98,56%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bantuan benih padi inbrida di Kabupaten/Kota.
- Area Penyaluran Benih Padi, dengan target yang di tetapkan 10.200 unit dengan pagu Rp. 3.197.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.197.500.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Untuk Tahun 2022 telah dialokasikan Kegiatan Fasilitas Bantuan Benih Padi Inbrida Bersertifikat sebanyak 10.200 Ha yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Agar bantuan benih dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani dilakukan percepatan kegiatan. Proses kontrak sudah dimulai di Bulan Februari/Maret sehingga diakhir Februari sudah bisa dilakukan proses *droping* benih dan penanaman. Saat ini proses kontrak sudah 100%, tanam sudah 89,45%, panen 57,7% atau sekitar 5.888 ha dengan provitas 50,62 ku/Ha dan produksi sebesar 29.807 ton.
- Area Penyaluran Benih Jagung, dengan target yang di tetapkan 1.000 unit dengan pagu Rp. 630.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 630.000.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%. Alokasi Kegiatan Jagung untuk Provinsi Jambi Tahun

Anggaran 2022 seluas 1.000 Ha yang tersebar di 6 Kabupaten (24 Kecamatan, 54 Desa dan 74 Kelompok Tani). Kabupaten penerima bantuan yaitu Kabupaten Batanghari (100 Ha), Tanjabtim (300 Ha), Tebo (300 Ha), Bungo (100 Ha), Merangin (100 Ha) dan Muaro Jambi (100 Ha). Paket bantuan yang diberikan pada Kegiatan Jagung 2022 adalah benih dengan pagu sebanyak 15 Kg/Ha. Varietas benih yang digunakan Pioneer 35. Realisasi Tanam pada 6 Kabupaten penerima bantuan hingga akhir Bulan Desember 2022 seluas 1.000 Ha (100%), realisasi panen seluas 897 Ha (90%), provitas rata-rata sebesar 58.97 Ku/Ha, dan produksi sebesar 5.686 ton.

- e. Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan, sub kegiatan :
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran, dengan target yang ditetapkan 1 dokumen dengan pagu Rp. 26.810.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.040.650,- (97,13%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa koordinasi Perencanaan ke Kabupaten/Kota.
 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dengan target yang ditetapkan 1 dokumen dengan pagu Rp. 488.950.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 485.280.400,- (99,25%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini koordinasi, evaluasi dan pelaporan ke Kabupaten/Kota, koordinasi data dan informasi serta honor Reporter/Mantri Tani dan Admin (Verifikasi Data).
 - Layanan Manajemen Keuangan, dengan target yang ditetapkan 1 layanan dengan pagu Rp. 279.260.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 279.167.100,- (99,97%) dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini berupa operasional kantor dan rapat koordinasi terkait pengelolaan keuangan.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas pembantuan Ditjen Tanaman Pangan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 14.355.543.000,- dan terealisasi sebesar 14.284.222.777,- (99,50%).

2. Satker TP Hortikultura (109905)

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.04.4.109905/2022, dengan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, sub kegiatan :
- Sarana Pemasaran, dengan pagu Rp. 86.312.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.119.500,- (99,87%), target yang ditetapkan 1 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa bantuan sarana pasar lelang/pasar tani 1 unit yang dilaksanakan oleh Dinas TPHP Provinsi Jambi.

- Prasarana Pemasaran, dengan pagu Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 99.810.500,- (99,81%), target yang ditetapkan 1 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa persiapan identifikasi ke lokasi dan pendampingan serta pengawalan dan fasilitasi rehabilitasi prasarana pemasaran 1 unit.
 - Sarana Pasca Panen Hortikultura, dengan pagu Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 299.799.150,- (99,93%) target yang ditetapkan 3 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa identifikasi/koordinasi/persiapan sarana pascapanen hortikultura di 6 (enam) Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - Sarana Pengolahan Hortikultura, dengan pagu Rp. 270.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 269.255.350,- (99,72%) target yang ditetapkan 3 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa identifikasi/koordinasi/persiapan sarana pascapanen hortikultura di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan Provinsi.
 - Prasarana Pasca Panen Hortikultura, dengan pagu Rp. 165.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 164.776.500,- (99,86%) target yang ditetapkan 1 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa fasilitasi bantuan bangunan pengering tenaga surya (*solar dryer*) pada Kabupaten Merangin.
- b. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat, sub kegiatan :
- Kawasan Bawang Merah, dengan pagu Rp. 140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 137.826.720,- (98,45%) target yang ditetapkan 20 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini yaitu pengembangan kawasan bawang merah 20 Ha di Kabupaten Muaro Jambi dan Merangin masing-masing 10 Ha. Komponen bantuan berupa sarana produksi dan sarana budidaya bawang merah perhektar sebagai berikut; mulsa plastik 6 roll, pupuk pembeih tanah organik 7 sachet dan pupuk hayati endofit 6 sachet. Pengadaan benih didukung dari Perbenihan Hortikultura sebanyak 20 ton untuk 20 Ha.
 - Kawasan Aneka Cabai dengan pagu Rp. 480.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 469.772.240,- (97,87%) target yang ditetapkan 40 Unit terealisasi 100%. Kegiatan ini bertujuan terbangunnya kawasan baru dan pengutuhan kawasan aneka cabai di sentra-sentra produksi seluas 40 Ha pada 2 (dua) sentra baru di Kabupaten Muaro Jambi dan Merangin. Komponen bantuan berupa sarana produksi dan sarana budidaya cabe merah perhektar untuk kebutuhan 40 Ha sebagai berikut; benih cabe merah (juro f1) 10 sachet 10 Ha, benih cabe merah (lado) (pelepat ilir/pak badrud) 11 sachet 30 Ha, uji mutu benih 1 sample, uji mutu pestisida 2 sample, mulsa plastik 9 sachet 40 Ha, pembenah tanah organik 10 sachet 40 Ha, pupuk hayati 14 sachet 40 Ha.
 - Kawasan Jahe dengan pagu Rp. 70.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.216.520,- (96,02%) target yang ditetapkan 10 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan kawasan jahe 10 Ha pada Kabupaten Merangin. Komponen bantuan berupa sarana produksi dan sarana budidaya jahe perhektar sebagai berikut; mulsa plastik 3 roll 10 Ha, NPK 150 Kg 10 Ha, pembenah tanah organik 6 sachet 10 Ha, pupuk hayati majemuk endofit 6 sachet 10 Ha.

- Kawasan Kentang dengan pagu Rp. 140.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 138.877.720,- (99,20%) target yang ditetapkan 20 unit terealisasi 100%.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kawasan baru dan pengutuhan kawasan kentang di sentra-sentra produksi seluas 20 Ha di Kabupaten Kerinci. Komponen bantuan berupa Sarana Produksi dan Sarana Budidaya Kentang perhektar sebagai berikut; 1 pupuk pembenah tanah organik 7 sachet, mulsa plastik 6 roll, pupuk hayati endofit) 4 sachet, benih kentang G2 1000 Kg dengan luas lahan keseluruhan 20 Ha.

c. Peningkatan Produksi Buah dan Hortikultura, sub kegiatan :

- Kawasan Jeruk dengan pagu sebesar Rp. 180.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 178.214.000,- (99,01%) target yang ditetapkan 20 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kawasan baru dan pengutuhan kawasan jeruk seluas 20 Ha di Kabupaten Kerinci. Komponen bantuan berupa Sarana Produksi dan Sarana Budidaya Jeruk perhektar sebagai berikut; 1 pupuk pembenah tanah organik 7 sachet, mulsa plastik 6 roll, pupuk hayati endofit) 4 sachet, benih kentang G2 1000 Kg dengan luas lahan keseluruhan 20 Ha.

d. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura, sub kegiatan :

- Layanan Perencanaan Satker Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 28.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.700.000,- (100%) target yang ditetapkan 1 layanan terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa koordinasi dan penyusunan data perencanaan serta monev perencanaan kegiatan.
- Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah, dengan pagu sebesar Rp. 71.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,- (84,15%) target yang ditetapkan 1 layanan terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa layanan perbendaharaan dan keuangan satker daerah.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp.2.736.312.000,- dan terealisasi sebesar 2.704.838.544,- (98,85%).

3. Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan (109121)

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana Tugas pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.06.4.109121/2022, Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak, pagu sebesar Rp. 220.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 219.989.800,- (100%) target yang ditetapkan 4 lembaga terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa pelatihan pelaku usaha

menuju ekspor, pemutakhiran database pengolahan data, pendaftaran ijin edar pupuk organik pada Kabupaten Sarolangun dan pelayanan informasi harga komoditas peternakan.

- b. Peningkatan Produksi Pakan Ternak, pagu sebesar Rp. 90.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 87.859.500,- (97,62%) target yang di tetapkan 45 produk terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa pengujian mutu dan keamanan pakan/bahan pakan sebanyak 45 sampel yang terdiri dari:
 1. Sampel sapi potong sebanyak 13 sampel;
 2. Sampel itik sebanyak 3 sampel;
 3. Sampel ayam pedaging sebanyak 12 sampel;
 4. Sampel ayam petelur sebanyak 14 sampel; dan
 5. Sampel bahan pakan sebanyak 3 sampel.
- c. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, pagu sebesar Rp. 8.001.865.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 5.360.426.881,- (66,99%) target yang di tetapkan 205.850 layanan terealisasi 89%. Kegiatan ini berupa penyediaan vaksin jembrana sebanyak 1.950 dosis, vaksin rabies 3.900 dosis dan operasional vaksin PMK tahap I dan II sebanyak 200.000 layanan. Untuk penyediaan vaksin jembrana dan rabies telah terealisasi 100% dan untuk PMK telah terealisasi keuangan operasional PMK Tahap 1 dan 2 sebanyak 101.985 ekor dari target 200.000 ekor (setelah difokusing), sedangkan fisiknya terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 103.866 layanan. Adapun tidak terealisasi semua dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2022, vaksin yang diterima oleh Dinas TPHP Provinsi Jambi dari Pusat sebanyak 123.000 dosis dan berdasarkan laporan dari Kabupaten/Kota ternak banyak yang sakit, sehingga petugas lebih fokus ke pengobatan.
- d. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak, pagu sebesar Rp. 3.265.158.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 2.790.648.143,- (85,47%) target yang di tetapkan 15.000 kelompok masyarakat terealisasi 99%. Kegiatan ini berupa operasional inseminasi buatan sebanyak 17.251 ekor sehingga target yang dicapai sebanyak 15.000 akseptor. Akseptor IB adalah induk ternak yang sudah didaftarkan maupun yang belum di aplikasi iSIKHNAS. Akan tetapi pada kegiatan ini terdapat target penandaan dan pendataan ternak sebanyak 207.151 ekor dan pada bulan Oktober telah dilakukan refokusing sehingga kesanggupan provinsi sebanyak 40.000 ekor. Telah terealisasi keuangan operasional penandaan dan pendataan ternak sebanyak 17.011 ekor dari target 40.000 ekor (setelah refokusing), untuk realisasi fisik yang terdata di aplikasi IDENTIK PKH sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 35.031 ekor. Permasalahan dilapangan yang menyebabkan tidak mencapai 100% seperti : SDM Petugas dalam menginput di Aplikasi IDENTIK PKH, pengaruh sinyal dalam penginputan, kondisi ternak yang masih dilepas (ekstensif) sehingga kesulitan dalam mendata ternak serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga menolak dilakukan pemasangan *ear tag* (penandaan ternak).

- e. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, pagu sebesar Rp. 432.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 429.868.400,- (99,51%) target yang di tetapkan 4 lembaga terealisasi 100%. Kegiatan ini yaitu pembinaan dan penilaian higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan, pembinaan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pengendalian pemotongan betina produktif dan pelaporan data kesmavet di Kabupaten/Kota.
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan, pagu sebesar Rp. 494.820.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 487.014.900,- (98,42%) target yang di tetapkan 6 layanan terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa layanan BMN, layanan hubungan masyarakat, layanan data dan informasi, layanan pemantauan dan evaluasi, layanan manajemen keuangan berupa akuntansi, verifikasi dan tindaklanjut hasil pengawasan provinsi dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan provinsi.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana tugas pembantuan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 12.503.843.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.375.807.624,- (74,98%).

4. Satker Prasarana dan Sarana Pertanian (109125)

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan sumber dana tugas pembantuan Ditjen Hortikultura pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi adalah nomor DIPA : SP DIPA- 018.08.4.109125/2022, dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian, sub kegiatan :
 - RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan pagu Rp. 2.144.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.107.998.880,- (99,25%) target yang di tetapkan 19 Unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa Persiapan, Pelaksanaan Kontruksi Irigasi dan Monitoring ke Kabupaten yaitu Kerinci, Merangin, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Pembangunan Embung Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - RDK OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan pagu Rp. 3.675.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.675.000.000,- (100%) target yang di tetapkan 49 unit terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa rehabilitas jaringan irigasi ke 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Batanghari dan Tanjung Jabung Barat.
- b. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian dengan sub kegiatan RBO Prasarana Pengembangan Kawasan, dengan pagu Rp. 18.898.150,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.277.607.100,- (96,72%) target yang di tetapkan 42 Km² terealisasi 100%. Kegiatan ini berupa Persiapan Optimalisasi Lahan dan Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan Rawa di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.

- c. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian dengan sub kegiatan AEA Koordinasi, dengan pagu Rp. 190,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.302.478,- (96,47%) target yang ditetapkan 12 Kegiatan realisasi 100%. Kegiatan ini berupa Bimtek Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian yang dilakukan melalui koordinasi antar Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten/Kota.
- d. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, sub kegiatan :
 - QAA Pelayanan Publik kepada Masyarakat, dengan pagu Rp. 1.686.465.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.685.715.000,- (99,96%) target yang ditetapkan 117.756 orang terealisasi 100%. Kegiatan ini merupakan Penyusunan e-RDKK untuk Pendataan Penerimaan Pupuk Bersubsidi di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota.
 - QAH Pelayanan Publik lainnya, dengan pagu Rp. 1.337,010,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.336.650.000,- (99,95%) target yang ditetapkan 11 layanan terealisasi 100%. Kegiatan ini merupakan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota.
- e. Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dengan sub kegiatan RBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dengan pagu Rp. 154.192,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 153.107.000,- (99,30%) target yang ditetapkan 8 unit realisasi 100%. Kegiatan ini berupa Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Asuransi Pertanian meliputi Pembayaran Honor dan Perjalanan Dinas ke 8 (delapan) Kabupaten yaitu Kerinci, Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan pagu Rp. 1.220.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.193.715.722,- (97,83%) target yang ditetapkan 1 layanan realisasi 100%. Kegiatan ini berupa Administrasi Pengelolaan Dana Tugas pembantuan di Provinsi berupa Pembayaran Honor Petugas di 11 (sebelas) Kabupaten/Kota.

Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana tugas pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 29.305.387.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.613.096.180 (97,64%).

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan yang dilaksanakan oleh Satker Dinas TPHP Provinsi Jambi yaitu :

1. Terjadinya banjir sebagai dampak dari perubahan iklim ekstrim di beberapa wilayah di Provinsi Jambi mengakibatkan terjadinya tunda tanam sehingga menyebabkan terjadinya penurunan luas tanam dan panen komoditi tanaman pangan;
2. Permasalahan dalam pengembangan padi biofortifikasi, dalam hal ini ketersediaan benih padi inpari nutrizinc yang masih terbatas, bulir gabah lebih kecil dari gabah umumnya, serta tekstur nasi agak pulen 3.
3. Terjadinya *refocusing* anggaran di semester pertama Tahun Anggaran 2022 terutama untuk anggaran pembinaan/pengawasan kegiatan, menyebabkan koordinasi kegiatan dengan Kabupaten/Kota, petani dan stakeholder menjadi sedikit terhambat.

4. Potensi lahan ladang/huma sangat luas namun hanya sedikit yang dapat dimanfaatkan. Hal ini disebabkan belum ada varietas unggul nasional padi ladang yang benar-benar cocok untuk dikembangkan di Jambi, selain itu produktivitas padi ladang masih rendah.
5. Lahan-lahan tadah hujan dan pasang surut pemanfaatannya belum dapat dimaksimalkan, karena lahan tersebut belum bisa ditanam 2 kali disebabkan kendala pengelolaan airnya.
6. Target penerima bantuan belum berpengalaman dalam mengusahakan budidaya tanaman pangan khususnya komoditi kedelai program ABT (petani integrasi perkebunan), menyebabkan hasil produksi kurang optimal karena penanganan yang kurang maksimal.
7. Belum terbangunnya industri perbenihan, sehingga benih komoditi lokal yang tersedia sangat terbatas, sedangkan benih non lokal tidak cocok dengan iklim di Provinsi Jambi, kurang penguasaan teknologi budidaya hortikultura ditingkat petani sehingga produktivitas dan efisiensi produksi, rendah harga komoditi hortikultura yang berfluktuasi dan sering kalah bersaing dengan produk luar yang penampilannya lebih menarik, tingginya harga pestisida dan pupuk, keterbatasan modal dan lemahnya daya tawar petani terhadap produk yang dihasilkan. Permintaan petani yang bervariasi terhadap kebutuhan varietas benih dan kebutuhan dalam budidaya cabe, bawang merah dan bawang putih.
8. Terjadinya pandemi kasus PMK menyebabkan pengadaan ternak sapi dan kambing tidak dapat dilaksanakan.
9. Jumlah semen beku yang didistribusikan ke Kabupaten/Kota tidak menggambarkan jumlah pelaksanaan inseminasi buatan;
10. Rentang waktu pelaksanaan IB I ke IB II yang terlalu jauh;
11. Realisasi pelaporan kelahiran yang rendah karena tidak memiliki biaya operasional sehingga petugas enggan melaporkan;
12. Pembayaran klaim kematian yang lama membuat peserta ragu program AUTS/AUTSK ini; dan
13. SDM Petugas dalam menginput di Aplikasi IDENTIK PKH, pengaruh sinyal dalam penginputan, kondisi ternak yang masih dilepas (ekstensif) sehingga kesulitan dalam mendata ternak, serta kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga menolak dilakukan pemasangan *eartag* (penandaan ternak).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan upaya penyelesaian sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan dan pengawalan langsung ke kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan dan monev kegiatan;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait penangkaran benih padi agar bisa menyediakan varietas benih sesuai dengan kebutuhan petani;
3. Mendorong percepatan kontrak, salur dan tanam sehingga diharapkan semua bantuan kegiatan Tahun Anggaran 2022 ini dapat dipanen ditahun berjalan sehingga tercatat sebagai produksi Tahun 2022;

4. Melakukan evaluasi secara keseluruhan rangkaian kegiatan dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul di lapangan sehingga dapat diketahui tindakan koreksi sedini mungkin;
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk kelancaran program/kegiatan;
6. Meningkatkan peran serta penyuluh dilapangan dalam hal penyampaian informasi dan tata cara budidaya tanaman pangan;
7. Dilaksanakannya vaksinasi PMK dengan target ternak sapi dan kebau untuk mencegah pandemi PMK;
8. Sosialisasi kegiatan SIKOMADAN dilakukan diawal tahun dan penetapan target berdasarkan kesepakatan dari Kabupaten/Kota; dan
9. Sosialisasi terkait penandaan dan pendataan ternak dikelompok tani sehingga masyarakat atau kelompok tani mau untuk melakukan penandaan dan pendataan ternak

4.1.4 Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

OPD-TP Dinas Perkebunan Provinsi Jambi berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja yang telah dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA Dekon/TP) dan menjamin terwujudnya output yang telah ditetapkan. Alokasi anggaran TP Dinas Perkebunan (Kode Satker 109120) Tahun 2022 sebesar Rp. 21.349.248.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.198.621.770.- (99,29%).

Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas pembantuan dan Upaya Penyelesaian pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi :

- a. Ketersediaan benih pada Bulan September; dan
- b. Sebagian besar kegiatan perkebunan tergantung pada musim tanam dan iklim, terutama suhu dan curah hujan. Perubahan iklim global berimbas kepada pergeseran musim tanam dalam kaitannya dengan intensitas curah hujan yang berpengaruh pada ketersediaan air irigasi tanaman.

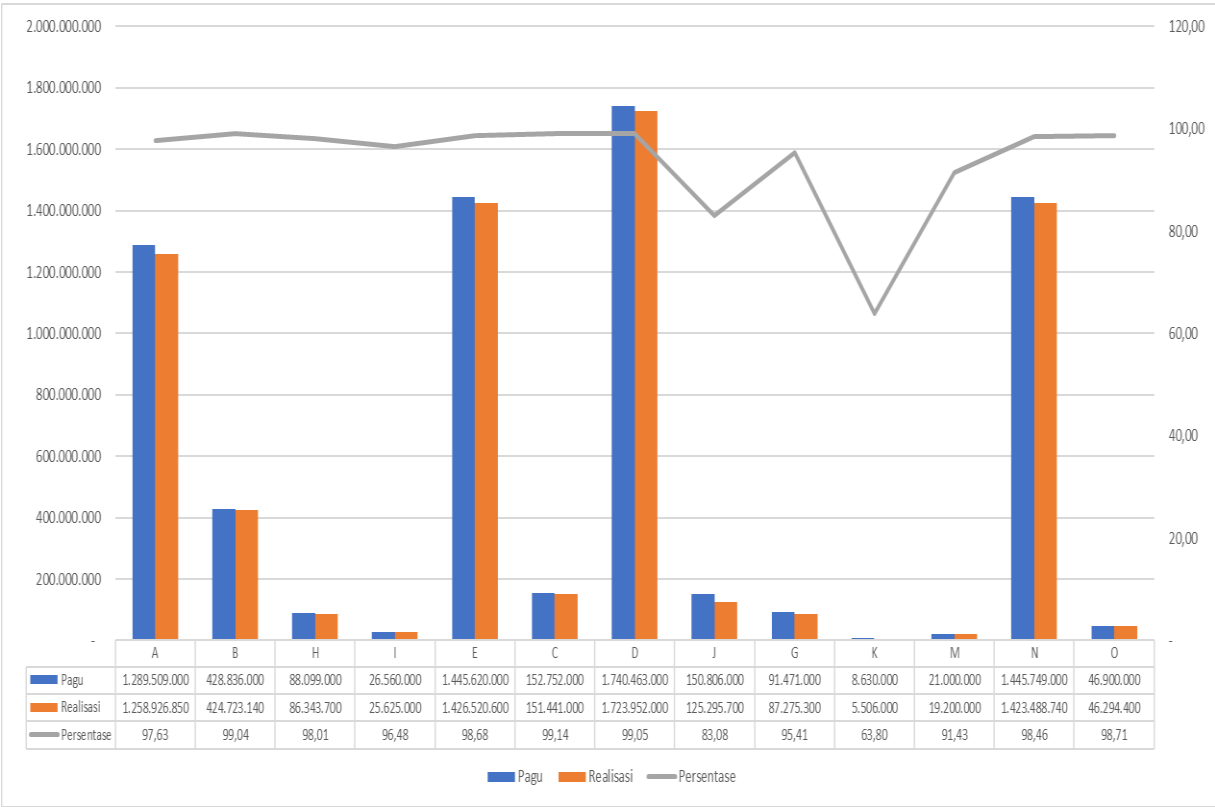
Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya penyelesaian sebagai berikut :

- a. Diupayakan lelang pada pra DIPA;
- b. Kegiatan yang tidak tergantung musim agar dilaksanakan sesuai rencana;
- c. Segera mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan/kendala/hambatan di lapangan dan melaporkan kepada Pemerintah Pusat, jika mengganggu pelaksanaan kegiatan, sehingga terhindar terhambatnya pelaksanaan kegiatan;
- d. Meningkatkan kinerja untuk menjadi lebih baik; dan
- e. Meningkatkan kualitas koordinasi dan kerja sama tim dalam pelaksanaan pekerjaan.

4.1.5 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan Restorasi Gambut Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 mendapatkan dana melalui APBN senilai Rp 12.679.607.000,- yang akan dipergunakan untuk kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Dana tersebut merupakan dana awal sebelum diberlakukannya kebijakan *Automatic Adjustment* (AA)/Pencadangan Anggaran sebagai kebijakan pemerintah untuk antisipatif APBN dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan kesehatan. Kebijakan AA pada tugas pembantuan Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun Angaran 2022 akan diberlakukan sebanyak 2 kali dengan nominal pencadangan anggaran yang berbeda. Untuk pelaksanaan kegiatan sumber dana tugas pembantuan pada Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 6.936.395.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.804.592.430,- (98,10%).

Grafik 4.1
Realisasi Keuangan Satker Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2023

Hambatan/Permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas pembantuan sebagian besar merupakan kendala yang muncul akibat dari adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dan tata waktu. Adapun uraian permasalahan sebagaimana dimaksud, yaitu:

- 1. Sumber Daya Manusia
Sampai dengan akhir kegiatan di tahun 2022, SDM di Satker 105103 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi masih didominasi oleh staf administrasi kegiatan.

Minimnya staf teknis lapangan terutama yang paham mengenai pelaksanaan kegiatan restorasi menyebabkan rendahnya pencapaian kegiatan. SDM juga berkaitan dengan mitra yang dilibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan kegiatan karena kegiatan restorasi merupakan tupoksi tambahan, sedangkan masing-masing OPD Mempunyai tugas pokok masing-masing. SDM yang terdapat di tingkat tapak yaitu masyarakat serta mitra belum mampu menjawab kebutuhan percepatan tindakan restorasi di tingkat tapak.

2. Keadaan Forcemarger

Waktu pelaksanaan kegiatan sempat tidak berjalan di triwulan pertama dikarenakan adanya pandemi Covid-19, kegiatan baru mulai dilaksanakan kembali sekitar Bulan April dengan situasi baru dan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Hal ini merupakan kendala tersendiri dan tidak mudah untuk penyesuaian kepada masyarakat.

Melihat hasil pencapaian Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Tahun 2022 yang telah memenuhi target pencapaian kegiatan. Walau demikian, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tetap membutuhkan strategi dalam pelaksanaan dan tata kelola waktu yang lebih terencana dengan baik. Diharapkan Tahun 2023 dan tahun berikutnya penyusunan jadwal kegiatan disusun lebih awal dan lebih maksimal sehingga tidak banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

4.2 IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKATAN PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA

Tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa. Program/kegiatan pada Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ini digunakan untuk program/kegiatan yang tidak didanai oleh APBN/APBD, Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Restribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya. Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa adalah :

- a. Pemerataan pembangunan Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
- b. Membantu meningkatkan kemampuan keuangan Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi guna mengatasi kesenjangan fiskal dalam melaksanakan pembangunan;
- c. Membantu Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran; dan
- d. Membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa dalam Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang tidak tersedia alokasi dananya.

Pada tahun 2022 penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota untuk Desa sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 853/KEP.GUB/DP3AP2-4.2/2023 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Provinsi Jambi Kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Tahun Anggaran 2022, bahwa besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Tahun 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Desa.

Penetapan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Tahun Anggaran 2022, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 859/KEP.GUB/SETDA-PEM.OTDA-1.1/2022 tentang Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota untuk Kelurahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Kelurahan. Secara global, rekap alokasi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada
Desa/Kelurahan Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	156.400.000.000	156.400.000.000	-
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	139.900.000.000	139.900.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Batanghari	11.000.000.000	11.000.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Bungo	14.100.000.000	14.100.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Kerinci	28.500.000.000	28.500.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Merangin	20.500.000.000	20.500.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Muaro Jambi	15.000.000.000	15.000.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Sarolangun	14.900.000.000	14.900.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Tanjab Barat	11.400.000.000	11.400.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Tanjab Timur	7.300.000.000	7.300.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kabupaten Tebo	10.700.000.000	10.700.000.000	-
Belanja Bantuan Desa ke Kota Sungai Penuh	6.500.000.000	6.500.000.000	-
Belanja Bantuan Keuangan Infrastruktur/Inovasi Penguatan Kelembagaan Kelurahan	16.500.000.000	16.500.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Batanghari	1.400.000.000	1.400.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Bungo	1.200.000.000	1.200.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Kerinci	200.000.000	200.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Merangin	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Muaro Jambi	500.000.000	500.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Sarolangun	900.000.000	900.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Tanjab Barat	2.000.000.000	2.000.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Tanjab Timur	2.000.000.000	2.000.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kabupaten Tebo	700.000.000	700.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kota Jambi	6.200.000.000	6.200.000.000	-
Belanja Bantuan Kelurahan ke Kota Sungai Penuh	400.000.000	400.000.000	-

Sumber: Data Olahan Biro Pem dan Otda, 2023

Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada
Desa Tahap I Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	TAHAP	SISA TAHAP SEBELUMNYA	PENERIMAAN DARI PROVINSI	TOTAL	REALISASI PEMBAYARAN (SP2D)	SISA DI REKENING KAS UMUM DAERAH	
1		2	3	4	5 = 3+4	6	7 = 5- 6	8 = (7/5)*100%
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1.	KERINCI	TAHAP I	-	8,550,000,000	8,550,000,000	8,550,000,000	-	0.000%
2.	MERANGIN	TAHAP I	-	6,150,000,000	6,150,000,000	6,150,000,000	-	0.000%
3.	SAROLANGUN	TAHAP I	-	4,470,000,000	4,470,000,000	4,470,000,000	-	0.000%
4.	BATANGHARI	TAHAP I	-	3,300,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	-	0.000%
5.	MUARO JAMBI	TAHAP I	-	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	0.000%
6.	TANJUNG JABUNG TIMUR	TAHAP I	-	2,190,000,000	2,190,000,000	2,190,000,000	-	0.000%
7.	TANJUNG JABUNG BARAT	TAHAP I	-	3,420,000,000	3,420,000,000	3,420,000,000	-	0.000%
8.	TEBO	TAHAP I	-	3,210,000,000	3,210,000,000	3,210,000,000	-	0.000%
9.	BUNGO	TAHAP I	-	4,230,000,000	4,230,000,000	4,230,000,000	-	0.000%
10.	SUNGAI PENUH	TAHAP I	-	1,950,000,000	1,950,000,000	1,950,000,000	-	0.000%
JUMLAH			0	41,970,000,000	41,970,000,000	41,970,000,000		

Sumber: Data Olahan Biro Pem dan Otda, 2023

Tabel 4.4
Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jambi kepada
Desa Tahap II Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	TAHAP	SISA TAHAP SEBELUMNYA	PENERIMAAN DARI PROVINSI	TOTAL	REALISASI PEMBAYARAN (SP2D)	SISA DI REKENING KAS UMUM DAERAH	
1		2	3	4	5 = 3+4	6	7 = 5- 6	8 = (7/5)*100%
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1.	KERINCI	TAHAP II	Belum menyampaikan laporan					

2.	MERANGIN	TAHAP II	Belum menyampaikan laporan					
3.	SAROLANGUN	TAHAP II	-	10,430,000,000	4,470,000,000	4,470,000,000	-	0.000%
4.	BATANGHARI	TAHAP II	-	7,700,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000	-	0.000%
5.	MUARO JAMBI	TAHAP II	-	15,000,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	-	0.000%
6.	TANJUNG JABUNG TIMUR	TAHAP II	-	7,300,000,000	2,190,000,000	2,190,000,000	-	0.000%
7.	TANJUNG JABUNG BARAT	TAHAP II	-	11,400,000,000	3,420,000,000	3,420,000,000	-	0.000%
8.	TEBO	TAHAP II	-	10,700,000,000	3,210,000,000	3,210,000,000	-	0.000%
9.	BUNGO	TAHAP II	Belum menyampaikan laporan					
10.	SUNGAI PENUH	TAHAP II	Belum menyampaikan laporan					
JUMLAH			0	62,530,000,000	62,530,000,000	62,530,000,000		

Sumber: Data Olahan Biro Pem dan Otda, 2023

Hingga disusunnya laporan ini, laporan pertanggungjawaban dari Kabupaten/Kota belum tersedia secara lengkap, sehingga data rinci penggunaan dana bantuan ini belum dapat diketahui.

BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi Tahun 2022 ini disusun sebagai gambaran tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Jambi pada Tahun 2022 yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui LKPJ Gubernur Jambi ini diharapkan pihak DPRD Provinsi Jambi memiliki informasi dan evaluasi secara lengkap yang dapat mencerminkan kinerja Kepala Daerah Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang berminat untuk melihat dan mengukur pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2022.

Pemerintah Provinsi Jambi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, aman dan damai. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi perhatian bersama, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Jambi membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan saran, kritik dan masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun ini tentu akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian penyampaian LKPJ Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2022 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jambi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semua demi **“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**